



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019- 2024, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai pada Tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- b. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
- f. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- h. BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Oktober 2021
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KOTA MUNGKID
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	1-5
1.4 Maksud dan Tujuan	1-6
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	II-1
2.1.2. Topografi	II-2
2.1.3. Geologi	II-3
2.1.4. Hidrologi.....	II-4
2.1.5. Klimatologi	II-5
2.1.6. Penggunaan Lahan	II-5
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	II-12
2.1.9. Kondisi Demografi	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-25
2.2.2 Laju Inflasi	II-33
2.2.3 PDRB Perkapita	II-34
2.2.4 Pemerataan Pembangunan	II-35
2.2.5 Penduduk Miskin.....	II-37
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-42
2.2.7 Angka Partisipasi Kasar	II-45
2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM).....	II-46
2.2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-46
2.2.10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-48
2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-49
2.2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	II-50
2.2.13 Kebudayaan.....	II-51
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-51
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-51
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-53
2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-62
2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-68
2.3.5 Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan	II-70
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-75
2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-75

2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-105
2.4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-145
2.4.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-162
2.5	Pandemi <i>COVID-19</i>	II-171
2.5.1	Jumlah dan Sebaran <i>COVID-19</i>	II-172
2.5.2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)	II-174
2.5.3	Dampak Pandemi <i>Covid-19</i>	II-175
2.6	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai Tahun 2020	II-179
2.6.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-179
2.6.2	Aspek Daya Saing	II-182
2.6.3	Aspek Pelayanan Umum	II-184
2.7	Evaluasi Kinerja Indikator Program	II-207
2.8	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-226
2.8.1.	SPM Bidang Urusan Pendidikan	II-226
2.8.2.	SPM Bidang Urusan Kesehatan	II-228
2.8.3.	SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-231
2.8.4.	SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	II-232
2.8.5.	SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-233
2.8.6.	SPM Bidang Urusan Sosial	II-235
2.9	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-237
2.9.1.	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan	II-237
2.9.2.	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan	II-237
2.9.3.	Masih Tingginya Jumlah PMKS	II-238
2.9.4.	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	II-238
2.9.5.	Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka	II-238
2.9.6.	Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender	II-238
2.9.7.	Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik	II-238
2.9.8.	Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	II-238
2.9.9.	Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah	II-239
2.9.10.	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	II-241
2.9.11.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	II-241
2.9.12.	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	II-241
2.9.13.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	II-242
2.9.14.	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian	II-242

2.10	Penerapan Inovasi Daerah sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Daerah.....	II-242
------	--	--------

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	III-1
3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020.....	III-3
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-9
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-17

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2022	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-6
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	IV-6
4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022	IV-8
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.....	IV-8
4.3 Inovasi Daerah	IV-32
4.3.1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Milenial (PKK Milenial).....	IV-32
4.3.2 Paseso Merapi atau Sister Village	IV-34
4.3.3 Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan)	IV-35
4.3.4 Centre of Service for Research (COSFRE) / Klinik Penelitian.....	IV-36
4.3.5 UNIDES (Universitas Pemuda Desa Indonesia).....	IV-37
4.3.6 PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)	IV-38
4.3.7 Pancen A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)	IV-39
4.3.8 Budidaya tanaman bawah tegakan penghasil emas hijau (BINTANG HIJAU).....	IV-40
4.3.9 Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air).....	IV-41

4.3.10 PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten)	IV-42
4.3.11 Pengembangan Desa Wisata	IV-43
4.4 Pokok-pokok Pikiran DPRD	IV-44

**BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN
MAGELANG V-1**

5.1. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah	V-1
5.2. Arah Pengembangan Wilayah	V-2
5.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah	V-2
5.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang	V-2
5.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2022	V-3
5.3. Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang	V-5

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN VI-1

6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2022	VI-1
6.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022	VI-1
6.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VII-1

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)	VII-6
7.3. Indikator Kinerja Daerah	VI-25
7.4. Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan	VII-33

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan , serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2.	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-3
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Ha)	II-6
Tabel 2.4.	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2020	II-7
Tabel 2.5.	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang	II-9
Tabel 2.6.	Desa Bersaudara (<i>Sister Village</i>)	II-15
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-18
Tabel 2.8.	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2016 - 2020	II-19
Tabel 2.9.	Perkembangan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-20
Tabel 2.10.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-21
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020	II-22
Tabel 2.12.	Jumlah penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-24
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-25
Tabel 2.14.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-27
Tabel 2.15.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-27
Tabel 2.16.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Miliar Rupiah)	II-29
Tabel 2.17.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 - 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang	II-30
Tabel 2.18.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) ...	II-31
Tabel 2.19.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) ...	II-32
Tabel 2.20.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-32
Tabel 2.21.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-33
Tabel 2.22.	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-33

Tabel 2.23.	Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2020	II-35
Tabel 2.24.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-36
Tabel 2.25.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-37
Tabel 2.26.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-42
Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 - 2020.....	II-43
Tabel 2.28.	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-45
Tabel 2.29.	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-45
Tabel 2.30.	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-46
Tabel 2.31.	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah dan Indonesia Tahun 2016 - 2020 ..	II-47
Tabel 2.32.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-49
Tabel 2.33.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-50
Tabel 2.34.	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-51
Tabel 2.35.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-51
Tabel 2.36.	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-53
Tabel 2.37.	Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-53
Tabel 2.38.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 ..	II-53
Tabel 2.39.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-55
Tabel 2.40.	Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang	II-56
Tabel 2.41.	Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang	II-56
Tabel 2.42.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel 2.43.	Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.44.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-60
Tabel 2.45.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.46.	Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-61
Tabel 2.47.	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-62

Tabel 2.48.	Angka Kriminalitas tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-63
Tabel 2.49.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-63
Tabel 2.50.	Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-65
Tabel 2.51.	Status Desa Kabupaten Magelang Tahun 2018 - 2020.....	II-66
Tabel 2.52.	Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-67
Tabel 2.53.	Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-67
Tabel 2.54.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-69
Tabel 2.55.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-70
Tabel 2.56.	Produk Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020...	II-71
Tabel 2.57.	Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-73
Tabel 2.58.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 ..	II-73
Tabel 2.59.	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-74
Tabel 2.60.	Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-75
Tabel 2.61.	Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-76
Tabel 2.62.	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-76
Tabel 2.63.	Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-77
Tabel 2.64.	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-80
Tabel 2.65.	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-81
Tabel 2.66.	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-81
Tabel 2.67.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-82
Tabel 2.68.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-84
Tabel 2.69.	Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-85
Tabel 2.70.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-85
Tabel 2.71.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-87

Tabel 2.72.	Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-87
Tabel 2.73.	Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-88
Tabel 2.74.	Penyakit Tidak Menular Tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Magelang.....	II-88
Tabel 2.75.	Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-89
Tabel 2.76.	Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2016 - 2020	II-90
Tabel 2.77.	Kondisi Standar Jalan Kewenangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-91
Tabel 2.78.	Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2020	II-91
Tabel 2.79.	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 - 2020	II-92
Tabel 2.80.	Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020.....	II-93
Tabel 2.81.	Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-93
Tabel 2.82.	Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-94
Tabel 2.83.	Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-94
Tabel 2.84.	Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2020	II-96
Tabel 2.85.	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-96
Tabel 2.86.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-97
Tabel 2.87.	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-98
Tabel 2.88.	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang Tahun 2015 - 2019	II-99
Tabel 2.89.	Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-100
Tabel 2.90.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 ..	II-101
Tabel 2.91.	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-102
Tabel 2.92.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2020.....	II-102
Tabel 2.93.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016 - 2020.....	II-103
Tabel 2.94.	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2016 - 2020.....	II-104

Tabel 2.95.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-105
Tabel 2.96.	Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.97.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-106
Tabel 2.98.	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-107
Tabel 2.99.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2020	II-108
Tabel 2.100.	Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek) Tahun 2016 – 2020.....	II-109
Tabel 2.101.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 -2020	II-110
Tabel 2.102.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-110
Tabel 2.103.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-111
Tabel 2.104.	Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-112
Tabel 2.105.	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang 2020.....	II-114
Tabel 2.106.	Ketersediaan Komoditas selain Beras tahun 2020	II-114
Tabel 2.107.	Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) Kabupaten Magelang	II-115
Tabel 2.108.	Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-117
Tabel 2.109.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020	II-117
Tabel 2.110.	Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru Tahun 2017 – 2020	II-118
Tabel 2.111.	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020	II-118
Tabel 2.112.	Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020	II-119
Tabel 2.113.	Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020.....	II-120
Tabel 2.114.	Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-121
Tabel 2.115.	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020...II-121	
Tabel 2.116.	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-122

Tabel 2.117.	Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-123
Tabel 2.118.	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-123
Tabel 2.119.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-125
Tabel 2.120.	Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-125
Tabel 2.121.	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-126
Tabel 2.122.	Target/Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tahun 2024	II-127
Tabel 2.123.	Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-128
Tabel 2.124.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian Material di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-128
Tabel 2.125.	Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2016 - 2020	II-129
Tabel 2.126.	Predikat Indeks Tingkat Kematangan SPBE.....	II-132
Tabel 2.127.	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi informasi di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-132
Tabel 2.128.	Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik di Kabupaten Magelang tahun 2016 - 2020.....	II-133
Tabel 2.129.	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-134
Tabel 2.130.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-134
Tabel 2.131.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-136
Tabel 2.132.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-136
Tabel 2.133.	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-137
Tabel 2.134.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-137
Tabel 2.135.	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-138
Tabel 2.136.	Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-139
Tabel 2.137.	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-140
Tabel 2.138.	Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-140
Tabel 2.139.	Persentase Jumlah Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Dalam Sistem informasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-141

Tabel 2.140.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-142
Tabel 2.141.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-142
Tabel 2.142.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-143
Tabel 2.143.	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-144
Tabel 2.144.	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-148
Tabel 2.145.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (ADHK) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2.146.	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2.147.	Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2.148.	Total Produksi Sayur-Sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-152
Tabel 2.149.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-153
Tabel 2.150.	Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-153
Tabel 2.151.	Persentase Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Tahun 2016 – 2020	II-154
Tabel 2.152.	Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kab. Magelang Tahun 2016 – 2020	II-155
Tabel 2.153.	Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-156
Tabel 2.154.	Perkembangan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-157
Tabel 2.155.	Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-157
Tabel 2.156.	Rasio Penyuluh Pemerintah dengan kelompok tani Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2.157.	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-158
Tabel 2.158.	Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-159
Tabel 2.159.	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-160
Tabel 2.160.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-161

Tabel 2.161.	Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-161
Tabel 2.162.	Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2016 – 2020	II-162
Tabel 2.163.	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	II-163
Tabel 2.164.	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-163
Tabel 2.165.	Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020....	II-164
Tabel 2.166.	Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-164
Tabel 2.167.	Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020	II-164
Tabel 2.168.	Penyertaan Modal dan Penerimaan Deviden BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020	II-165
Tabel 2.169.	Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2016 - 2020 (Juta Rupiah)	II-165
Tabel 2.170.	Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2.171.	Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-168
Tabel 2.172.	Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.173.	Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2016 – 2020	II-169
Tabel 2.174.	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020...	II-170
Tabel 2.175.	Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	II-170
Tabel 2.176.	Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020 (Orang)	II-171
Tabel 2.177.	Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II- 172
Tabel 2.178.	Jumlah Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang Bulan Maret – 17 Juni 2021	II-172
Tabel 2.179.	Jumlah Kasus Covid-19 Per Kecamatan di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021	II-173
Tabel 2.180.	Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	II-179
Tabel 2.181.	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-180
Tabel 2.182.	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing.....	II-182
Tabel 2.183.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-184
Tabel 2.184.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-185
Tabel 2.185.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-186
Tabel 2.186.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-187

Tabel 2.187.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-188
Tabel 2.188.	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-189
Tabel 2.189.	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-190
Tabel 2.190.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-190
Tabel 2.191.	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-191
Tabel 2.192.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-192
Tabel 2.193.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-193
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-193
Tabel 2.195.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-194
Tabel 2.196.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-195
Tabel 2.197.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-195
Tabel 2.198.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-196
Tabel 2.199.	Capaian Kinerja Urusan Pangan	II-196
Tabel 2.200.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-197
Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-197
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Urusan Persandian	II-198
Tabel 2.203.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-198
Tabel 2.204.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-199
Tabel 2.205.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-200
Tabel 2.206.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-201
Tabel 2.207.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-202
Tabel 2.208.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-202
Tabel 2.209.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	II-203
Tabel 2.210.	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-203
Tabel 2.211.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-204
Tabel 2.212.	Capaian Kinerja Urusan Keuangan	II-204
Tabel 2.213.	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	II-205
Tabel 2.214.	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-206
Tabel 2.215.	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	II-206
Tabel 2.216.	Capaian Kinerja Pada Layanan Fungsi Lainnya	II-207
Tabel 2.217.	Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2020	II-207
Tabel 2.218.	Indikator Kinerja Program yang Berstatus Perlu Upaya Keras	II-221
Tabel 2.219.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	II-227
Tabel 2.220.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020	II-228
Tabel 2.221.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-231

Tabel 2.222.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-232
Tabel 2.223.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020	II-233
Tabel 2.224.	Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	II-236
Tabel 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	III-4
Tabel 3.2.	Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020	III-4
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.4.	Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.5.	Target indikator makro ekonomi Tahun 2022	III-9
Tabel 3.6.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2020	III-10
Tabel 3.7.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022	III-11
Tabel 3.8.	Target Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	III-17
Tabel 3.9.	Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	III-18
Tabel 3.10.	Target APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022.....	III-19
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2022.....	IV-4
Tabel 4.2.	Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	IV-22
Tabel 5.1.	Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang	V-5
Tabel 6.1.	Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022	VI-1
Tabel 6.2.	Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2022	VI-20
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022	VII-1
Tabel 7.2.	Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022	VII-3
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022	VII-6
Tabel 7.4.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2022	VII-26
Tabel 7.5.	Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 (sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019).....	VII-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan yang Lainnya	I-6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-1
Gambar 2.2.	Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang....	II-3
Gambar 2.3.	Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang	II-8
Gambar 2.4.	Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.....	II-8
Gambar 2.5.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-13
Gambar 2.6.	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020	II-19
Gambar 2.7.	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020	II-23
Gambar 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun pada Tahun 2020	II-24
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-25
Gambar 2.10.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu tahun 2016 - 2020	II-26
Gambar 2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten /Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020	II- 28
Gambar 2.12.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020	II- 30
Gambar 2.13.	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016 - 2020	II- 34
Gambar 2.14.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-34
Gambar 2.15.	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020.....	II-35
Gambar 2.16.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2016 - 2020	II-39
Gambar 2.17.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2020).....	II-40
Gambar 2.18.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten /Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 - 2020	II-40
Gambar 2.19.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten /Kota di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016 - 2020	II-42
Gambar 2.20.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-43
Gambar 2.21.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Nasional Tahun 2016 - 2020	II-44
Gambar 2.22.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 - 2020	II-45
Gambar 2.23.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-47

Gambar 2.24.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-48
Gambar 2.25.	Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/Kapita) Tahun 2020	II-52
Gambar 2.26.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Jumlah Kelahiran di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-79
Gambar 2.27.	Persentase Kasus Stunting di Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2020	II-84
Gambar 2.28.	Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang	II-90
Gambar 2.29.	Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng Tahun 2015 - 2020	II-107
Gambar 2.30.	Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2016 - 2020	II-109
Gambar 2.31.	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-112
Gambar 2.32.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-113
Gambar 2.33.	Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-113
Gambar 2.34.	Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)	II-115
Gambar 2.35.	Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)	II-116
Gambar 2.36.	Peta Sebaran Terminal Di Kabupaten Magelang.....	II-127
Gambar 2.37.	Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-145
Gambar 2.38.	Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-146
Gambar 2.39.	Produksi Ikan Hias di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020.....	II-146
Gambar 2.40.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-147
Gambar 2.41.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-148
Gambar 2.42.	Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-150
Gambar 2.43.	Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 (Ton).....	II-151
Gambar 2.44.	Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-152
Gambar 2.45.	Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-154
Gambar 2.46.	Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020	II-155

Gambar 2.47.	Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020.....	II-156
Gambar 2.48.	Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021.....	II-174
Gambar 2.49.	Indikator Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-181
Gambar 2.50.	Indikator Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing	II-183
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2015-2020.....	III-6
Gambar 3.2	Grafik laju inflasi Tahun 2020 menurut Kelompok Pengeluaran.....	III-8
Gambar 4.1	Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2022 ...	IV-12
Gambar 4.2	Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2022 ...	IV-15
Gambar 4.3	Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2022 ...	IV-16
Gambar 4.4	Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2022 .	IV-19
Gambar 4.5	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Inovasi PKK Milenial.....	IV-34
Gambar 4.6	Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Paseso Merapi sebagai Top 45 Inovasi Nasional	IV-35
Gambar 4.7	Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi MACAK.....	IV-36
Gambar 4.8	Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi COSFRE	IV-37
Gambar 4.9	Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi PEPAK	IV-39
Gambar 4.10	Penghargaan Pancen A SIKK Sebagai Top 10 Inovasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah	IV-40
Gambar 4.11	Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi BINTANG HIJAU	IV-41
Gambar 4.12	Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi JOGO TUK.....	IV-42
Gambar 4.13	Bupati Magelang berada di <i>Command Center Room</i> Pusaka Gemilang.....	IV-43
Gambar 5.1.	Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang alam RPJMD Tahun 2020-2024.....	V-14

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tahap penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2022 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan rancangan awal RKPD, penyiapan Rancangan RKPD, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi. Disamping hal tersebut, dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun 2022. Upaya *recovery* dampak Pandemi Covid-19 pada Tahun 2022 dilakukan sinergi bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
20. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
21. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
22. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

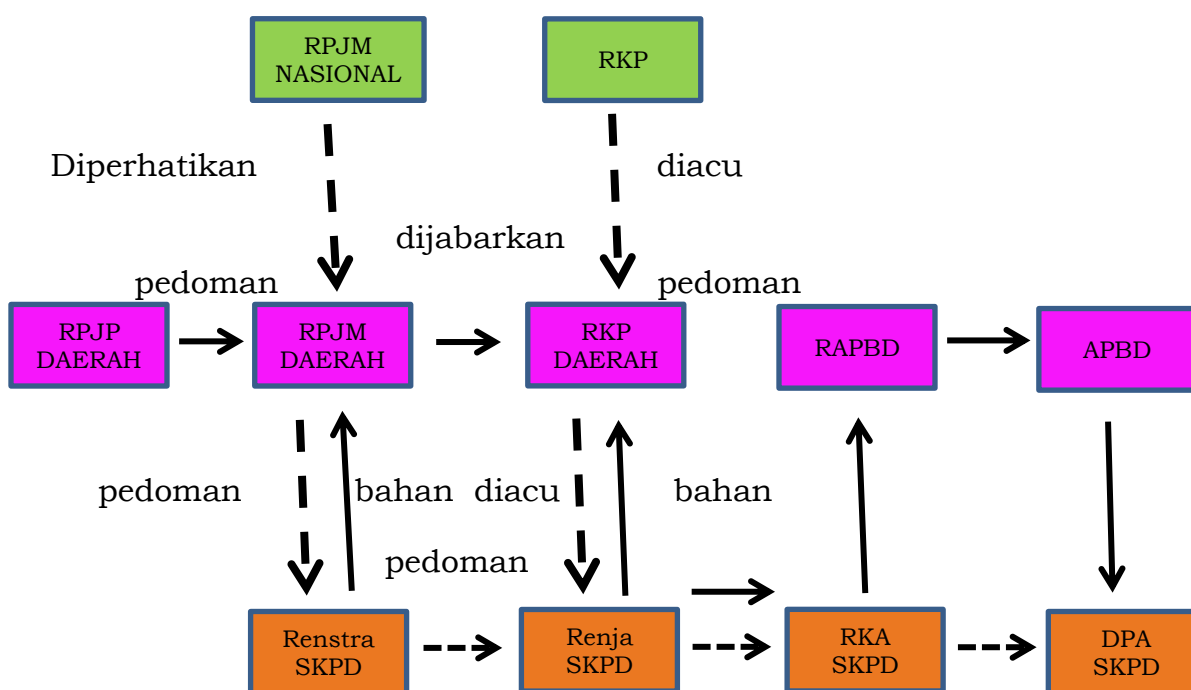
- 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75).
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD). RPJMD berfungsi untuk menjalankan pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kondisi saat ini dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 masih dalam proses penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD paska pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Rancangan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD dan juga sebagai pedoman

bagi perangkat daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.

RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022.

Tujuan penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;

2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2022.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2020.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah Tahun 2020, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

Mengemukakan secara eksplisit kebijakan umum pengembangan wilayah Kabupaten Magelang, perwujudan struktur ruang dan pola ruang serta rencana pengembangan wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian

kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Sasaran pada akhir Tahun 2022.

BAB VIII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022.

BAB II

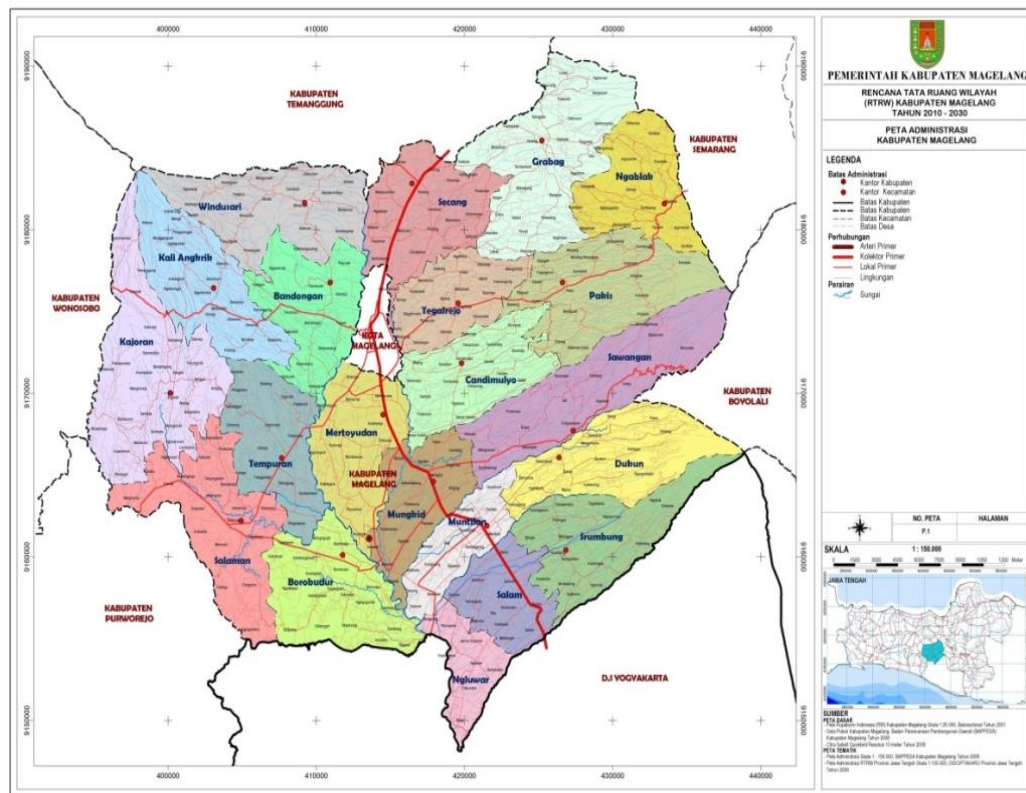
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektare atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang (mendasarkan pada Permendagri), luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 112.926,41 hektare. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Bagian tengah : Kota Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain

itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

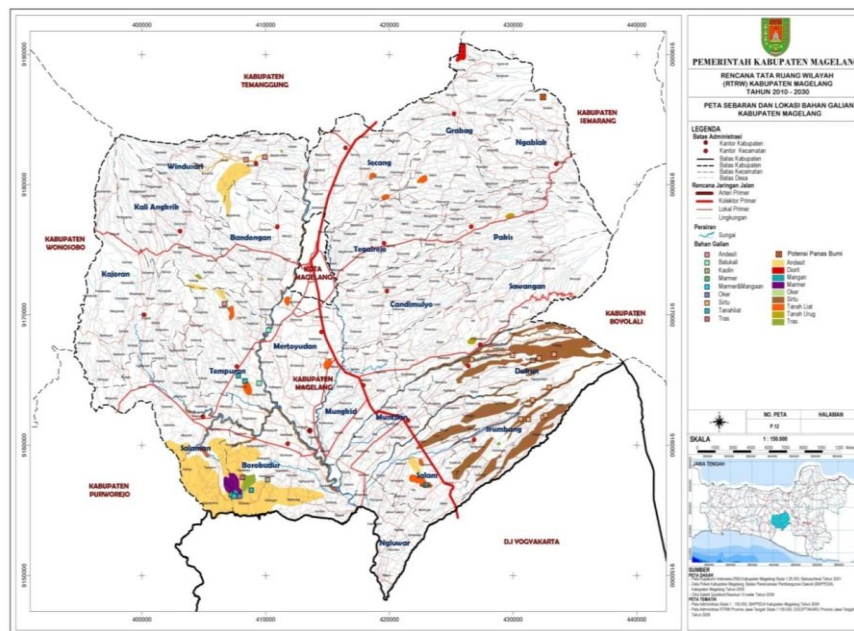
Tabel 2.2
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2%	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (\pm 1,5% dari luas wilayah)
2	2 – 15%	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah
3	15 – 40%	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
4.	> 40%	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah)

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

2.1.3 Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Kecamatan Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Gambar 2.2
Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang

Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer.

2.1.4 Hidrologi

Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto.

Luas wilayah DAS Progo adalah 246.207,78 Ha, yang berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 175.047,66 Ha dan di Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 71.160,12 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan DAS Progo bagian hulu seluas 107.637,97 Ha, yang terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sedangkan DAS Bogowonto berada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- a. Air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo.
- b. Air tanah, di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:
 - 1) Mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing.
 - 2) Mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada di antara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas akuifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Berdasarkan Penyusunan *Profiling* Mata Air tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terdapat 268 sumber mata air, yang mana 20 mata air merupakan sumber mata air baru yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan pengukuran dilakukan antara bulan Mei sampai dengan Juli 2020, dari 268 mata air terdapat 1 mata air diidentifikasi mati dan 42 mata air tidak ada limpasan, sehingga mata air yang memiliki debit sebanyak 225 mata air

dengan total debit dari hasil perhitungan sebesar 8.590,85 liter/detik. Debit tersebut jika dikonversi dalam setahun, maka memiliki potensi mata air mencapai 270.921.045,6 m³/tahun.

Berdasarkan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, potensi air limpasan Kabupaten Magelang sebesar 1.181.862.220,51 m³/tahun dan potensi mata air sebesar 270.921.045,60 m³/tahun, sehingga total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.452.783.266,11 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air Kabupaten Magelang mencapai 912.851.010 m³/tahun. Nilai daya dukung air di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 1,59 yang berarti daya dukung air Kabupaten Magelang termasuk dalam kelompok daya dukung bersyarat atau sedang.

Selain itu, ketiga gunung api yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.5 Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62°C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang, curah hujan pada tahun 2019 berkisar antara 0 - 604 mm/bulan dan pada tahun 2020 berkisar antara 20 - 507 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 200 mm.

Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Sedangkan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2020 terdapat

pengurangan luasan lahan sawah dari 36.855 hektare pada tahun 2016 menjadi 27.026 hektare, sedangkan untuk lahan bukan pertanian terjadi penambahan luasan dari 22.168 hektare pada tahun 2016 menjadi 25.713 hektare pada tahun 2020. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 (Ha)

No.	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Lahan sawah					
1	Irigasi	27.653	27.732	27.732	22.911	22.383
2	Tadah hujan	9.202	8.949	8.949	4.988	4.643
	Jumlah	36.855	36.681	36.681	27.899	27.026
B	Lahan kering					
1	Tegal kebun	31.904	31.813	31.813	37.462	38.050
2	Perkebunan	2.219	2.317	2.317	2.725	2.725
3	Hutan rakyat	5.611	5.609	5.609	5.467	5.467
4	Padang rumput	2	2	2	2	2
5	Sementara tidak ditanami	7	7	7	9	36
6	Lainnya (kolam/empang/hutan negara)	9.807	9.746	9.746	3.207	3.054
7	Hutan Negara	-	-	-	6.500	6.500
	Jumlah	49.550	49.494	49.494	55.372	55.834
	Total lahan pertanian (A+B)	86.405	86.175	86.175	83.271	82.860
C	Lahan bukan pertanian					
1	(Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll)	22.168	22.398	22.398	25.302	25.713
	TOTAL (A+B+C)	108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak

ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari.

Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung.

Tabel 2.4

Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang 2020

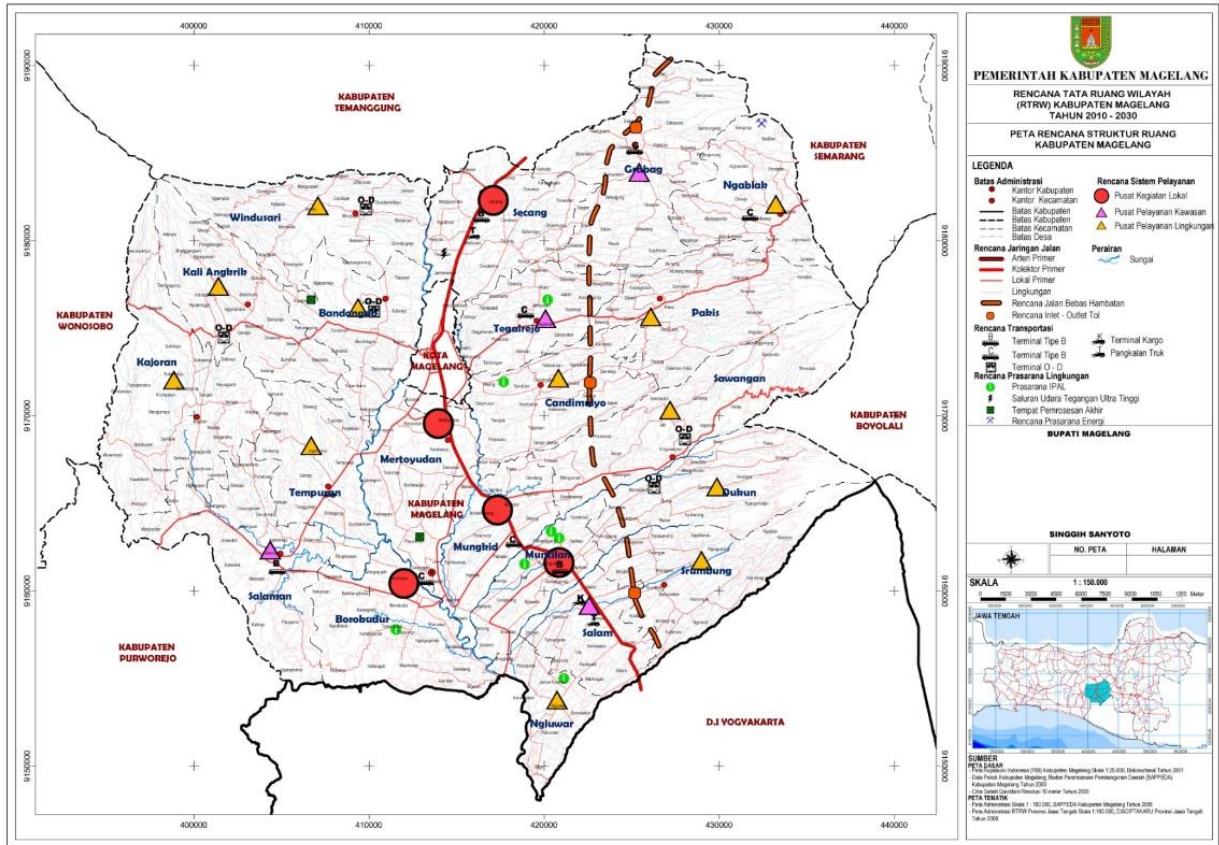
Deskripsi Permukaan	Luas (Ha)	Luas (%)	Ci	$\sum (ci \times Ai)$
Air Payau	0,19	0,00	0,98	0,19
Air Tawar	206,05	0,18	0,98	201,93
Badan Sungai	636,17	0,56	0,98	623,45
Belukar/Semak	5.847,74	5,18	0,28	1.637,37
Gedung	52,35	0,05	0,18	9,42
Hutan	637,94	0,56	1	637,94
Kebun	32.953,35	29,18	0,54	17.794,81
Pasir Darat	23,32	0,02	0,01	0,23
Pemukiman	17.843,42	15,80	0,18	3.211,82
Rumput	1.429,32	1,27	0,28	400,21
Sawah Irigasi	17.798,18	15,76	0,46	8.187,16
Sawah Tadah Huja	23.911,02	21,17	0,46	10.999,07
Tanah Berbatu	934,27	0,83	0,01	9,34
Tegalan	10.653,09	9,43	0,21	2.237,15
Jumlah	112.926,41	100,00		45.950,08

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Magelang Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,41 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil.

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

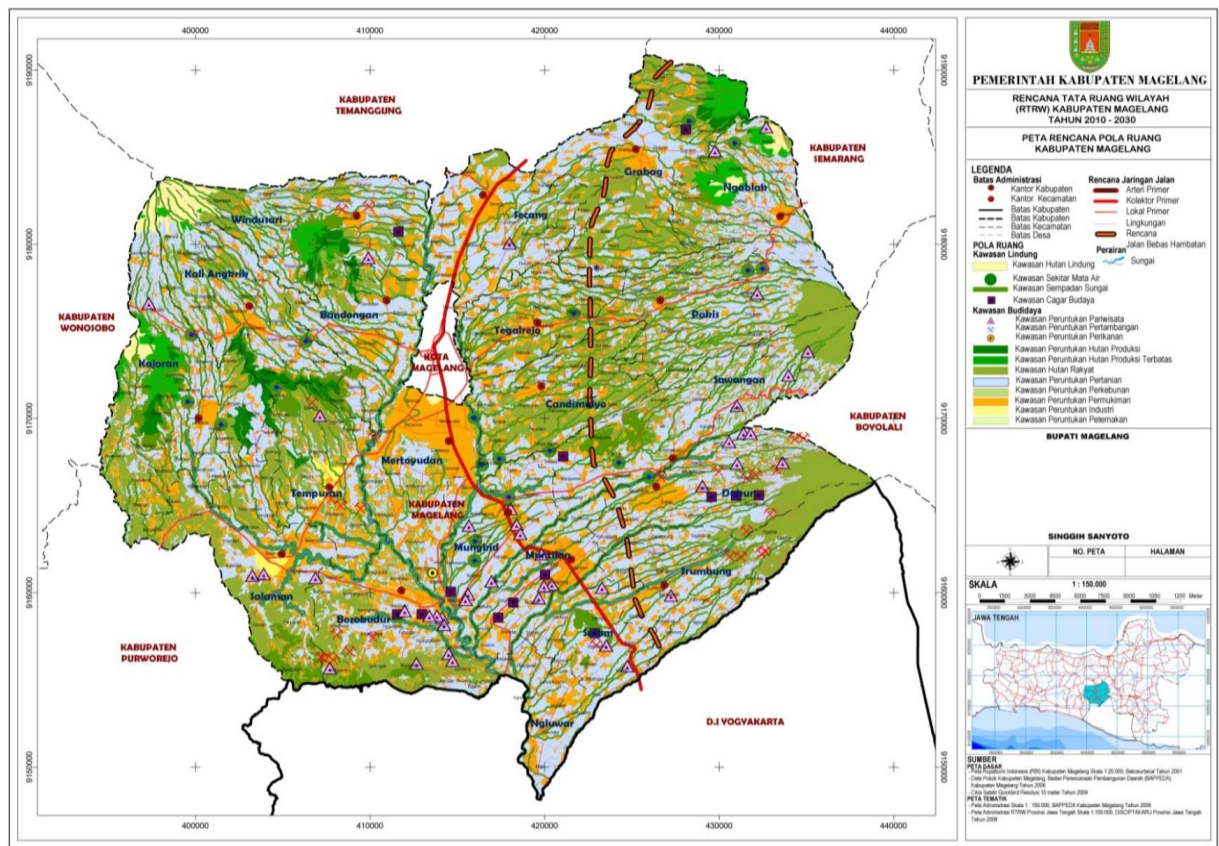
Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Potensi pengembangan wilayah ini didasarkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Gambar 2.3

Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030

Gambar 2.4

Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magelang

Struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan yang sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. sedangkan pola ruang adalah pendistribusin peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Peruntukan pola ruang fungsi budaya di Kabupaten Magelang akan memperlihatkan potensi pengembangan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Magelang, secara detail dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Tabel 2.5
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang
Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan peruntukan hutan produksi	
1.a.	Hutan produksi terbatas	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari
1.b.	Hutan produksi tetap	Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari
2	Kawasan hutan rakyat	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari
3	Kawasan peruntukan pertanian	
3.a.	Kawasan pertanian lahan basah	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
3.b.	Kawasan pertanian lahan kering	Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari
4	Kawasan peruntukan perkebunan	Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman
5	Kawasan peruntukan perikanan	
5.a.	Daerah pembenihan	Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid
5.b.	Daerah pembesaran perikanan	Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo
6	Kawasan peruntukan peternakan	
6.a.	Kawasan peternakan besar	Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam
6.b.	Kawasan peternakan sedang	Semua kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
6.c.	Kawasan peternakan unggas	Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar
7	Kawasan peruntukan pertambangan	
7.a.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu	Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman.
7.b.	Kawasan peruntukan pertambangan batuan marmer	Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari.
7.c.	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam	Kecamatan Borobudur dan Salaman
8	Kawasan peruntukan pariwisata	
8.a.	Kawasan peruntukan pariwisata budaya	Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo, Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul
8.b.	Kawasan peruntukan pariwisata alam	Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder
8.c.	Kawasan peruntukan pariwisata buatan	Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan
9	Kawasan peruntukan industri	
9.a.	kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah	tersebar di masing-masing kecamatan
9.b.	Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus	tersebar di masing-masing kecamatan
9.c.	Kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tempuran dan Salaman
10	Kawasan peruntukan permukiman	
10.a.	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2. Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) 3. Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
10.b.	Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	tersebar di luar ibukota kecamatan
11	Kawasan peruntukan lainnya	
11.a.	Kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran
11.b.	Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan	tersebar di masing-masing kecamatan

Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030

Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (*main-prime-mover*), yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya.
- b. Kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan.
- c. Kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi-potensi wisata daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata selain Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi-Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya.
- d. Kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal.

Selain pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang Kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:

- a. pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
- b. pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;

- c. pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
- d. pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa.

Dalam rangka memperkuat fungsi aksesibilitas dan mobilitas guna mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan dan pusat kegiatan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penataan ulang jaringan trayek angkutan umum. Penataan ulang jaringan trayek angkutan umum diarahkan pada :

- a. Penguatan akses dan mobilitas wisatawan dari Borobudur ke DTW lokal ;
- b. Penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat kegiatan;
- c. Penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan;
- d. Penguatan akses dan mobilitas di kawasan perkotaan;
- e. Penguatan akses dan mobilitas di kawasan perdesaan.

Dilihat kedudukan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah pengembangan Purwomanggung, maka pengembangan transportasi berupa angkutan massal Berbasis Jalan/Operasionalisasi BRT Trans Jateng pada koridor Purworejo – Magelang bisa ditangkap sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang. Banyak wilayah yang dilalui secara langsung akan berkembang secara pesat dan menimbulkan efek pada wilayah sekitarnya.

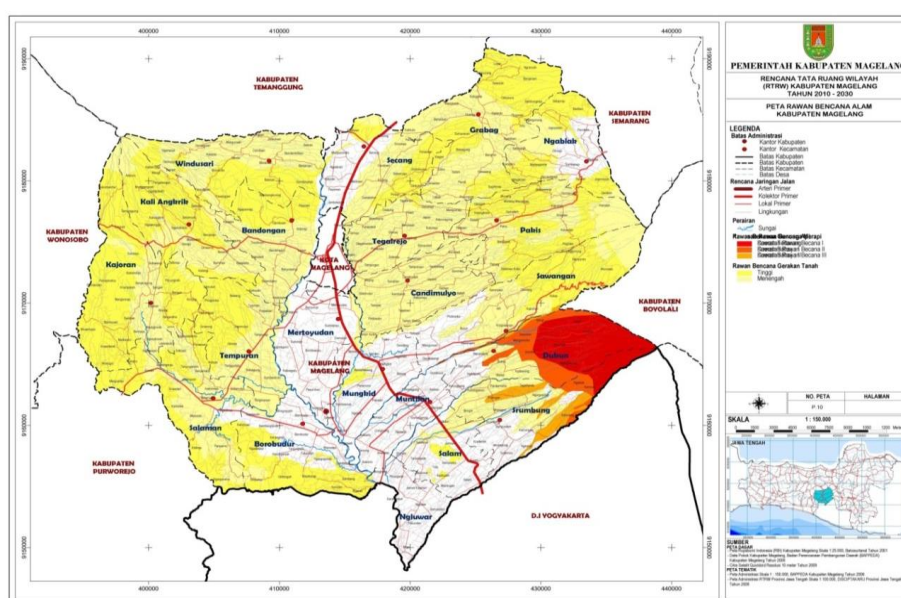
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

2.1.8.1. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam terutama yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:

- a. tanah longsor di 21 kecamatan;
- b. banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
- c. angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
- d. kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
- e. Kebakaran hutan;
- f. Sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah;

- g. Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di KRB III. Wilayah KRB III berada pada radius 0-10 km, meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), dan Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep);
- h. Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan rawan bencana II;
- i. lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi : sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I;



Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030

Gambar 2.5

Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

2.1.8.2. Jalur Evakuasi dan Desa Bersaudara (*Sister Village*)

Pengelolaan risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Magelang dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya yang berada di kawasan rawan bencana. Saat ini Kabupaten Magelang melakukan upaya pengurangan risiko terhadap bencana letusan gunung api melalui penyusunan Rencana Kontijensi, sistem peringatan dini serta pembangunan sarana dan prasarana evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api. Di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan cara membangun infrastruktur evakuasi seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara.

Jalur-jalur evakuasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam kondisi rusak parah. Padahal jalur-jalur evakuasi yang berada di desa-desa di lereng Gunung Merapi tersebut, merupakan akses satu-satunya untuk lalu lintas

evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait infrastruktur seperti jalan dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

Jalan-jalan evakuasi tersebut kondisinya sebagian besar rusak, sehingga akan mengganggu kelancaran proses evakuasi. Namun yang menjadi kendala, jalan-jalan tersebut merupakan jalan desa yang perbaikannya menjadi tanggungjawab desa, bukan DPU Kabupaten. Sehingga DPU tidak dapat menganggarkan perbaikan jalur-jalur evakuasi tersebut melalui APBD. Untuk itu perlu dicarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hingga tahun 2020 tercatat ada 19 jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan/ desa rawan bencana dengan desa penyangga di bawahnya, yaitu:

- a. Dari Desa Kalibening Kec. Dukun menuju Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kec. Muntilan;
- b. Dari Desa Krinjing Kec. Dukun menuju Desa Deyangan Kec. Mertoyudan;
- c. Dari Desa Paten Kec. Dukun menuju Desa Gondang, Bumirejo, Paremono Kec. Mungkid; Desa Banyurojo, Kec. Mertoyudan;
- d. Dari Desa Sengi Kec. Dukun menuju Desa Treko, Desa Senden, Kec. Mungkid dan Desa Butuh, Desa Tirtosari, Desa Jati Kec. Sawangan;
- e. Dari Desa Sewukan Kec. Dukun menuju Desa Ambartawang, Desa Rambeanak, Desa Mungkid Kec. Mungkid;
- f. Dari Ngargomulyo Kec. Dukun menuju Desa Tamanagung Kec. Muntilan;
- g. Dari Sumber Kec. Dukun menuju Desa Pucungrejo dan Desa Ngawen Kec. Muntilan;
- h. Dari Keningar Kec. Dukun Menuju Desa Ngrajek Kec. Mungkid;
- i. Dari Kaliurang Kec. Srumbung menuju Desa Jamuskauman, Desa Pakunden, dan Desa Bligo Kec. Ngluwar;
- j. Dari Desa Ngablak Kec. Srumbung menuju Desa Kradenan Kec. Srumbung; Desa Kadiluwih, Desa Somoketro dan Desa Tirto Kec. Salam;
- k. Dari Desa Kemiren Kec. Srumbung menuju Desa Salam Kec. Salam;
- l. Dari Desa Nglumut Kec. Srumbung menuju Desa Sucen Kec. Salam;
- m. Dari Desa Srumbung Kec. Srumbung menuju Desa Baturono Kec. Salam;
- n. Dari Desa Mranggen Kec. Srumbung menuju Desa Gunungpring dan Desa Sokorini Kec. Muntilan;
- o. Dari Desa Tegalrandu Kec. Srumbung menuju Desa Bringin Kec. Srumbung; Ds. Pabelan Kec. Mungkid; Ds. Wanurejo Kec. Borobudur;
- p. Dari Desa Ngargosoko Kec. Srumbung menuju Desa Gulon Kec. Salam;
- q. Dari Desa Kapuhan Kec. Sawangan menuju Desa Mangunsari Kec. Sawangan;
- r. Dari Desa Ketep Kec. Sawangan menuju Ds. Podosoko dan Wulungunung Kec. Sawangan; Ds. Ketundan Kec. Pakis; dan Ds. Danurejo Kec. Mertoyudan; dan
- s. Dari Desa Wonolelo Kec. Sawangan menuju Desa Banyuroto Kec. Sawangan; Ds. Pogalan Kec. Pakis.

Berkaitan dengan pengurangan risiko bencana upaya mitigasi merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipersiapkan. Mitigasi bencana sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).

Bercermin dari pengalaman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Magelang menghadirkan program penanggulangan bencana berbasis komunitas, yang disebut dengan *sister village* atau desa bersaudara. Konsep dasar dari *sister village* ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa diluar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Tidak hanya itu konsep *sister village* bisa diterapkan juga untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang terus membentuk Desa Bersaudara atau *Sister Village* dalam upaya mitigasi terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Hingga tahun 2020 sebanyak 20 desa bersaudara yang telah terbentuk. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Desa Bersaudara (*Sister Village*)

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)
	KRB III	KRB II		
1	Kaliurang 2.516 Jiwa		Srumbung	1. Jamuskauman, Kec.Ngluwar 2. Pakunden, Kec.Ngluwar 3. Bligo, Kec.Ngluwar
2	Nglumut 798 Jiwa		Srumbung	1. Sucen, Kec.Salam
3	Ngablak 2.412 Jiwa		Srumbung	1. Kradenan, Kec.Srumbung 2. Somoketro, Kec.Salam 3. Tirto, Kec.Salam 4. Kadiluwih, Kec.Salam
4	Ngargosoko 2.264 Jiwa		Srumbung	1. Gulon, Kec.Salam 2. Seloboro, Kec.Salam
5	Tegalrandu 2.297 Jiwa		Srumbung	1. Bringin, Kec.Srumbung 2. Pabelan, Kec.Mungkid 3. Wanurejo, Kec.Borobudur
6	Mranggen 4.375 Jiwa		Srumbung	1. Gunungpring, Kec.Muntilan 2. Sokorini, Kec.Muntilan
7	Srumbung 3.842 Jiwa		Srumbung	1. Baturono, Kec.Salam 2. Tersangede, Kec.Salam
8	Kemiren 1.174 Jiwa		Srumbung	1. Salam, Kec.Salam
9	Kapuhan 3.396 Jiwa		Sawangan	1. Mangunsari, Kec.Sawangan

No	Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB)		Kecamatan	Desa Tujuan (Penyangga)	
	KRB III	KRB II			
10	Wonolelo 6.447 Jiwa		Sawangan	1. Banyuroto, Kec.Sawangan 2. Pogalan, Kec.Pakis	
11	Ketep 2.420 Jiwa		Sawangan	1. Wulunggunung, Kec.Sawangan 2. Podosoko, Kec.Sawangan 3. Ketundan, Kec.Pakis	
12	Sumber 3.802 Jiwa		Dukun	1. Pucungrejo, Kec.Muntilan 2. Sedayu, Kec.Muntilan 3. Ngawen, Kec.Muntilan	
13	Ngargomulyo 2.514 Jiwa		Dukun	1. Tamanagung, Kec.Muntilan	
14	Kalibening 2.582 Jiwa		Dukun	1. Adikarto, Kec.Muntilan 2. Tanjung, Kec.Muntilan	
15	Sengi 4.404 Jiwa		Dukun	1. Jati, Kec.Sawangan 2. Tirtosari, Kec.Sawangan 3. Butuh, Kec.Sawangan 4. Senden, Kec.Mungkid 5. Treko, Kec.Mungkid	
16	Sewukan 2.498 Jiwa		Dukun	1. Ambartawang, Kec.Mungkid 2. Rambeanak, Kec.Mungkid 3. Mungkid, Kec.Mungkid	
17	Paten 3.092 Jiwa		Dukun	1. Gondang, Kec.Mungkid 2. Paremono, Kec.Mungkid 3. Bumirejo, Kec.Mungkid 4. Banyurojo, Kec.Mertoyudan 5. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan	
18	Keningar 605 Jiwa		Dukun	1. Ngrajek, Kec.Mungkid	
19	Krinjing 2.156 Jiwa		Dukun	1. Deyangan, Kec.Mertoyudan	
20			Dukun 2.456 Jiwa	Dukun	1. Bojong, Kec.Mungkid 2. Sriwedari, Kec.Muntilan
21			Mangunsoko 856 Jiwa	Dukun	1. Giyanti, Kec.Candimulyo
22	Tlogolele (Kab.Boyolali)			Selo	1. Donorojo, Kec.Mertoyudan 2. Mertoyudan, Kec.Mertoyudan

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2021

2.1.8.3. Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Saat ini Kabupaten Magelang sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana.

Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam rencana strategis (Renstra) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Magelang.

Hasil perhitungan indeks risiko bencana di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari skor 143.20 pada tahun 2015, menjadi 75,1 pada tahun 2019. Walaupun Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana, tetapi berdasarkan skor di atas Kabupaten Magelang berhasil menurunkan skor indeks resiko bencana dengan kelas resiko “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dianggap sangat baik.

2.1.9 Kondisi Demografi

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai 1.302.434 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (110.684 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (94.394 jiwa) dan Secang (81.984 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.544 jiwa).

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

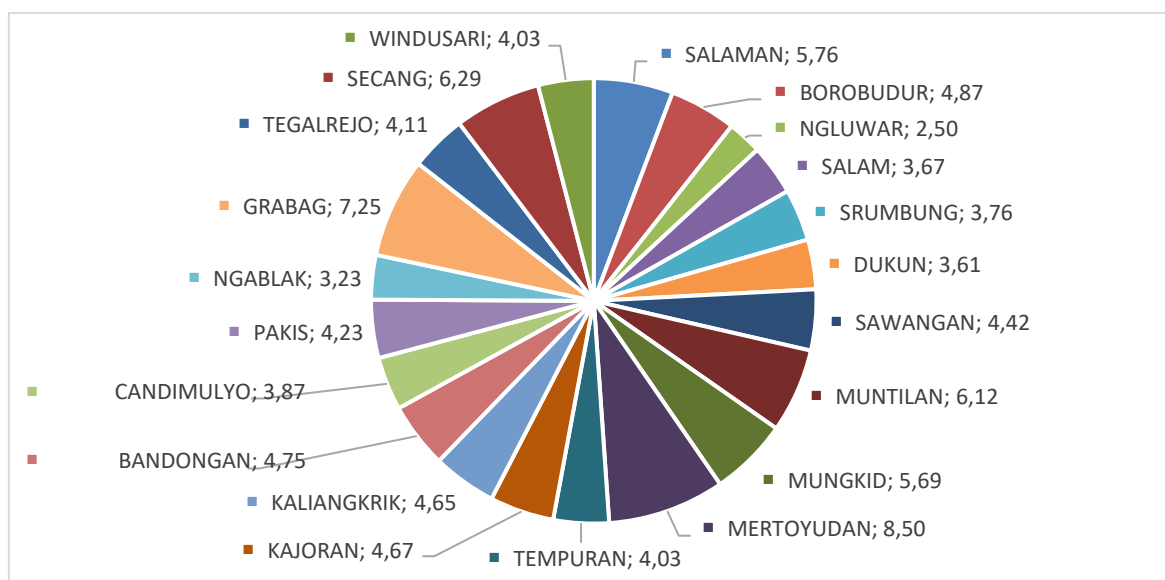
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan Penduduk (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Salaman	73.833	73.372	73.913	74.561	74.973	5,76
2	Borobudur	61.232	61.305	62.517	62.970	63.397	4,87
3	Ngluwar	32.415	32.319	32.710	32.709	32.544	2,5
4	Salam	47.605	47.631	48.257	48.149	47.764	3,67
5	Srumbung	48.339	48.080	48.847	49.073	48.988	3,76
6	Dukun	46.730	46.900	47.187	47.110	46.969	3,61
7	Muntilan	78.871	79.136	79.372	79.348	79.681	6,12
8	Mungkid	73.426	74.295	74.602	74.653	74.070	5,69
9	Sawangan	57.118	57.287	57.986	57.293	57.575	4,42
10	Candimulyo	49.714	50.091	50.424	50.121	50.450	3,87
11	Mertoyudan	108.558	109.233	109.652	109.803	110.684	8,50
12	Tempuran	51.011	51.041	51.585	52.218	52.497	4,03
13	Kajoran	59.552	59.929	59.776	60.217	60.877	4,67
14	Kaliangkrik	59.161	59.575	59.405	59.808	60.597	4,65
15	Bandongan	60.858	60.916	60.481	61.085	61.812	4,75
16	Windusari	51.763	52.156	50.894	51.604	52.430	4,03
17	Secang	80.996	80.914	80.291	80.894	81.984	6,29
18	Tegalrejo	52.829	52.981	53.369	53.510	53.587	4,11
19	Pakis	52.237	52.819	53.988	54.159	55.048	4,23
20	Grabag	90.807	91.559	92.212	93.252	94.394	7,25
21	Ngablak	41.569	41.866	42.647	42.482	42.113	3,23
	Jumlah	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434	4,76

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021*

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2016 - 2020 cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mertoyudan, yaitu sebesar 8,5%, sedangkan kecamatan yang pertumbuhan penduduknya terendah adalah Kecamatan Ngluwar sebesar 2,5%.

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2020, terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,50%), disusul dengan Kecamatan Grabag (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,50%). Data distribusi penduduk di Kabupaten Magelang selengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.6

Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2020

Penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan.

Tabel 2.8

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2016 - 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2016*	2017*	2018**	2019**	2020**
1	Salaman	68,87	1.072,06	1.065,37	1.073,22	1082.63	1.088,62
2	Borobudur	54,55	1.122,49	1.123,83	1.146,05	1154.35	1.162,18
3	Ngluwar	22,44	1.444,52	1.440,24	1.457,66	1457.62	1.450,27
4	Salam	31,63	1.505,06	1.505,88	1.525,67	1522.26	1.510,09
5	Srumbung	53,18	908,97	904,1	918,52	922.77	921,17
6	Dukun	53,4	875,09	878,28	883,65	882.21	879,57
7	Muntilan	28,61	2.756,76	2.766,03	2.774,27	2773.44	2.785,07
8	Mungkid	37,4	1.963,26	1.986,50	1.994,71	1996.07	1.980,48
9	Sawangan	72,37	789,25	791,58	801,24	791.67	795,56
10	Candimulyo	46,95	1.058,87	1.066,90	1.073,99	1067.54	1074,54
11	Mertoyudan	45,35	2.393,78	2.408,67	2.417,91	2421.23	2.440,66
12	Tempuran	49,04	1.040,19	1.040,80	1.051,90	1064.80	1.070,49
13	Kajoran	83,41	713,97	718,49	716,65	721.94	729,85
14	Kaliangkrik	57,34	1.031,76	1.038,98	1.036,01	1043.04	1.056,80
15	Bandongan	45,79	1.329,07	1.330,33	1.320,83	1334.02	1.349,90

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)				
			2016*	2017*	2018**	2019**	2020**
16	Windusari	61,65	839,63	846	825,53	837,05	850,44
17	Secang	47,34	1.710,94	1.709,21	1.696,05	1708,79	1.731,81
18	Tegalrejo	35,89	1.471,97	1.476,21	1.487,02	1490,94	1.493,09
19	Pakis	69,56	750,96	759,33	776,14	778,59	791,37
20	Grabag	77,16	1.176,87	1.186,61	1.195,08	1208,55	1.223,35
21	Ngablak	43,8	949,06	955,84	973,68	969,91	961,48
	Jumlah	1.085,73	1.177,66	1.182,07	1.188,25	1.196,76	1.381,23

Sumber:

1. BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2018*
2. Hasil Olahan, Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021**

Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta-Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, Mungkid dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal di sana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.785,07 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 729,85 km/jiwa².

c. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Magelang secara umum memiliki angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang besar. Angka rasio jenis kelamin yang cukup besar ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka rasio jenis kelaminnya, secara umum selama kurun waktu tahun 2016 - 2020, angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang relatif tetap, yakni 102. Pada tahun 2017- dan 2020 sex ratio berada pada angka 102 yang dapat diartikan bahwa terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9

Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2016*	630.821	626.302	1.257.123	101
2	2017**	648.458	634.947	1.283.405	102

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
3	2018**	650.382	639.733	1.290.115	102
4	2019**	653.106	641.913	1,295,019	102
5	2020**	656.724	645.710	1.302.434	102

Sumber :

1. BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2020*
2. Hasil Olahan Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021**

Berdasarkan data tahun 2020, angka *sex ratio* tertinggi berada di Kecamatan Windusari, yakni 106 artinya terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang memiliki angka rasio terendah adalah Kecamatan Mertoyudan, yakni dengan angka rasio 99, artinya hanya terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan.

Kecamatan yang angka *sex rasionya* dibawah 100, mengindikasikan jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Terdapat satu kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang yang penduduk laki-lakinya lebih sedikit daripada penduduk perempuannya, yaitu Kecamatan Mertoyudan. Selengkapnya data ratio jenis kelamin penduduk menurut kecamatannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang Tahun 2020

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Sex Ratio (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Salaman	37.667	50.24	37.306	49,76	101
2	Borobudur	31.911	50.34	31.486	49,66	101
3	Ngluwar	16.273	50	16.271	50	100
4	Salam	23.931	50.1	23.833	49,9	100
5	Srumbung	24.553	50.12	24.435	49,88	100
6	Dukun	23.510	50.05	23.459	49,95	100
7	Sawangan	29.026	50.41	28.549	49,59	102
8	Muntilan	39.846	50.01	39.835	49,99	100
9	Mungkid	36.943	49.88	37.127	50,12	100
10	Mertoyudan	54.940	49.64	55.744	50,36	99
11	Tempuran	26.576	50.62	25.921	49,38	103
12	Kajoran	30.887	50.74	29.990	49,26	103
13	Kaliangkrik	30.949	51.07	29.648	48,93	104
14	Bandongan	31.511	50.98	30.301	49,02	104
15	Candimulyo	25.525	50.59	24.925	49,41	102
16	Pakis	28.083	51.02	26.965	48,98	104
17	Ngablak	21.472	50.99	20.641	49,01	104
18	Grabag	47.871	50.71	46.523	49,29	103
19	Tegalrejo	27.108	50.59	26.479	49,41	102

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Sex Ratio (%)
		Jumlah	%	Jumlah	%	
20	Secang	41.142	50.18	40.842	49,82	101
21	Windusari	27.000	51.5	25.430	48,5	106
Jumlah		656.724	50,42	645.710	49,58	102

Sumber : Hasil Olahan Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Proyeksi perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

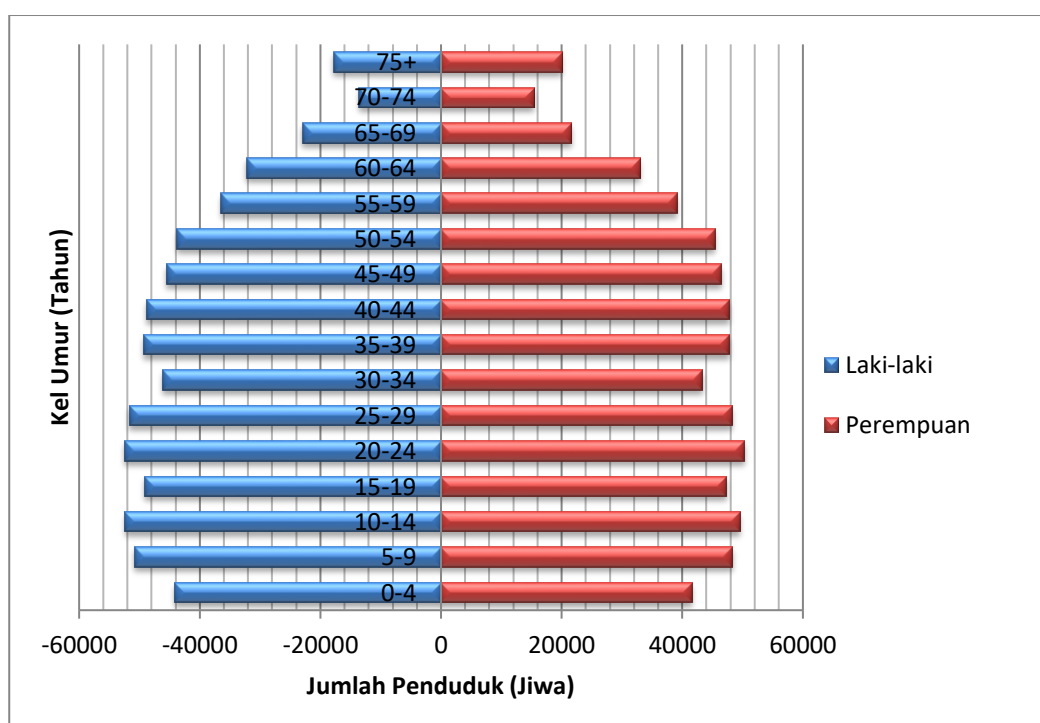
Kelompok Umur	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	42.959	37.22	43380	44.236	44.094	41034	35.76	41.018	41.577	41.608	83.993	72.98	84.398	85.813	85.702
05-Sep	50.322	50.31	49.839	51.151	50.783	47.459	47.477	47.231	48.868	48.364	97.781	97.787	97.070	100.019	99.147
Okt-14	50.089	49.728	48.751	51.363	52.365	47.532	47.092	46.035	48.447	49.558	97.621	96.82	94.786	99.810	101.923
15-19	50.038	52.006	47.967	45.454	49.066	47666	49.369	46.544	44.668	47.300	97.704	101.375	94.511	90.122	96.366
20-24	53.033	53.16	52.284	52.017	52.440	50.152	49.467	49.938	49.611	50.310	103.185	102.627	102.222	101.628	102.750
25-29	47.236	48.203	48.894	49910	51.602	44.204	45.32	46.229	46.823	48.243	91.44	93523	95.123	96.733	99.845
30-34	49.390	48028	47.256	46.428	46.136	47.557	45.683	44.907	43.579	43.409	96.947	93.711	92.163	90.007	89.545
35-39	49.312	50.561	50.993	49.738	49.243	48.156	49.473	49.547	48.478	47.817	97.468	100.034	100.540	98.216	97.060
40-44	47.485	47.278	47.938	48.180	48.809	48.128	47.224	47.819	47.837	47.815	95.613	94.502	95.757	96.017	96.624
45-49	45.899	47.265	46.399	45.422	45.487	47.342	48.828	47.895	46780	46.514	93.241	96.093	94.294	92.202	92.001
50-54	40.340	40866	42.676	44.158	43.729	42.771	43.358	45.135	46560	45.467	83.111	84.224	87.811	90.718	89.196
55-59	35.654	36.661	36.699	36.837	36.466	36.280	37776	38.673	39.269	39.162	71.934	74.437	75.372	76.106	75.628
60-64	29.142	29.829	30.768	31.401	32.232	26965	28.129	29.912	31.144	33.013	56.107	57.958	60.680	62.545	65.245
65-69	18.800	20753	21.439	22.839	22.949	19.681	21.08	21.304	21.908	21.626	38.481	41.833	42.743	44.747	44.575
70-74	15044	13.816	13620	13.831	13.548	15.371	14.854	15.103	15.246	15.422	30.415	28.67	28.723	29.077	28.970
75+	21.187	22.774	21.479	20.141	17.775	22.396	24.057	22.443	21.118	20.082	43.583	46.831	43.922	41.259	37.857
Jumlah	645.930	648458	650.32	653.106	656.724	632.694	634.947	639.733	641.913	645.710	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Penduduk dengan kelompok usia 5-9, 10-14, 15-19 dan 20-24 tahun memiliki jumlah paling tinggi, terlihat pada piramida penduduk yang mengembang di bagian bawah. Artinya, penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten Magelang. komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Pada tahun 2020, Kabupaten Magelang didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 904.260 jiwa. Adapun penduduk usia nonproduktif (<15 + >65 tahun) Kabupaten

Magelang adalah sebesar 398.174 jiwa. Dengan demikian, dapat diukur bahwa rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 0,44 menunjukkan rata-rata 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Magelang masih harus menanggung kurang lebih 44 penduduk usia non produktif.

Berdasarkan grafik di bawah, dapat dilihat bahwa Kabupaten Magelang mengalami bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Di dalam rentang masa bonus demografi, terdapat waktu yang rasio ketergantungannya pada titik terendah, hal ini yang disebut jendela kesempatan (*window of opportunity*). Kabupaten Magelang mulai menikmati bonus demografi sejak tahun 2016 dan berdasarkan proyeksi penduduk akan memiliki jendela kesempatan antara tahun 2017 sampai 2020.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.7

Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020

e. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

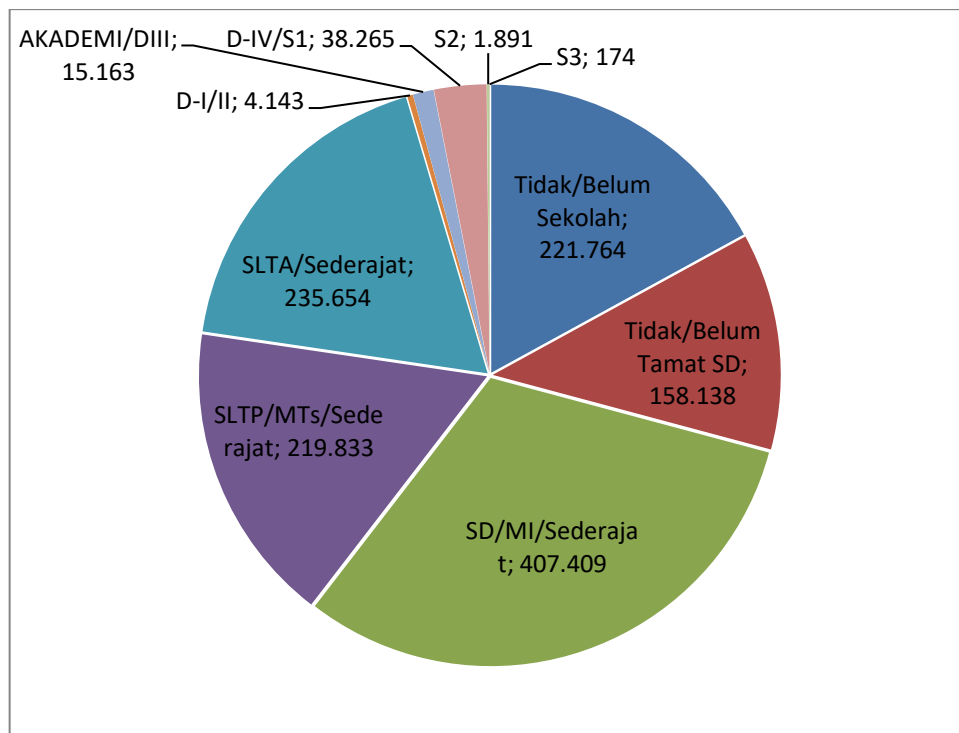
Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/ sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/Belum Sekolah	198.444	195.188	207.959	210.559	221.764
2	Tidak/Belum Tamat SD	167.929	167.215	160.204	161.637	158.138
3	SD/MI/Sederajat	432.473	432.488	424.710	420.936	407.409
4	SLTP/MTs/Sederajat	212.419	215.060	217.129	217.310	219.833
5	SLTA/Sederajat	216.346	220.622	224.694	226.192	235.654
6	DI/II	4.527	4.421	4.324	4.219	4.143
7	AKADEMI/DIII	14.187	14.432	14.802	14.777	15.163
8	D-IV/S1			34.449	35.186	38.265
9	S2			1.648	1.706	1.891
10	S3			196	191	174
	Jumlah	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.292.713	1.302.434

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021.

Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/ sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.8

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Magelang Pada Tahun 2020

f. Struktur Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Magelang memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 97,41%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 1,71%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di kabupaten ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

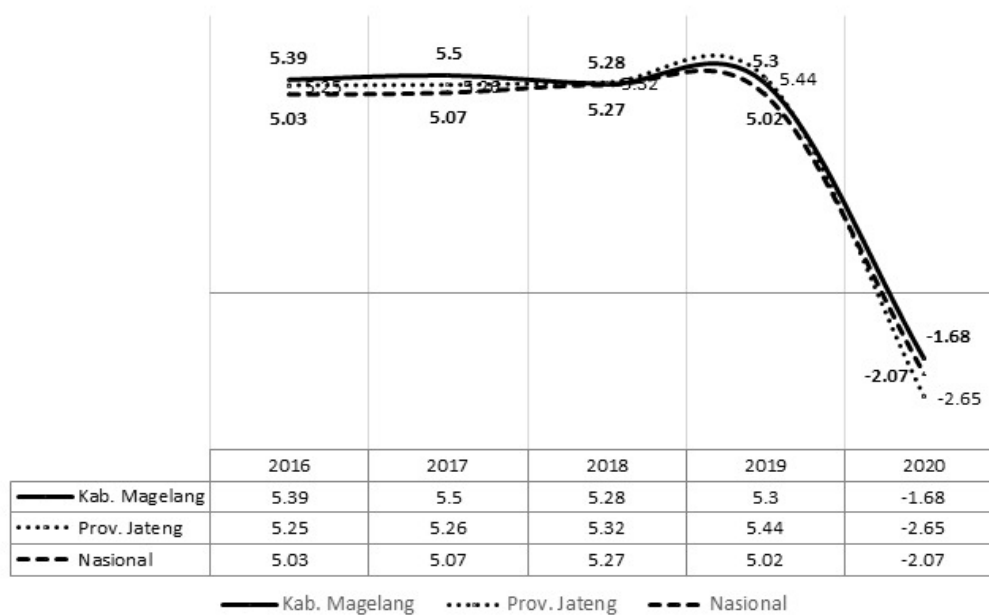
No.	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	1.243.565	1.248.402	1.255.556	1,261,070	1.268.751
2	Kristen	10.544	10.532	10.562	10,448	10.476
3	Katolik	23.284	23.302	22.907	22,513	22.270
4	Hindu	212	197	188	175	171
5	Budha	294	291	290	285	287
6	Konghucu	11	11	9	7	6
7	Lainnya	714	670	603	521	473
Jumlah		1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.302.434

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang relatif stabil pada kisaran 5,28% - 5,5% dengan rata-rata 5,37%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata 5,10), dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (rata-rata 5,32).

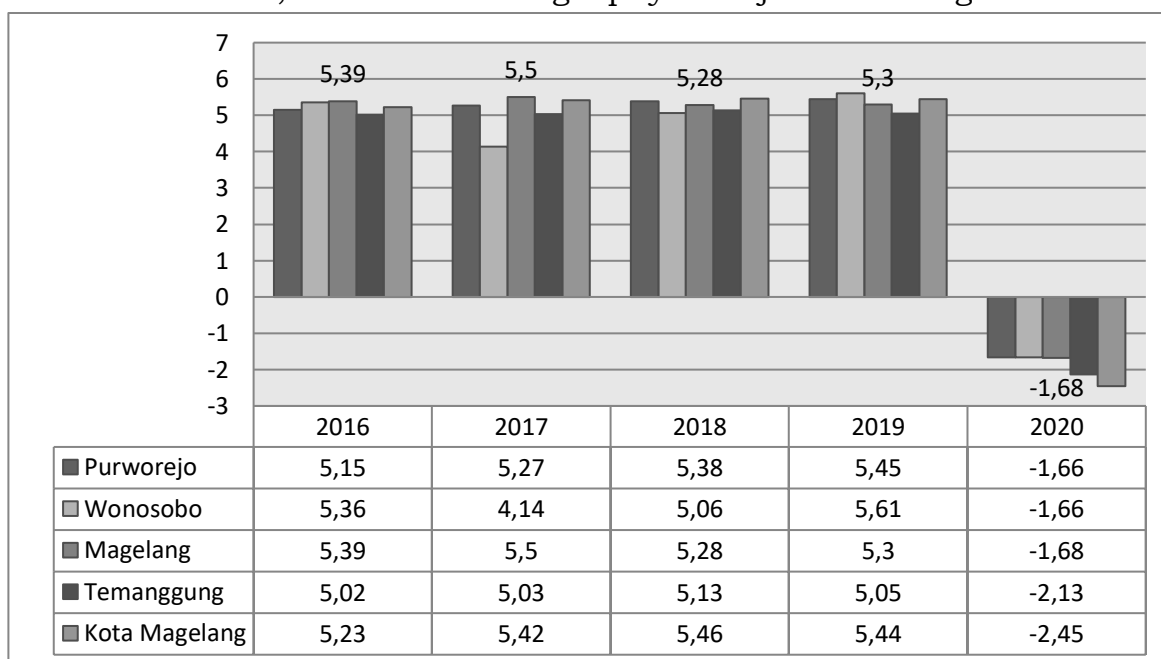


Gambar 2.9

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi selama dua tahun, yaitu tahun 2016 dan 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019. Karena Pandemi Covid tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68 %. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021

Gambar 2.10
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota
se eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 secara sektoral ekonomi Kabupaten Magelang terdapat 10 sektor ekonomi yang mengalami kontraksi, yang tertinggi tingkat kontraksinya adalah sektor Transportasi dan Pergudangan -26,99%, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -8,00%, selanjutnya sektor Jasa Perusahaan -7,12%.

Selanjutnya, terdapat 7 sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yang tertinggi tingkat pertumbuhannya adalah sektor Informasi dan Komunikasi 15,68%, diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,20%, selanjutnya sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,35%.

Sementara itu, sektor pertanian sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar kedua 21,31% tetap mengalami pertumbuhan, walaupun

hanya sebesar 0,16%. Sektor industri sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar pertama 22,38% mengalami kontraksi, walaupun hanya sebesar -0,03%. Sektor perdagangan sebagai kontributor pembentukan PDRB terbesar ketiga 13,27% mengalami kontraksi sebesar -4,47%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32	2,52	2,39	0,79	0,16
B. Pertambangan dan Penggalian	3,14	4,51	3,33	4,74	2,15
C. Industri Pengolahan	5,63	4,88	5,34	6,07	-0,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	4,91	5,39	5,55	1,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	7,03	5,48	4,40	2,35
F. Konstruksi	6,32	6,47	5,97	4,87	-3,71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,48	6,38	4,80	5,88	-4,47
H. Transportasi dan Pergudangan	6,61	6,13	6,20	8,55	-26,99
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	6,36	7,27	8,16	-8,00
J. Informasi dan Komunikasi	8,30	13,35	12,77	11,38	15,68
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,74	5,98	4,08	3,77	1,65
L. Real Estate	6,76	6,50	5,06	5,68	-0,26
M,N. Jasa Perusahaan	10,40	9,30	9,89	9,97	-7,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,57	3,05	3,78	-1,22
P. Jasa Pendidikan	6,65	7,67	8,15	7,58	-0,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	9,15	8,68	6,81	8,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,85	9,31	9,86	9,25	-6,93
TOTAL	5,39	5,50	5,28	5,30	-1,68

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan dari Rp. 20.974,80 miliar (2016) menjadi Rp. 23.253,15 miliar (2019). Pada Tahun 2020, karena pandemi covid Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang turun menjadi Rp. 22.861,47 miliar. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

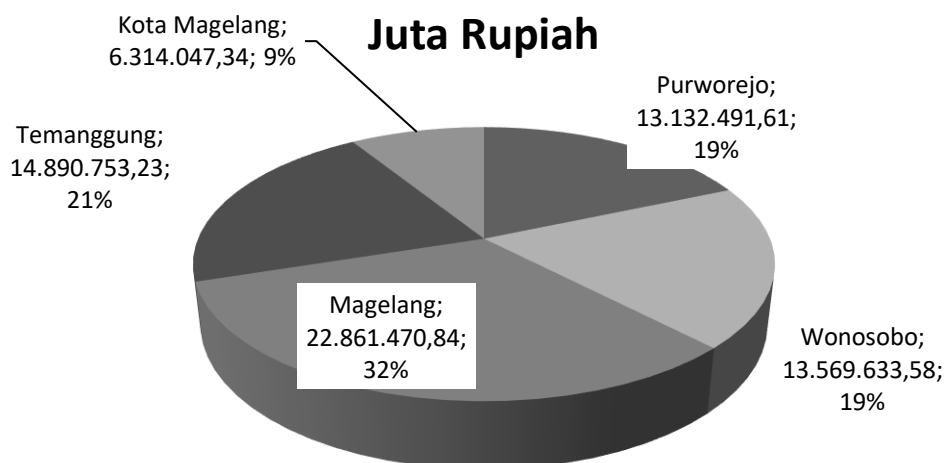
Tabel 2.15
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.245,74	4.352,89	4.456,86	4.492,19	4.499,15
B. Pertambangan dan Penggalian	774,49	809,46	836,42	876,07	894,94

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2016	2017	2018	2019	2020
C. Industri Pengolahan	4.238,43	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11,99	12,58	13,26	13,99	14,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,06	20,40	21,51	22,46	22,99
F. Konstruksi	1.904,58	2.027,74	2.148,79	2.253,39	2.169,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.839,00	3.020,27	3.165,17	3.351,23	3.201,37
H. Transportasi dan Pergudangan	777,89	825,56	876,76	951,71	694,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	824,43	876,85	940,61	1.017,36	936,02
J. Informasi dan Komunikasi	894,63	1.014,06	1.143,53	1.273,71	1.473,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	539,88	572,15	595,50	617,95	628,13
L. Real Estate	426,19	453,89	476,87	503,96	502,64
M,N. Jasa Perusahaan	50,32	55,00	60,45	66,47	61,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	698,85	716,81	738,66	766,58	757,22
P. Jasa Pendidikan	1.030,49	1.109,54	1.200,01	1.290,97	1.288,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,13	174,78	189,95	202,89	219,52
R,S,T,U. Jasa Lainnya	446,13	487,67	535,74	585,29	544,73
PDRB	19.882,24	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2020 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota

se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2020

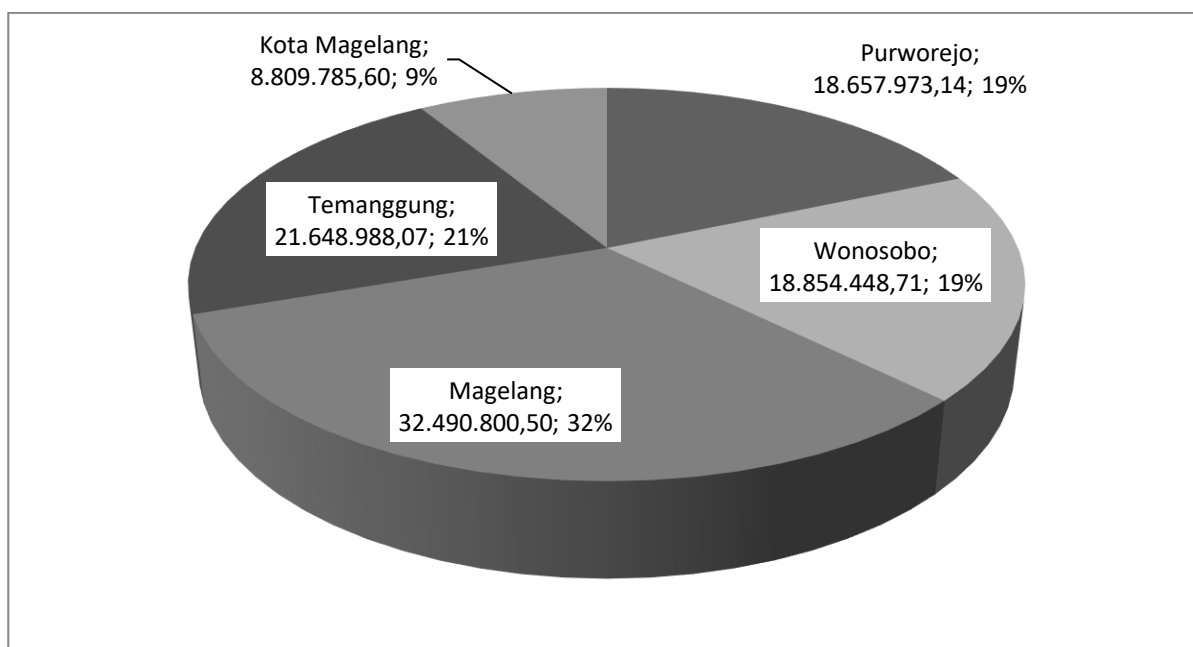
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2016-2020 meningkat sebesar Rp. 6.222,37 miliar, dari Rp. 26.232,35 miliar (2016) menjadi Rp. 32.454,72 miliar (2020). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16
 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang
 Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.013,39	6.201,99	6.550,44	6.747,26	6.914,81
B. Pertambangan dan Penggalian	1.175,20	1.276,59	1.374,84	1.449,94	1.511,36
C. Industri Pengolahan	5.793,00	6.175,68	6.635,45	7.131,88	7.264,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,56	14,28	15,51	16,40	16,60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,34	22,96	24,28	25,81	27,93
F. Konstruksi	2.421,24	2.629,47	2.898,45	3.133,13	3.027,90
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.523,00	3.842,38	4.119,08	4.455,80	4.306,14
H. Transportasi dan Pergudangan	881,27	949,30	1.013,87	1.119,98	847,59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.086,21	1.167,42	1.258,72	1.379,38	1.274,04
J. Informasi dan Komunikasi	820,44	968,72	1.091,71	1.230,34	1.425,19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	710,41	785,13	844,87	896,65	913,54
L. Real Estate	483,34	527,30	567,59	606,44	608,64
M,N. Jasa Perusahaan	63,49	71,85	81,15	91,95	87,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	941,68	997,56	1.039,69	1.098,36	1.100,03
P. Jasa Pendidikan	1.527,05	1.710,40	1.891,21	2.086,41	2.118,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,75	231,38	254,58	276,82	307,86
R,S,T,U. Jasa Lainnya	549,98	611,44	678,01	744,25	702,20
PDRB	26.232,35	28.183,85	30.339,47	32.490,80	32.454,72

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2020 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kab. Temanggung, berikutnya Kab. Wonosobo, kemudian Kab. Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota
se eks Karesidenan Kedu Tahun 2020

Sektor yang dominan perekonomian Kabupaten Magelang (ADHK) tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan (21,66 %), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,68 %), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,00%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,92	23,40	22,01	20,71	21,59	20,20	20,77	19,32	21,31	19,68
2	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,44	4,53	3,86	4,53	3,79	4,46	3,77	4,66	3,91
3	Industri Pengolahan	22,08	21,80	21,91	21,25	21,87	21,17	21,95	21,36	22,38	21,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,10
6	Konstruksi	9,23	9,29	9,33	9,69	9,55	9,73	9,96	9,69	9,33	9,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	13,43	13,39	13,63	14,40	13,58	14,34	13,71	14,41	13,27	14,00

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Sepeda Motor										
8	Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,40	3,37	3,95	3,34	3,97	3,45	4,09	2,61	3,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,06	4,14	4,19	4,15	4,26	4,25	4,38	3,93	4,09
10	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,13	3,44	4,76	3,60	5,18	3,79	5,48	4,39	6,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,66	2,79	2,75	2,78	2,70	2,76	2,66	2,81	2,75
12	Real Estate	1,84	1,85	1,87	2,17	1,87	2,16	1,87	2,17	1,88	2,20
13	Jasa Perusahaan	0,24	0,23	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,59	3,66	3,54	3,43	3,43	3,35	3,38	3,30	3,39	3,31
15	Jasa Pendidikan	5,82	5,77	6,07	5,28	6,23	5,44	6,42	5,55	6,53	5,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,78	0,82	0,83	0,84	0,86	0,85	0,87	0,95	0,96
17	Jasa Lainnya	2,10	2,01	2,17	2,32	2,23	2,43	2,29	2,52	2,16	2,38
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.222.371,04 juta. Meningkatkan dari Rp. 26.232.349,05 juta (2016) menjadi Rp. 32.454.720,09 juta (2020). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	19.066.541,09	20.468.392,81	21.897.417,21	23.419.218,13	23.435.081,00
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	489.720,93	523.285,99	576.845,07	672.077,76	663.166,12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.208.562,37	2.383.355,30	2.581.515,79	2.649.272,78	2.534.883,09
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.039.221,20	7.707.266,58	8.887.094,04	9.655.036,54	9.120.314,65
5	Perubahan Inventori	649.095,83	350.349,58	398.077,85	540.702,32	418.867,48
	Net Ekspor	(3.220.792,37)	(3.248.796,25)	(4.001.484,49)	(4.445.507,02)	-3.717.592,25
	Produk Domestik Regional Bruto	26.232.349,05	28.183.854,01	30.339.465,47	32.490.800,51	32.454.720,09

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020.

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 2.979.226,60 juta dari Rp. 19.882.244,24 juta (2016) menjadi Rp. 22.861.470,84 juta (2020). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2015-2020 (Juta Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.317.884,58	15.007.593,11	15.647.776,86	16.376.073,96	16.146.742,19
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	337.020,13	351.286,01	377.313,73	429.760,34	417.024,65
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.472.425,17	1.522.577,72	1.596.623,15	1.633.213,53	1.568.624,25
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.124.683,83	5.481.954,78	6.002.230,75	6.303.160,94	5.946.331,10
5	Perubahan Inventori	175.083,72	255.867,44	325.394,89	472.863,40	477.857,26
	Net Ekspor	(1.544.853,19)	(1.644.478,05)	(1.866.543,48)	(1.961.917,85)	(1.695.109,34)
	Produk Domestik Regional Bruto	19.882.244,24	20.974.801,01	22.082.795,90	23.253.154,32	22.861.470,84

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 Konsumsi RT sebesar 72,68%, maka pada tahun 2020 Konsumsi RT menjadi sebesar 72,21%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2016 komponen net export sebesar -12,28%, pada tahun 2020 komponen net export menjadi sebesar -11,25%. Pada tahun 2016 komponen PMTB sebesar 26,83%, pada tahun 2020 komponen PMTB menjadi sebesar 28,10%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,68	72,62	72,17	72,08	72,21
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,86	1,9	2,07	2,04
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,42	8,46	8,51	8,15	7,81
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,83	27,35	29,29	29,72	28,10
5	Perubahan Inventori	2,47	1,24	1,31	1,66	1,29
	Net Ekspor	-12,28	-11,53	-13,19	-13,68	-11,45
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2016 Konsumsi RT sebesar 72.01%, maka pada tahun 2020 Konsumsi RT menjadi sebesar 70.63%. Demikian juga komponen *net export* (expor – import), jika pada tahun 2016

komponen *net export* sebesar -7,77%, pada tahun 2020 komponen *net export* menjadi sebesar -7,41%.

Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Jika pada tahun 2016 komponen PMTB sebesar 25,78%, pada tahun 2020 komponen PMTB menjadi sebesar 26,01%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.21
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,01	71,55	70,86	70,43	70,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,70	1,67	1,71	1,85	1,82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,41	7,26	7,23	7,02	6,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,78	26,78	27,18	27,11	26,01
5	Perubahan Inventori	0,88	1,22	1,47	2,03	2,09
	Net Ekspor	-7,77	-7,84	-8,45	-8,44	-7,41
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang tumbuh diatas 5%. Pada tahun 2020, karena dampak pandemi pertumbuhan PDRB minus 1.69 %. Untuk selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

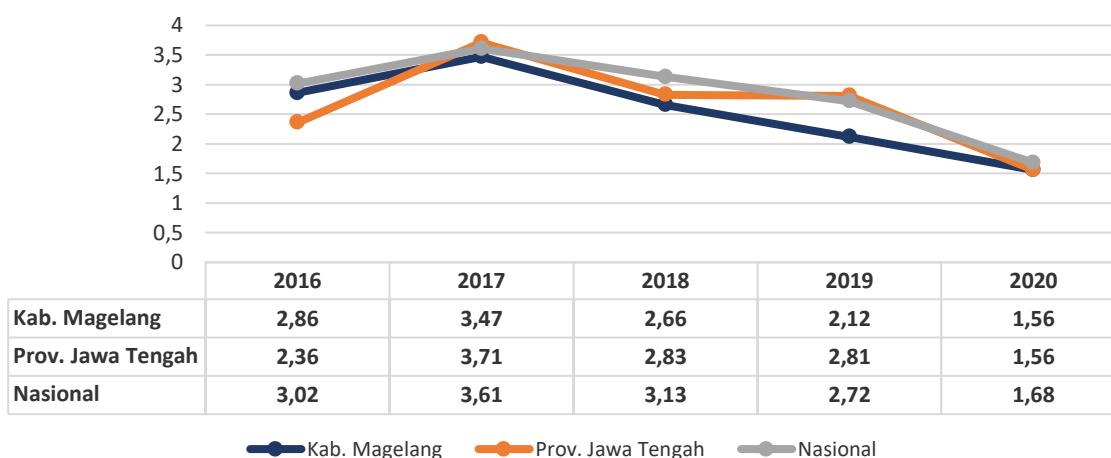
No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,45	4,82	4,27	4,65	-1,40
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,39	4,23	7,41	13,9	-2,96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,57	3,41	4,86	2,29	-3,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,81	6,97	9,49	5,01	-5,66
	PDRB	5,39	5,5	5,28	5,3	-1,68

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

2.2.2 Laju Inflasi

Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Magelang lebih lambat dari laju inflasi Provinsi Jawa Tengah 2,81 maupun Nasional 2,72. Sedangkan pada tahun 2020 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 1,56%, sama

dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan masih sesuai dengan target inflasi tahun 2020, yaitu pada rentang 3 ± 1 . Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

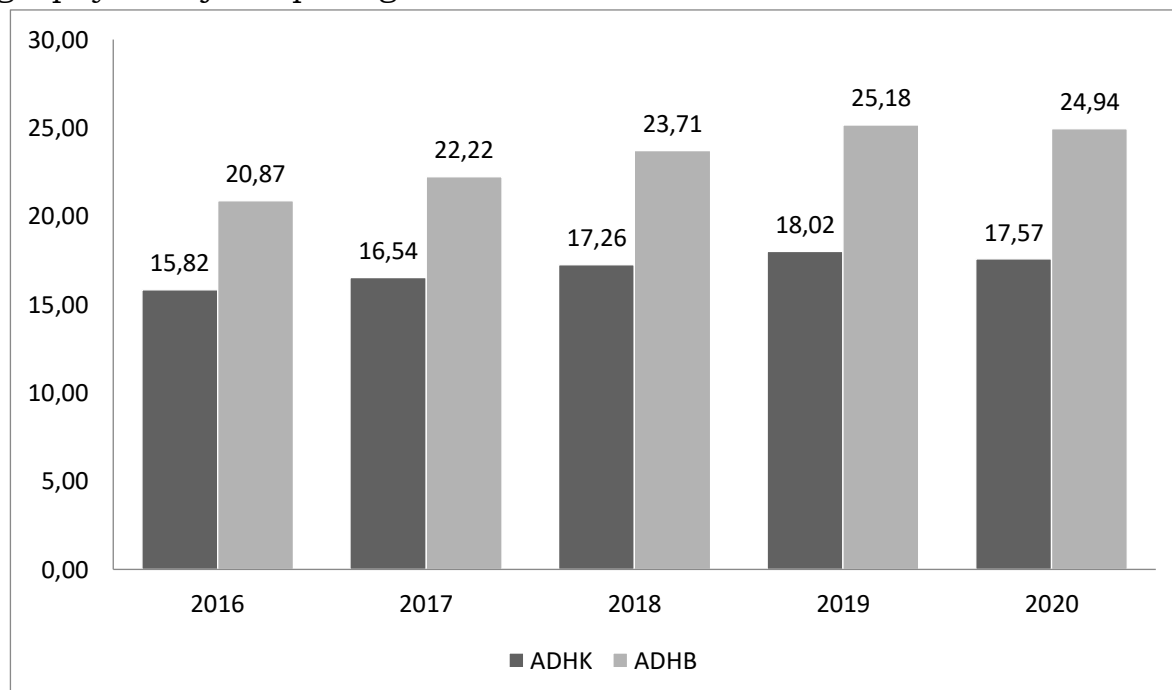


Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

Gambar 2.13
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2016-2020

2.2.3 PDRB Per Kapita

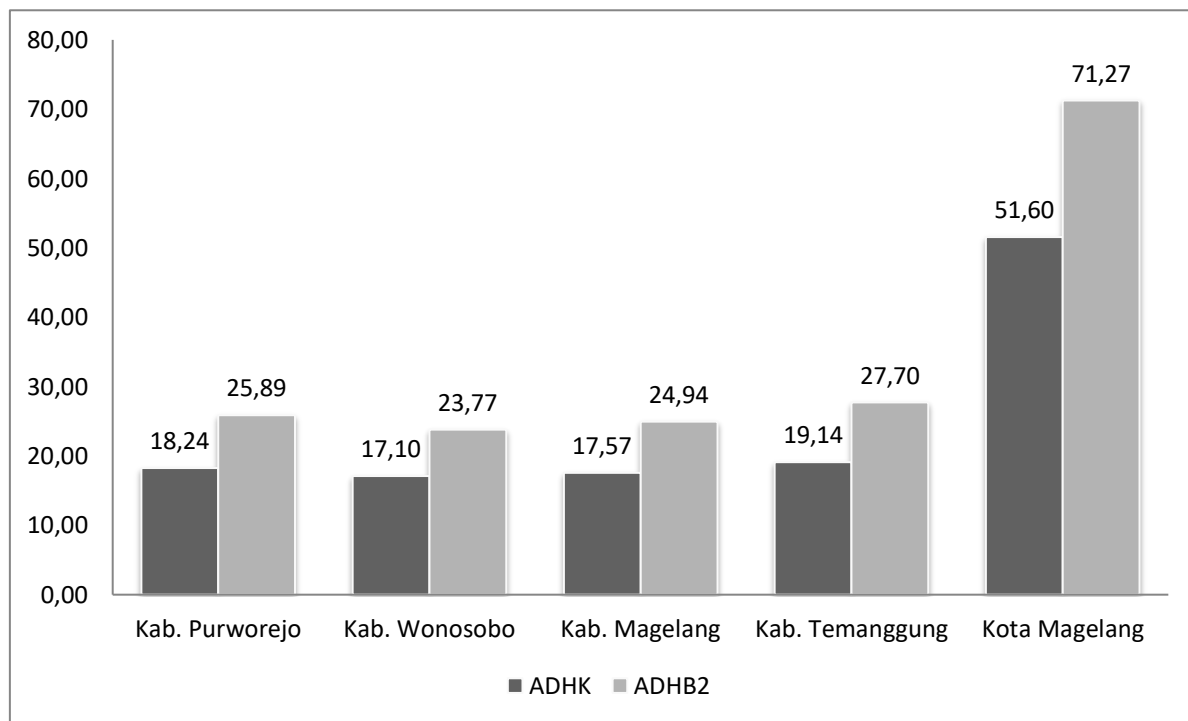
Pada tahun 2016 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.15,82 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.17,57/tahun pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2016 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.20,87 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp.24,94 juta /tahun pada tahun 2020. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.14
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang disandingkan dengan kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, berada pada urutan kedua dari bawah. PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kab. Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.15

PDRB Perkapita kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu Tahun 2020

2.2.4 Pemerataan Pembangunan

2.2.4.1. Indeks Gini/Koefisien Gini

Indeks gini/koefisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya, kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka koefisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka koefisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Tabel 2.23

Indeks Gini Kabupaten Magelang tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Gini Kabupaten Magelang*	0,326	0,325	0,378	0,321	0,322
2	Kriteria Ketimpangan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah	0,366	0,365	0,378	0,361	0,362

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Koefisien gini Kabupaten Magelang pada periode tahun 2016-2020 relatif tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,34-0,37. Koefisien gini Kabupaten Magelang masih lebih kecil dibandingkan dengan koefisien gini Provinsi Jawa Tengah. Artinya, kondisi distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang masih dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

2.2.4.2. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan pendapatan penduduk tidak hanya dapat dilihat dari angka koefisien gini, tetapi dapat diamati dengan pendekatan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia merupakan pemerataan pendapatan yang diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Pendekatan ini mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut.

1. Ketimpangan pendapatan tinggi
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
2. Ketimpangan pendapatan sedang/menengah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
3. Ketimpangan pendapatan rendah
Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Tabel 2.24
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Kelompok Penduduk	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	40 % Penduduk Berpendapatan Terendah	18,68	18,60	18,52	17,71	18,57
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	34,40	35,00	36,17	36,75	36,12
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	46,92	46,40	45,31	45,54	45,31
Kriteria Ketimpangan		Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

Berdasarkan pendekatan ini, distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah. Proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada periode 2016-2020 fluktuatif. Kondisi ketiga kategori proporsi jumlah pendapatan dari penduduk, menunjukkan masih terdapatnya ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Magelang.

2.2.4.3. Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Indeks Williamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Hasil pengukuran Indeks Williamson kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. $IW < 0,4$ artinya tingkat ketimpangan rendah;
- b. $0,4 < IW < 0,5$ artinya tingkat ketimpangan moderat;
- c. $IW > 0,5$ artinya tingkat ketimpangan tinggi.

Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi. Sebaliknya apabila Indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin besar ketimpangan pembangunan ekonomi.

Indeks Williamson Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori moderat. Tercatat besar indeks williamson Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 0,40 dan cenderung stagnan hingga tahun 2016. Besar nilai Indeks Williamson yang masih masuk dalam kategori moderat menunjukkan bahwa masih perlunya pemerataan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Magelang.

2.2.5 Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	271.800	281.237	296.327	325.921	342.430
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	158,86	157,15	143,44	137,45	146,34
Persentase Penduduk Miskin	(%)	12,67	12,42	11,23	10,67	11,27
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	87,33	87,58	88,77	89,33	88,73

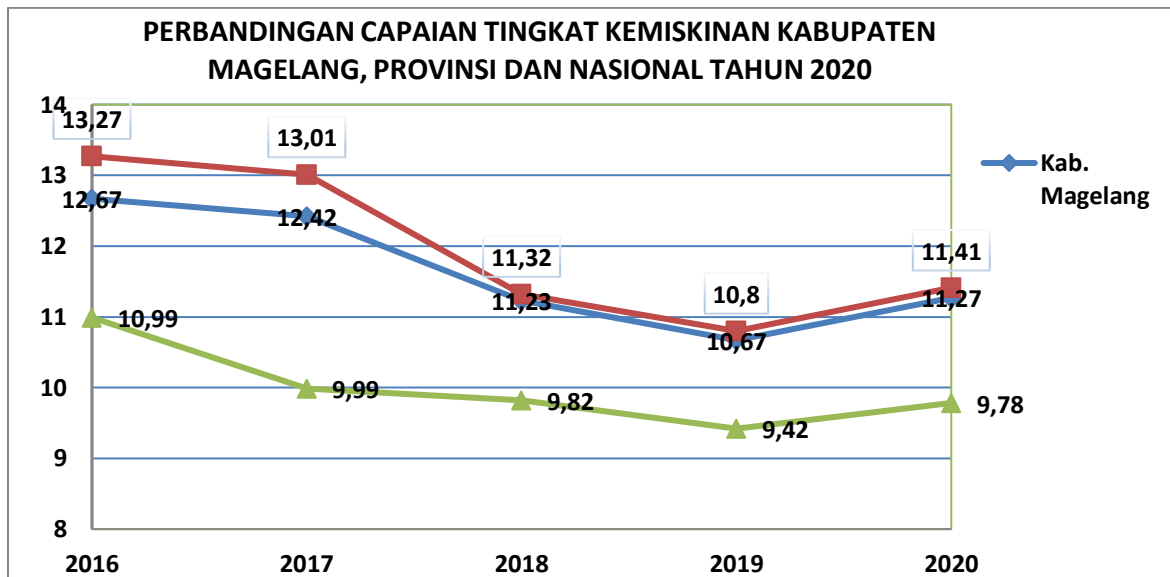
Indikator Kabupaten Magelang	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,44	0,34	0,34	0,17	0,20
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,84	1,67	1,55	0,98	1,23

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Dari tabel di atas menunjukkan garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir semakin meningkat, dari Rp. 271.800,- pada tahun 2016 menjadi Rp. 342.430 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan tingkat pengeluaran penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,67% atau sebesar 158.860 jiwa, walaupun penurunan angka kemiskinan agak landai, namun selama lima tahun terakhir bisa diturunkan menjadi 11,27% atau sebesar 146.340 jiwa pada tahun 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, dari 1,84 pada tahun 2016, turun menjadi 1,23 pada tahun 2020. Begitu pula dengan Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian Indeks Keparahhan Kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menunjukkan tren penurunan, dari 0,44 pada tahun 2016 menjadi 0,20 pada tahun 2020.

Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, selama 5 (lima) tahun terakhir indikator kemiskinan, khususnya persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun secara umum mengalami kenaikan dengan adanya pandemi *Covid-19*. Pada periode Maret tahun 2020, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,41%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,78 %). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Gambar 2.16

Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan
Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2016-2020

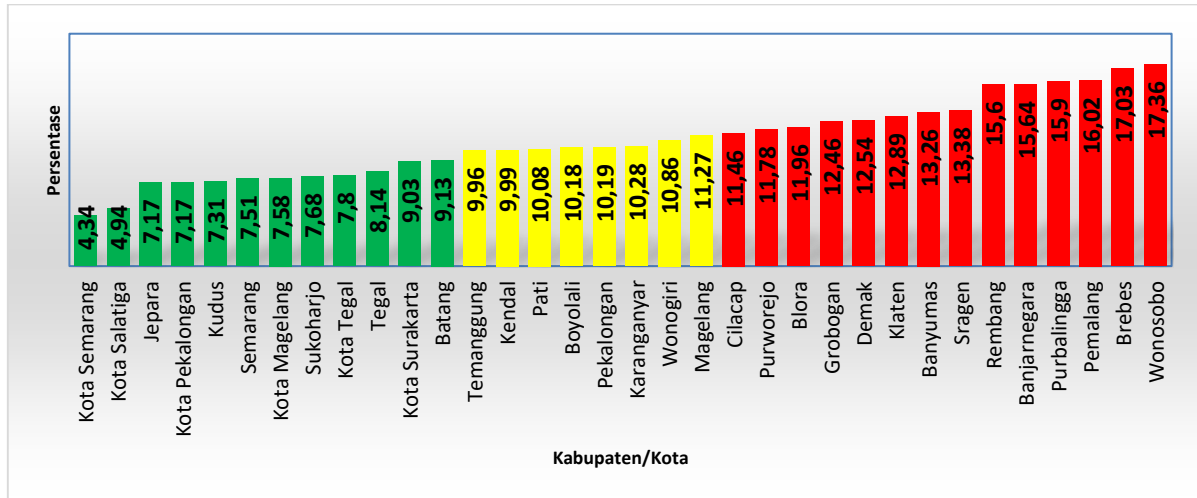
Jika dilihat perbandingan capaian persentase kemiskinan Kabupaten Magelang dengan provinsi dan nasional, selama 5 (lima) tahun terakhir indikator kemiskinan, khususnya persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun secara umum mengalami kenaikan dengan adanya pandemi *Covid-19*. Pada periode Maret tahun 2020, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,41%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,78 %).

Persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2016-2019 mengalami tren penurunan, tetapi kembali mengalami kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2020. Demikian juga yang terjadi pada capaian provinsi dan nasional tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan, baik yang terjadi di Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional merupakan hasil survei BPS yang dilakukan pada bulan Maret 2020, Hasil survei menunjukkan data kemiskinan di level makro. Meskipun kasus *Covid-19* pertama di Indonesia baru terjadi pada awal Maret, tetapi tekanan terhadap perekonomian pada Kuartal I 2020 sudah sangat kuat :

1. Tekanan di sektor produksi akibat ketergantungan industri pada bahan baku impor dan turunnya ekspor. Yang sudah dirasakan sejak Januari 2020, dan perlahan diikuti dengan rasionalisasi jumlah tenaga kerja.
2. Terjadi perubahan ekspektasi masyarakat menghadapi ketidakpastian pandemi *Covid-19*, terutama dengan menahan spending dan mengatur saving.
3. Terjadi pembatasan kegiatan masyarakat.

Proses circular tersebut menyebabkan adanya peningkatan persentase angka kemiskinan baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada Maret 2020 cukup besar, meskipun penyebaran (outbreak)

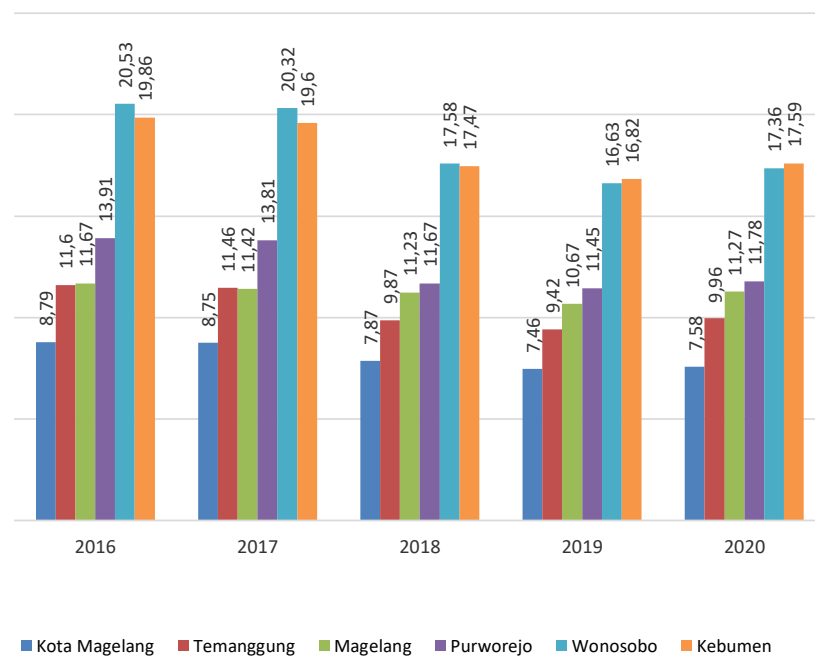
Covid-19 sendiri belum luas. Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan diantara 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota lainnya di Jawa Tengah, bisa dilihat posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi 20, dan ditunjukkan warna kuning. Artinya persentase kemiskinan Kabupaten Magelang masih berada di bawah angka kemiskinan propinsi, tetapi diatas nasional. Selengkapnya bisa dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2020

Gambar 2.17
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2020)

Jika dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2020 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dan ditunjukkan warna hijau. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.18
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota

di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu hampir semua meningkat cukup signifikan pada Tahun 2020, sekitar 0,40-0,60 dibandingkan capaian tahun 2020. Peningkatan angka kemiskinan di atas jelas diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia mulai awal tahun 2020.

Pandemi virus corona yang terjadi pada tahun 2020 memukul perekonomian seluruh dunia termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang hanya dalam waktu beberapa bulan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan pada periode September 2019 hingga Maret 2020 antara lain: terjadinya perlambatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I 2020. Selain itu, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 yang mencapai 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus *Covid-19* pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020.

Selain itu, pada periode September 2019–Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78 persen), daging ayam ras (5,53 persen), minyak goreng (7,06 persen), gula pasir (13,35 persen), dan telur ayam ras (11,10 persen). Meski rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019–Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan yang sebesar 3,20 persen. Selain itu pada Maret 2019, hasil dari pendataan Susenas BPS menunjukkan penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang. Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* dapat memutarbalikan tren penurunan angka kemiskinan dalam 5 (lima) tahun terakhir, selama 5 (lima) tahun terakhir, yang sebelumnya pada angka 2,75% atau rata-rata 0,55% setiap tahunnya pada periode 2015-2019, namun dengan adanya pandemi *Covid-19* pada Tahun 2020, selama lima tahun terakhir, 2016-2020 penurunan angka kemiskinan menjadi melambat, yaitu sebesar 1,4%, atau 0,28% setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan, dari 137.450 jiwa pada Tahun 2019, menjadi 146.340 jiwa pada Tahun 2020, atau mengalami penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 8.890 jiwa.

Diperkirakan pada tahun 2022 masih akan terjadi perlambatan penurunan penduduk miskin di Kabupaten Magelang, mengingat adanya potensi masyarakat yang rentan miskin/ hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Adanya PHK masal dan kelesuan beberapa sektor ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akan menjadi faktor utama penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun

2022 diperkirakan target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,65% tidak akan tercapai. Guna menjaga jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui refocusing belanja dalam APBD 2022 untuk diarahkan mengatasi dampak *Covid-19*, antara lain melalui strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang difokuskan untuk warga yang langsung terdampak pandemi *Covid-19*. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat *Covid-19*. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat diluar data DTKS yang terdampak *Covid-19* baik langsung ataupun tidak langsung.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada 2020 IPM Kabupaten Magelang mencapai 69,87 mengalami kenaikan sebesar 2,02 dari tahun 2016 yang sebesar 67,85 dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,51. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

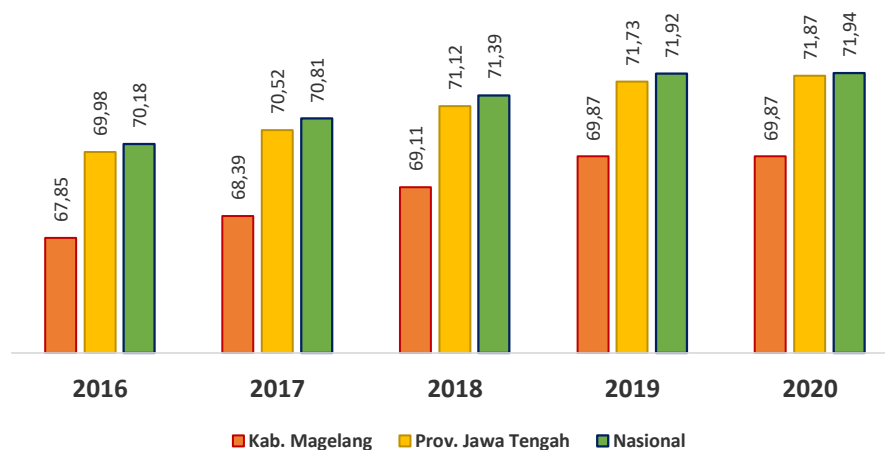
Tabel 2.26

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,33	73,39	73,47	73,56	73,72
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,15	12,47	12,48	12,53	12,54
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,40	7,41	7,57	7,77	7,78
Pengeluaran Riil Per Kapita	Ribu Rp	8.501	8.627	9.025	9.387	9.301

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2021

IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah (71,87) maupun Nasional (71,92). Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.19

Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota

di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Eks Karesidenan Kedu Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Purworejo	70,66	71,31	71,87	72,50	72,68
Kabupaten Wonosobo	66,19	66,89	67,81	68,27	68,22
Kabupaten Magelang	67,85	68,39	69,11	69,87	69,87
Kabupaten Temanggung	67,6	68,34	68,83	69,56	69,57
Kota Magelang	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2021

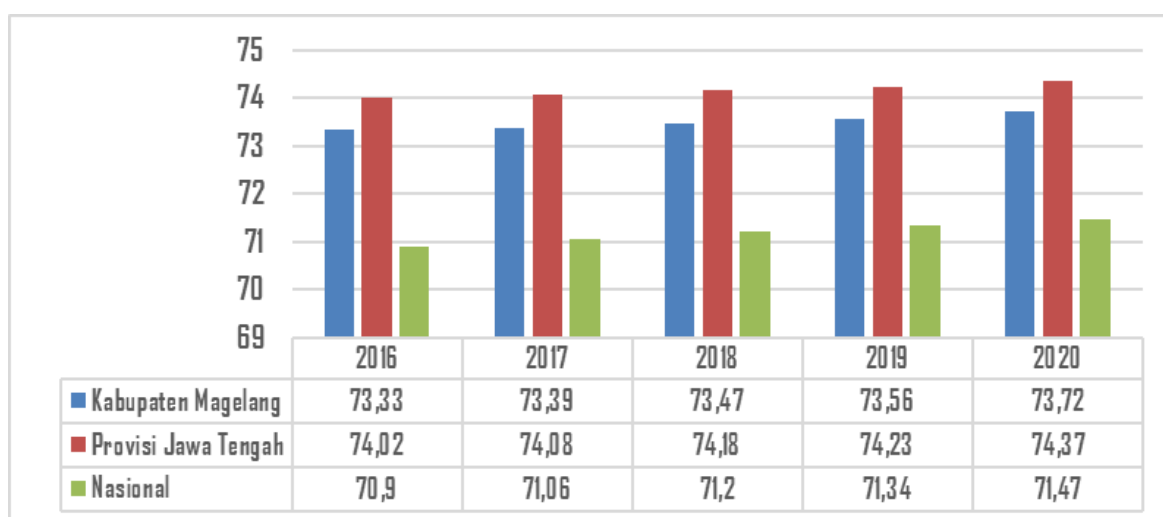
IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran, menggunakan rumus sebagai berikut.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

1. Indeks Kesehatan :

- Umur Harapan Hidup (UHH)

Pada tahun 2020 UHH Kabupaten Magelang mencapai 73,72 mengalami kenaikan sebesar 0,39 dari tahun 2016 yang sebesar 73,33. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



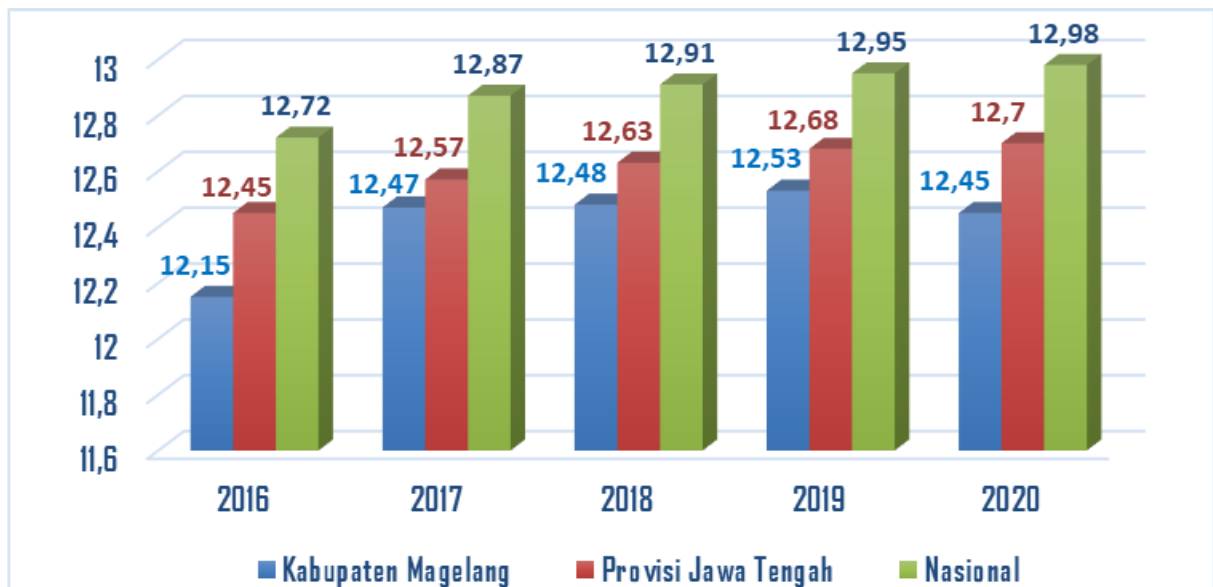
Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.20
Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

2. Indeks Pendidikan

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sebesar 12,54. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,54 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2016 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,15 (2016) menjadi 12,45 (2020). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.



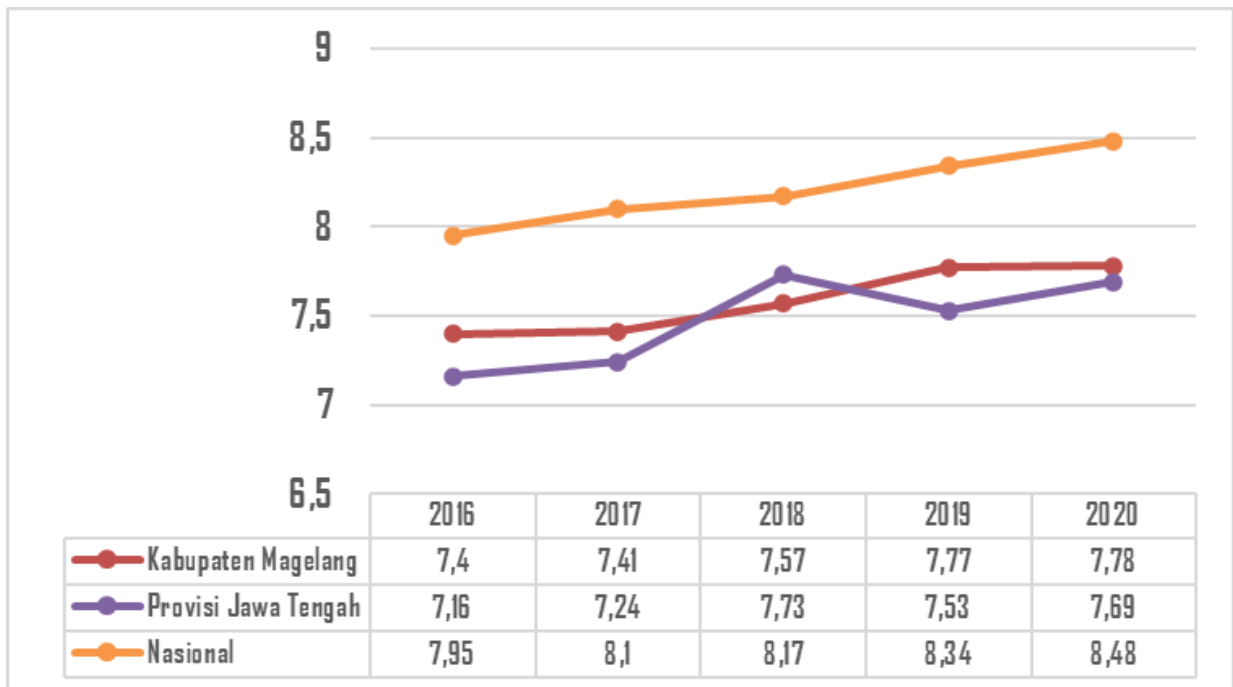
Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.21

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2016-2020

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2020 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,78 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,78 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.22

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

3. Indeks Pengeluaran

- Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan

Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 pengeluaran riil per kapita Kab. Magelang meningkat 14,73%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 3,68% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 2,95% per tahun nasional 2,83% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah.

Tabel 2.28

Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	8.501	8.627	9.025	9.387	9.301
Provinsi Jawa Tengah	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930
Nasional	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

2.2.7 Angka Partisipasi Kasar

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Perkembangan APK Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar PAUD	60,27	62,64	64,79	62,73	64,84
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,69	105,87	106,76	105,30	99,38
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	82,40	88,38	91,67	91,60	92,18
Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	82,12	85,63	87,74	87,64	81,63

Sumber: Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

APK jenjang SD tahun 2016-2019 telah mencapai 100%, bahkan melampaui. Namun untuk jenjang SMP sederajat APK belum mencapai 100%. Besaran APK tidak sampai 100 menunjukkan masih ada anak yang seharusnya sekolah ternyata tidak sekolah. Hal ini secara umum menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan.

2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Nilai ideal APM adalah 100%. Adapun capaian APM di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	89,70	92,66	94,78	98,97	90,05
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	62,78	67,76	71,48	78,02	69,14
Angka Partisipasi Murni	76,24	80,21	88,18	81,42	79,60

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

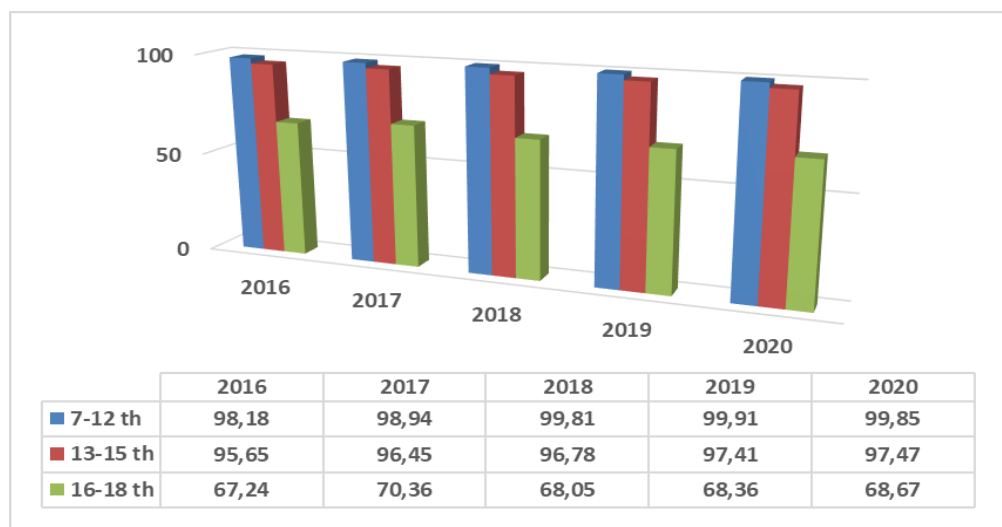
APM jenjang SD dan SMP di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, dan belum mencapai angka 100%, serta untuk jenjang SMP masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang belum optimal.

2.2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka ideal APS adalah 100%.

APS Kabupaten Magelang pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan

mudah diakses oleh masyarakat. APS Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun menunjukkan trend yang fluktuatif, namun masih dibawah 100%, sehingga masih perlu ditingkatkan. APS Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.23

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Apabila dibandingkan dengan APS tingkat provinsi dan nasional, APS Kabupaten Magelang kelompok usia 7-12 tahun pada tahun 2020 lebih tinggi dari APS nasional dan lebih rendah dari APS Provinsi. Untuk kelompok usia 13-15 tahun APS Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada APS Provinsi dan APS Nasional. Dan untuk kelompok umur 16-18 tahun APS Kabupaten Magelang lebih rendah dari APS Provinsi dan Nasional. Berarti secara umum penduduk Kabupaten Magelang yang mengakses Pendidikan Menengah Atas (SMA sederajat) lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.31

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2016-2020

No	Tahun	7-12 TAHUN			13-15 TAHUN			16-18 TAHUN		
		Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas	Kab	Prov	Nas
1	2016	98,18	99,58	98,98	95,65	95,41	94,79	67,24	67,95	70,68
2	2017	98,94	99,62	99,08	96,45	95,48	94,98	70,36	68,48	71,20
3	2018	99,81	99,76	99,11	96,78	95,48	95,23	68,05	69,02	71,82
4	2019	99,91	99,76	99,17	97,41	96,11	95,43	68,36	69,65	71,92
5	2020	99,85	99,99	99,21	97,47	96,70	95,52	68,67	74,15	71,44

Sumber: BPS Pusat dan BPS Kabupaten Magelang, 2021

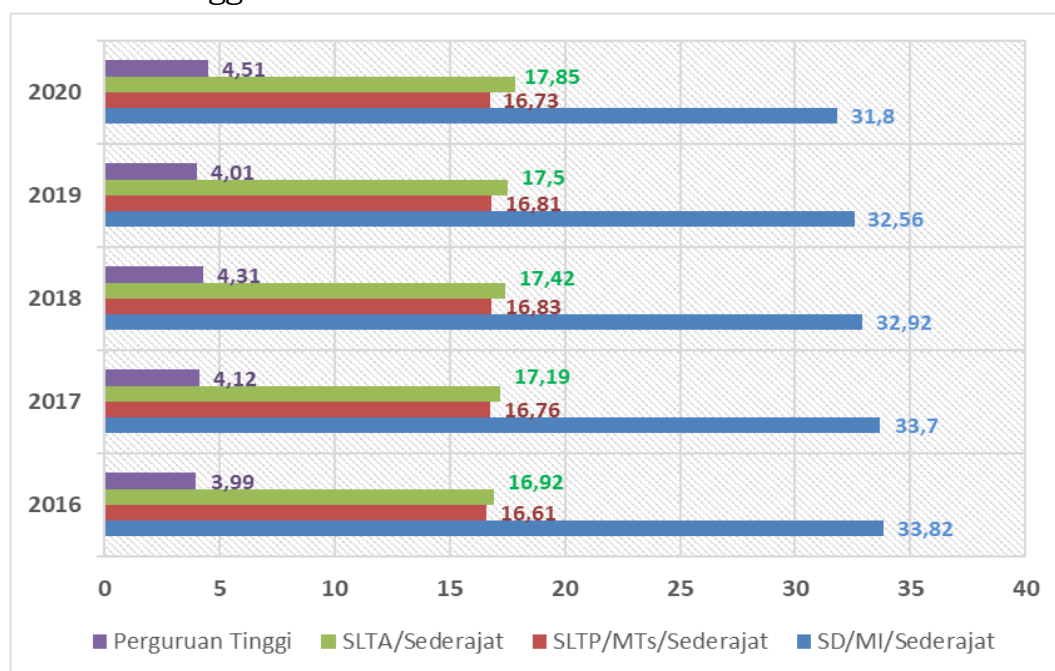
Jenjang pendidikan Dasar yang terdiri dari SD sederajat dan SMP sederajat menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sedangkan jenjang SMA sederajat menjadi kewenangan Provinsi. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka rata-rata APS (SD sederajat dan SMP sederajat) di Kabupaten Magelang menjadi indikator kinerja urusan pendidikan.

APS ini juga menjadi indikator dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pendidikan. APS sangat berkaitan dengan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT), pada tahun 2020 jumlah ATS di Kabupaten Magelang usia 7-12 tahun sebanyak 2.703 anak, ATS usia 13-15 tahun sebanyak 5.695 dan ATS usia 16-18 tahun sebanyak 16.183 anak. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang. Program yang dilaksanakan untuk menangani ATS ini antara lain adalah dengan Pengembalian ATS ke sekolah (Non Formal).

2.2.10 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah angka yang memperlihatkan penduduk yang telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini mampu memperlihatkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Persentase tertinggi pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Magelang terdapat pada jenjang pendidikan SD. Hal tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk Magelang hanya tamat pada jenjang pendidikan SD. Untuk perkembangan APT SD/MI/Sederajat secara umum mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Secara umum pada tahun 2020 APT yang mengalami penurunan adalah SD dan SLTP, dan yang mengalami kenaikan adalah APT SLTA/Sederajat dan Perguruan Tinggi. Hal ini berarti semakin banyak penduduk Kabupaten Magelang yang mengenyam pendidikan lebih tinggi.



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.24

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

2.2.11 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Secara umum IPG Kabupaten Magelang mengalami tren yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,23 tahun 2018, namun mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, dan naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020. Walaupun mengalami penurunan, tetapi capaian pembangunan gender di Kabupaten Magelang masih lebih baik dibandingkan dengan nasional.

Tabel 2.32

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	NA	91,95	92,23	91,78	91,81
Provinsi Jawa Tengah	92,22	91,94	91,95	91,89	92,19
Nasional	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indeks pembangunan gender di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 91,78, tetapi naik kembali di tahun 2020 menjadi 91,81. Capaian IPG Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Perbup 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan.

Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).

2.2.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Berdasarkan data tahun 2016-2020, perkembangan angka IDG di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, adapun capaian terakhir tahun 2020 sebesar 69,65. Perbandingan capaian IDG Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini..

Tabel 2.33

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Magelang	NA	62,43	71,21	67,74	69,65
Provinsi Jawa Tengah	74,89	75,10	74,03	72,18	71,73
Nasional	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

Pada tahun 2020, capaian IDG Kabupaten Magelang sebesar 69,65, mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2019, sebesar 67,74. Jika dibandingkan capaian propinsi dan nasional, IDG Kabupaten Magelang Tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

2.2.13 Kebudayaan

Pencapaian pembangunan seni budaya dapat dilihat berdasarkan indikator jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang diinventarisasi, serta jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir (2016- 2020) bersifat fluktuatif, namun menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 ke 2019. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan, dikarenakan adanya pemberlakuan aturan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan pengalihan alokasi anggaran untuk penanganan *covid-19*.

Tabel 2.34

Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	81	38	126	167	0
2.	Jumlah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	25	25	25	0
3.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang diinventarisasi	698	922	949	949	1019
4.	Jumlah Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	10	10	10	10	0

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang Tahun 2021

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pada Tahun 2020, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas makanan sebesar 62.18% pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah; 54.46% pada kelompok pengeluaran 40% tengah; dan 36.18% pada kelompok 20 % atas. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk komoditas bukan makanan sebesar 37.82% pada kelompok pengeluaran 40% terbawah, 45.54% pada kelompok pengeluaran 40% tengah dan 63.82% pada kelompok 20% atas..

Tabel 2.35

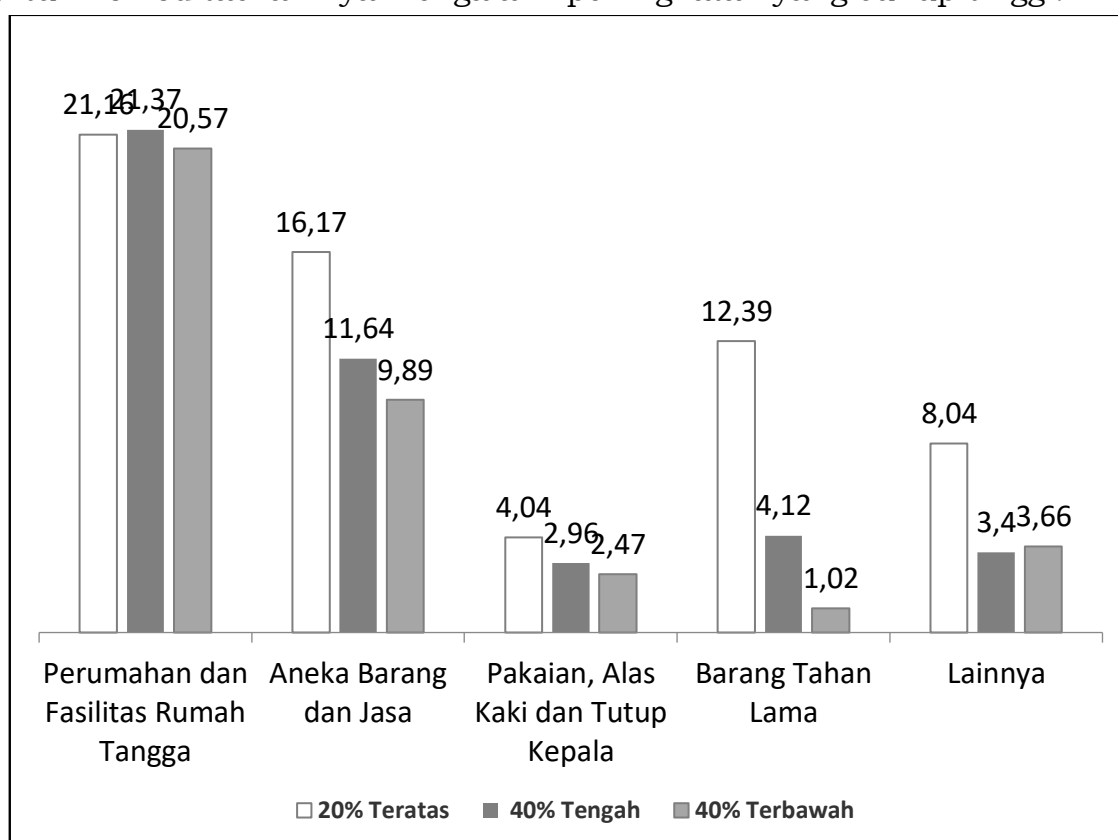
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020

Tahun	Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
		Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
		40%	40%	20%	40%	40%	20%
		Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
2018	Makanan	230.884	408.387	693.563	62,40	56,51	38,19
	Bukan Makanan	139.152	314.316	1.122.312	37,60	43,49	61,81
2019	Makanan	239,591	439,337	688,392	60.85	53.99	33.97
	Bukan Makanan	154,125	374,359	1,337,942	39.15	46.01	66.03

Tahun	Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan					
		Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
		40%	40%	20%	40%	40%	20%
		Terbawah	Tengah	Teratas	Terbawah	Tengah	Teratas
2020	Makanan	263,603	447,912	744,490	62.18	54.46	36.18
	Bukan Makanan	160,329	374,614	1,313,222	37.82	45.54	63.82

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Tabel di atas menunjukkan pengeluaran non makanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan pendekatan dengan pengeluaran. Dari gambar terlihat bahwa semua komoditas pengeluaran non makanan mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya pengeluaran penduduk, untuk komoditas perumahan cenderung persentasenya sama untuk semua kelompok pengeluaran, sedangkan untuk komoditas lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Gambar 2.25

Persentase Pengeluaran Perkapita Komoditas Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran (Rp/kapita) Tahun 2020

b. Produktivitas Total Daerah

Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 Produktivitas total daerah Kabupaten Magelang masing-masing sektor lapangan usaha utama berkembang fluktuatif. Sedangkan antara tahun 2019–2020, Produktivitas total daerah Kabupaten cenderung turun kecuali untuk sektor manufaktur naik dari 54,16 % menjadi 58,29 %.

Tabel 2.36

Produktivitas Total Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Produktivitas Total Daerah (Juta Rp)	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,09	25,12	30,08	33,12	29,69
Industri Pengolahan	64,43	47,64	46,14	54,16	58,29
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	41,28	25,64	32,35		
Jasa Kemasyarakatan	28,65	42,68	51,85	46,15	44,87
Lain-lain	455,38	87,02	93,34		

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2021

c. Nilai Tukar Petani (NTP)

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Magelang berkisar 103,05. Pada kondisi ini harga produksi pertanian lebih besar daripada kenaikan harga konsumsi, atau dengan kata lain pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Hal ini berarti bahwa kondisi petani di Kabupaten Magelang sudah cukup sejahtera karena sudah mencapai lebih dari 100.

Tabel 2.37

Nilai Tukar Petani Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017*	2018	2019*	2020*
1	Indeks yang diterima petani (It)	%	145,98	128,45	134,14	142,08	108,18
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	%	137,72	127,95	130,45	136,26	106,27
3	NTP	%	105,99	100,40	102,83	104,26	101,79

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Ketercapaian Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan selama Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	NA	70,95	71,93	71,18	71,30
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	NA	54,00	56,55	61,43	61,90
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	NA	62,47	64,24	66,30	66,60

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponen cakupan pembangunan infrastruktur terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan

lingkungan hidup. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah dari tahun 2017 – 2020 menjadi tolak ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan. Namun mulai tahun 2021, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menjadi tolak ukur kinerja dari tiga urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perhubungan, dan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2017 – 2020, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Namun mulai tahun 2021, komponen komposit cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menjadi 3 (tiga) yaitu cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, Cakupan Penyelenggaran Layanan Perhubungan dan cakupan hunian layak dan berkualitas. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, mapupun cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu :

1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Tahun 2017 – 2020, cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 11 komponen pembentuk yaitu : Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan; persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air; cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik; persentase terbangunnya landmark; cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik; cakupan layanan air minum; cakupan layanan sanitasi; cakupan sarana prasarana ke PU-an; cakupan layanan jasa konstruksi; persentase dokumen rekomendasi perijinan; Persentase kesesuaian tata ruang; dan cakupan kinerja pertanahan. Namun mulai tahun 2021, komponen pembentuk indikator kinerja cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang hanya memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sda, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaran penataan ruang.

2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan

Dari tahun 2017-2021 kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur : persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan; persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas; persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan persentase peningkatan angkutan umum layak jalan. Namun mulai tahun 2021, kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan komposit persentase layanan penyelenggaraan angkutan dan persentase keamanan dan keselamatan lalu lintas.

3) Cakupan hunian layak dan berkualitas

Cakupan hunian layak dan berkualitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman mulai tahun 2021. Cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki 2 komponen/unsur pembentuk, yaitu : Persentase penanganan Rumah Tidal Layak Huni dan Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh.

Dibawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2016-2020.

Tabel 2.39

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	NA	53,06	57,83	62,80	69,90
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	NA	54,93	55,27	60,05	53,89
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	NA	54,00	56,55	61,43	61,90

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2021

c. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Indikator ketaatan terhadap RTRW merupakan hasil perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukannya, namun indikator ini belum didukung oleh ketersediaan data, sehingga digantikan dengan pembahasan mengenai luas wilayah lindung dan budidaya di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.40
Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Magelang

No.	Kecamatan	Luas Kawasan Lindung (Ha)		
		Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya	Kaw. Perlindungan Setempat
1	Salaman	-	0,02	2.557,87
2	Borobudur	-	-	4.132,94
3	Ngluwar	-	-	1.810,98
4	Salam	-	-	2.336,49
5	Srumbung	-	17,13	3.012,54
6	Dukun	-	-	3.231,89
7	Muntilan	-	-	4.828,23
8	Mungkid	-	-	3.546,00
9	Sawangan	-	-	3.579,05
10	Candimulyo	-	0,04	4.338,49
11	Mertoyudan	35,59	-	4.011,89
12	Tempuran	-	-	3.435,01
13	Kajoran	516,30	-	2.867,77
14	Kaliangkrik	501,15	-	3.609,85
15	Bandongan	-	-	1.024,87
16	Windusari	461,25	-	2.854,02
17	Secang	-	-	4.523,48
18	Tegalrejo	-	-	3.105,16
19	Pakis	-	-	5.180,82
20	Grabag	100,24	-	3.500,57
21	Ngablak	232,49	0,01	1.930,10

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

Ketaatan terhadap rencana tata ruang secara makro terindikasi dengan masih tetapnya luasan yang dialokasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030. Adapun kawasan lindung dialokasikan seluas kurang lebih 41.770,57 hektare dan kawasan budidaya dialokasikan seluas kurang lebih 66.802,43 hektare.

Kawasan budidaya di Kabupaten Magelang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi seluas kurang lebih 3.083 hektare, hutan rakyat seluas kurang lebih 2.919 hektare, kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 79.416 hektare, kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 337,09 hektare, kawasan perkebunan seluas kurang lebih 25.667 hektare, kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 19.751 hektare, serta kawasan peruntukan pertanian seluas kurang lebih 40.587 hektare.

Tabel 2.41
Luas Kawasan Budidaya di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Peruntukan Pertanian
1	Bandongan	178,38	32,40	197,90	-	659,07	834,16	1.965,25
2	Borobudur	-	-	466,00	-	2.435,19	1.274,41	1.674,93
3	Candimulyo	-	-	3,82	-	2.484,93	802,38	1.168,33

No	Kecamatan	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Perkebunan	Kawasan Peruntukkan Permukiman	Kawasan Peruntukkan Pertanian
4	Dukun	-	-		-	2.961,78	708,29	3.001,85
5	Grabag	176,69	765,78	74,29	-	3.168,95	1.327,19	3.037,54
6	Kajoran	981,41	550,05	471,64	-	3.017,04	1.108,36	3.241,75
7	Kaliangkrik	618,81	51,59	250,86	-	1.001,69	697,78	2.889,37
8	Mertoyudan	-	-	-	-	690,09	2.434,70	1.567,28
9	Mungkid	-	-	-	-	172,37	2.534,46	3.293,45
10	Muntilan	-	-	-	-	29,73	1.007,87	1.866,71
11	Ngablak	118,75	525,20	73,10	-	1.374,57	505,99	3.437,10
12	Ngluwar	-	-	0,22	-	194,64	622,66	2.660,26
13	Pakis	-	-	4,74	-	4.639,87	618,83	3.304,03
14	Salam	-	-	186,24	-	347,25	1.006,67	3.466,14
15	Salaman	186,58	3,26	496,62	170,26	4.420,84	1.259,36	2.708,62
16	Sawangan	-	-	396,77	-	2.706,82	698,46	3.958,24
17	Secang	-	-	28,36	-	1.239,42	1.450,16	3.546,14
18	Srumbung	-	-	-	-	3.331,54	819,81	3.477,53
19	Tegalrejo	-	-	3,68	-	971,14	985,79	1.782,13
20	Tempuran	661,49		244,29	167,60	1.547,02	1.033,71	1.914,18
21	Windusari	333,98	256,42	249,43	-	1.287,31	769,94	2.194,53

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030.

d. Luas Wilayah Produktif

Berdasarkan Lampiran Permendagri 86/2017, indikator luas wilayah produktif merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah produktif di Kabupaten Magelang diartikan sebagai luas wilayah pertanian produktif. Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, luas wilayah kawasan pertanian produktif dan luas seluruh wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang sama. Luas wilayah kawasan pertanian produktif meliputi 79.416 hektare, dan luas seluruh wilayah budidaya meliputi 92.449,52 hektare. Sehingga, dalam kurun waktu yang sama persentase luas wilayah pertanian produktif juga menunjukkan nilai yang konstan, yakni sebesar 85,902%.

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Magelang meliputi kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 36.848 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) hektare yang tersebar di seluruh kecamatan. Adapun kawasan pertanian lahan kering memiliki luas kurang lebih 42.568 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektare yang juga tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kabupaten Magelang. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering dikelola untuk mendukung suatu program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan seluas kurang lebih 42.070 (empat puluh dua ribu tujuh puluh) hektare.

Pada tahun 2020, luas wilayah Kabupaten Magelang didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah, yakni sebesar 51,42% dari keseluruhan wilayah kabupaten. Lahan pertanian bukan sawah menunjukkan luasan yang meningkat dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020. Luas lahan sawah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan penurunan dari 36.855 hektare menjadi 27.026 hektar. Lahan bukan pertanian di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 semakin meningkat.

Tabel 2.42

Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Peruntukan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A. Lahan Pertanian :		86.405	86.175	86.175	83.271	82.860
1. Lahan sawah	Ha	36.855	36.855	36.681	27.899	27.026
2. Lahan bukan sawah	Ha	49.550	49.550	49.494	55.372	55.834
B. Lahan Bukan Pertanian	Ha	22.168	22.168	22.398	25.302	25.713
Jumlah		108.573	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021;

e. Luas Wilayah Industri

Persentase Luas wilayah industri didapatkan dari perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan luas seluruh wilayah budidaya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, luas wilayah peruntukan industri dan luas wilayah budidaya di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan sebesar 337,091 hektare dan 92.449,52 hektare. Persentase luas wilayah industri di Kabupaten Magelang adalah 0,364%.

f. Luas Wilayah Perkotaan

Indikator luas wilayah perkotaan merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah wilayah perkotaan dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya. Sesuai dengan kesepakatan, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Magelang dituliskan sebagai luas wilayah permukiman perkotaan. Luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang menunjukkan luasan sebesar 8.875,48 hektare. Persentase luas wilayah permukiman perkotaan di Kabupaten Magelang mencapai 9,6%.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030, kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- a) perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- b) perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK); dan
- c) ibukota-ibukota kecamatan, meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan dan Candimulyo.

g. Luas Wilayah Rawan Bencana

Indikator luas wilayah rawan bencana merupakan salah satu indikator yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan data di Kabupaten Magelang. Indikator ini dapat dikatakan menggantikan indikator luas wilayah banjir dan indikator luas wilayah kekeringan dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Indikator luas wilayah rawan bencana terdiri atas wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api, serta wilayah rawan bencana gerakan tanah tinggi di Kabupaten Magelang.

Secara umum, 47,62% wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan bencana erupsi dan banjir lahar dingin gunung api. Kawasan-kawasan yang sering mengalami bencana alam, seperti erupsi dan banjir lahar dingin gunung api dapat ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana I, Kawasan Rawan Bencana II dan Kawasan Rawan Bencana III. Kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin gunung api di Kabupaten Magelang, meliputi 10 kecamatan, yaitu :

- a) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi terletak di Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid, dan
- b) kawasan rawan erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Sumbing terletak di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik dan Windusari.

Sebanyak 57,14% wilayah Kabupaten Magelang merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi meliputi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Bandongan dan Secang. Selain gerakan tanah tinggi, Kabupaten Magelang memiliki wilayah rawan gerakan tanah menengah yang terletak di Kecamatan Kajoran, Windusari, Tempuran, Borobudur, Salaman, Grabag, Ngablak, Pakis, Sawangan, Dukun, Srumbung, Bandongan, Tegalrejo, Candimulyo dan Secang; rawan gerakan tanah rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Ngablak, Sawangan, Dukun, Srumbung, Mungkid, Muntilan, Salam dan Ngluwar; dan rawan gerakan tanah sangat rendah yang terletak di Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan dan Secang.

h. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank pembangunan, dan bank pengkreditan rakyat.

Perkembangan jumlah bank di Kabupaten Magelang cenderung tetap, serta mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat sedikit. Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut

karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan, tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.43

Jenis dan Jumlah Bank di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	KC Bank Umum	Unit	7	7	7	7	7
2.	KCP Bank Umum	Unit	48	48	48	48	48
3.	KK Bank Umum	Unit	43	43	43	43	43
4.	KP BPR	Unit	12	12	12	12	12
5.	KC BPR	Unit	21	21	21	21	21
6.	KK BPR	Unit	39	39	39	39	39
	Jumlah	Unit	170	170	170	170	170

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2021

i. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Kabupaten Magelang ada dua jenis, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa berasal dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan BNI Life Insurance, PT. Sedangkan perusahaan asuransi umum adalah PT Asuransi Sinar Mas.

Tabel 2.44

Jenis dan Jumlah Asuransi di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Asuransi Jiwa	Unit	2	2	2	2	2
2.	Asuransi Umum	Unit	1	1	1	1	1
3.	Asuransi Kerugian	Unit	0	0	0	0	0
4.	Asuransi Lainnya	Unit	0	0	0	0	0
	Jumlah	Unit	3	3	3	3	3

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Magelang, 2021

j. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan daya tarik investasi suatu daerah terutama dibidang kuliner. Restoran juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi dibidang perdagangan yang juga dapat mendukung sektor pariwisata. Oleh karena itu, banyaknya restoran dan rumah makan dapat menjadi salah satu indikator perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Ada bermacam-macam jenis dan istilah restoran, antara lain restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sementara itu, pengusaha restoran dan rumah makan adalah penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu usaha pokok, seperti restoran di dalam hotel.

Dari tahun 2016 - 2020 jumlah usaha restoran rumah makan kelas A berjumlah 6 unit dan meningkat menjadi 10 unit pada tahun 2019, sedangkan rumah makan kelas D sejumlah 25 unit pada tahun 2015 sampai dengan 2018 dan meningkat menjadi 32 unit pada tahun 2019. Secara umum pada tahun 2019 jumlah semua kelas rumah makan mengalami peningkatan karena di adanya *updating* data.

Tabel 2.45
Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Jenis Restoran	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha restoran golongan tertinggi	Unit	3	3	3	3	3
2	Usaha restoran golongan menengah	Unit	0	0	0	0	0
3	Usaha restoran golongan terendah	Unit	0	0	0	0	0
4	Usaha rumah makan kelas A	Unit	6	6	6	10	10
5	Usaha rumah makan kelas B	Unit	28	28	28	57	57
6	Usaha rumah makan kelas C	Unit	2	2	2	17	17
7	Usaha rumah makan kelas D	Unit	25	25	25	32	32

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2021

k. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel merupakan salah satu fasilitas penunjang pariwisata pada suatu wilayah. Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut dan kebutuhan akomodasi penginapan/hotel.

Tabel 2.46
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel Bintang 5	Unit	1	1	1	3	3
2	Hotel Bintang 4	Unit	1	1	1	1	1
3	Hotel Bintang 3	Unit	3	3	3	3	3
4	Hotel Bintang 2	Unit	-	-	-	-	-
5	Hotel Bintang 1	Unit	-	-	-	-	-
6	Hotel Non Bintang/Melati	Unit	32	32	32	52	52
7	Homestay	Unit	243	243	243	389	389
Jumlah		Unit	189	190	280	448	448

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2021

Kabupaten Magelang yang memiliki daya tarik pariwisata yang cukup besar, mampu menarik investasi berupa penyediaan akomodasi hotel. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Magelang dari tahun 2016 hingga 2020 belum mengalami peningkatan terutama hotel bintang 1 sampai hotel bintang 4. Jumlah terbanyak adalah hotel jenis *homestay* yang hingga tahun 2020 mencapai 389 unit. Sedangkan jumlah hotel non bintang/melati mengalami peningkatan 20 unit selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah *homestay* dapat menjadi salah satu indikasi adanya peningkatan permintaan penyedia akomodasi tersebut dari wisatawan dan menjadi peluang untuk mengembangkan perekonomian lokal.

2.3.3.Fokus Iklim Berinvestasi

a. Pertumbuhan Investasi

Realisasi investasi PMDN dan PMA pada periode tahun 2016-2019 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar Rp 490.490 juta pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 meningkat tajam menjadi Rp 2.023.303 juta. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Namun pada tahun 2020 karena dampak wabah covid realisasi investasi PMDN dan PMA turun drastis menjadi Rp. 165.061 juta. Pertumbuhan investasi (PMA dan PMDN) Kabupaten Magelang Tahun 2016 -2020 sebagai berikut.

Tabel 2.47

Pertumbuhan investasi Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Nilai Investasi	Juta Rp	490.490	1.030.689	1.907.516	2.023.303	165.061
2	Pertumbuhan Investasi	%	110.13	91.75	21,71	6,07	-91,84

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2021

b. Angka Kriminalitas

Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan kondisi ini dengan baik, agar dapat memberikan jaminan bagi keamanan investasi. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada 5 tahun terakhir. Berdasarkan tabel berikut ini, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang memiliki angka yang cenderung fluktuatif. Data terakhir sampai triwulan 3 tahun 2020 capaian angka kriminalitas sebesar 2,5, mengalami kenaikan dibandingkan capaian 2019 sebesar 2,04.

Tabel 2.48

Angka Kriminalitas tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Selesai	Kasus	186	248	259	264	20*
2.	Lapor	laporan	252	339	392	377	20*
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.300.195
4.	Rasio	%	73.30	73.16	66.10	70,03	100*
5.	Angka Kriminalitas		2.02	2.65	2.60	2,04	2,5*

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2021

Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan sebuah instrumen penting dalam menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Indikator lama proses perizinan dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan dalam satuan hari. Kabupaten Magelang memiliki kurang lebih 40 jenis perizinan, namun hanya beberapa perizinan saja yang memiliki banyak permintaan.

Tabel 2.49

Lama Proses Perizinan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendaftaran penanaman Modal		1	1	1	1*	NA
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3*	NA
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	Hari	3	3	3	3*	NA
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	Hari	5	5	5	5*	NA
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Hari	3	3	3	1*	1
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Hari	3	3	3	1*	NA
7	Izin Usaha Industri (IUI)		14	14	14	1	1
8	Izin Perluasan Industri	Hari	7	7	7	*	1
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Hari	14	14	14		1
10	Izin Usaha Pariwisata	Hari	3	3	3	7	1

No	Jenis Perizinan	Lama Penyelesaian					
		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
11	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Hari	15	15	15	15	1
12	Izin Usaha Penggilingan Padi	Hari	4	4	4	5	1
13	Izin Usaha Angkutan Jalan	Hari	14	14	14		NA
14	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet	Hari	NA	NA	NA		NA
15	Izin Usaha Peternakan	Hari	14	14	14		1
16	Izin Usaha Perikanan	Hari					1
17	Izin Usaha Pertambangan	Hari				Ijin di Prov	1
18	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu	Hari				Ijin di Prov	1
19	Izin Perluasan	Hari	7	7			1
20	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	Hari	7	7			NA
21	Izin Usaha Perubahan	Hari	5	5			NA
22	Izin Lokasi	Hari	18	18		30	30
23	Izin Pemanfaatan Tanah	Hari	18	18		30	30
24	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Hari	18	18		30	30
25	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	Hari	14	14			NA
26	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	Hari	14	14	14	14	14
28	Izin Pemasangan Reklame	Hari	2		2	Uk besar 14 hari; uku kecil 5 hari	14
29	Izin Trayek	Hari		1086	976		1
30	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL	Hari					5
	UKL-UPL	Hari					NA
	SPL	Hari					NA
31	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan	Hari				9 hari, operasional puskesmas 14 hari	NA
32	Izin Riset/Penelitian	Hari	1	1	1	1	

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Magelang, 2021

Ket:*) menggunakan sistem OSS

Pada tahun 2020 waktu penyelesaian perizinan terlama adalah 30 hari, yaitu perizinan untuk jenis izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, dan perubahan penggunaan tanah. Selain itu Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB), Izin Pemasangan Reklame memakan waktu lama, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. Target yang diharapkan dari lamanya proses perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah paling lama 9 hari. Beberapa jenis perizinan sudah dapat

diusahakan kurang dari 9 hari kerja, namun beberapa lainnya masih lebih dari 9 hari. Perbedaan lamanya proses perizinan dapat disebabkan banyak sedikitnya jumlah berkas atau persyaratan yang perlu dinilai kelayakannya.

d. Jumlah dan Macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis Pajak Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Sedangkan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Magelang, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang meliputi jasa pelayanan umum, jasa komersil yang biasanya disediakan oleh pihak swasta, dan perizinan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Dari sumber pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut realisasi Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020.

Tabel 2.50
Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	Rp	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532
Retribusi Daerah	Rp	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

e. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *good will* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan kedalam perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum

yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian.

Peraturan Daerah terkait perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan;
5. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
6. Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, PST Perbelanjaan, dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang;
8. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Pada tahun 2018 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 292 desa dari 367 Desa (79,56%), pada tahun 2019 meningkat menjadi 328 Desa (89,37%) dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 350 (95,37%) Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.51

Status Desa Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020

Status Desa	2018	2019	2020
Sangat Tertinggal	0	0	0
Tertinggal	75	39	17
Berkembang	216	225	231
Maju	71	92	106
Mandiri	5	11	13
Total	367	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2021

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat. Berkaitan dengan desa kategori tertib penyelenggaraan keuangan desa, dari 367 desa di Kabupaten Magelang, sejak tahun 2018-2020 semua desa sudah tertib dalam penyelenggaraan keuangan desa. Kapasitas/ partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.52

Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PKK Aktif	394	394	394	394	394
2.	Jumlah LPMD Aktif	367	367	367	367	367
3.	Jumlah PKK	394	394	394	394	394
4.	Jumlah LPMD	367	367	367	367	367

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2021

Pendirian BUMDes merupakan salah satu program yang diberi perhatian lebih dan dijadikan unggulan oleh Kemendes dalam upaya menjadikan Desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam pasal 4 bahwa setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Hal ini menjadi penting bagi desa untuk memiliki BUMDES ketika Desa memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat desa karena bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sampai tahun 2020, sudah terbentuk 188 Bumdes. Adapun status ke 188 Bumdes tersebut adalah aktif (100%), mengalami kenaikan yang cukup mengembirakan dibandingkan tahun 2016 yang aktif hanya 31,91%. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.53

Persentase Bumdes Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2016	60/188	31,91
2	2017	118/188	62,76
3	2018	168/188	89,36
4	2019	188/188	100
5	2020	188/188	100

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2021

Berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan, Kabupaten Magelang sudah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan Kecamatan Ngluwar;
- b. Tahun 2018 Penetapan Kawasan Pedesaan berbasis pengembangan pertanian di Kecamatan Ngluwar;
- c. Tahun 2019 Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Dukun dan Ngablak;
- d. Tahun 2020 :
 - d.1. Fasilitasi Pembentukan Kawasan Pedesaan di Kecamatan Borobudur;
 - d.2. Penetapan Kawasan pedesaan Kecamatan Dukun, Ngablak dan Borobudur;
 - d.3. Penetapan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan;
 - d.4. Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Kecamatan Ngluwar, Dukun, Borobudur dan Ngablak (Kecamatan Ngluwar ada revisi Lokasi).

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs Nasional) hingga ke tingkat desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 ini dilatarbelakangi pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs Desa maka diharapkan mampu memberi hasil berupa arah perencanaan pembangunan desa yang berbasis kondisi faktual (*evidence*) di desa tersebut, serta memudahkan intervensi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan swasta untuk mendukung pembangunan desa.

2.3.4.Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

- a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Masyarakat merupakan obyek dan subyek pembangunan. Dalam pembahasan indikator rasio lulusan S1/S2/S3, masyarakat ditempatkan

sebagai subyek pembangunan. Semakin tinggi rasio lulusan perguruan tinggi menunjukkan daerah tersebut mempunyai potensi sumberdaya manusia yang berkualitas untuk menggerakkan roda pembangunan. Ketersediaan kualitas SDM yang tinggi membuat daerah mempunyai daya saing di sektor SDM. Rasio lulusan S1/S2/S3 ini dihitung dengan rumus formula jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi dengan jumlah penduduk dan dikalikan dengan 10.000.

Tabel 2.54

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan S1, S2, dan S3	Jiwa	32.299	33.979	36.293	37.083	41.416
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.278.624	1.283.405	1.290.115	1.295.019	1.300.195
3	Rasio Lulusan S1, S2, dan S3		252,06	264,76	281,32	286,35	304,31
4	Persentase Lulusan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah penduduk	%	2,52	2,65	2,81	2,86	3,04

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase jumlah lulusan S1/S2/S3 selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 41.416 jiwa penduduk pada tahun 2020 sudah menamatkan perguruan tinggi atau 3,04 % dari total jumlah penduduk. Persentase jumlah lulusan perguruan tinggi selama periode tahun 2016 – 2020 selalu meningkat diiringi dengan peningkatan jumlah lulusan.

Ketersediaan SDM yang berkualitas mutlak diperlukan oleh Kabupaten Magelang untuk mengolah potensi sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah daerah harus mempunyai program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga perguruan tinggi ataupun bentuk subsidi lainnya sehingga memudahkan anak sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk diharapkan mampu menjadi gerbang perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita.

b. Rasio Ketergantungan

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 897.320 penduduk usia produktif (69,01%) dan 402.875 jiwa penduduk usia nonproduktif (30,99%). Dengan demikian, angka rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang tahun 2020 sebesar 44,90 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang telah mengalami bonus demografi, di mana jumlah

penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dalam memanfaatkan peluang bonus demografi dengan baik, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang di antaranya untuk menciptakan kesempatan kerja dan atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2018, TPT Kabupaten Magelang sebesar 2,91 dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,51.

Tabel 2.55
Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk usia < 15 tahun + usia > 64 tahun	Jiwa	391.874	384.921	394.068	400.725	402.875
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	886.750	898.484	895.609	894.294	897.320
3	Rasio Ketergantungan Kabupaten Magelang	%	44,19	42,84	44,00	44,80	44,90
4	Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah	%	48,81	47,51	47,63	47,7	NA
5	Rasio Ketergantungan Nasional	%	48,30	48,10	47,06	47,7	NA

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

2.3.5. Fokus Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

a. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dan pada tahun 2019 mendapat nilai 62,78.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Salah satu syarat *good governance* adalah akuntabilitas, di samping transparansi dan partisipasi. Dalam 8 (delapan) area perubahan birokrasi,

yaitu mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi salah satu bagian pencapaian reformasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 (CC), tahun 2019 sebesar 60.10 (B). Untuk mendukung meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan (AKIP), Sekretariat Daerah menetapkan indikator sasaran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

Indikator ini digunakan karena kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dengan 3 (tiga) komponen pembentuk yaitu : Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan, Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, dan Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Tabel 2.56

Produk Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peraturan Daerah	21	21	13	9	12
2	Jumlah Peraturan Bupati	84	49	48	51	61
3	Jumlah Keputusan Bupati	720	589	523	444	459
4	Jumlah Kebijakan (PERDA) yang seharusnya ada	25	26	22	31	20

Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2021

2. Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan, merupakan indikator yang disusun untuk mengukur kinerja sasaran perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan

Indikator tersebut merupakan cerminan dari tiga program yaitu : kebijakan perekonomian dan pembangunan, penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan Tingkat Kematangan UKPBJ.

Tingkatan kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) Domain yaitu Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi, dan 9 (sembilan) Variabel yaitu Variabel Pengorganisasian, Variabel Tugas dan Fungsi, Variabel Perencanaan, Variabel Pengembangan, Variabel Manajemen Pengadaan, Variabel Manajemen Penyedia, Variabel Manajemen

Kinerja, Variabel Manajemen Risiko, dan Variabel Sistem Informasi. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ditentukan sebagai berikut:

- a. Kriteria UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PK-PBJ) direfleksikan pada level proaktif di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ.
- b. Penentuan skor untuk menuju PK-PBJ didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level proaktif dibandingkan dengan jumlah variabel keseluruhan.

Tingkatan UKPBJ sebagai PKP-BJ terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut:

- a. PKP-BJ Proaktif;
- b. PKP-BJ Strategis; dan
- c. PKP-BJ Unggul.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indek Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten sebesar 75,93 atau cukup, pada tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik dan tahun 2019 sebesar 83,03 dan 2020 sebesar 83,69. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik.

d. Indeks Sistem Merit

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini

tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

e. Cakupan Penegakan hukum

Cakupan penegakan hukum merupakan penilaian yang mendasarkan pada jumlah penindakan, jumlah pelanggaran, jumlah penertiban, jumlah target perencanaan penertiban, dan jumlah aduan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57

Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda	Kasus	174	251	81	215	180
2	Jumlah Pelanggaran perda	Kasus	175	312	85	230	192
3	Jumlah Penertiban	kali	216	312	288	250	216
4	Jumlah Target perencanaan Penertiban	kali	216	312	288	250	216
5	Jumlah aduan	kali	0	0	0	0	21
6	Cakupan penegakan hukum	%	99,72	90,23	97,65	98,57	93,75

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2021

Dari data di atas, dapat dilihat cakupan penegakan hukum di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuasi. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 90,23% dan kembali membaik menjadi 93,75% pada tahun 2020. Dari data di atas menunjukkan kinerja penegakan hukum mengalami peningkatan.

f. Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat

Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial.

Dari data tabel berikut ini, dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Disamping itu data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil bahkan tidak ada.

Tabel 2.58

Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	93	95	97	108	139
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	97	99	101	112	143
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	1	0	13	5
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	1	0	13	5
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	95,00	97,00	99,00	98,70	98,95

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2021

g. Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban

Kondusifitas wilayah dapat dilihat dari frekuensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain demonstrasi atau unjuk rasa dan tindak pidana. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Kegiatan demonstrasi terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjung rasa yang berlebihan. Kegiatan perusakan terhadap benda-benda itulah yang terkadang menimbulkan gangguan kecil atau besar bagi rutinitas masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, meskipun sebenarnya demonstrasi merupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakat untuk berpolitik.

Tabel 2.59
Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Penegakan Hukum	%	99,72	90,23	90,55	98,57	93,75
2.	Cakupan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	%	47,00	66,67	74,10	99,12	122,09
3.	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	95,00	97,00	99,00	98,70	98,95
4.	Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	%	80,57	84,63	87,88	98,80	104,93

Sumber: Data diolah, 2021

Untuk Aspek Daya Saing diatas yang terdiri dari 5 (lima) fokus, yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, Sumber Daya Manusia, Penyelenggaraan Pemerintahan, hal ini selaras dengan yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/ Badan Riset Nasional (BRIN) berupa pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD dilaksanakan dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologiterutama Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 mengenai invensi dan inovasi. Tujuan adalah mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah.

Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan kepada IDSD berdasarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Nomor 070/7266/SJ tanggal 31 Juli 2019 tentang Dukungan Pendataan Indek Daya Saing Daerah dalam rangka penyempurnaan peta pembinaan inovasi daerah. Pengukuran IDSD terdiri dari 4 aspek, yaitu Aspek Penguat/*Enabling Environment*, Aspek Pasar/*Market*, Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital* dan Aspek Ekosistem Inovasi. Keempat aspek tersebut dirinci kedalam 12 pilar, 23 dimensi dan 97 indikator. IDSD mengelompokkan pemerintah daerah kedalam kategori “rendah”, kategori “sedang”, kategori “tinggi” dan kategori “sangat tinggi“. Untuk pengukuran IDSD Tahun 2020, Kabupaten Magelang masuk ke dalam kategori Pemerintah Daerah yang memiliki Daya Saing “Tinggi”.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai 2019 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Data angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60

Angka Kelulusan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100,00	99,99	100,00	99,99	100*
Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,98	99,77	99,91	99,79	100*

Sumber Data : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan data tahun 2020, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Angka ini diperoleh karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Ujian Nasional karena adanya pandemic *Covid-19*, dan semua peserta didik dinyatakan lulus, sehingga angka kelulusan menjadi 100%.

2) Rerata Nilai Ujian Nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai 2019 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Pada tahun 2020 sistem pembelajaran berubah karena adanya pandemi Covid-19, dan Ujian Nasional ditiadakan, sehingga pada tahun 2020 ini tidak ada data untuk nilai Ujian Nasional.

Tabel 2.61

Rerata Nilai Ujian Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rerata Nilai UN SD/MI/ Paket A	7,03	7,59	7,42	7,60	NA
Rerata Nilai UN SMP/MTs/Paket B	5,86	5,78	5,79	5,80	NA
Rerata Nilai UN SMA/ SMK/MA	6,45	6,69	6,61	6,70	NA

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.62

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,18	98,68	99,34	99,35	99,17
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	88,19	86,82	88,37	88,38	87,02
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	93,19	92,75	93,86	93,87	93,10

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 98,18%, naik menjadi 99,35% pada tahun 2019, dan turun menjadi 99,17 pada tahun 2020. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 88,19% pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 87,02 % pada tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2019 ada perubahan dalam penilaian, dimana *grade* penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2019 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

4) Kompetensi Pendidik

Mutu tenaga pendidik saat ini tercermin dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.63

Kompetensi Pendidik di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Guru memenuhi kualifikasi S1/DIV						
	1.1 Guru SD/MI	%	79,66	83,75	86,10	93,63	95,61
	1.2 Guru SMP/MTs	%	87,97	90,48	96,77	96,77	96,98
2.	Guru bersertifikasi						
	2.1. Guru SD/MI	%	82,00	84,21	86,27	86,27	87,64
	2.2. Guru SMP/MTs	%	91,00	93,36	93,21	93,21	95,57

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2021

Guru SD/MI yang bersertifikasi tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 82,00%, tahun 2017 sebanyak 84,21%, tahun 2018 dan 2019 sebesar 86,27% dan tahun 2020 sebesar 87,64%. Sementara untuk guru SMP/MTs, guru yang bersertifikasi bersifat fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi, dan naik lagi pada tahun 2020.

Tahun 2016 guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 79,66%, dan tahun 2020 meningkat menjadi 95,61%. Berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 4,39 % pada tahun 2020. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 96,98%, masih ada 3,02% yang belum berkualifikasi S1/DIV. Selain masih adanya guru yang belum berkualifikasi S1/DIV, pada tahun 2018 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru SD/MI non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki kualifikasi SI/DIV mengalami peningkatan

Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan tren naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu

meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

b. Kesehatan

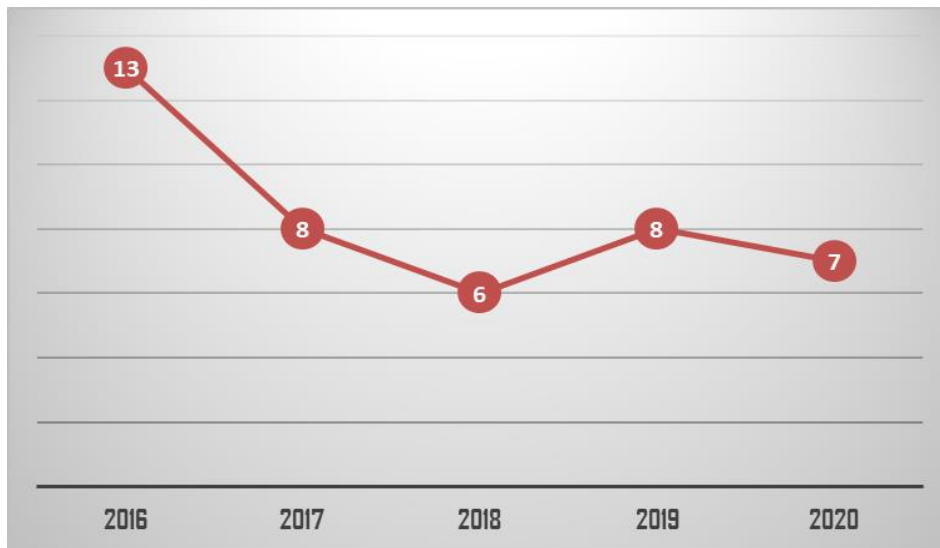
Prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Magelang salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu parameter keberhasilan pembangunan kesehatan adalah angka kematian yang merupakan komposit dari empat komponen yaitu : (1). Angka Kematian Ibu (AKI), (2). Angka Kematian Bayi (AKB), (3). Angka Kematian Balita (AKABa), dan (4). Angka Kematian Neonatal (AKN).

1) Angka Kematian Ibu

AKI merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Adapun pengertian Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll.

AKI di Kabupaten Magelang tidak bisa dihitung, karena perhitungan AKI adalah per 100.000 kelahiran hidup, sementara kelahiran hidup di Kabupaten Magelang tidak mencapai 100.000. Oleh karena itu, data yang terkait dan menggambarkan AKI adalah jumlah kasus kematian ibu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, kasus kematian Ibu di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 13, tahun 2017 sebesar 8, tahun 2018 sebesar 6, tahun 2019 sebesar 8 dan pada tahun 2020 sebesar 7 kematian ibu per jumlah kelahiran. Secara umum kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami tren penurunan dari 13 kasus pada tahun 2016 menjadi 7 kasus pada tahun 2020, sebagaimana grafik di bawah ini.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.26

Jumlah Kasus Kematian Ibu per jumlah kelahiran
di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020

Penyebab utama masih adanya kasus kematian ibu adalah adanya penyakit bawaan/ penyerta yang tidak diperiksakan ketika masa kehamilan, seperti hipertensi, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme serta terjadinya pendarahan. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil berhubungan erat dengan kasus kematian ibu. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar pada tahun 2020 di Kabupaten Magelang sebanyak 17.629 orang dan jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sejumlah 17.033 orang.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengupayakan kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. P4K difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan.

Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh keterlambatan mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengupayakan kegiatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) sebagai wujud perhatian terhadap peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. P4K difasilitasi oleh bidan desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi pada ibu hamil, termasuk perencanaan pemakaian alat kontrasepsi pasca persalinan.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

Data AKB (usia < 1 tahun) di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	147	114	99	143	75
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.984	17.192	17.319	17.147	17.044
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	Permil	8,17	6,13	5,72	8,33	4,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang sebesar 8,17 per 1.000 kelahiran hidup. AKB tersebut justru mengalami tren penurunan hingga tahun 2018, yang kemudian naik mencapai 8,33 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2019 dan turun lagi menjadi 4,40 pada tahun 2020. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, ternyata angka kematian bayi justru turun cukup besar yaitu 68 bayi dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Dalam SDGs 2030, AKB ditargetkan dapat ditekan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, AKB ditargetkan pada tahun 2024 menjadi 5,65 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan standar SDGs tersebut, AKB di Kabupaten Magelang berada di posisi yang sudah baik yaitu di bawah 12 sejak tahun 2016 sampai 2020. Hal ini tidak lepas dari adanya pelayanan kesehatan yang baik. Jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar (Indikator Standar Pelayanan Minimal) pada tahun 2020 sebanyak 16.878 anak.

3) Angka Kematian Balita (AKABa)

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 0 hingga tepat sebelum 5 tahun. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak usia di bawah 5 tahun. Data angka kematian balita di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Balita	Balita	167	129	116	154	90
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.984	17.192	17.319	14.147	17.044
3.	Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	9,29	7,5	6,69	8,98	5,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, angka kematian balita di Kabupaten Magelang dalam periode 2016-2020 mengalami tren parabola dengan pola naik kemudian turun. Puncak AKB terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 8,98 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 5,28 kematian per 1000 kelahiran hidup. Ada penurunan drastis kematian balita di tahun 2016 yaitu dari 167 kasus menjadi hanya 129 kasus pada tahun 2017 dan turun lagi pada tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal) sebanyak 47.362 Balita.

4) Angka Kematian Neonatal (AKN)

AKN adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.66

Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Neonatal	Bayi	104	82	77	110	58
2.	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	17.984	17.192	17.319	17.147	17.044
3.	Angka Kematian Neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)	permil	5,78	4,77	4,45	6,42	3,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, AKN di Kabupaten Magelang dalam periode 2016-2020 bersifat fluktuatif, mengalami penurunan dari tahun 2016 ke

2018, naik di tahun 2019 dan turun lagi pada tahun 2020. Puncak AKN terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 6,42 kematian per 1000 kelahiran hidup, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 3,4 kematian per 1000 kelahiran hidup.

Dilihat dari jumlahnya, ada penurunan drastis kematian balita di tahun 2019 yaitu dari 110 kasus menjadi hanya 58 kasus pada tahun 2020. Hal ini terjadi diantaranya karena keberhasilan beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan AKN di masa pandemi covid-19, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan bayi dimasa pandemi yaitu dengan pelaksanaan kelas ibu balita dengan penerapan protokol kesehatan
2. Peningkatan pelayanan ibu hamil dengan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan penerapan protokol kesehatan
3. Pelayanan kunjungan neonatal dimasa pandemi

5) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Stunting

a) Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-kwasiorkor). Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama. Data prevalensi balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Balita Gizi Buruk	Anak	36	18	15	13	22
2.	Jumlah Balita	Anak	98.231	97.249	89.890	85.785	86.280
3.	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 36 anak balita menderita gizi buruk dan menjadi 13 kasus pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 22 kasus karena adanya pandemi Covid 19.

b) Stunting

Kasus stunting ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan

anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah akses pangan dan gizi di beberapa wilayah di Kabupaten Magelang yang masih minim. Seperti di daerah pegunungan yang jauh dari cakupan pangan bergizi.

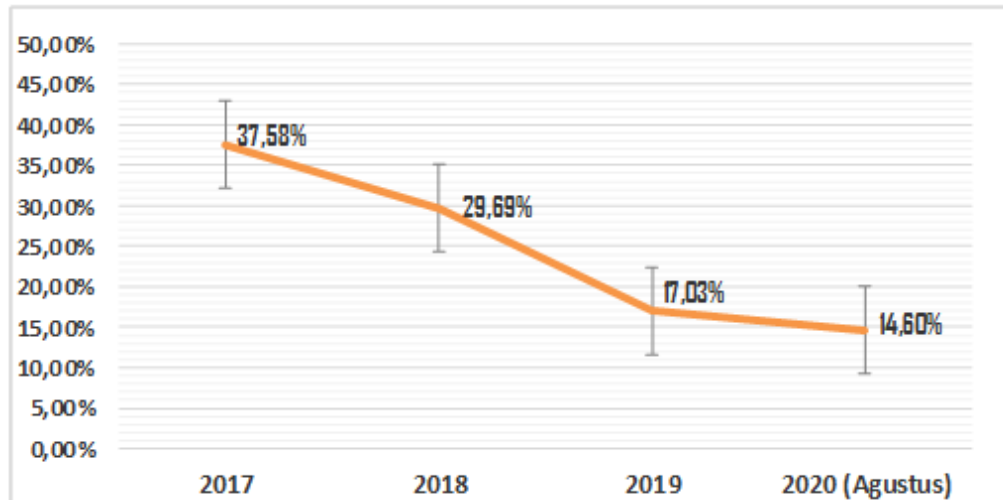
Daerah endemik gondok seperti di pegunungan juga mempengaruhi. Kebanyakan stunting terjadi di daerah sana. Selain karena kurang cakupan pangan bergizi, bisa jadi akibat kekurangan yodium.

Berdasarkan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM, sampai Bulan Agustus 2020, persentase angka stunting di Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 14,60%, yang sebelumnya sempat menyentuh angka 37,58% pada tahun 2017.

Pada grafik diberikut ini, data dari tahun 2017 merupakan data persentase hasil dari survey Pemantauan Status Gizi. Data tahun 2018 adalah data persentase laporan dari puskesmas. Sedangkan data 2019 dan data 2020 merupakan hasil dari data e-PPGBM.

Keberhasilan penurunan angka stunting ini dikerenakan adanya kesadaran sinergi dari semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Magelang. Penanganan stunting tidak hanya tugas bidang kesehatan, tetapi juga menjadi tugas semua elemen masyarakat. Baik dari sisi penyediaan pangan yang bergizi, kualitas sanitasi, lingkungan bersih, dan beberapa hal lain yang menunjang atau mendukung intervensi pencegahan dan penurunan stunting.

Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyoar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting.



Sumber data : Dinas Kesehatan Prov, Jateng dan Kab. Magelang

Gambar 2.27

Persentase kasus Stunting di Kab. Magelang Tahun 2017-2020

5) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis profesinya, dokter dikelompokkan menjadi tiga yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bisa disebut dengan tenaga medis, yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Umum	orang	71	123	57	57	52
2	Dokter Gigi	orang	37	44	29	25	32
3	Dokter Spesialis	orang	51	52	15	23	26
4	Jumlah Tenaga Medis	orang	159	219	101	105	105
5	Jumlah Penduduk (BPS)	jiwa	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195**
6	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	per 100.000 pddk	5,57	9,70	4,42	4,40	4,00
7	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	per 100.000 pddk	2,90	3,47	2,25	1,93	2,46
8	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	4,00	4,10	1,16	1,78	2,00
9	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	per 100.000 pddk	12,47	17,27	7,83	8,11	8,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2020 jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Dokter umum tahun 2016 ada 77 orang, sedangkan dokter spesialis ada 51 orang. Di tahun 2020 jumlah dokter umum menjadi 52

orang dan dokter spesialis 26 orang. Penurunan juga terjadi pada jumlah dokter gigi yang semula berjumlah 37 orang di tahun 2016 menjadi 32 orang pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 Rasio dokter umum berada pada angka 4,00 memiliki gap yang sangat besar dengan standar idealnya yang mencapai 43 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis yang idealnya adalah 11 per 100.000 penduduk hanya mampu dipenuhi sebanyak 2,00 per 100.000 penduduk. Tidak jauh berbeda dengan rasio dokter gigi yang rasionya baru mampu dicapai sebanyak 2,46 per 100.000 penduduk dibandingkan standar idealnya yang sebesar 10.

6) Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit

Kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas layanan publik. Dengan kualitas layanan kesehatan yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Magelang dapat dilihat dari jumlah puskesmas dan rumah sakit yang terakreditasi seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Puskesmas yang ada	Unit	10	22	29	29	29
3.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	34,48	75,86	100	100	100
4.	Jumlah RSUD	Unit	1	1	1	1	1
5.	Jenjang RSUD berakreditasi	tingkat	dasar	madya	madya	madya	madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, polio 4 kali, dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standar Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap kabupaten. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa / kelurahan UCI	Unit	372	372	372	372	372
2.	Jumlah Seluruh desa/ kelurahan	Unit	372	372	372	372	372
3.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Cakupan desa/kelurahan UCI di Kabupaten Magelang berdasarkan tabel diatas telah mencapai 100% di setiap tahun (tahun 2016-2020). Dapat dilihat bahwa jumlah desa atau kelurahan UCI bersifat statis atau tidak berubah sejak tahun 2016 hingga 2020 yaitu sebanyak 372 desa.

8) Angka Kesakitan

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan minimal standar secara mudah, murah dan merata, termasuk untuk anak-anak, orang dewasa dan orang tua.

Pada tahun 2020, anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 29.696 anak, penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan standar sebanyak 40.062 dan penduduk usia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 63.707.

Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan. Di Kabupaten Magelang pada tahun 2020, angka kesakitan sebesar 41,19.

9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular

a) Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di seluruh Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 58,93, pada tahun 2016 sebesar 44,63, pada tahun 2017 sebesar 46,12 dan pada tahun 2018 sebesar 52,95. Cakupan penemuan semua kasus TBC tahun 2019 sebesar 31% dan tahun 2020 sebesar 25%. Adapun orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 5.001 orang.

b) Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar disuatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu

tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF).

Tabel 2.71

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penemuan penderita baru DBD	Jiwa	463	123	107	215	145
2	Jumlah penderita baru DBD yang diobati	Jiwa	463	123	107	215	145
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel cakupan diatas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2016-2020 telah mencapai 100% sejak tahun 2016.

c) Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang upaya pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goals* (SDG"s). Di Kabupaten Magelang, pada tahun 2016 penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif) sebanyak 21 jiwa. Tahun 2016 ini merupakan jumlah kasus ini tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Semua kasus malaria tersebut tidak ada kematian sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) adalah 0. Tahun 2017, terjadi penurunan menjadi 14 jiwa, dan penderita malaria meninggal adalah 0 sehingga *Case Fatality Rate*-nya 0. Pada tahun 2018 dan 2019, jumlah penderita malaria kembali turun menjadi 4 jiwa, dan menjadi 0 di tahun 2020. Penderita malaria di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Penderita Malaria dengan Pemeriksaan Darah (positif) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita malaria dengan pemeriksaan darah (positif)	Jiwa	21	14	4	4	0
2.	Jumlah penderita malaria meninggal	Jiwa	0	0	0	0	0
3.	<i>Case Fatality Rate</i> (CFR)	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

d) HIV/AIDS

HIV dan AIDS merupakan permasalahan global yang juga dirasakan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Penderita HIV/AIDS

menyebarkan diseluruh wilayah dan berbagai kalangan. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penderita HIV/AIDS	Jiwa	62	60	29	32	29
2.	Jumlah Penduduk (BPS)	Jiwa	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195*
3.	Prevelensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0049	0.0047	0.0023	0,0025	0,0022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penderita HIV/AIDS di Kabupaten Magelang angkanya pada tahun 2016 sebesar 62 jiwa dan tahun 2020 menjadi 29 jiwa. Pada tahun 2020 orang terduga beresiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 17.485.

- 10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular
 Penyakit menular yang dimaksud dalam narasi ini adalah penyakit hipertensi, Diabetes Melitus (DM), dan gangguan jiwa, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74

Penyakit Tidak Menular Tahun 2016-2020 di Kab. Magelang

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hipertensi	Jiwa	NA	41.099	50.438	51.026	28.586
2.	Diabetes Melitus (DM)	Jiwa	NA	2.812	7.077	7.404	7.642
3.	Gangguan Jiwa	Jiwa	NA	889	1.434	1.450	1.869

Sumber: Hasil olahan, 2021

Data diatas terlihat bahwa penyakit tidak menular baik penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan gangguan jiwa, sampai dengan tahun 2019 tiap tahunnya mengalami peningkatan. Kenaikan penyakit tidak menular ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Namun pada data di atas, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penderita. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic covid-19, sehingga penderita yang melakukan pemeriksaan di Puskesmas/Rumah Sakit Daerah menurun drastis. Sementara itu, data jumlah penderita diambil dari data pasien yang memeriksakan diri di Puskesmas/Rumah sakit. Untuk meminimalkan kenaikan penyakit tidak menular perlu penanganan dan pelayanan yang lebih intensif. Orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar pada tahun 2020 sebanyak 28.586, Orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 7.642 dan orang dengan

gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sebanyak 1.869

Bonus demografi penduduk di usia produktif dapat mendorong kemajuan bangsa apabila menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

Bonus demografi di Kabupaten Magelang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah dapat menjaga kestabilan penduduk yang sehat dan berkualitas, bonus demografi tersebut akan menjadi peluang untuk pembangunan bangsa.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, jalan kabupaten memiliki fungsi sebagai jalan lokal primer. Jalan yang menjadi kewenangan kabupaten di Kabupaten Magelang dari tahun 2015 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi 1.000,83 km yang meliputi 249 ruas jalan sampai dengan tahun 2020. Adapun kondisi dasar jalan di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.75

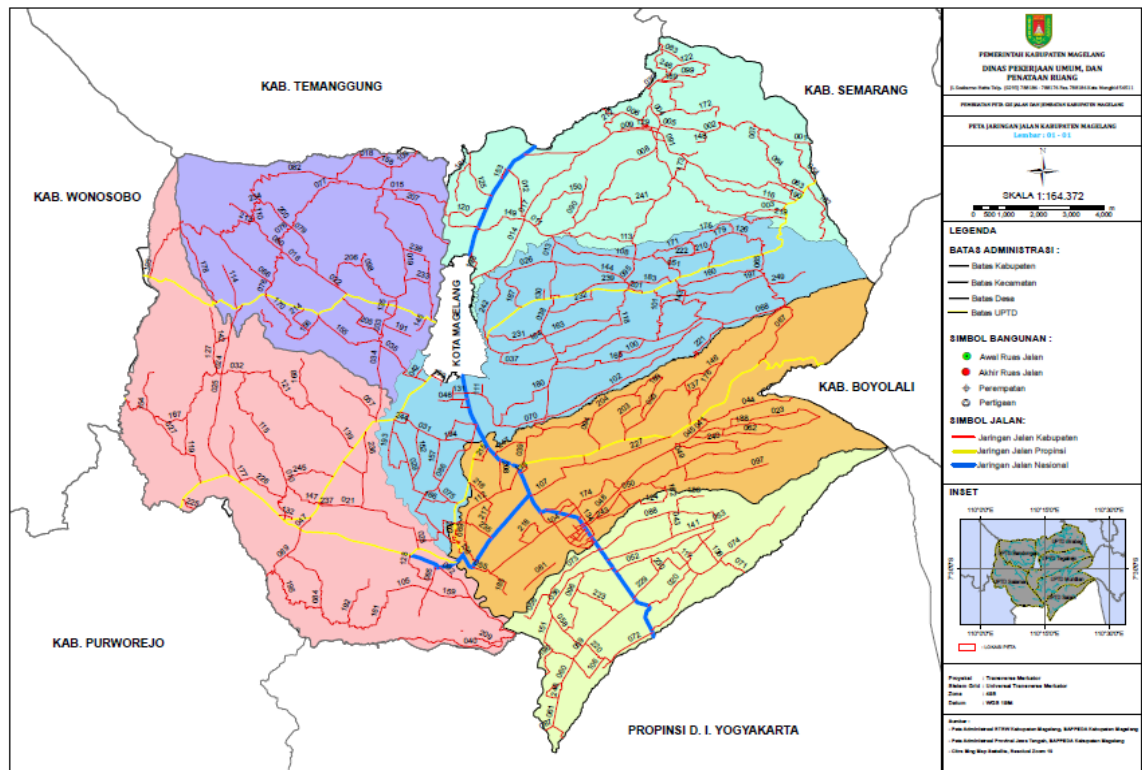
Kondisi Dasar Jalan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
JALAN							
1	Jalan Nasional	Km	36,4	36,4	36,4	37,71	37,71
2	Jalan Provinsi	Km	118,68	118,68	118,68	118,68	118,68
3	Jalan Kabupaten	Km	887,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83
4	Jalan Lingkungan	Km	NA	2123, 31	2123, 31	2123, 31	2123,31
5	Jumlah ruas jalan kab	Ruas Jalan	204	249	249	249	249
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten	Buah	306	337	339	344	345
2	Panjang jalan kab berdrainase	Km	323,56	357,5	360	365,05	365,05
3	Panjang jalan kab bertrotoar	Km	47,03	50,59	52,62	54,62	56,62
4	Panjang jalan kab yang bertalud (memiliki dinding penahan tanah)	Km	NA	95,55	96,55	96,55	96,55

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

Ketersediaan jalan kabupaten di Kabupaten Magelang telah menghubungkan seluruh kawasan permukiman dan simpul-simpul kegiatan, baik itu kawasan permukiman dengan pusat-pusat aktivitas, ibukota kabupaten dengan 21 ibukota kecamatan, ibukota kecamatan

dengan ibukota kecamatan, ataupun ibukota kecamatan dengan ibukota desa. Sebaran ketersediaan Jalan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.28
Peta Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Magelang

Kondisi ketersediaan jalan kabupaten dilihat dari kondisi permukaan jalan, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76

Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Magelang Sesuai Kewenangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PERMUKAAAN JALAN							
1	Baik	Km	619,80	736,88	742,30	748,547	773,67
		%	61,93	73,63	74,17	74,79	77,30
2	Sedang	Km	227,94	156,65	143,83	140,475	118,275
		%	22,78	15,65	14,37	14,04	11,82
3	Rusak	Km	120,96	96,27	95,98	93,13	90,56
		%	12,09	9,62	9,59	9,31	9,05
4	Rusak Berat	Km	32,13	11,03	18,72	18,67	18,32
		%	3,21	1,10	1,87	1,87	1,83
	Total Panjang jalan	Km	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83	1000,83
KONSTRUKSI JALAN							
1	Aspal/Penetrasi/Macadam	Km	891,61	890,38	878,11	876,11	988,83
2	Perkerasan Rigid/Beton	Km	-	3,15	8,02	10,02	12
3	Telford/Kerikil	Km	109,22	107,30	114,70	114,70	-
4	Tanah	Km	-	-	-	-	-

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

Sedangkan bila dilihat sesuai dengan standar atau ketentuan jalan yang berlaku, kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.77
Kondisi Standar Jalan Kewenangan Kabupaten Magelang
Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
JALAN							
1	Jalan kabupaten lebar standar \geq 5,5 m (PP 34/2006)	Km	NA	207,74	227,74	235,94	240,44
		%		20,76	22,76	23,57	24,02
BANGUNAN PELENGKAP JALAN							
1	Jembatan kabupaten kondisi baik	Unit	NA	332	336	343	344
		%		80,78	81,75	83,45	83,69
2	Jembatan kabupaten yang memiliki lebar standar 5,5 m	Buah	NA	183	183	186	186
		%		44,53	44,53	54	54
3	Panjang jalan yang memiliki drainase kondisi baik	Km	111,41	268,13	270,63	275,68	275,68
		%	34,43	75	75,17	75,16	75,16
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar kondisi baik	Km	47,03	50,59	52,62	54,62	56,62
		%	100	100	100	100	100
5	Panjang jalan bertalud (memiliki dinding penahan tanah) kondisi baik	Km	NA	71,66	72,66	72,66	72,66
		%		75	75,26	75,26	75,26

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

2) Irigasi

Kondisi fisik jaringan irigasi di Kabupaten Magelang dijelaskan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78
Kondisi Dasar Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016 – 2020

No	Jaringan Irigasi	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	DI	993	993	993	993	993
2	Luas Areal Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662	35.662	35.662	35.662
3	Panjang saluran irigasi	Km	NA	887,12	887,12	887,12	887,12
4	Jumlah bangunan irigasi	Unit	NA	827	827	827	833

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

Jaringan irigasi dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan kabupaten dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik diukur berdasarkan luas areal daerah irigasi yang teraliri atau tercukupi airnya. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
 Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
 Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	Ha	22.008	22.843	23.347	24.198	25.054
		%	61,71	64,05	65,47	67,85	70,25
2	Rusak	Ha	6.539	6.131	5.958	5.503	5.422
		%	18,34	17,19	16,70	15,43	15,20
3	Rusak Berat	Ha	7.116	6.688	6.357	5.961	5.187
		%	19,95	18,75	17,83	16,72	14,54
	Luas Daerah Irigasi (DI)	Ha	35.662	35.662	35.662	35.662	35.662

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

*) data sementara

Kondisi fisik dari infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, yaitu :

- a) Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2017 adalah 572,63 km, tahun 2018 menjadi 578,58 km, tahun 2019 menjadi 618,10 km, dan tahun 2020 menjadi 625,28 km ;
- b) Jumlah bangunan irigasi kondisi baik pada tahun 2017 sebanyak 533 unit, tahun 2018 menjadi 563 unit, pada tahun 2019 menjadi 618 unit, dan pada tahun 2020 tetap sebanyak 624 unit.

Dalam rangka mendukung meningkatnya layanan jaringan irigasi dan produktivitas pertanian menuju tercapainya ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Magelang, maka perlu menjamin ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui pengelolaan sumber-sumber daya air yang baik.

Kebutuhan air untuk sawah irigasi seluas 22.383 ha (BPS, 2021) di Kabupaten Magelang rata-rata sebesar 705.870.288 m³/tahun. Sedangkan bila mendasarkan pada luas Daerah Irigasi Kabupaten Magelang (35.662 Ha), maka kebutuhan air untuk sawah irigasi di Daerah Irigasi rata-rata sebesar 1.124.636.832 m³/tahun.

Ketersediaan air baku tahun 2020 di Kabupaten Magelang mencapai 1.452.783.266,11 m³/tahun dengan rincian potensi air limpasan sebanyak 1.181.862.220,51 m³/tahun dan potensi mata air 270.921.045,60 m³/tahun. Pada tahun 2020, kebutuhan pengairan untuk sawah irigasi di area Daerah Irigasi baru terpenuhi 790.102.629 m³/tahun (70,25%).

Selama ini pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan irigasi di Kabupaten Magelang, diperoleh melalui pemanfaatan air sungai dan mata air. Namun ketersediaan air sungai dan mata air jumlahnya terbatas terutama pada musim kemarau. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka pemenuhan ketersediaan air untuk keperluan irigasi antara lain melalui

pembangunan embung dan pembinaan kelembagaan petani pengelola air.

Tabel 2.80
Pengelolaan Air Untuk Layanan Irigasi
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah embung yang terbangun	Buah	1	3	3	3
2.	jumlah kelembagaan petani pengelola air	Kelompok	283	283	283	283
3.	jumlah kelembagaan petani pengelola air, yang berfungsi dengan baik	Kelompok	83	103	163	169

Sumber: DPUPR, 2021

3) Bangunan Gedung

Pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 1.451 bangunan kantor pemerintah yang telah dibangun dan bertambah menjadi 1.454 unit pada tahun 2018, 1.457 unit pada tahun 2019 dan 1.458 unit pada tahun 2020. Adapun perkembangan pembangunan gedung pemerintah selama 5 tahun adalah ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Pembangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gedung Pemerintah Yang Dibangun	Unit	7	6	3	3	1
2.	Jumlah Gedung Pemerintah	Unit	1.445	1.451	1.454	1.457	1.458

Sumber: Hasil olahan, 2021

Sedangkan pembangunan bangunan berupa *landmark* di kawasan perbatasan sampai dengan tahun 2018 dan 2020 sebanyak 7 unit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan gedung, maka setiap bangunan gedung perlu memiliki SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Sasaran bangunan gedung yang wajib ber-SLF dimulai dari bangunan gedung pemerintah dan bangunan gedung baru.

Jumlah bangunan *landmark* yang masih rendah di Kabupaten Magelang, menyebabkan perlunya pembangunan *landmark* di beberapa lokasi, sebagai penanda yang mempertegas ciri sebuah kawasan di Kabupaten Magelang.

4) Cakupan Layanan Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemenuhan kebutuhan pokok air minum

sehari-hari merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kondisi cakupan layanan air minum di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82

Cakupan Layanan Air Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga terlayani air minum	RT	257.724	279.671	353.485	362.755	391.011
2.	Jumlah rumah tangga	RT	325.475	336.608	407.301	412.738	439.190
3.	Cakupan Layanan Air Minum	%	79,18	83,09	86,79	87,89	89,03

Sumber: Hasil olahan, 2021

Jumlah rumah tangga terlayani air minum di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 memiliki kecenderungan meningkat sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Namun demikian, capaian ini masih jauh dari target *Universal Access* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 100% akses masyarakat terhadap layanan air minum pada akhir tahun 2020. Sampai dengan akhir tahun 2020, masih terdapat 10,97% rumah tangga yang belum mendapat pelayanan air minum.

5) Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik

Capaian layanan sanitasi tidak hanya diukur dari cakupan layanan air limbah domestik saja, tetapi juga layanan pengelolaan sampah dan layanan drainase sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun. Layanan yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah cakupan air limbah domestik. Sedangkan layanan drainase menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (drainase jalan kabupaten) dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (drainase lingkungan), dan layanan pengelolaan sampah menjadi urusan lingkungan hidup.

Tabel 2.83

Cakupan Layanan Sanitasi Air Limbah Domestik di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi	Rumah tangga	263.081	274.057	348.812	396.641	439.190
2	Jumlah rumah tangga	Rumah tangga	325.475	336.608	407.301	412.738	439.190
3	Persentase rumah tangga bersanitasi	%	80,83	81,42	85,64	96,10	100

Sumber: Hasil olahan, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, setiap rumah tangga minimal mempunyai satu akses pengolahan air limbah domestik. Berdasarkan data yang tertuang pada tabel di atas, capaian akses sanitasi dasar Kabupaten

Magelang tahun 2020 telah mencapai 100%. Dan pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Magelang telah mendeklarasikan Kabupaten Magelang bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan mendasarkan pada hasil pendataan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian di 29 puskesmas. Akses sanitasi dasar 100% yang dicapai Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 meliputi jamban sehat permanen (JSP) sebanyak 80,29%, jamban sehat semi permanen sebanyak 7,76% dan Sharing sebanyak 11,95%. Terkait layanan drainase, di Kabupaten Magelang tidak terdapat genangan air yang melebihi ketinggian 30 cm dan berlangsung selama 6 jam atau lebih. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan pada tahun 2017 oleh DPUPR (dalam penyusunan dokumen masterlan drainase) terdapat 37 titik lokasi genangan di 16 Kecamatan dengan total luasan 645,84 ha, dengan rata-rata ketinggian 10-15 cm dan hanya berlangsung paling lama 30 menit.

6) Sarana Prasarana Ke-PUan

Peningkatan sarana prasarana ke-PUan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan di Kabupaten Magelang. Peningkatan sarana prasarana ke-PUan yang dimaksud meliputi peningkatan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana ke-PUan dan peningkatan layanan jasa konstruksi. Jumlah sarana dan prasarana ke-PUan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017- 2019 adalah sebanyak 122 buah dan 146 buah pada tahun 2020. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik adalah sejumlah 122 buah pada tahun 2017 – 2019 dan meningkat menjadi 132 buah pada tahun 2020. Pada tahun 2024 direncanakan terdapat penambahan kebutuhan sarana prasarana ke-PUan menjadi 150 buah.

7) Penataan Ruang

Pengaturan penataan ruang di Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang 2010-2030. Belum adanya rencana rinci selain ketiga dokumen tata ruang tersebut menjadikan perangkat perizinan menjadi belum memadai, sehingga kesesuaian tata ruang antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang masih belum optimal. Ketidaksesuaian terbesar terdapat pada pola ruang Kawasan pertanian, secara umum persentase ketidaksesuaian pola ruang di Kabupaten Magelang sebesar 2,76% (sumber Kajian Identifikasi Kondisi Lingkungan Strategis dan Dinamika Internal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, 2014).

Tabel 2.84
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	4,11	39,59	39,27	39,27	39,27
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	384	577	346	432	324

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2021

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mengakomodir prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun sasaran daerah, salah satunya yaitu meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- 2) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak masuk pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari perangkat daerah pelaksana;
- 3) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 2.85
Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penanganan RTLH	Unit	9.830	14.624	20.737	29.240	32.852
2.	Jumlah RTLH Yang Harus Ditangani	Unit	66.273	66.273	65.830	65.830	65.830
3.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	-	13	9	-	-
4.	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	-	13	11	-	-
5.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	276.071	277.495	291.398	310.722**	318.930
6.	Jumlah Rumah	Unit	336.610	337.246	349.150	341.893**	360.079
7.	Rasio Rumah Layak Huni	-	0,82	0,82	0,83	0,91**	0,885

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

***) sensus BPS 2019

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2008 sampai dengan 2020, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebanyak 32.852 unit.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data *backlog* rumah di Kabupaten Magelang mencapai 55.735 unit, dimana dari 419.671 KK yang terdata, baru 360.079 unit rumah yang terbangun). Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, baru ada satu perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah belum optimal mengalokasikan anggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarannya.

Tabel 2.86
 Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang
 Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	85,09	97,20	97,20	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani (Simulasi perhitungan pengurangan kumuh sesuai PermenPU 14/PRT/M/2018)	Ha	13,91		66,53	77,74	77,74
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	16,35		68,45	79,98	79,98
4.	Luas Kawasan kumuh yg belum tertangani	Ha	71,18		30,67	19,46	19,46
5.	Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani	%	83,65		31,55	20,02	20,02

Sumber : DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati No. 188.45/498/KEP/25/2014 (tanggal 8 Desember 2014) sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Kemudian melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2020, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditunjukkan seperti pada tabel di atas.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui penataan lingkungan dan melalui peningkatan rumah tidak layak huni atau peningkatan kualitas rumah swadaya. Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana permukiman melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Salah satu PSU yang perlu dibangun seiring dengan tumbuhnya perumahan di Kabupaten Magelang, adalah tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah. TPU ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU bagi warga pendatang atau warga yang tinggal di perumahan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Jumlah penegakan perda merupakan persentase penyelesaian penegakan perda dibandingkan jumlah pelanggaran perda. Semakin tinggi persentase penegakan perda, maka semakin tinggi jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menggambarkan kemampuan penyelesaian pelanggaran perda oleh petugas terkait. Tabel berikut menggambarkan data penegakan perda di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.87

Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	174	251	81	215	180
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	175	312	85	230	192
3	Penegakan PERDA	Persen	99,43	80,45	95,29	93,42	93,70

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran di Kabupaten Magelang fluktuatif. Namun, sebagian besar pelanggaran yang terjadi sudah mampu diselesaikan. Data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan penegakan perda di Kabupaten Magelang berada pada angka 93,70%, mengalami peningkatan sebesar 0,28% dibanding tahun 2019 sebesar 93,42%. Tingkat penyelesaian pelanggaran perda di Kabupaten Magelang masih melebihi target setiap tahunnya yaitu 75%. Hal tersebut mengindikasikan penyelesaian masalah yang terjadi di Kabupaten Magelang sudah optimal.

2) Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Bencana kebakaran merupakan bencana yang memerlukan penanganan yang cepat. Penanganan yang cepat adalah penanganan yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap adalah ≤ 15 menit. Berikut adalah persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*)

daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.88
 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
 Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
 di Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) \leq 15 menit	Kejadian	75	54	35	81	99
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	94	72	55	155	181
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	79,79	75,00	63,64	52,60	54,70

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) mengalami tren penurunan, sempat berada pada angka 79,79% pada tahun 2015, turun menjadi 54,70% pada tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 99 kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian kebakaran dengan waktu tanggap \leq 15 menit dari 181 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut masih di bawah target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan tingkat kesiapan pemadam kebakaran dapat ditingkatkan sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat (*response time rate*) dan risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir.

3) Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Trantibumlinmas merupakan salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan lebih lanjut Permendagri Nomor 121 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang adalah:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Realisasi SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang tahun 2020:

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah 0%. Capaian 0% dikarenakan tidak ada warga negara yang terdampak akibat adanya penegakan hukum;
- b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah 100%.
- 4) Cakupan Masyarakat yang Mendapat Pengetahuan Kebencanaan
Sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi.

Apabila belajar dari sejarah, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang rentan terkena bencana, terutama bencana gunung api Merapi. Selain itu, Kabupaten Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, dan Sumbing yang mengakibatkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana tanah longsor. Oleh karena itu pengetahuan terhadap bencana menjadi penting. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa cakupan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 74,10% pada tahun 2018. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Magelang, khususnya yang berada pada daerah rawan bencana memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Tabel 2.89

Cakupan Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	14	18	11	7	0
2	Jumlah Desa Rawan Bencana	Desa	372	372	372	372	372
3	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang Dilakukan	Kejadian	195	337	433	624	481
4	Jumlah Sasaran Dampak Bencana yang harus Dilakukan Tanggap Bencana	Kali	195	337	433	624	481
5	Jumlah Kejadian Bencana yang Direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kejadian	25	20	25	22	8
6	Jumlah Kejadian Bencana yang harus Dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kali	5	5	5	4	0
7	Cakupan Ketahanan masyarakat menghadapi bencana	%	47,00	66,67	74,10	99,12	122,09

Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2021

- 5) Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat terdiri dari jumlah organisasi yang aktif dan yang tercatat, serta jumlah konflik sosial, sebagaimana yang disajikan tabel dibawah ini.

Tabel 2.90

Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif	unit	93	95	97	108	139
2	Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang tercatat	unit	97	99	101	112	143
3	Jumlah Konflik Sosial Tertangani	unit	0	1	0	13	5
4	Jumlah Konflik Sosial	unit	0	1	0	13	5
5	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat	%	95,00	97,00	99,00	98,70	98,95

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2021

Dari data di atas dapat dilihat cakupan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat selama tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,30 persen. Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang aktif dan tercatat menunjukkan tren yang meningkat. Di samping itu, data di atas juga menggambarkan kejadian konflik sosial relatif kecil. Pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah kasus sebanyak 13, tetapi menurun kembali menjadi 5 kasus pada tahun 2020.

f. Sosial

1) Sarana Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Panti pelayanan sosial memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS guna pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi Panti Asuhan, dimana semua panti asuhan yang ada di Kabupaten Magelang adalah milik swasta. Jumlah panti asuhan yang terdata sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) buah.

2) PMKS yang tertangani

Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah PMKS

yang memperoleh bantuan mengalami kecenderungan naik. Dari 40.016 orang pada tahun 2016, menjadi 143.179 orang pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup tajam ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2016-2020, persentase PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat. Lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.91

Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PMKS yang tertangani	Orang	40.016	38.001	79.069	67.715	143.179
2.	PMKS yang ada	Orang	131.222	131.222	170.684	136.993	136.993
3.	Penanganan PMKS	%	30,49	28,95	46,32	42,13	104,52

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajuan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru. Adapun kenaikan penanganan PMKS yang cukup tajam pada tahun 2020 menjadi diatas 100% diakibatkan karena jumlah yang dilayani jauh lebih banyak dari sasaran yang ada yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19.

3) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

PSKS mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuktahiran data tahun 2020 terdiri atas 4.265 orang, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebanyak 1.744 orang.

Tabel 2.92

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2020

NO	NAMA PSKS	2019							2020						
		KODE PSKS	L	P	KK	LMBG	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH	KODE PSKS	L	P	KK	LMBG	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	1	3	4	0	0	0	7	1	48	62	0	0	0	110
2	Pekerja Sosial Masyarakat	2	971	127	0	0	0	1098	2	2046	532			0	2578
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	3	80	2	0	0	0	82	3	153	11			0	164
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	0	0	0	37	0	37	4				81	0	81
5	Karang Taruna	5	0	0	0	55	0	55	5				174	0	174

NO	NAMA PSKS	2019							2020						
		KODE PSKS	L	P	KK	LMBG	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH	KODE PSKS	L	P	KK	LMBG	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	6	0	0	0	1	0	1	6				7	0	7
7	Keluarga Pioner	7	0	0	141	0	0	141	7				284	0	284
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	8	0	0	0	1	0	1	8				61	0	61
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	9	0	299	0	0	0	299	9		658			0	658
10	Penyuluh Sosial	10	0	0	0	0	0	0	10	45	13			0	58
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	11	17	3	0	0	0	20	11	19	2			0	21
12	Dunia Usaha	12	0	0	0	3	0	3	12				69	0	69
JUMLAH			1.071	435	145	97	0	1.744		2311	1278	0	676	0	4265

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Tenaga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS

4) Jumlah disabilitas dan bantuan yang diberikan

Jumlah penyandang difabel, yang memperoleh bantuan dan jumlah bantuan yang diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.93

Jumlah Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyandang Disabilitas	10.508	9.009	9.578	9.578	9.578
2	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh Bantuan	412	417	406	442	354
3	Jumlah Bantuan (ribu rupiah)	741.600	797.200	1.158.600	1.465.200	1.184.350

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Dari tabel diatas bisa dilihat jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020, dimana data terakhir pada jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan sebanyak 354 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 1.184.350.000,-.

5) Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2016-2020

Data historis kinerja makro urusan sosial tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi	Buah	39	39	39	39	39
PMKS yang tertangani	Orang	40.253	38.001	79.069	57.715	143.179
PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	-	28,96	46,29	42,13	104,52
Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	-	-	1,25	1,28	6,97
Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100
Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan (JKN-PBI dan Jamkesda)	jiwa	-	752.478	759.599	727.410	668.878

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2021

Data diatas menunjukkan PMKS yang tertangani menunjukkan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020. perkembangan Penduduk miskin yang memperoleh Jaminan kesehatan (JKN-PBI dan Jamkesda) pada tahun 2016-2019 meningkat, sedangkan pada tahun 2020 agak mengalami penurunan.

6) Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DTKS)

Basis Data Terpadu (BDT) atau pada saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sistem data elektronik dari Kementerian Sosial yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, yang dijadikan acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut dengan desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi kedalam 4 desil. Pengelompokan desil adalah sebagai berikut:

- 1) Desil 1 rumah tanggal dalam kelompok 10 % terendah sebesar 53.663 Rumah Tangga;

- 2) Desil 2 rumah tinggal dalam kelompok 10 - 20 % terendah sebesar 52.073 Rumah Tangga;
- 3) Desil 3 rumah tinggal dalam kelompok 20 - 30 % terendah sebesar 28.250 Rumah Tangga;
- 4) Desil 4 rumah tinggal dalam kelompok 30 - 40 % terendah sebesar 5.892 Rumah Tangga.

Rekapitulasi DTKS Kabupaten Magelang Tahun 2020 mendasar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 /HUK/2020 sebanyak 167.189 RT. Rekapitulasi BDT tersebut dilakukan verifikasi dan validasi sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Magelang.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka TPAK mengindikasikan besarnya presentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2016 -2018 cenderung menurun meskipun tidak signifikan, dan cenderung naik kembali pada tahun 2019-2020. Tingkat partisipasi angkatan Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Jawa Tengah. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.95

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	677.609	722.295	699.907	741.101	774.364
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	Orang	899.809	969.654	981.963	868.013	905.146
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,34	74,49	71,28	74,55	76,60
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jawa Tengah	%	67,86	67,15	69,11	68,56	69,43
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional	%	65,76	66,34	66,67	67,26	NA

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

2) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari Indeks Produktifitas Tenaga Kerja. Indeks ini diukur dari total PDRB dibandingkan dengan total angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2016 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp 37,05 juta per pekerja

meningkat menjadi Rp 43,78 juta per pekerja pada tahun 2020. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 produktivitas tenaga kerja Kabupaten Magelang masih rendah dibandingkan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.96

Produktivitas Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB	Rp. (juta)	26.108.949	28.045.174	29.464.259,80	32.490.800,51	32.454.720,09
2	Total Angkatan Kerja yang Bekerja	orang	704.651	722.295	679.506	717.960	741284
3.	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. (juta)	37,05	38,83	43,36	45,25	43,78
4.	Produktivitas Tenaga Kerja Prov. Jateng	Rp. (juta)	51,44	52,01	54,57	78.12	76,90

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

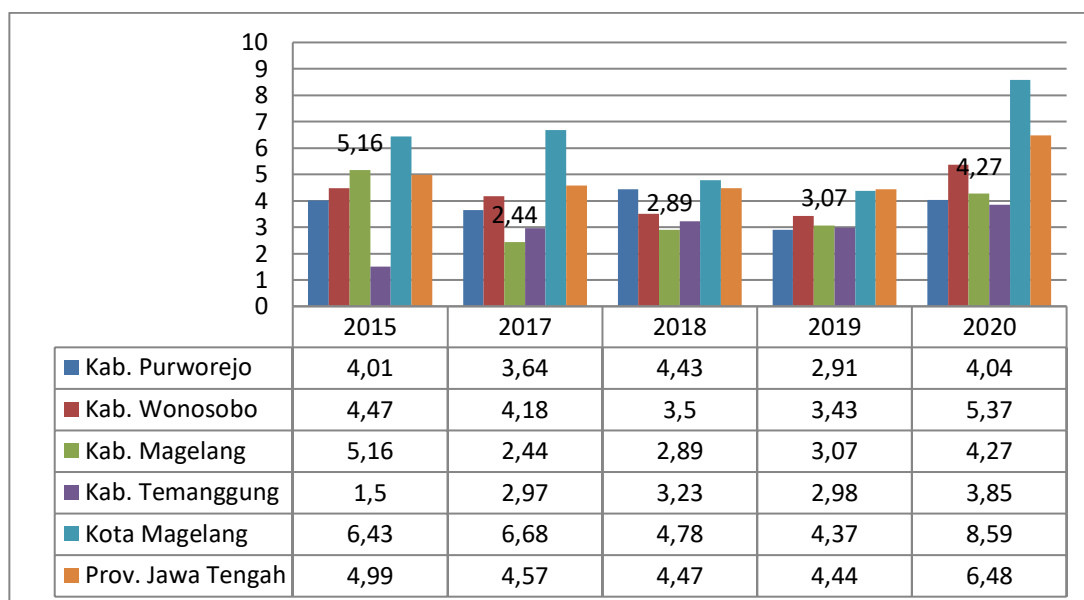
Dari 2017 sampai dengan 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Magelang cenderung naik. Jika pada tahun 2017 TPT mencapai 2,44 % maka pada tahun 2020 menjadi 4,27. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah penduduk angkatan kerja meningkat sebesar 52.069 orang. Jika pada tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 722.295 orang maka pada tahun 2020 meningkat menjadi 774.364 orang. Data tingkat pengangguran terbuka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	NA	17.644	20.401	23.114	33 080
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	NA	722.295	699.907	741.101	774.364
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	NA	2,44	2,91	3,12	4,27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jateng	%	NA	4,57	4,51	4,49	6,48
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,5	5,33	5,13	5,01	7,07

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.29

Perbandingan TPT Kabupaten/Kota
di Karesidenan Kedu dan Prov. Jateng Tahun 2015-2020

Posisi relatif TPT Kab. Magelang antar tahun 2015-2020 dibandingkan dengan rata-rata TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu, selalu lebih rendah dari TPT Kota Magelang dan selalu lebih tinggi daripada Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo kecuali pada tahun 2017 dan 2018.

4) Pencari kerja yang ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Menempatkan pencari kerja yang mendaftar merupakan salah satu program pemerintah daerah. Oleh karena itu, indikator ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan kesempatan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran. Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut..

Tabel 2.98

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	1.442	1.749	1.797	1991	323
2	Pencari kerja yang terdaftar	Orang	3.573	4.038	4.193	3838	2195
3	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	40,36	43,31	42,86	51,88	14,72

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan program penempatan tenaga kerja yang mendaftar. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah sebanyak 3.573 orang dan hanya 40,36 % dari jumlah tersebut yang berhasil

ditempatkan atau sekitar 1.442 pekerja saja. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan fluktuatif. Perbedaan persentase pekerja yang ditempatkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan jumlah kesempatan kerja yang tersedia dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan.

5) Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 741.284 jiwa, meningkat 16% daripada tahun 2015 yang berjumlah 623.713 jiwa. Jika dirinci secara sektoral atau lapangan usaha, pada tahun 2015-2019 penyerapan angkatan kerja terbesar adalah lapangan usaha pertanian. Namun penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian cenderung menurun. Pada tahun 2015 lapangan usaha pertanian mencapai 35,80%, pada tahun 2019 hanya sebesar 28,32%. Pada tahun 2020 BPS membagi lapangan pekerjaan utama menjadi tiga sektor yaitu pertanian, manufaktur dan jasa. Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.99

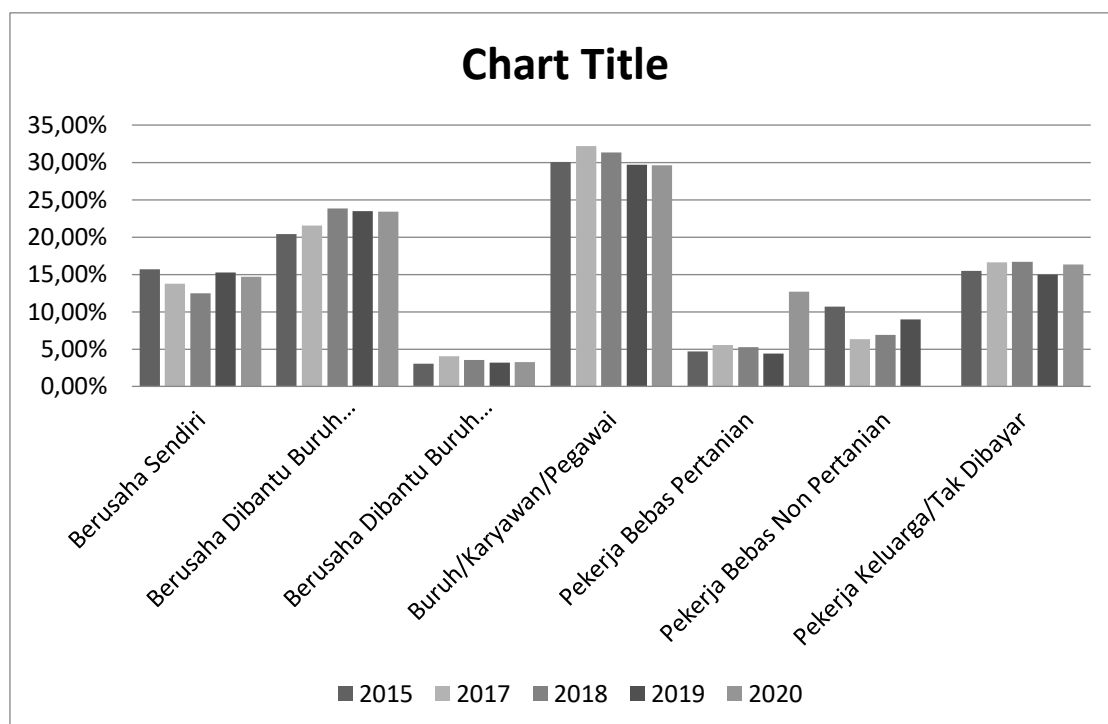
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020

NO	Pekerjaan Utama	2015	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian	35,80	34,52	30,43	28,32	31,42
2	Industri Pengolahan	16,92	18,12	20,66	21,26	27,42
3	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	19,18	21,34	22,87	27,62	41,16
4	Jasa Kemasyarakatan	11,08	12,90	11,01	11,26	
5	Lainnya	17,02	13,12	15,03	11,54	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2021

6) Persentase penduduk yang bekerja menurut Status Pekerjaan

Sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020, Penduduk Kabupaten Magelang mayoritas pekerjaan utamanya sebagai pengusaha dan sebagai buruh/ karyawan/pegawai. Dan pada tahun 2020 masih ada 16,33 persen penduduk Kabupaten Magelang yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga pada pekerjaan utamanya.



Gambar 2.30

Perkembangan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2015-2020

7) Jumlah Peserta Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek)

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Di Kabupaten Magelang masih banyak potensi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Adapun tenaga kerja yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.100

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial (Jamsostek) Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Jamsostek	%
1	2016	372	25.653	13.143	51,23
2	2017	372	25.653	13.143	51,23
3	2018	370	25.457	13.351	52,45
4	2019	366	25.987	21.677	83,41
5	2020	369	26.353	21.971	83,37

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat tenaga kerja yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (jamsostek) setiap tahun meningkat, kecuali pada tahun 2020 jumlahnya turun sebesar 0,04 % dari tahun 2019.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat melalui cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Cakupan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari persentase perempuan di lembaga legislatif selama tahun 2016-2020.

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Secara umum jumlah pekerja perempuan yang berada di lembaga pemerintah mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 hanya terdapat 1,60% perempuan yang terdapat di lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Tabel 2.101

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jiwa	5.415	5.304	5.008	4.905	4.688
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	Jiwa	279.504	281.958	253.317	297.376	292.888
3.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	1,94	1,88	1,98	1,65	1.60

Sumber : Dinsos, PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

2) Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan yang terselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, capaian terakhir tahun 2020 penyelesaian pengaduan sebesar 98,70%. Dengan kata lain, setiap aduan yang dilaporkan dapat diselesaikan di tiap tahunnya. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.102

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	Kasus	113	115	75	113	76
Jumlah seluruh pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Kasus	113	115	98	113	77
Penyelesaian pengaduan	Persen	100	100	76,53	100	98,70

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021.

3) Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Sampai dengan tahun 2020, tingkat desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat. Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Perda nomor 20 tahun 2016 tentang KLA, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media.

Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.103

Desa, Kecamatan dan Kabupaten
Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Urian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Pratama	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	11	14	92	94	0
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	0	98
4	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	3	5	13	17	17
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	1	1	1	1	0
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	0	0	1
4	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

c. Pangan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

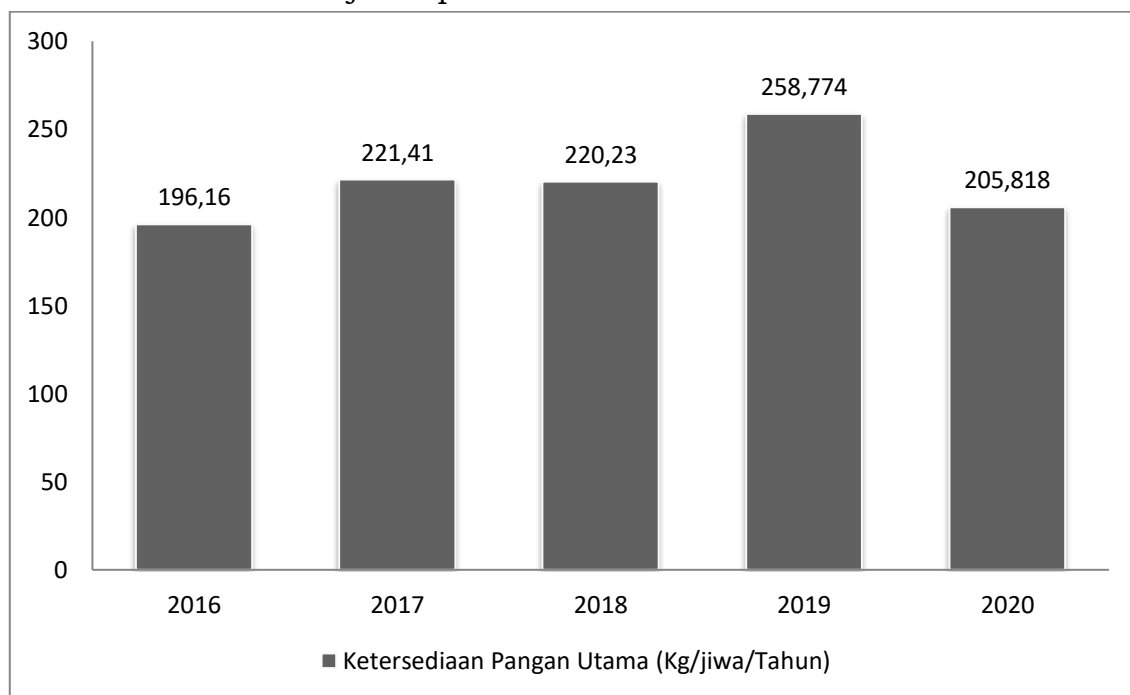
1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor

52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama Beras

Gambaran ketersediaan pangan utama beras di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 disajikan pada tabel dibawah ini.



Sumber : Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.31

Ketersediaan Pangan Utama Beras (Kg/jiwa/Tahun) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

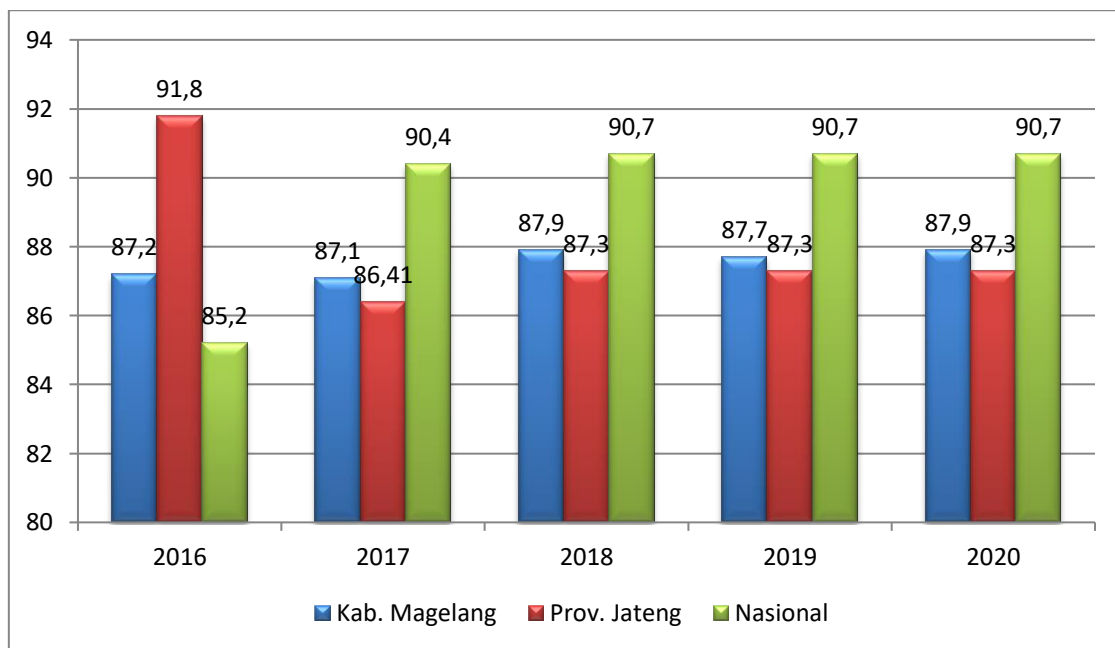
Tabel 2.104

Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PPH Ketersediaan Kab. Magelang	%	72,85	70,60	87,36	89,61	87,9
2	PPH Ketersediaan Prov. Jawa Tengah	%	-	85,3	85,3	NA	NA

Sumber: Distan dan Pangan Kabupaten Magelang diolah, 2021

PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 72,85% menjadi 70,60% pada tahun 2017. Namun angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 2019, yaitu 89,61%. Pada Tahun 2020 PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 87,9%.



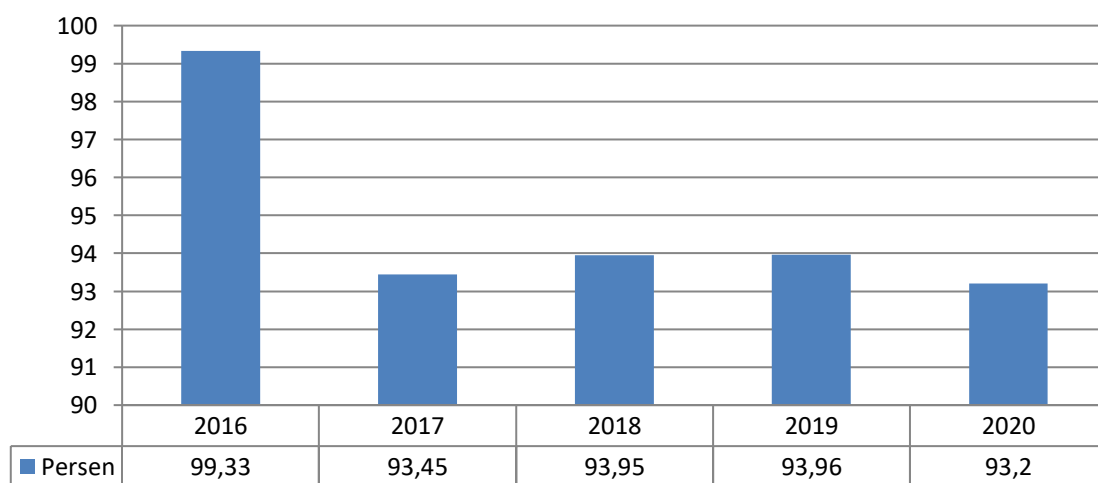
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.32

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Selama kurun waktu 2016-2020, skor PPH terus meningkat, kecuali tahun 2017 yang turun dari capaian tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 capaian Kabupaten Magelang lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan nasional, capaian Kabupaten Magelang lebih rendah.

4) Stabilitas Harga Pangan



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.33

Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Stabilitas Harga Pangan Kabupaten Magelang dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 Stabilitas harga pangan sebesar 99,33 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 93,2 persen.

5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang. Konsumsi beras tahun 2020 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 111,58 kg/perkapita/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL). Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.105

Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang 2020

Uraian	Jumlah
Jumlah produksi padi (ton)	347.785
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras (63,84%)	222.026
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.302.434
Angka konsumsi beras (kg/perkapita/tahun)	92,1
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	119.954
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	1,85
Surplus beras (Ton/Tahun)	102.072

Sumber : Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Magelang sebesar 1,85 dengan kondisi surplus sebesar 102.072 ton.

6) Ketersediaan komoditas selain beras

Pada tahun 2020 ketersediaan komoditas selain beras mengalami surplus kecuali untuk kedelai, kacang hijau, gula, daging sapi, susu dan Bawang merah deficit. Selengkapnya ada di tabel berikut:

Tabel 2.106

Ketersediaan Komoditas selain beras tahun 2020

No	Komoditi	Penyediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus / Defisit (Ton)
1	Padi	205.818	119.848	85.970
2	Jagung	40.887	1.171	39.716
3	Kedelai	-	12.753	-12.753

No	Komoditi	Penyediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Surplus / Defisit (Ton)
4	K. Tanah	635	130	505
5	K. Hijau	-	651	-651
6	Ubi Kayu	47.104	13.143	33.962
7	Ubi Jalar	16.715	2.733	13.983
8	Gula	2.318	9.629	-7.311
9	Daging sapi	1.817	5.075	-3.258
10	Daging ayam	11.862	8.979	2.883
11	Telur	14.836	8.719	6.117
12	Susu	709	3.513	-2.804
13	Ikan	18.520	16.136	2.384
14	Cabai merah	15.640	2.420	13.220
15	Cabai rawit	15.986	2.485	13.500
16	Bawang merah	403	3.735	-3.332

Sumber : Hasil Olahan, 2021

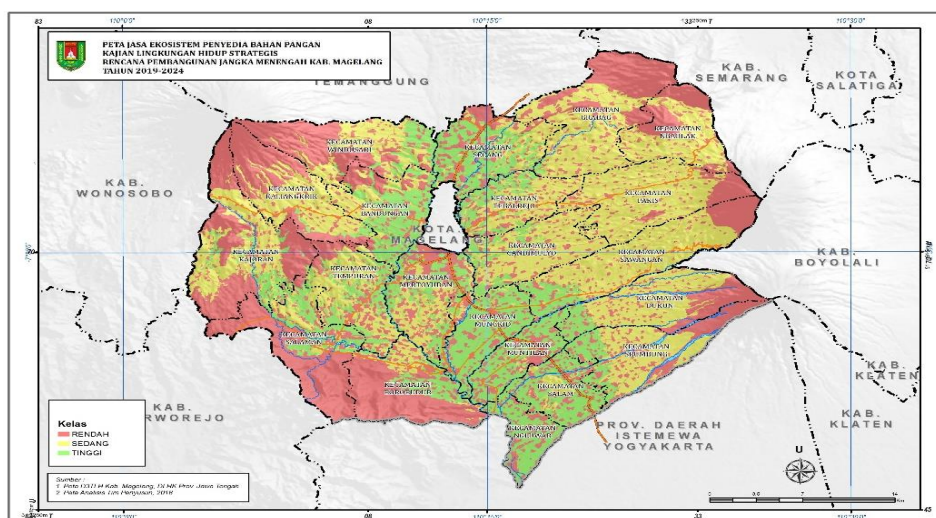
7) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan. Berikut kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.107
Luasan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)
Kabupaten Magelang

No	Kelas	Luas (Ha)	Persen
1	Rendah	43.306,03	38,31%
2	Sedang	45.128,48	39,92%
3	Tinggi	24.600,33	21,76%
4	Total	113.034,84	100,00%

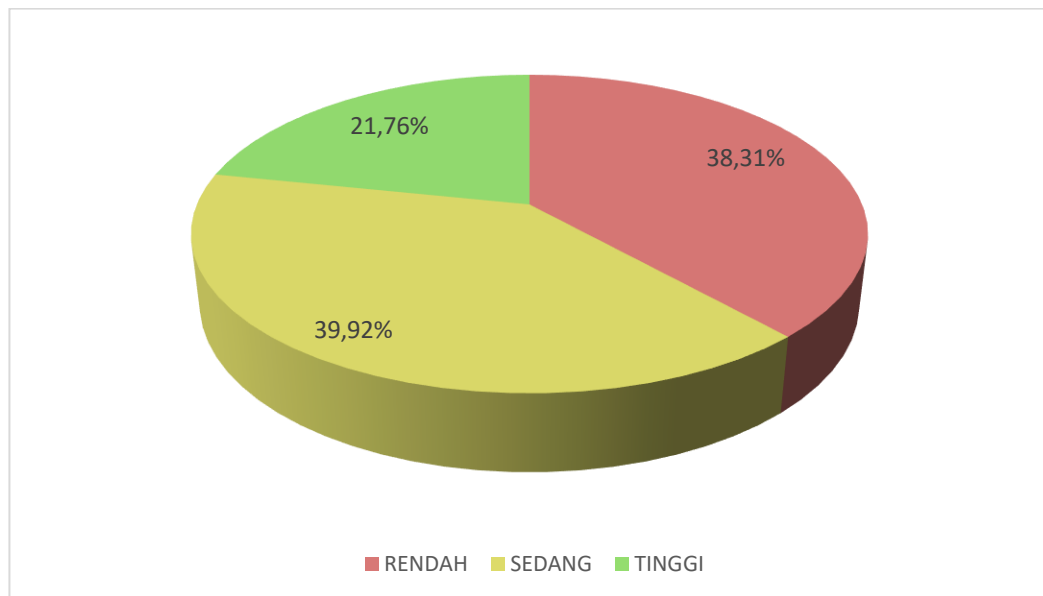
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Gambar 2.34

Peta Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Gambar 2.35

Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1)

Berdasarkan diagram dan peta di atas dapat dilihat bahwa Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP1) di Kabupaten Magelang lebih dominan berada pada kategori sedang dengan luas lahan 45.128,48 ha atau sebesar 39,92%, kemudian diikuti dengan kategori rendah dengan luas 43.306,03 ha atau sebesar 38,31% dan kategori dengan persentase paling kecil adalah kategori tinggi dengan luas lahan 24.600,33 ha atau sebesar 21,76%.

d. Pertanahan

Urusan pertanahan menjadi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa urusan pertanahan memiliki tiga indikator, yaitu (1) persentase luas lahan bersertifikat, (2) penyelesaian kasus tanah negara dan (3) penyelesaian izin lokasi.

Hingga tahun 2020, persentase luas lahan yang telah bersertifikat sebanyak 39,7%, meningkat 2,53% dari tahun 2019 yang sebesar 37,17% dengan luasan terbanyak berada pada hak milik seluas 408.788.562 m², sedangkan yang terkecil adalah hak guna usaha dengan luasan 68.900 m².

Sedangkan untuk penyelesaian kasus tanah negara dari tahun 2016-2020 sebesar 100% dimana semua permasalahan terkait dengan kasus tanah negara dapat diselesaikan seluruhnya. Indikator penyelesaian izin lokasi dikaitkan dengan investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Magelang khususnya.

Tabel 2.108
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)	Bidang	Luas (m2)
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	28,93		30,31		32,19		37,17		39,7	
	Hak Milik	380.322	298,742,548	404.921	312,884,055	432.284	330,570,963	478.533	382,100,784	518.594	408.788.562
	Hak Guna Bangunan	7.829	3,940,369	8.996	4,217,355	9.038	4,376,391	9.319	4,569,464	9.203	4.609.435
	Hak Guna Usaha	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900	1	68.900
	Hak Pakai	1.934	9.861.892	2.226	10.337.741	2.869	12.918.222	3.598	15.128.226	3.797	15.898.613
	Hak Pengelola	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857	10	1.093.857
	Hak Wakaf	983	428,136	1.050	477,184	1.111	515,863	1.236	576,652	1300	606.771
2.	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100		100		100		100		90	
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	NA		100		100		100		100	

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, 2021; Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2021

e. Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori sedang. Kualitas lingkungan hidup dilihat melalui kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.109

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air	59,09	54,62	50,77	56,15
2.	Indeks Kualitas Udara	82,39	82,82	84,19	87,03
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,27	76,74	76,74	68,24
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,95	71,93	76,18	71,30

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Kualitas lingkungan hidup akan ditunjukkan dengan membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun ke depan, dimulai dari penghitungan angka IKLH Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 70,59 yang didapatkan dari perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Penghitungan IKLH sebelum Tahun 2020 dan Tahun 2020 berubah, hal ini yang menyebabkan nilai IKLH Kabupaten Magelang Tahun 2020 lebih rendah dari target.

Sebelum Tahun 2020, IKLH dihitung dengan komposisi $(0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) + (0,4 \times \text{IKTL})$; sedangkan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL /SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020

Hal : Metode Perhitungan IKLH adalah = $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$.

- 2) Jumlah Usaha Peserta Proper yang Mencapai Minimal Ranking Biru
Indikator jumlah usaha peserta Proper yang mencapai minimal ranking biru merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur ketercapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat Proper Biru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Persentase Perusahaan Minimal Berpredikat Proper Biru
Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perusahaan mencapai rangking emas	perusahaan	0	0	0	0
2.	Jumlah perusahaan mencapai rangking hijau	perusahaan	0	0	0	0
3.	Jumlah perusahaan mencapai rangking biru	perusahaan	7	7	3	1
4.	Jumlah perusahaan peserta Proper	perusahaan	115	115	51	51
5.	Persentase perusahaan minimal berpredikat Proper Biru	%	6,09	6,09	5,88	2

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Indikator Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru pada tahun lebih rendah dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah akibat refocusing dan Pandemi COVID 19

- 3) Persentase Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga disebutkan bahwa target pengelolaan sampah adalah 100% pada akhir tahun 2025. Target pengelolaan sampah tersebut meliputi target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dengan lingkup pelayanan seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data, capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang tahun 2017 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut..

Tabel 2.111
Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah timbulan sampah	ton/tahun	231.482,27	233.797,09	236.155,06	238.345
2.	Jumlah pengurangan sampah melalui 3R	ton/tahun	34.238,17	44.472,43	45.132,59	45.307.45

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah sampah tertangani	ton/tahun	28.390,66	31.336,77	38.565,8	41.307,05
4.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,79	19,02	19,11	17,08
5.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	12,26	13,40	16,38	17,21
6.	Persentase pengelolaan sampah	%	27,05	32,42	35,49	34,29

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Persentase pengelolaan sampah pada tahun 2017 mencapai 27,05% dan meningkat menjadi 34,29 % pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan target 2020, maka nilainya lebih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah pengelolaan sampah sangat terpengaruh kondisi pandemi COVID-19, banyak Bank sampah yang untuk sementara waktu tidak berani beroperasi sehingga sampah yang dikelola berkurang. Selain itu pertumbuhan Bank Sampah baru tidak memenuhi target. Terkait jumlah sampah yang ditangani juga memprihatinkan karena jumlah sampah masuk ke TPA Pasuruhan justru meningkat, namun demikian kapasitas TPA Pasuruhan sudah penuh.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024, mulai tahun 2021 indikator persentase pengelolaan sampah berubah menjadi indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sesuai dengan arahan sesditjen pengelolaan sampah dan limbah B3 KLHK Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8/2020.

IKPS merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat. Untuk formula perhitungan mendasarkan pada perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

4) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam membentuk struktur ruang wilayah perkotaan dan memiliki berbagai fungsi strategis. Secara ekologis, RTH berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara, menjaga kelestarian air dan tanah sedangkan secara sosiologis RTH diperlukan sebagai ruang untuk berinteraksi dan rekreasi bagi penduduk di wilayah perkotaan. Persentase RTH terhadap luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112

Persentase Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
-----	-----------	--------	------	------	------	------

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Luas wilayah perkotaan	Ha	16.069,09	16.069,09	16.069,09	16.069,09
2.	Luas RTH publik di wilayah perkotaan	Ha	302,85	302,85	302,85	302,85
3.	Luas RTH privat di wilayah perkotaan	Ha	6.059,65	6.008,23	6.008,23	6.008,23
4.	Persentase ketersediaan RTH publik di wilayah perkotaan	%	1,88	1,88	1,88	1,88
5.	Persentase ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan	%	37,71	37,39	37,39	37,39
6.	Persentase ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan	%	39,59	39,27	39,27	39,59

Sumber : DLH Kabupaten Magelang, 2021

Secara akumulasi, capaian ketersediaan RTH terhadap luas wilayah perkotaan sudah melampaui persentase luas RTH yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu sebesar 30%. Namun apabila dilihat per komponen indikator maka RTH publik di wilayah perkotaan belum memenuhi target yang dipersyaratkan yaitu 20%. Sedangkan ketersediaan RTH privat di wilayah perkotaan telah memenuhi syarat minimal yaitu 10%.

5) Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya pelaksanaan konservasi di Kabupaten Magelang meliputi konservasi daerah resapan air, rawan bencana dan mata air. Upaya ini dilakukan melalui program kampung iklim dan sekolah adiwiyata. Adapun capaian kinerja konservasi sumber daya alam tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113

Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	%	0,82	1,34	2,41	2,56
2	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	%	0,34	0,44	0,72	0,78
3	Persentase mata air yang dikonservasi	%	4,94	5,38	12,11	16,14
4	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	%	1,34	1,88	3,76	5,65
5	Persentase sekolah adiwiyata	%	0,49	1,06	18,33	19,55
6	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	%	1,59	2,02	7,47	8,94

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kinerja pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pelaksanaan konservasi di daerah resapan air dan rawan bencana masih rendah. Berkaitan dengan upaya konservasi, perlu diperhatikan pula untuk kawasan-kawasan rawan bencana mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan rawan bencana.

Sebagaimana hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, 73,83% wilayah Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana kelas sedang.

- 6) Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani
Data capaian kinerja penanganan kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.114

Persentase Kasus Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang Ditangani di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus lingkungan dan pengaduan terkait izin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	Kasus	9	10	12	14	9
2	Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang teregistrasi	Kasus	10	10	15	14	9
3	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan terkait izin lingkungan	%	90	100	80	100	100

Sumber: DLH Kabupaten Magelang, 2021

Dari tabel diatas, ditunjukkan bahwa kinerja penanganan kasus lingkungan di Kabupaten Magelang dapat dikatakan sangat baik. Dilihat dari persentase jumlah kasus yang diselesaikan tidak kurang dari angka 80% dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik yang baik diantaranya diukur dari pelayanan administrasi kependudukan. Kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115

Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang melakukan perekaman e-KTP	%	94,90	96,62	96,13	95,27	99,34
2	Penerbitan KK	%	94,89	95,46	96,05	97,02	97,44
3	Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK	%	94,90	96,04	96,09	96,045	98,39

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya Rasio Perekaman KTP – elektronik dan Keluarga yang Ber KK. Penduduk yang melakukan perekaman KTP persentasenya mengalami peningkatan dalam

5 (lima) tahun terakhir, tercatat pada tahun 2020 sudah 99,34% penduduk yang melakukan perekaman KTP. Disamping itu penerbitan KK juga menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya, dari 94,89% pada tahun 2016 menjadi 97,44% pada tahun 2020.

Kualitas pelayanan akte kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian Kabupaten Magelang di Kabupaten Magelang juga semakin baik, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116
Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran,
Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penerbitan Akta Kelahiran (0-18 tahun)	%	69,63	72,17	77,64	86,98	87,46
2	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	%	38,75	33,27	42,40	41,50	50,25
3	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	0	0	0	0	100
4	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	%		72,17	77,64	75,79	79,23

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi kependudukan semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian. Salah satu faktornya adalah tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang dalam mengurus akta kelahiran, perkawinan dan kematian semakin meningkat. Di samping itu saat ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri meluncurkan program layanan akta kelahiran online. Layanan ini memungkinkan masyarakat membuat akta kelahiran melalui situs online yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Disdukcapil untuk mengurus akta kelahiran karena bisa langsung cetak dari rumah. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program kebijakan yang hadir dalam upaya melindungi hak anak secara Hukum. Terkait Penerbitan KIA, Kabupaten Magelang baru mulai menerbitkan KIA pada Tahun 2018. Dilihat dari persentase penerbitan KIA, terjadi peningkatan baik dari segi jumlah maupun persentase. Kedepan harus difikirkan lagi agar anak – anak dapat memperoleh manfaat lebih dari KIA yang dimiliki, misal potongan harga pembelian buku atau potongan harga tiket masuk tempat wisata.

Tabel 2.117
Presentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIA yang diterbitkan		0	0	26.166	16.1254	204.059
2	Jumlah anak Usia KIA		0	0	318.882	330.731	331.990
3	Persentase Penerbitan KIA	%	0	0	8,21	48,76	61,47

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2021

g. Keluarga Sejahtera dan KB

Bangsa Indonesia tengah menghadapi bonus demografi. Salah satu tantangan bonus demografi saat ini adalah masih tingginya angka stunting yaitu sebesar 27,67% (data SSGI). Adapun angka stunting di Kabupaten Magelang pada bulan Desember tahun 2020 sebesar 20,23%.

Sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, target nasional penurunan stunting sebesar 14% (empat belas persen) di tahun 2024. Dalam rangka mencapainya, maka daerah diminta untuk mewujudkan bonus demografi dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, salah satunya melalui penguatan fungsi keluarga. Penguatan fungsi keluarga dilakukan dengan pembangunan keluarga yang integrative, tidak hanya pengaturan jarak dan jumlah kelahiran, tetapi melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Beberapa indikator pada urusan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana yang dipakai Kabupaten Magelang untuk mendukung Bangga Kencana adalah :

1) Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data mengenai cakupan KB aktif di Kabupaten Magelang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	IUD	Jiwa	32.494	33.894	25.110	26.711	26.817
	MOW/MOP	Jiwa	10.400	10.687	8.800	9.131	8.593
	Kondom	Jiwa	4.025	4.150	4.931	5.202	6.236
	Implant	Jiwa	23.147	24.818	16.515	18.111	17.996
	Suntik	Jiwa	88.271	87.381	79.113	81.025	77.753
	Pil	Jiwa	21.050	20.612	14.924	14.801	14,391
	Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	179.050	181.542	149.393	155.041	151.786

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jiwa	225.057	227.752	204.431	205.292	202.572
3	Cakupan peserta KB aktif	%	80,79	79,71	73,08	75,52	74,93
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi	%	8,97	9,32	13,36	11,88	12,33
5	Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	%	79,77	79,31	73,08	75,52	74,93
6	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	36,86	38,23	33,75	34,86	35,19
7	Usia Kawin Pertama (UKP) /Rata-rata usia kawin pertama wanita	%					
8	Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	%	56,09	55,03	55,11	53,27	NA

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, cakupan peserta KB aktif di atas, secara umum selama 5 tahun perkembangannya bisa dikatakan cenderung menurun. Dalam lima tahun tersebut, rentang cakupan indikator ini berada pada posisi 80,79% - 74,93%. Tetapi jika dibandingkan dengan target SPM dari Kemenkes maupun dari BKKBN tersebut, rasio KB Aktif Kabupaten Magelang telah mencapai target karena sejak tahun 2012 cakupannya sudah lebih dari 65% bahkan lebih dari 70%.

2) Total Fertility Rate

TFR (*Total Fertility Rate*) bisa didefinisikan sebagai jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika ia melampaui masa-masa melahirkan anak. Capaian TFR di Kabupaten Magelang tahun 2015-2018 relatif turun. Pada tahun 2015 berada pada angka 2,26, tahun 2016 naik menjadi 2,28, tahun 2017 naik lagi menjadi 2,30 dan turun menjadi 2,17 pada tahun 2018. Salah satu faktor turunnya angka TFR adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang.

3) Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai Keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera Tahap I (KSI) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti yang telah disebutkan.

Tabel 2.119

Persentase Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	91.106	90.389	86.283	84.230	82.177
2.	Jumlah Keluarga*	Keluarga	390.618	404.777	406.420	407.128	407.884
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Persen	23,32	22,33	21,23	20,69	20,15

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun dari 2016 hingga 2020 mengalami tren penurunan. Persentase tertinggi pada tahun 2016 yaitu 23,32% dengan 91.106 keluarga pra sejahtera, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 20,15% dengan jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 82.177 keluarga.

Sejenis dengan persentase keluarga pra-sejahtera, persentase keluarga sejahtera I juga memiliki tren parabola yaitu dengan pola naik kemudian turun. Puncak parabola yaitu persentase tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 16,98%, sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 14,74%. Secara persentase, indikator ini memiliki tren yang semakin membaik karena semakin menurun, akan tetapi bila dilihat dari jumlah keluarga sejahtera I, ternyata jumlah keluarga yang tergolong sejahtera I memiliki tren yang meningkat terus. Persentase semakin kecil karena jumlah keluarga semakin bertambah banyak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.120

Persentase Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Keluarga Sejahtera I	KK	66.341	66.340	62.141	59.995	57.851
2.	Jumlah Keluarga	Keluarga	390.618	404.777	406.420	407.128	407.884
3.	Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	16,98	16,39	15,24	14,74	14,18

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

h. Perhubungan

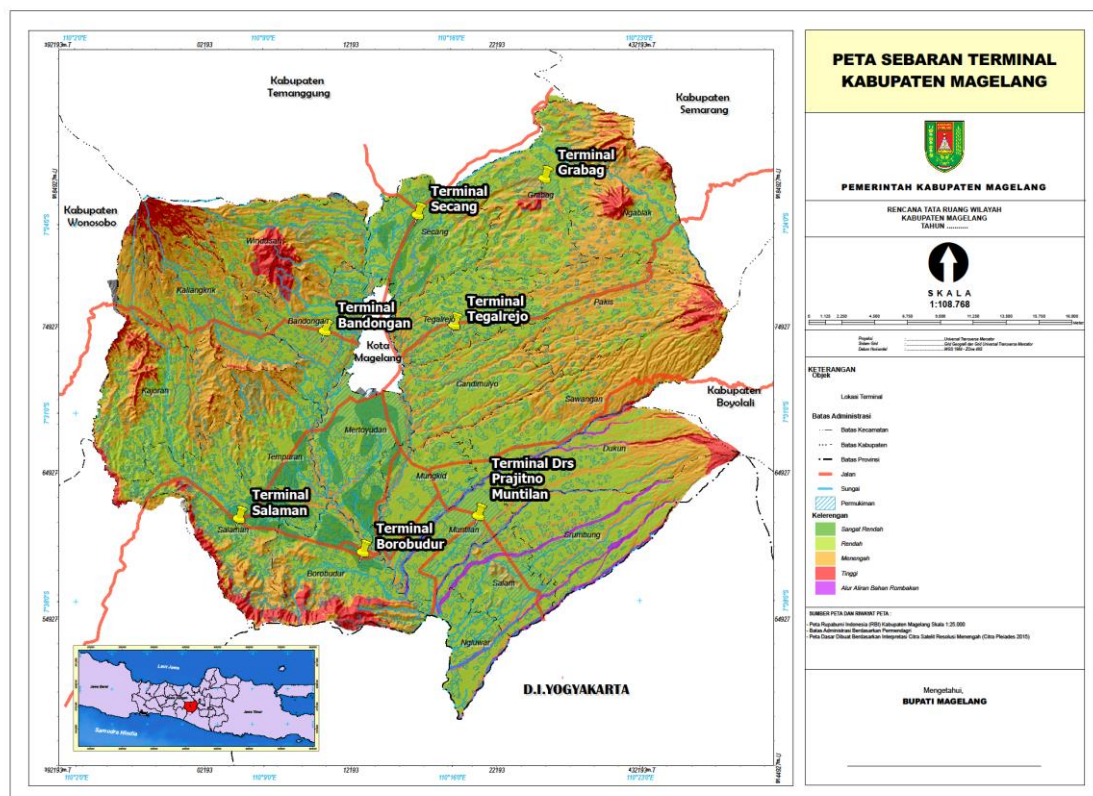
Perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pembangunan terutama mendukung perekonomian dan perkembangan wilayah. Secara umum gambaran ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121
Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Magelang
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Data Terminal (A, B dan C)					
	Ketersediaan Terminal A	0	0	0	0	0
	Ketersediaan Terminal B (Muntilan)	1	1	1	1	1
	Ketersediaan Terminal C ((Tegalrejo, Bandongan, Grabag, Secang, Salaman, Borobudur)	6	6	6	6	6
2	Pemenuhan Fasilitas Keselamatan jalan					
	LPJU	NA	2.499	2.610	2.610	2.962
	APILL	NA	18	18	18	18
	Guardrail	NA	4.748	5.104	5.104	5.104
	Rambu	NA	2.457	2.574	2.574	2.681
	Marka	NA	11.435	11.660	11.660	11.660
3	Stasiun	0	0	0	0	0
4	pengelolaan parker					
	Jumlah titik parkir yang dikelola	NA	193	175	225	238
5	Trayek Angkutan Lalu lintas					
	Rasio Ijin trayek	NA	82,56	74	60,88	89,85
	jumlah trayek yang berijin	NA	1089	976	803	726
	Jumlah trayek yang ada di kabupaten	NA	1.319	1.319	1.319	808
6	kelayakan kendaraan umum					
	rasio kelayakan kendaraan umum	NA	98,39	88,1	89,87	60,96
	Kemdaraam bermotor lulus KIR	NA	20.267	18.832	19.491	14.369
	KBWU	NA	20.598	21.376	21.688	23.572
7	Armada Angkutan Umum					
	Jumlah armada	NA	1215	1174	1093	1447
	Jumlah Pengusaha angkutan penumpang	NA	18	18	18	63

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan seperti yang disebutkan pada tabel di atas, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berikut ini kami sajikan peta sebaran terminal di wilayah Kabupaten Magelang digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2021

Gambar 2.36

Peta Sebaran Terminal Di Kabupaten Magelang

Target atau kebutuhan sarana dan prasarana yang akan dibangun di Kabupaten Magelang sampai tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122

Target/Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Magelang Sampai Dengan Tahun 2024

Indikator	Satuan	2024
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan		
1. Jumlah halte yang terbangun	Buah	16
2. Jumlah terminal yang direvitalisasi	Buah	4
3. Jumlah parkir yang dikelola	Titik	295
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas		
1. Jumlah APILL yang terbangun	Buah	18
2. Jumlah rambu yang terbangun	Buah	3.080
3. Jumlah marka yang terbangun	Meter	13.660
4. Jumlah zebra cross yang terbangun	Lokasi	26
5. Jumlah LPJU yang terbangun	Titik	3.162
6. Jumlah guardrail yang terbangun	Meter	5.304
7. Jumlah ITS yang terbangun	Titik	17
Persentase angkutan umum layak jalan		
1. Kendaraan motor yang diuji	Buah	16.920

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Terkait dengan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, maka perlu diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang merupakan lokasi rawan kecelakaan. Berikut kami sajikan beberapa lokasi rawan kecelakaan di wilayah Kabupaten Magelang.

Tabel 2.123

Lokasi Rawan Kecelakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2020

NO	RUAS JALAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sambung - Simpang Tiga Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang	Pasar Secang
2	Magelang - Yogyakarta	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare	Jembatan Blondo - SPBU Pare
3	Jl Magelang - Purworejo	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.
4	Jl. Muntilan - Salam	Desa Salam, Desa Sucen, Desa Jumoyo, Desa Gulon	Desa Salam, Desa Sucen, Desa Jumoyo, Desa Gulon			
5	Jl Soekarno - Hatta				Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar	Dusun Pedak, Simpang Tiga Pangenan, Simpang Empat Banar
6	Jl magelang - Salatiga				Slumut Pakis	Slumut Pakis
7	Jl magelang - Boyolali				Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2021

Sedangkan data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.124

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas, Korban, dan Kerugian Material Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Korban				Jumlah Kerugian (Rp. 000)
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Jumlah Korban	
1	2016	750	163	3	996	1162	533.000
2	2017	780	158	11	929	1098	465.980
3	2018	901	157	1	1030	1188	359.240
4	2019	1180	145	3	1373	1521	334.000
5	2020	781	138	2	936	1076	252.950

Sumber: Polres Magelang, 2021

Indikator yang digunakan dalam menghitung kinerja perhubungan di Kabupaten Magelang adalah cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dihitung berdasarkan:

1. Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan;
2. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
3. Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan
4. Persentase angkutan umum layak jalan

Perkembangan indikator kinerja perhubungan tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125

Indikator Kinerja Perhubungan Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Ketersediaan					Kebutuhan/ Target
		2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan							
1. Jumlah halte yang terbangun	Buah	NA	9	11	12	12	16
	%		56,25	68,75	75	75	
2. Jumlah terminal yang terbangun	Buah	NA	6	6	6	6	
3. Jumlah terminal yang direhabilitasi	Buah	-	-	-	-	-	4
4. Jumlah parkir yang dikelola	Titik	NA	193	175	225	238	295
	%		65,42	59,32	76,27	80,68	
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas							
1. Jumlah APILL yang terbangun	Buah	NA	18	18	18	18	18
	%		100	100	100	100	
2. Jumlah rambu yang terbangun	Buah	NA	2.457	2.574	2.574	2.681	3080
	%		79,77	83,57	83,57	87,05	
3. Jumlah marka yang terbangun	Meter	NA	11.435	11.660	11.660	11.660	13660
	%		83,71	85,36	85,36	85,36	
4. Jumlah zebra cross yang terbangun	Lokasi	NA	10	20	20	20	26
	%		38,46	76,92	76,92	76,92	
5. Jumlah LPJU yang terbangun	Titik	NA	2.499	2.610	2.610	2.962	3162
	%		79,03	82,54	82,54	93,67	
6. Jumlah guardrail yang terbangun	Meter	NA	4.748	5.104	5.104	5.104	5304
	%		89,52	96,23	96,23	96,23	
7. Jumlah ITS yang terbangun	Titik	NA	-	-	-	-	17
Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas							
1. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	Orang	NA	50	86	126	126	326
	%		15	26	39	39	
2. Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar	Orang	NA	54	79	149	219	499
	%		10,82	15,83	29,86	43,89	
Persentase angkutan umum layak jalan							
1. Kendaraan motor yang diuji	Buah	NA	20.267	18.832	19.491	14.369	16.920

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2021

Terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, Pemerintah Pusat telah menanamkan investasi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan di wilayah KSPN Borobudur. Kegiatan

Percepatan pembangunan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang. Di bidang perhubungan, percepatan pembangunan diarahkan pada perkuatan fungsi aksesibilitas dan mobilitas. Perkuatan fungsi aksesibilitas dan mobilitas dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, antara lain :

- Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, berupa revitalisasi terminal Borobudur, Secang, Salaman; Pengadaan dan pemasangan APILL di Kawasan Candi Borobudur; Pengadaan dan pemasangan LPJU di Kawasan Candi Borobudur; dan Pengadaan dan pemasangan rambu di Kawasan Candi Borobudur.
- Pembangunan Anjungan cerdas

Dalam mendukung percepatan pembangunan KSPN, dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun Studi Pengembangan Angkutan Aglomerasi Di Wilayah Purwomanggung yang menghasilkan usulan pengembangan 3 (tiga) koridor angkutan aglomerasi Wilayah Purwomanggung, meliputi :

- Koridor 1 : Terminal Secang – Jl Lingkar Magelang (Jl. Urip Sumoharjo) – Terminal Tidar Magelang – Armada Town Square (Artos) – Mertoyudan – Blondo – Borobudur – Krepekan – Muntilan PP;
- Koridor 2 : Secang – Kranggan – Terminal Temanggung – Kedu – Parakan PP; dan
- Koridor 3 : Borobudur – Salaman – Margoyoso – Jati – Bener – Loano – Purworejo – Stasiun Kutoarjo PP

Bahkan pada tahun 2020, di koridor Borobudur – Kutoarjo telah mulai diterapkan penyediaan angkutan massal dengan pelayanan yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau atau berbasis Bus Rapid Transit (BRT).

Percepatan pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangkap peluang untuk memperluas multiplier efek yg timbul ke seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Borobudur sebagai *focal point* pembangunan dan *point of interest* pariwisata (skala internasional) akan memberikan pengaruh yang signifikan. Peningkatan volume kendaraan, peningkatan wisatawan dan peningkatan pergerakan barang maupun orang merupakan peluang sekaligus pemicu timbulnya permasalahan. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah :

- 1) Penyediaan prasarana angkutan jalan dengan menerapkan konsep *park and ride* antara lain meliputi halte, terminal, dan parkir;
- 2) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas (rambu-rambu, marka, PJU, guardrail, zebra cross, APILL, dan ITS);
- 3) Peningkatan layanan angkutan melalui penyusunan rencana perhubungan yang terintegrasi dan terpadu, penataan ulang rute

angkutan, penyediaan angkutan lokal dengan sistem BRT dalam rangka mempermudah pendistribusian orang/barang :

- Dari Daya Tarik Wisata berskala international ke seluruh Daya tarik wisata lokal,
- Dari dan ke pusat-pusat kegiatan,
- dari dan ke pusat-pusat pelayanan
- dari dan ke kawasan perdesaan
- dari dan ke kawasan perkotaan
- dari kawasan perkotaan ke perdesaan atau sebaliknya

i. Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Magelang mulai tahun 2017 sedang berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart Regency*). Dalam rangka mendukung terwujudnya hal tersebut maka perlu disusun indikator-indikator kinerja tambahan sebagai tolok ukur dalam ketercapaian perwujudan *smart regency*. Indikator-indikator yang sebelumnya digunakan (sesuai Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) mengalami penyesuaian dengan kondisi wilayah Kabupaten Magelang dan ketersediaan data yang dimiliki oleh OPD. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Indeks SPBE Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sebesar 2,74 masuk dalam kategori cukup, dan tahun 2020 adalah 2,94 masuk kategori baik. Untuk tahun 2022-2024, penghitungan indeks SPBE menggunakan aturan yang terbaru, yaitu PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk tahun 2022-2024, penghitungan indeks SPBE menggunakan aturan yang terbaru, yaitu PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, berupa perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Untuk penilaian predikat indeks tingkat kematangan SPBE sebagai berikut:

Tabel 2.126
Predikat Indeks Tingkat Kematangan SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

2) Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi.

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi pada tahun 2020 terhitung 57,63% meningkat dari tahun 2019 sebesar 38,17%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PD yang terfasilitasi jaringan komunikasi data dan peningkatan cakupan layanan komunikasi yang secara teknis mengurangi *blankspot* di area Kabupaten Magelang.

Tabel 2.127

Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi informasi di Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan yang terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	%	NA	11,71	23,41	39,52	53,37
2	Cakupan Layanan Komunikasi	%	NA	72,72	73	75	75
3	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standart komunikasi Informasi	%	NA	28,14	32,14	38,17	57,63

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

3) Cakupan Layanan Informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah

Persentase cakupan layanan informasi bagi desa dan perangkat daerah tahun 2019 sebesar 41.32% ditahun 2020 meningkat menjadi 56,46%. Cakupan ini diperoleh dari persentase urusan yang terintegrasi dengan big data persentase layanan domain dan sub domain pemerintah yang secara kuantitas dan kualitas jaringan TIK serta sarana lainnya. Persentase urusan yang terintegrasi dengan big data tahun 2019 sebesar 23.68% dan pada tahun 2020 menjadi 35,00%.

4) Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik

Persentase layanan *website* PD dan Desa yang memenuhi kriteria diarahkan untuk menampilkan informasi kinerja, data, layanan serta kegiatan yang dilaksanakan. Saat ini belum ada kriteria yang diberlakukan untuk mengarahkan isi dari *website* yang dimiliki PD maupun desa.

Tabel 2.128
Cakupan Layanan dan Diseminasi Informasi Publik
di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase layanan website PD dan desa yang memenuhi kriteria	%	0	0	0	0,13	24,40
2	Persentase diseminasi informasi melalui media massa	%	66,67	66,67	70	66,67	90
3	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	%	41,67	41,67	25	66,67	66,67
4	Cakupan diseminasi melalui media interpersonal	%	41,67	75	0	58,33	100
5	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	%	41,67	58,33	25	100	100
6	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	%	0	128,22	100	100	100
7	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	%	31,95	61,65	36,67	65,30	80,18

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

Diseminasi informasi melalui berbagai media yang dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun 2016 sampai dengan 2020 bergantung dengan kegiatan langsung yang belum memanfaatkan teknologi informasi, hal ini dapat dilihat dari variansi angka cakupan layanan diseminasi informasi publik dari tahun 2016 sampai tahun 2020.

- 5) Persentase layanan *website* PD dan desa yang memenuhi kriteria
Keterbukaan informasi publik telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan menggunakan media baru berupa layanan *website* PD dan *website* desa. Tolok ukur dari layanan *website* ini adalah persentase layanan *website* PD yang memenuhi kriteria informatif dan layanan *website* desa yang memenuhi kriteria cukup informatif. Kriteria ini didasarkan pada pemeringkatan dari Badan Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi melalui penilaian kuesioner secara mandiri yang dilanjutkan dengan visitasi verifikasi. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Magelang belum berpartisipasi dalam pemeringkatan layanan *website* PD sehingga belum ada data yang dapat ditampilkan.
- 6) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI
Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI diindikasikan dengan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Tingginya cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM dipengaruhi oleh

aktifitas KIM di tiap kecamatan. Sedangkan konten literasi TIK diarahkan agar informasi yang disampaikan ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar.

Tabel 2.129
Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	119,05	119,05	100	119,05	119,05
2	Cakupan konten literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	%	0	16,67	25	33,33	50
3	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	%	61,9	67,86	62,5	76,19	82,02

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

j. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi menjadi salah satu penggerak perekonomian terutama di tingkat masyarakat golongan menengah ke bawah. Semakin besar jumlah persentase koperasi yang aktif, maka semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dengan menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Pengaruh koperasi terhadap perekonomian wilayah ditunjukkan dari perannya dalam membantu menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai lapangan pekerjaan informal alternatif ketika pekerjaan formal tidak lagi dapat memenuhi permintaan lapangan pekerjaan.

Dari tahun 2016 sampai dengan 2018 Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Magelang cenderung naik, dimana pada Tahun 2016, tercatat 472 (80,41%) dan tahun 2018 tercatat 405 (94,19 %). Pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif mengalami penurunan menjadi sejumlah 190 (39,42 %) lalu naik kembali menjadi 292 unit (66,21%) pada tahun 2020. Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi di Kabupaten Magelang menjadi salah satu media penggerak perekonomian skala kecil menengah.

Tabel 2.130
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	472	394	405	190	292
2	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	587	421	430	482	441
3	Persentase Koperasi Aktif	%	80,41	93,59	94,19	39,42	66,21

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2021

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha besar (bukan merupakan cabang). Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi

perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM cenderung stagnan yaitu sejumlah 106. 200 unit.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. LKM atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Jenis BPR dan LKM yang ada di Kabupaten Magelang adalah Usaha Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, jumlah BPR/LKM hanya 7 unit dan kini telah mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Magelang. Jumlah BPR/LKM akan menunjukkan seberapa besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah khususnya untuk masyarakat ekonomi rendah dan pengusaha kecil. Meski demikian, tidak banyak usaha mikro yang menggunakan BPR/LKM sebagai lembaga bantuan modal. Sebagian besar usaha ekonomi kecil masyarakat masih mendapatkan bantuan modal dari bank komersial dan modal pribadi.

4) Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui perekonomian masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran penting terutama untuk memberikan pembinaan terhadap usaha atau kegiatan ekonomi lokal. Pembinaan dari pemerintah dapat berbentuk fisik maupun nonfisik, seperti bantuan alat modal dan pelatihan teknis dan manajerial serta pendampingan dan fasilitasi pameran dan promosi produk. Keberhasilan dari program ini diindikasikan dengan meningkatnya omzet penjualan dan kapasitas produksi.

Persentase usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Magelang masih sangat kecil. Pada tahun 2016, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan mencapai 1,6% dari jumlah keseluruhan unit usaha mikro yang ada. Persentase tersebut mengalami penurunan mencapai menjadi 0,96% pada tahun 2017 dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 0,96. Pada tahun 2020, persentase usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan pembinaan kembali mengalami penurunan yang sangat dratis yaitu hanya sebesar 0,07 % hal ini terjadi *refocusing* anggaran untuk penanganan covid.

Tabel 2.131
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Unit	1.706	1.024	1.225	1.214	77
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	106.637	106.637	106.637	106.637	106.637
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	%	1,6	0,96	1,15	1,14	0,07

Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2021

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar.

Penanaman modal di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penanaman modal dalam negeri, yaitu hampir seluruhnya PMDN dan hanya 1 PMA. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Magelang untuk pihak asing masih sangat kurang. Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah dan target baru untuk memanfaatkan potensi Kabupaten Magelang sebagai daya tarik investor asing.

Tabel 2.132
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA)
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Investor PMDN	Unit	517	730	1.186	2.380	48
2	Investor PMA	Unit	1	0	8	4	9

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2021

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolak ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyek yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Tabel 2.133
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi PMA	Milyar Rp	6.000	-	68.858	68.858	0,4104
2	Nilai Investasi PMDN	Milyar Rp	484.941	1.030.690	1.907.516	1.907.516	164,650
3	Total Nilai Investasi	Milyar Rp	490.490	1.030.690	1.976.374	1.976.374	165,06

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2021

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah keseluruhan PMDN/PMA. Dengan melihat rasio daya serap tenaga kerja, dapat diketahui pengaruh adanya investasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA akan mencerminkan besarnya daya tampung di perusahaan PMDN/PMA untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Besar jumlah tenaga kerja yang terserap oleh perusahaan PMDN dan PMA sangat dipengaruhi jumlah perusahaan itu sendiri. Penyerapan tenaga kerja terbanyak terjadi pada tahun 2020.

Tabel 2.134
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Variabel	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	Unit	518	730	424	2.384	647
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	Orang	7.583	8.297	9.205	25.433	1921
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		6,83	11,37	21,71	9,38	33,702

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2021

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA akan menunjukkan besar pertumbuhan nilai realisasi proyek di suatu daerah. Angka pertumbuhan ini selanjutnya dapat menjadi salah satu aspek yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah mampu mempertahankan tren investasi dan daya tarik/potensi daerahnya. Selama periode 2014 hingga 2018 kecuali tahun 2016, Kabupaten Magelang mengalami kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA, meski nilai kenaikannya berbeda-beda. Kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA terbesar terjadi dari tahun 2016 menuju 2017, yakni sebesar 525.490 miliar rupiah, dari tahun 2014 menuju 2015 yang mampu mencapai 2.605 miliar rupiah, serta dari tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai 5.863 miliar rupiah, serta dari tahun 2017 ke tahun 2018 dengan jumlah yang tetap. Kenaikan nilai investasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah perusahaan PMDN dan PMA yang berinvestasi pada tahun terkait, tetapi juga skala perusahaan atau proyek kegiatan

yang dilakukan juga sangat mempengaruhi besar nilai investasi yang ditanamkan.

1. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia seutuhnya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menunjukkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Secara umum jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 26 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 naik menjadi 27 Organisasi. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya partisipasi penduduk terhadap pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020.

Jumlah kegiatan kepemudaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat diketahui dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Tingginya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dalam mendukung pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2016-2020, jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Magelang mengalami kecenderungan penurunan. Pada tahun 2017 mulai nampak penurunan jumlah kegiatan kepemudaan yaitu menjadi sebesar 17 kegiatan dari sebelumnya 21 kegiatan. Namun pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 20 kegiatan, walaupun kenaikannya masih dibawah tahun 2016. Pada Tahun 2020 kegiatan kepemudaan turun menjadi 4 kegiatan akibat dampak wabah covid.

Tabel 2.135

Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	organisasi	26	26	27	27	27
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	21	17	20	10	4

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

Generasi muda yang dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan suatu wilayah adalah generasi muda yang berprestasi. Prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang cenderung meningkat sebagaimana tabel cakupan prestasi generasi muda di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 2.136

Cakupan Prestasi Generasi Muda di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet berprestasi	orang	110	130	150	170	90
2	Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan	orang	560	570	570	585	279
3.	Cakupan Prestasi Generasi Muda	%	13,65	15,23	16,99	39,53	41,13
4.	Cakupan pembinaan pemuda	%	19,21	33	37	43,52	32,41

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Organisasi olahraga pada bahasan ini adalah induk organisasi cabang olahraga. Menurut Undang undang Nomor 3 tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional induk organisasi cabang olahraga yang membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. Jumlah organisasi olahraga dapat dihitung dari jumlah olahraga yang aktif pada saat tahun pengukuran. Banyaknya organisasi olahraga di suatu wilayah menggambarkan peran aktif masyarakat dalam bidang pengembangan olahraga. Berdasarkan data tahun 2014-2018, secara umum jumlah organisasi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya bidang olahraga.

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Jenis kegiatan olahraga ini dapat berbentuk pertandingan dan perlombaan ataupun peristiwa sejenis. Meningkatnya jumlah kegiatan olahraga menunjukkan meningkatnya peran dan efektifitas organisasi pemuda dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah khususnya bidang olahraga. Berdasarkan data tahun 2016-2020 perkembangan jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 30 jumlah kegiatan olahraga, pada tahun 2017 jumlah kegiatan menurun menjadi 24 dan cenderung stagnan sampai tahun 2019. Pada tahun 2020 kegiatan olahraga menurun dratis menjadi 15 kegiatan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah organisasi dan kegiatan olahraga di Kabupaten Magelang tahun 2016-2020.

Tabel 2.137

Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	30	31	35	36	41
2.	Jumlah klub olah raga	Unit	34	40	40	42	42
3.	Jumlah kegiatan olahraga	keg	30	24	24	24	15

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

3) Lapangan Olahraga

Lapangan olahraga dapat dilihat dari jumlah lapangan dibagi dengan jumlah penduduk per 1000 jiwa. Angka ini mampu menunjukkan ketersediaan sarana fisik untuk olahraga khususnya lapangan olahraga. Lapangan olahraga dalam hal ini dapat berbentuk lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket atau lapangan lainnya yang peruntukannya sebagai sarana olahraga. Secara umum jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah penduduk maka perkembangan lapangan olahraga per 1000 penduduk tersebut mengalami penurunan. Jumlah lapangan olahraga mengalami peningkatan, sebagaimana data perkembangan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Magelang dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.138

Rasio Lapangan Olahraga di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lapangan olahraga	Unit	265	265	265	266	266
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.195*
3.	Lapangan olah raga per 1.000 penduduk	Unit	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20
4	Cakupan Pembinaan olah raga	Persen	42,32	43,22	44,97	38	41

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2020

*) data sementara disdukcapil Kabupaten Magelang, semester I 2020

m. Statistik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu diukur pada urusan statistik yaitu tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, Buku Kabupaten Dalam Angka, dan Buku PDRB.

1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Mulai tahun 2017, urusan statistik menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Magelang belum mempunyai satu sistem data dan statistik yang terintegrasi. Pada tahun 2019 mulai dirilis sistem data statistik yang terintegrasi dengan alamat: <http://opendata.magelangkab.go.id/>. Sistem data statistik ini melingkupi semua data sektoral PD maupun Statistik Dasar dari Badan Pusat Statistik.

2) Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka memuat dua jenis data statistik yaitu data statistik dasar dan data statistik sektoral yang dihimpun dari instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta (data sekunder). Kontinuitas publikasi diindikasikan dengan terbitnya publikasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

3) Buku PDRB Kabupaten

Ketersediaan publikasi Buku PDRB Kabupaten bagi pemerintah dan masyarakat adalah untuk menyediakan data yang diperlukan guna melakukan analisis pembangunan perekonomian kabupaten atau untuk mengukur kondisi perekonomian kabupaten dibandingkan dengan wilayah regional dan provinsi. Buku PDRB Kabupaten Magelang ada/tersedia tahun 2013-2017.

Tabel 2.139

Persentase Jumlah Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah data sektoral yang tersedia	Buah	0	0	0	25	30
2	Jumlah data sektoral yang tersedia dalam sistem informasi	urusan	0	0	0	25	30
2	Jumlah data statistik sektoral yang seharusnya tersedia	Buah	0	0	0	31	31
3	Persentase Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	Persen	0	0	0	80,6	96,7

Sumber : Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

n. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Magelang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung urusan tersebut adalah program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan satu kegiatan yaitu pengelolaan dan pengembangan persandian yang masih terbatas pada pelayanan komunikasi yakni distribusi informasi berdasarkan klasifikasi di internal Pemerintah Kabupaten Magelang.

Persandian merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Untuk mengukur kinerja urusan persandian adalah persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang sudah terintegrasi. Data kinerja ini untuk Kabupaten Magelang belum tersedia, namun selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur kinerja urusan persandian.

Tabel 2.140
 Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Secara Terintegrasi
 Di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Buah	0	0	0	0	10
2	Jumlah SKPD	Buah	427	427	427	427	427
3	Persentase SKPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Diskominfo Kabupaten Magelang, 2021

o. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per Tahun

Semakin banyak pengunjung perpustakaan menunjukkan minat membaca di masyarakat cukup tinggi. Selain itu, dengan melihat peningkatan jumlah pengunjung, dapat terlihat bahwa apakah pemerintah daerah sudah mampu menstimulasi penduduknya untuk lebih rajin membaca dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah fluktuatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 2.141
 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
 di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jiwa	55.854	39.967	76.548	95.965	20.896
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.275.123	1.268.396	1.290.115*	1.295.019*	1.300.095*
3	Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	4,38	3,15	5,93	7,41	1,61
4	Persentase Peningkatan Pemustaka per tahun	%	61,76	-28,06	88,30	25,37	-0,78

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2020

*) Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2020

Berdasarkan tabel diatas, persentase pengunjung perpustakaan per tahun masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah.

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jenis koleksi buku yang tersedia menggambarkan seberapa beragamnya bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ilmu dalam tiap bidangnya. Semakin banyak judul koleksi buku, maka semakin beragam bacaan yang dapat dimanfaatkan. Jumlah koleksi judul buku tersebut kemudian diwujudkan ke dalam sebuah rasio yang

menggambarkan perbandingan jumlah koleksi judul buku dengan jumlah buku secara keseluruhan di perpustakaan daerah tersebut.

Tabel 2.142

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	24.955	26.179	27.230	27.745	26.365
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	52.683	56.724	61.030	64.120	44.940
3	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten	persen	2,11	2,16	2,24	2,31	1,92
4	Target Rasio		2,11	2,15	2,20	2,24	2,37

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah koleksi judul buku dan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Magelang terus meningkat dan beragam. Angka rasio yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya dikarenakan jumlah koleksi yang tersedia semakin banyak dan judul buku yang dikoleksi juga terus bertambah. Dengan semakin beragamnya judul serta jumlahnya, diharapkan semakin banyak ragam dan jenis ilmu yang dapat diperoleh oleh masyarakat pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2020 jumlah koleksi buku mengalami penurunan di karenakan : adanya penghapusan buku yang rusak, hilang dan tidak dikembalikan oleh pemustaka.

Terdapat dua unsur utama dalam definisi perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Pada awal perkembangannya, perpustakaan lebih diasumsikan dengan bangunan gedung dan tempat penyimpanan buku. Namun zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku, tetapi bisa berupa film, alat peraga, diorama, dan lainnya, yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Semua sumber informasi itu dikelola, disusun teratur, sehingga ketika masyarakat/pengguna membutuhkan suatu informasi dapat dengan mudah menemukannya.

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pada pasal 2 mengamanatkan bahwa “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan”. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan bagi masyarakat yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi semua kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerja bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, perpustakaan merupakan aset strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Jangkauannya yang luas dan inklusif menjadi keunggulan perpustakaan umum, sehingga

semua anggota masyarakat tanpa kecuali bisa memanfaatkan perpustakaan untuk pengembangan dirinya.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia (HAM). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan

Sejalan dengan hal tersebut, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi penting untuk dilaksanakan karena dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi dari buku dan internet yang dimiliki oleh perpustakaan, tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat, serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Ada 3 (tiga) strategi utama dalam transformasi perputakaan berbasis inklusi sosial, yaitu peningkatan kualitas layanan, fasilitasi pelibatan masyarakat dan advokasi Kerjasama.

p. Kearsipan

1) Pengelolaan Arsip Secara Baku

Tujuan penyelenggaraan kearsipan diantaranya adalah menjaga kelestarian arsip, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip secara baku, yang dikelola sesuai kaidah arsip yang tertib sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat dibutuhkan.

Dibawah ini data pengelolaan arsip secara baku atau tertib di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.143

Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku/Tertib di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	Unit	413	536	659	782	2 skpd
2	Jumlah Unit Pengolah/Pencipta Arsip	Unit	734	734	734	734	26 skpd
3	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku/ Tertib	%	56,27	73,02	89,77	106,52	7,69

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Magelang belum menyentuh ke seluruh

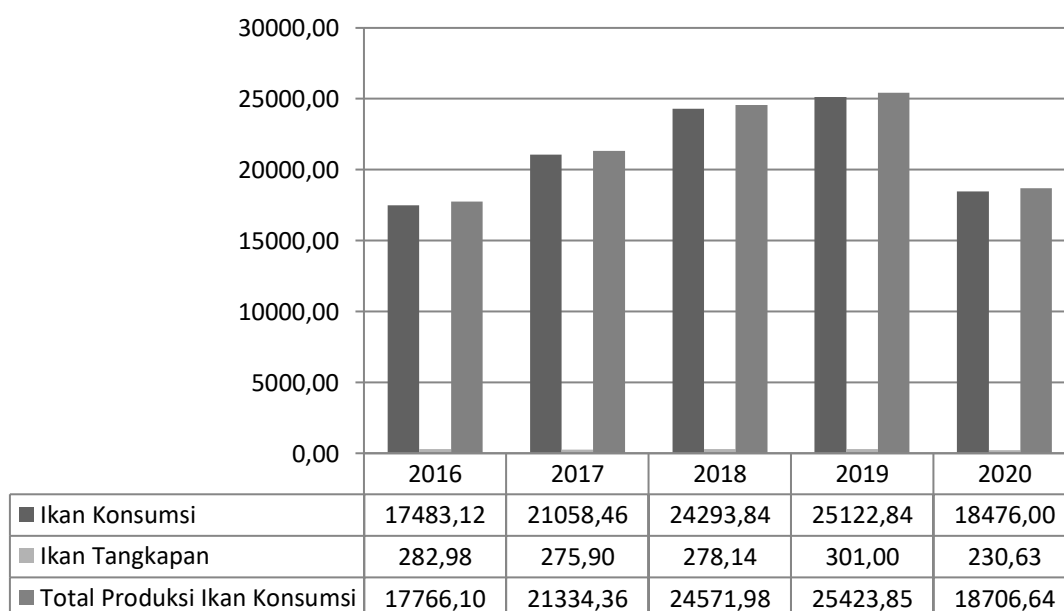
pengolah arsip/pencipta arsip, meskipun dari tahun 2015 hingga 2019 jumlahnya terus mengalami kenaikan. Hal tersebut mengindikasikan diperlukannya sosialisasi dan pendampingan kepada pengolah arsip/pencipta untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2020 target indikator mengalami perubahan sehingga penghitungan juga berubah.

2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

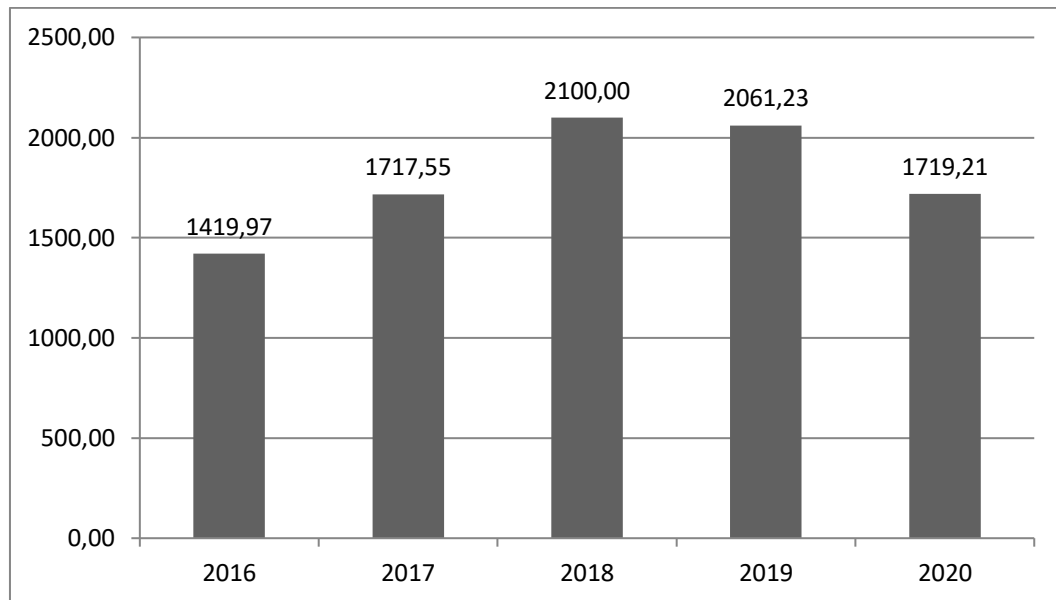
Sektor perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Magelang adalah sektor perikanan darat, mengingat Kabupaten Magelang bukanlah daerah pesisir. Perikanan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Magelang mayoritas adalah jenis ikan tawar konsumsi. Jumlah produksi perikanan budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Begitu juga pada produksi perikanan benih, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

Selain perikanan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Magelang juga bersumber dari perikanan tangkap sungai. Jumlah produksi perikanan tangkap memang tidak sebanyak perikanan budidaya, namun banyaknya sungai di wilayah Kabupaten Magelang berpengaruh terhadap besarnya produksi perikanan tangkap yang cenderung meningkat. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 282,98 ton menjadi 301 ton pada tahun 2019. Karena Pandemi covid 19 pada Tahun 2020 Produksi Ikan Konsumsi di Kabupaten Magelang mengalami penurunan menjadi 18706,64 Ton. Produksi perikanan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.37
Produksi Ikan Konsumsi (Ton) di Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

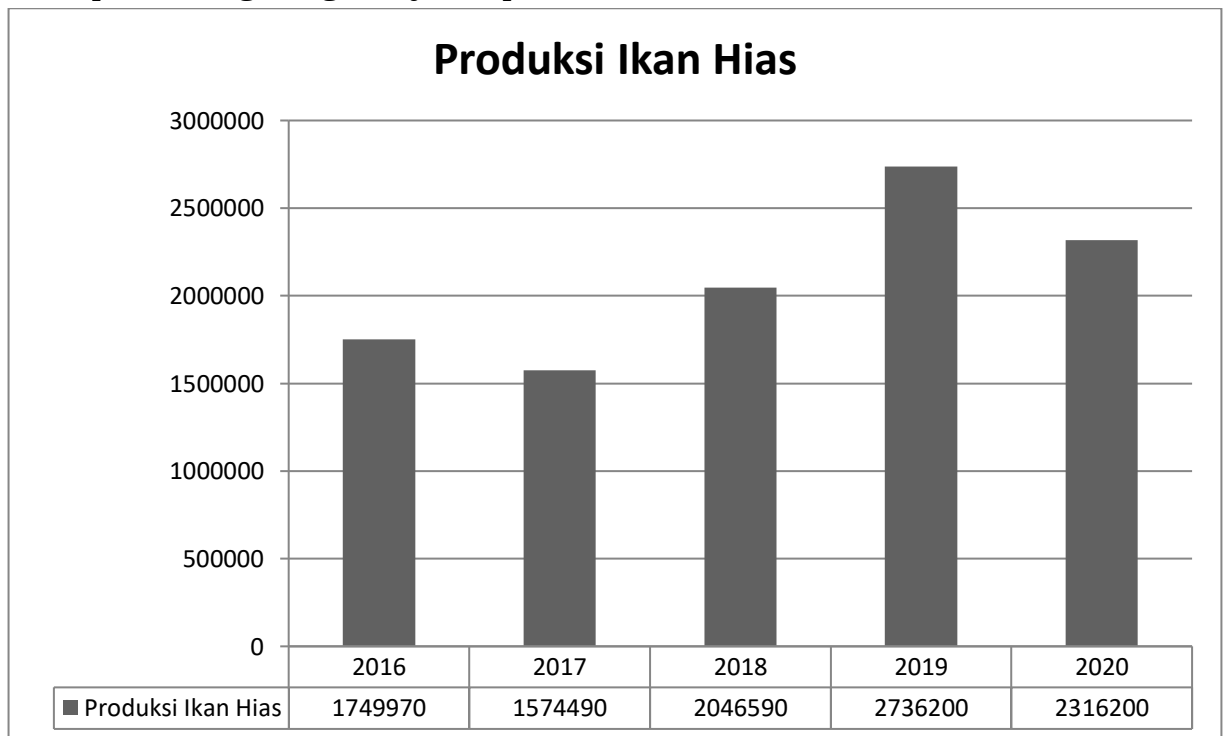


Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.38

Produksi Benih Ikan (Juta ekor) di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Komoditas ikan hias menjadi salah satu andalan dalam menopang perekonomian masyarakat. Produksi ikan hias di Kabupaten Magelang tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 produksi ikan hias sebesar 1.749.970 ekor dan tahun 2020 produksi ikan hias sebesar 2.316.200 ekor. Untuk selengkapnya produksi ikan hias di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut.



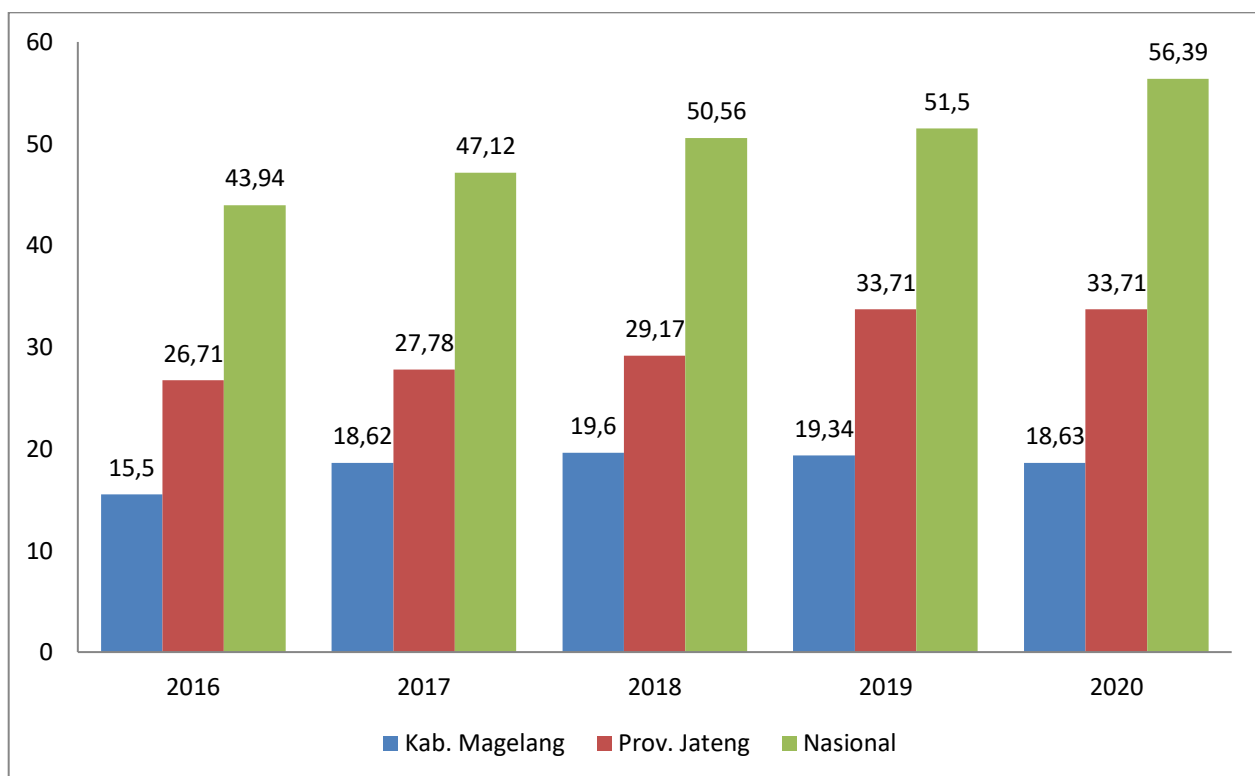
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.39

Produksi ikan hias di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Besar konsumsi ikan menjadi salah satu indikator kesejahteraan karena berhubungan dengan variasi pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk

memenuhi kualitas gizi dan kesehatan. Ikan mengandung vitamin dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ikan mengandung omega 3 yang berfungsi baik bagi perkembangan otak manusia, selain itu protein yang ada juga penting perannya dalam mensuplai kebutuhan dan perkembangan organ tubuh manusia.



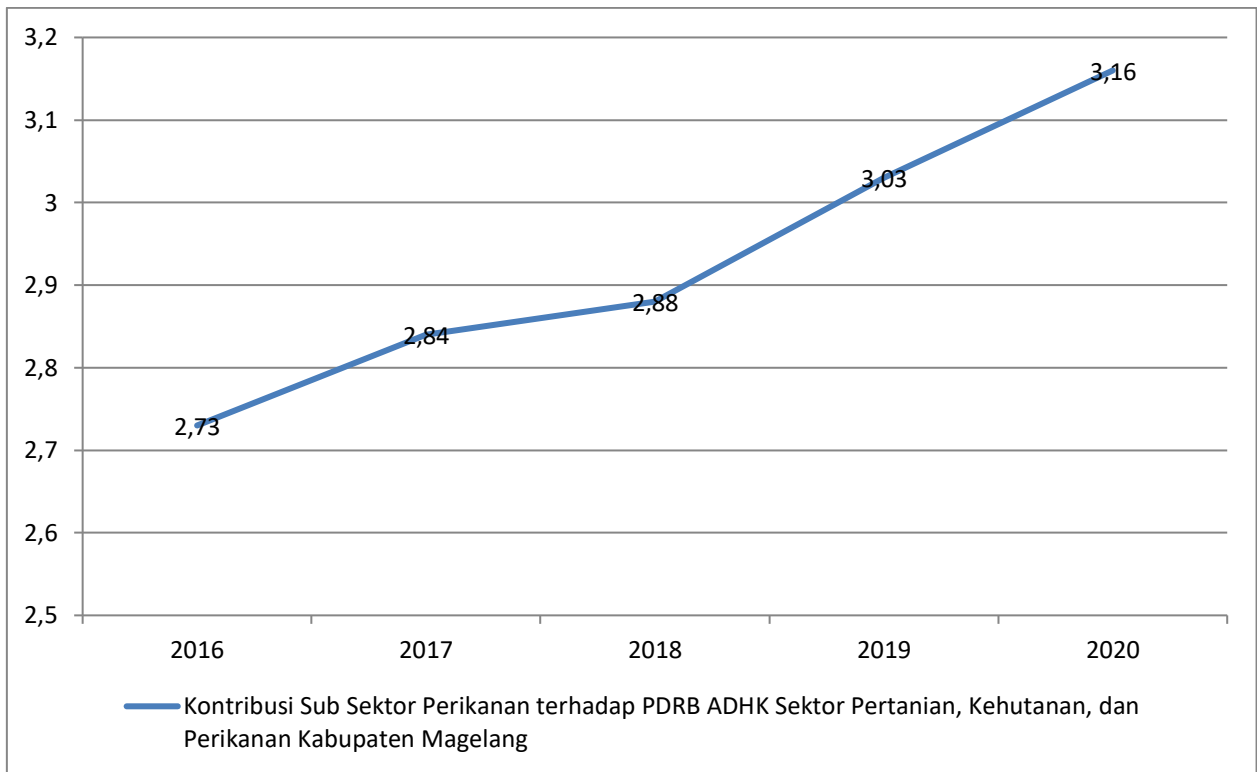
Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.40

Konsumsi Ikan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Jumlah konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2016 angka Konsumsi ikan Kab. Magelang sebesar 15,5 kg/kapita sedangkan pada tahun 2020 sebesar 18,63 kg/ kapita. Meskipun angka konsumsi ikan Kabupaten magelang cenderung naik, namun hal ini masih jauh dari angka konsumsi ikan di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Sehingga masih diperlukan kampanye memasyarakatkan makan ikan di Kabupaten Magelang.

Perikanan sebagai bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, juga memberi kontribusi dalam pendapatan Kabupaten Magelang melalui produk domestik regional bruto. Sebagai kabupaten yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan dataran membuat sektor perikanan yang berkembang masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kontribusi perikanan di dalam PDRB. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang cenderung naik, pada tahun 2016 sebesar 2,73 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 3,16 %.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.41

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

b. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Berikut adalah tabel kunjungan wisata ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.144

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata manca	302.979	337.515	358.673	361.050	37.681
2	Kunjungan Wisata nusantara	4.223.671	5.064.569	5.977.422	6.150.331	1.418.608
Jumlah		4.526.650	5.402.084	6.336.095	6.511.381	1.456.289
Peningkatan Jumlah Kunjungan		370.890	875.434	934.011	175.286	-5.055.092

Sumber : Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

Pada tahun 2016 kunjungan wisata hanya mencapai 4.526.650 selama setahun dan meningkat hingga 6.511.381 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 karena dampak dari pandemi *Covid 19* jumlah kunjungan wisatawan turun dratis menjadi 1.456.289.

2) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB, direpresentasikan dalam sektor. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*

Tabel 2.145
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (ADHK)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	19882,24	20974,80	22082,80	23253,15	22861,47
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	824,43	876,85	940,61	1.017,36	936,02
Kontribusi terhadap PDRB (%)	4,14	4,14	4,15	4,25	3,93
Pertumbuhan (%)	6,60%	6,02%	6,35%	7,27	-1,68

Sumber: Hasil Olahan, 2021

3) Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 rata-rata lama tinggal wisatawan selama 1,47 hari meningkat menjadi 1,51 hari pada tahun 2019. Karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 rata-rata lama tinggal wisatawan turun menjadi 1,43 hari. Selain karena adanya pandemi covid-19 rendahnya Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang disebabkan masih lemahnya dukungan atraksi malam hari, tempat penginapan, terbatasnya daya tarik wisata dan paket wisata yang cenderung menjadikan DTW di wilayah Kabupaten Magelang bukan sebagai tujuan utama wisata.

Tabel 2.146
Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wisman	Hari	1,14	1,004	1,65	1,71	2,3
2	Wisnu	Hari	1,01	1,006	1,31	1,32	1,24
	Rata-rata	Hari	1,47	1,075	1,48	1,51	1,43
	Peningkatan Lama Tinggal		0,2	-0,405	0,475	0,03	-0,08

Sumber :Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

4) Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)

Kabupaten Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya tarik wisata alam yaitu sejumlah 82. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*.

Tabel 2.147

Jumlah Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	DTW Alam	20	22	82	82	82
2	DTW Budaya	14	16	18	18	18
3	DTW Buatan	15	16	29	29	29
4	DTW Minat Khusus	25	26	29	29	29
5	Lain-lain (event)	48	50	53	53	53

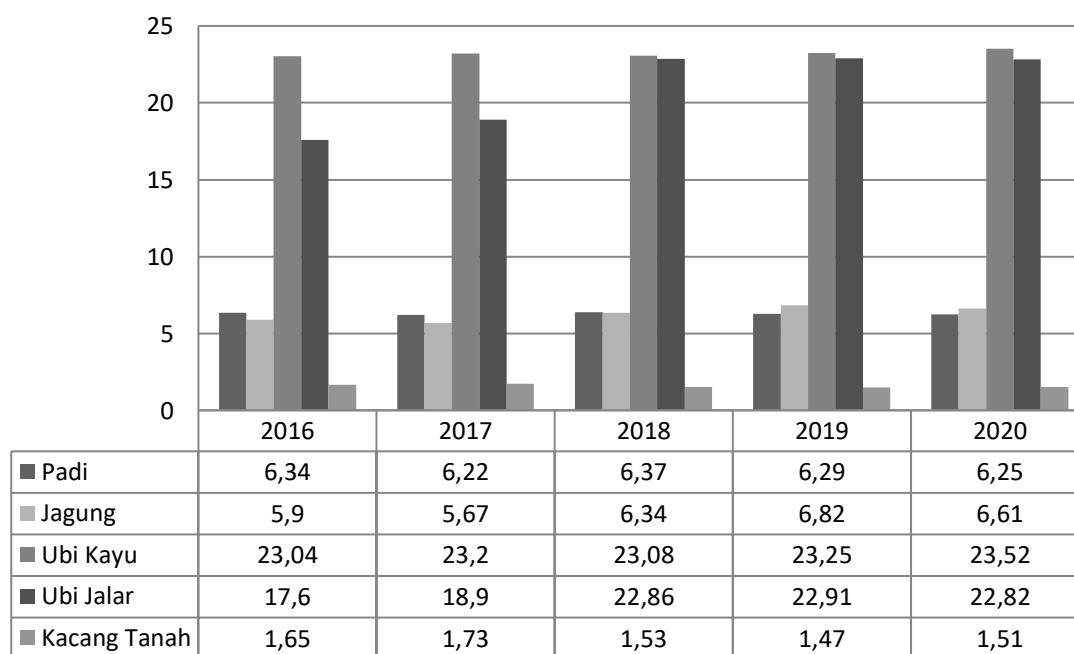
Sumber :Disparpora Kabupaten Magelang, 2021

c. Pertanian

Gambaran tentang kondisi pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama

Tanaman bahan makanan utama di Kabupaten Magelang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Perkembangan produktivitas dari tanaman tersebut selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.42

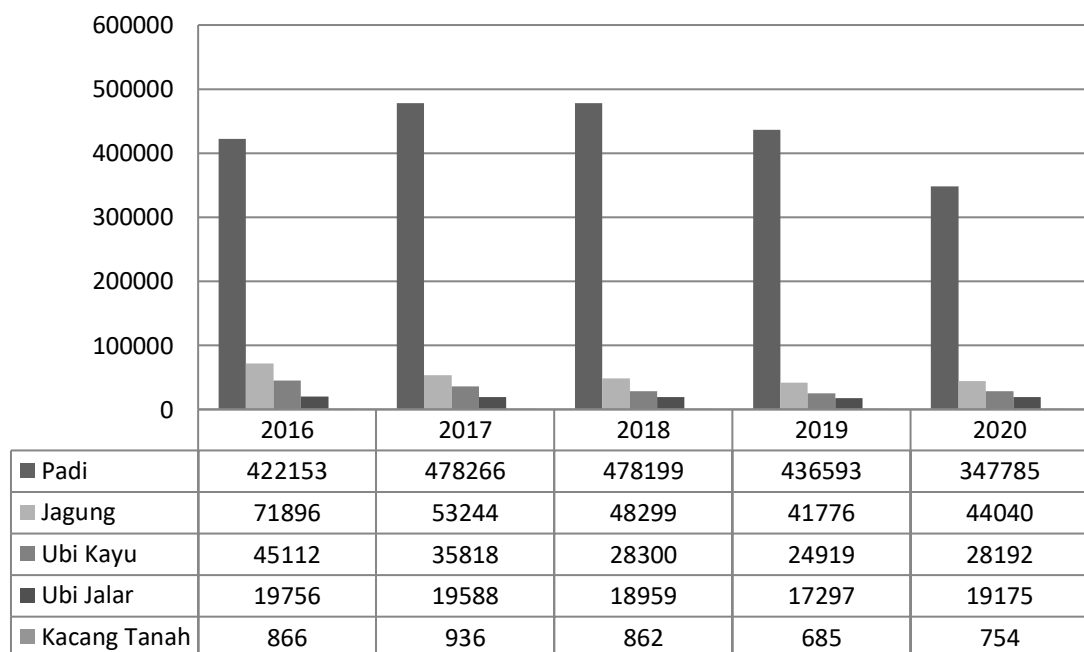
Produktivitas Tanaman Bahan Makanan Utama (Ton/Ha)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Produktivitas padi, jagung, ubi kayu cenderung tetap, meskipun ada kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Produktivitas tertinggi diantara komoditas tersebut adalah golongan ubi-ubian. Produktivitas ubi kayu adalah tertinggi pada tahun 2020 yakni mencapai 23,52 Ha dengan tren perkembangan yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Ubi jalar menyusul dengan 22,82 ton/ha pada tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 22,91 ton/ha.

Berbeda dengan ubi jalar dan ubi kayu, produktivitas padi di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 mencapai 6,25 ton/ha

2) Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama

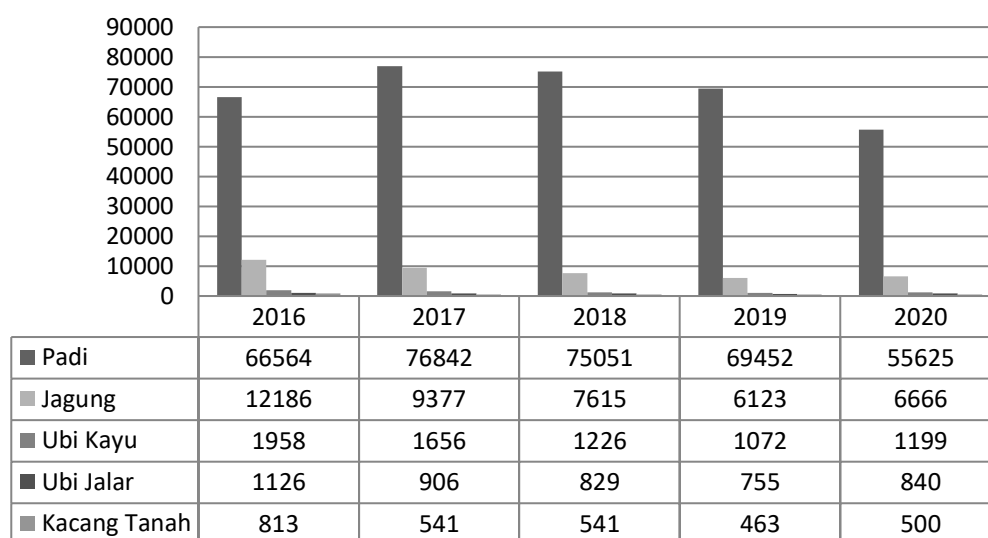
Apabila dilihat dari besar jumlah produksi tanaman bahan makanan utama, padi merupakan tanaman pangan dengan jumlah terbesar dibandingkan jenis tanaman pangan lainnya. Padi sebagai bahan pangan utama yang mentah sebelum menjadi beras, memiliki peran penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Total produksi komoditas tanaman pangan penting di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.43
Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Utama
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020 (Ton)

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Total produksi padi mengalami fluktuasi, sementara komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah mengalami penurunan produksi karena lahan bergiliran untuk peningkatan produksi padi (Pajale). Hal ini dapat dilihat dari luas panen tanaman bahan makanan di Kabupaten Magelang pada grafik di bawah ini.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.44
Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Utama
di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

3) Total Produksi Komoditas Sayur-sayuran

Sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang potensial dengan iklim yang sesuai, Kabupaten Magelang tidak hanya menghasilkan padi tetapi juga komoditas sayur-sayuran. Komoditas sayuran merupakan komoditas yang penting setelah komoditas tanaman pangan. Jenis dan karakteristik tanah serta kondisi geografis Kabupaten Magelang yang sebagian besar adalah wilayah tangkapan air membuat kabupaten ini sangat potensial untuk ditanami komoditas sayur-sayuran. Produksi beberapa jenis sayuran yang dihasilkan Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.148
Total Produksi Sayur-sayuran (Kwintal) di Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang putih	1.780	8.350	4.230	14.570	77.539
2	Bawang daun	116.472	117.843	108.492	102.730	125.668
3	Kubis	816.452	224.611	606.214	268.600	734.686
4	Wortel	91.641	75.488	75.773	46.860	52.410
5	Cabai besar	260.609	256.358	211.124	101.180	396.520
6	Cabai rawit	99.153	136.915	175.470	125.670	386.723
7	Tomat	104.782	133.999	211.194	127.770	182.296
8	Bawang putih	1.780	8.350	4.230	14.570	77.539

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Komoditas sayuran penting di Kabupaten Magelang antara lain kubis, bawang daun, wortel, tomat, cabai rawit, cabai besar dan bawang putih (sedang dikembangkan). Perkembangan produksi hampir seluruh komoditas sayuran fluktuatif namun relatif stabil dari tahun 2016-2020, dengan kecenderungan positif.

4) Total Produksi Komoditas Buah-Buahan

Komoditas buah-buahan merupakan komoditas pertanian lainnya yang penting setelah tanaman pangan dan sayuran, yang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat tani. Komoditas buah-buahan umumnya rata-rata memproduksi setahun sekali. Komoditas buah-buahan pada umumnya bisa diproduksi di semua kabupaten dan kota. Beberapa jenis buah dengan produksi tertinggi antara lain salak, pisang, pepaya, dan rambutan. Unggulnya buah-buahan tersebut tidak lepas dari kondisi lingkungan yang subur untuk menanam buah jenis tertentu.

Komoditas buah salak merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang produksinya mencapai 686.893 kwintal pada tahun 2020. Produksi buah terbesar selanjutnya adalah pisang yang mencapai 184.896 kwintal.

Tabel 2.149
Perkembangan Produksi Buah-Buahan (Kuintal)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Duku/langsat	8.747	3.741	28.970	16.500	15.530
2	Durian	22.514	18.914	51.530	28.220	77.202
3	Pisang	183.471	197.320	267.280	235.910	184.896
4	Rambutan	389.460	115.362	146.310	81.790	43.655
5	Salak	676.170	730.579	693.420	586.020	686.893
6	pepaya	53.984	56.345	81.900	66.110	53.282

Sumber: Hasil Olahan, 2021

5) Total Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Magelang fluktuatif, didominasi oleh tanaman perkebunan tembakau dan kapulaga, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.150
Total Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tebu	1986	934	3021	1836	2.341
2	cengkeh	274	55	203	166	165,7
3	kopi	1107	934	906	1493	1490,7
4	Tembakau	1273	3417	731	4040	3.359
5	kelapa	740	943	1432	7533	7.531
6	kapulogo	6733	4264			475

Sumber: Hasil Olahan, 2021

6) Pertanian Unggulan

Dari tahun 2016-2020, Luas Lahan pertanian Unggulan di kabupaten Magelang cenderung meningkat. Pada tahun 2016 luas Lahan Pertanian Unggulan di Kabupaten Magelang mencapai 17.463,25 Ha, kemudian meningkat menjadi 20.346,7 pada tahun 2020. Kenaikan Luas Lahan

Pertanian Unggulan Kabupaten Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.151

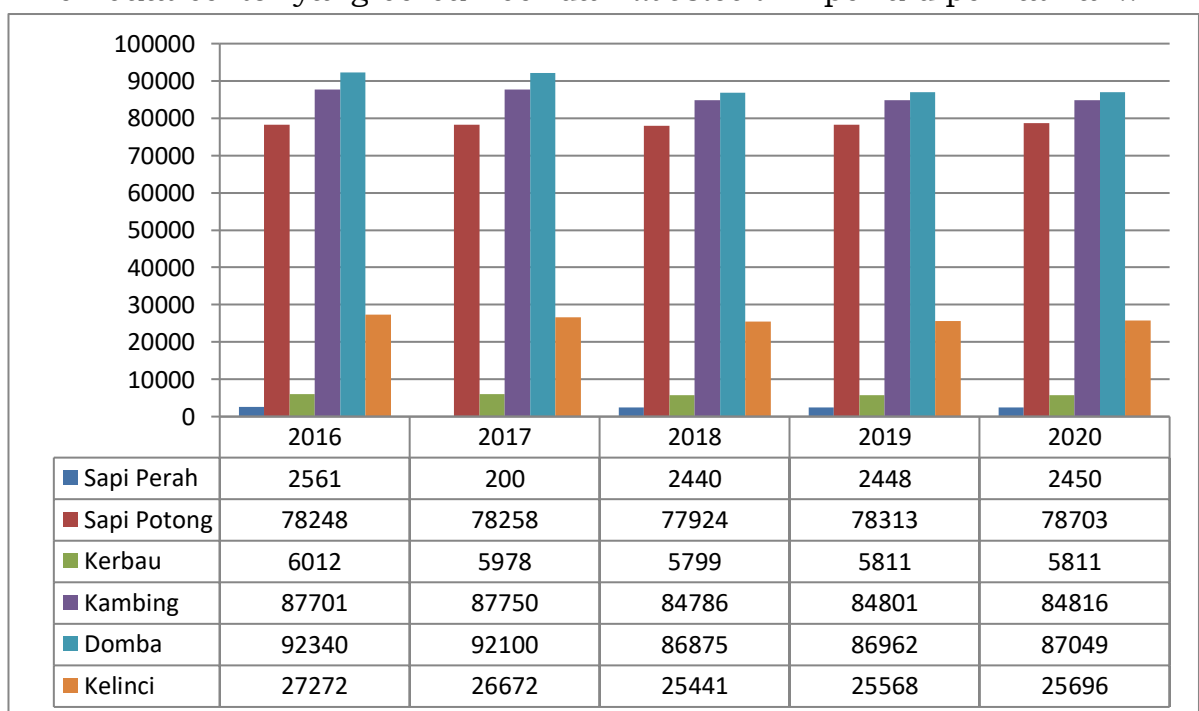
Persentase Kenaikan Luas Lahan Pertanian Unggulan Tahun 2016-2020

No	Luas Lahan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Organik	Ha	761.25	958.25	970.65	970.65	970.65
2	Kelapa	Ha	7.528	7.508	7.829	7.863	7.863
3	Kopi	Ha	1.638	1.632	2.484	2.703	2.710
4	Bawang putih	Ha	31	8	427	838	585
5	Salak	Ha	2.206	2.165	2.147	2.120	1.922
6	Cabai	Ha	5.299	5.921	5.612	5.644	6.296
7	Total lahan	Ha	17.463,25	18.192,3	19.469,65	20.138,7	20.346,7
8	Persentase Kenaikan	%	3,02	4,17	7,02	3,44	1,03

Sumber : Distanpangan Kabupaten Magelang, 2021

7) Total Produksi Peternakan

Peternakan sebagai bagian dari kegiatan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian wilayah. Selain sebagai sumber protein hewani bagi kebutuhan manusia, ternak juga seringkali digunakan sebagai tenaga pengolah lahan persawahan. Teknologi mutakhir saat ini juga telah mampu mengubah kotoran sapi menjadi pupuk organik dan alternatif sumber energi atau dikenal dengan biogas bagi rumah tangga. Banyaknya manfaat dari sektor perekonomian berbasis peternakan, membuat sektor yang bersumber dari *livestock* ini perlu diperhatikan..



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.45

Total Populasi Ternak (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan populasi masing-masing ternak cenderung menurun kecuali untuk sapi potong yang

cenderung naik. Penurunan jumlah populasi paling signifikan terjadi pada kambing dan domba. Populasi domba pada tahun 2017 mencapai 92.100 turun menjadi 86.875 pada tahun 2018, sedangkan populasi kambing pada tahun 2017 mencapai 87.750 turun menjadi 84.786 pada tahun 2017.

Perkembangan jumlah produksi hewan ternak di Kabupaten Magelang cenderung meningkat. Produksi daging sapi meningkat dari 1.767.047 kg pada tahun 2016 menjadi 1.912.619 kg pada tahun 2020. Sedangkan produksi daging kerbau juga meningkat dari 561 kg pada tahun 2016 menjadi 1.040 kg pada tahun 2020. Sementara itu, produksi daging kambing meningkat dari 749.409 kg pada tahun 2016 menjadi 797.242 pada tahun 2020. Sama halnya yang terjadi pada produksi daging domba, meningkat dari 1.053.382 pada tahun 2016 menjadi 1.121.236 pada tahun 2020.

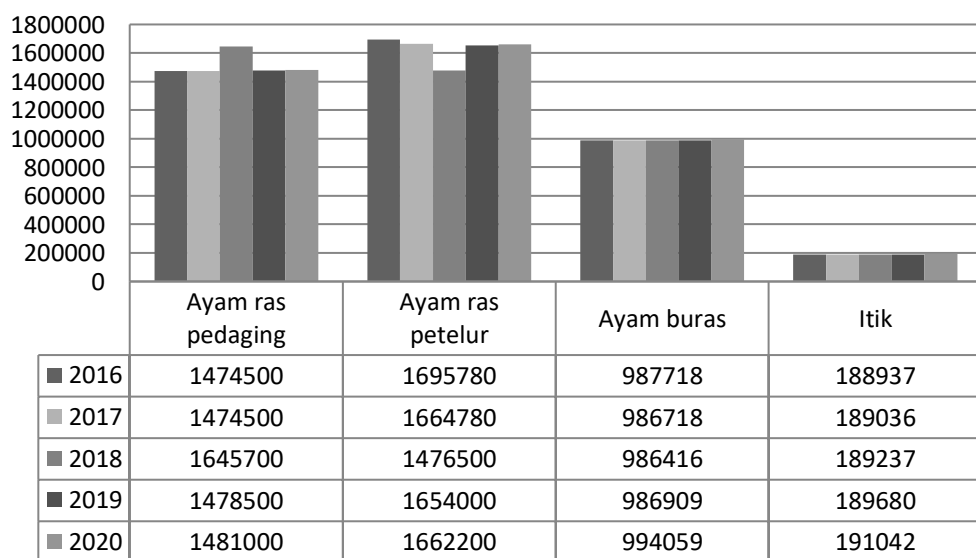
Tabel 2.152

Perkembangan Produksi Ternak (kg) Kab. Magelang Tahun 2016-2020

No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi potong	1.767.047	1.791.694	1.826.005	1.862.342	1.912.619
2	Kerbau	561	530	693	693	1.040
3	Kambing	749.409	749.957	737.960	793.276	797.242
4	Domba	1.053.382	1.053.911	1.046.106	1.115.659	1.121.236

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Tidak hanya memiliki potensi peternakan ruminansia, Kabupaten Magelang juga memiliki aktivitas pertanian disektor peternakan unggas. Perkembangan populasi ternak unggas dan hasil produksinya merupakan gambaran tingkat ketersediaan sumber bahan protein nasional. Perkembangan ternak unggas selama lima tahun terakhir relatif meningkat positif di semua jenis unggas.



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.46

Perkembangan Populasi Ternak Unggas (Ekor) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

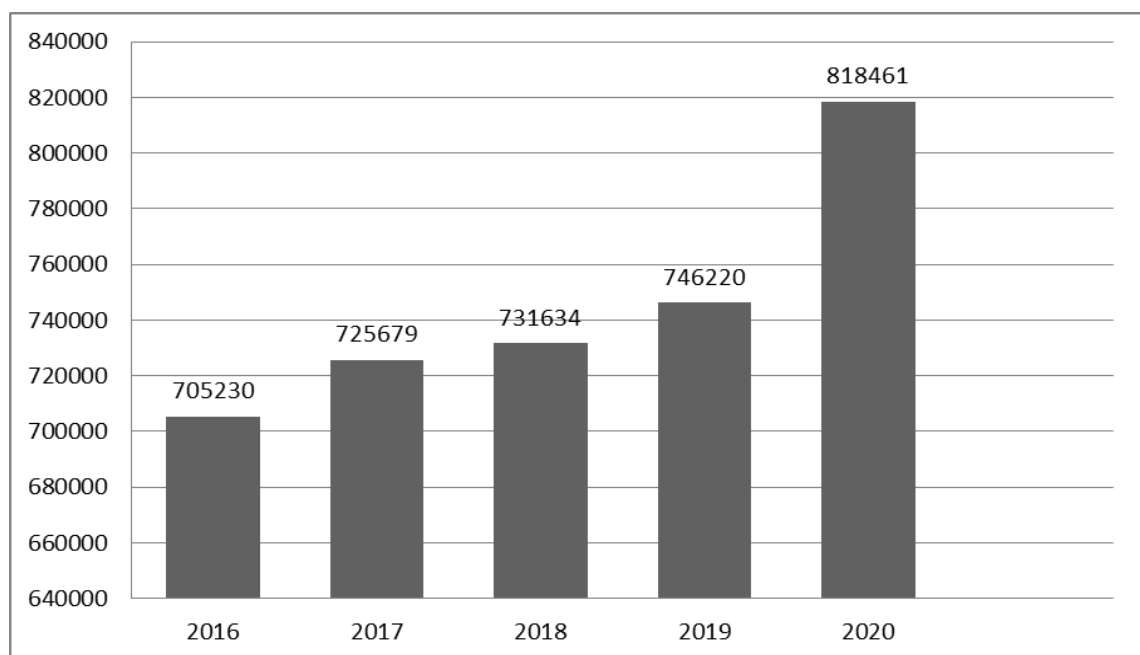
Populasi ternak unggas yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ayam petelur. Populasi ayam petelur mencapai 1.662.200 ekor pada tahun 2020. Angka ini disusul oleh ayam pedaging sebesar 1.481.000 ekor dan ayam buras 994.059 ekor.

Tabel 2.153

Perkembangan Produksi Daging Ternak Unggas Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Komoditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam ras pedaging	9.410,90	9.417,34	9.762,00	9.958,09	10.224.146
2	Ayam ras petelur	967	968	992	1.064	1.069.529
3	Ayam buras	1.169,63	1.170,02	1.168	1.240	1.246.576
4	Itik	89,62	90,45	92,3	95,46	96.689

Sumber: Hasil Olahan, 2021



Sumber: Hasil Olahan, 2021

Gambar 2.47

Perkembangan Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Selain daging, manfaat yang dapat diperoleh dari ternak ruminansia adalah produksi susu segar dari sapi perah untuk melengkapi pemenuhan gizi penduduk. Selama lima tahun terakhir produksi susu segar di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Pada tahun 2016 produksi susu sapi segar mencapai 709.155 liter dan meningkat di tahun 2019 hingga mencapai 746.220 liter. Untuk tahun 2020 produksi susu mencapai 818.461 liter.

8) Sumber Daya Manusia Pertanian

Kualitas sumber daya manusia pertanian dapat dilihat dari perkembangan kelas kelompok tani. Berikut disajikan perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Magelang. Semakin berhasil

penyuluhan yang dilaksanakan, maka semakin banyak kelompok tani dengan kelas madya dan utama.

Tabel 2.154
Perkembangan Kelas Kelompok Tani Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

Kelas Kelompok	2016	2017	2018	2019	2020
Pemula	1.772	1.534	1.599	1.599	1.716
Lanjut	872	1.125	1149	1.149	850
Madya	132	99	101	101	86
Utama	17	9	9	9	4
Jumlah Total	2.793	2.767	2.858	2.858	3.065

Sumber : Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, 2021

Kelompok tani yang menempati kelas madya dan utama masih sangat kecil dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada. Pada tahun 2019, 55% kelompok tani masih berada pada kelas pemula, 40% pada kelas lanjut, dan hanya 3,5% yang berada pada kelas madya serta 0,3% yang sudah berada pada kelas utama.

Keberlangsungan pembinaan kelompok tani sangat erat hubungannya dengan keberadaan tenaga penyuluh pertanian yang ada baik tenaga penyuluh ASN maupun tenaga penyuluh THL. Terdistribusinya pembinaan juga tidak lepas dari adanya penyuluh pertanian yang diterjunkan ke lapangan. Berikut ini adalah jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Magelang. Jumlah penyuluh swadaya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penyuluh dari pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.155
Jumlah Penyuluh di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kabupaten	Orang	8	8	6	6	7
	Penyuluh Pemerintah Tingkat Kecamatan						
1	Penyuluh PNS	Orang	118	125	117	117	100
2	Penyuluh THL-TBPP	Orang	150	102	102	102	102
	Penyuluh Swadaya	Orang	525	525	540	540	540
	Penyuluh Swasta	Orang	42	42	42	42	42

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2021

Selama lima tahun terakhir, keberadaan tenaga penyuluhan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan terus berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya penyuluh ASN yang memasuki masa pensiun. Berlawanan dengan hal tersebut, jumlah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta justru semakin meningkat.

Tabel 2.156

Rasio Penyuluh Pemerintah dengan kelompok tani Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyuluh Pemerintah	268	227	219	219	202
2	Jumlah Kelompok Tani	2.793	2.767	2.858	2.858	3.065
3	Rasio Penyuluh dengan kelompok Tani	1: 11	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 15

Selama tahun 2016 – 2020, rasio penyuluh dengan kelompok tani cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena kenaikan jumlah kelompok tani tidak di imbangi dengan kenaikan jumlah penyuluh, bahkan jumlah penyuluh dari tahun ke tahun cenderung menurun. Tahun 2016 jumlah kelompok Tani sebanyak 2.793 kelompok naik menjadi 3.065 kelompok pada tahun 2020, sedangkan jumlah penyuluh pemerintah pada tahun 2016 sebanyak 268 orang turun menjadi 202 orang pada tahun 2020.

d. Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 turut mengubah klasifikasi subsektor perdagangan. Semula, subsektor perdagangan termasuk di dalam kategori sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun kini berubah menjadi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi di bidang perdagangan skala besar maupun eceran atau perdagangan skala masyarakat umum untuk konsumsi perorangan dan rumah tangga. Jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kategori ini antara lain semua yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, hingga suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Tabel 2.157

Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	19882,24	20974,80	22082,80	23253,15	22861,47
PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	2839,00	3020,27	3165,17	3351,23	3201,37
Kontribusi (%)	13,43	13,63	13,58	13,71	13,27
Pertumbuhan PDRB sektor (%)	5,28	6,09	4,80	5,88	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

Sektor perdagangan dalam PDRB merupakan sektor sekunder kedua paling besar yang berkontribusi untuk PDRB Kabupaten Magelang

setelah sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten pada tahun 2016 mencapai 13,43% dan terus menurun menjadi 13,27% pada tahun 2020. Meski persentase kontribusinya terhadap total PDRB kabupaten, nilai riil PDRB sektor perdagangan tetap mengalami peningkatan.

2) Pasar Tertib Ukur

Untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen perlu diciptakan pasar tertib ukur. Di Kabupaten Magelang telah dilakukan penilaian terhadap pasar yang tertib ukur. Jumlah pasar yang telah menerima penghargaan tertib ukur di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.158

Pasar yang Menerima Penghargaan Tertib Ukur Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Unit	2	4	6	7	7
2	Jumlah Pasar	Unit	17	17	17	17	17
	Persentase	%	11.76	23.53	35.29	41,18	41,18

Sumber : Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2021

Dari sejumlah 17 unit pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magelang yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2020 Kabupaten Magelang memiliki 7 pasar yang telah menerima penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Koperasi. Hal ini perlu dilanjutkan karena selain untuk melindungi dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap keakuratan timbangan dan alat ukur dalam perdagangan, juga bisa meningkatkan pemanfaatan pasar rakyat oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan Keputusan Dirjen PKTN No. 161.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mewujudkan tertib ukur serta meningkatkan kinerja kemetrolagian, untuk itu pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai daerah tertib ukur.

3) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi terkait produksi barang dan perdagangan. Jika nilai ekspor bersih perdagangan positif, maka neraca perdagangan dikatakan positif atau surplus dan sebaliknya defisit.

Tabel 2.159

Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai Ekspor (US \$)	Nilai Impor (US \$)	Ekspor Bersih Perdagangan (000 US \$)
1	2016	9.431.030.720,00	123.349.955,00	1.005.288.077,00
2	2017	10.298.132.650,00	114.960.258,00	101.831.724,00
3	2018	8.718.056.641,00	109.866.330,00	860.190.311,00
4	2019	8.259.258.857,00	17.417.125,00	98.212.508,00
5	2020	79.740.492,08	21.455.254,12	58.285.236,96

Sumber : Disdagkop UKM Kab. Magelang, 2021

Selama lima tahun terakhir, nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang positif atau surplus dengan tren fluktuatif, meski kenaikan ataupun penurunannya tidak signifikan. Hal ini menunjukkan Kabupaten Magelang berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan nilai ekspor nasional.

Tabel diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan nilai impor, meski keduanya sama-sama mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Antara tahun 2018 sampai 2020 nilai ekspor cenderung menurun yaitu dari 860.190.311,00 pada tahun 2018 menjadi 58.285.236,96 pada tahun 2020. Kenaikan dan penurunan nilai ekspor sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan moneter. Saat ekonomi dunia melemah maka nilai ekspor Kabupaten Magelang menurun meskipun masih positif atau surplus.

e. Perindustrian

- 1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
- 2) Sektor industri pengolahan merupakan sektor sekunder penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Magelang dan sektor terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian yang selanjutnya diolah menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Kabupaten Magelang yang memiliki potensi alam melimpah merupakan salah satu faktor pesatnya perkembangan industri pengolahan baik pengolahan produk pertanian, kehutanan, perikanan hingga pertambangan penggalian.
- 3) Apabila dilihat dari segi perkembangan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun, persentase kontribusi sektor ini memiliki kecenderungan naik, meski tidak signifikan, seiring dengan kenaikan nilai riilnya. Pada tahun 2016, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 22,08% naik menjadi 22,38 % pada Tahun 2020. Pada tahun 2020 besar nilai riil sektor industri pengolahan telah mampu mencapai 4.952,26 miliar rupiah.

Tabel 2.160
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK Kabupaten Magelang (Miliar Rp)	19.882,24	20.974,80	22.082,80	23.253,15	22.861,47
PDRB Kategori Industri Pengolahan (Miliar Rp)	4.238,43	4.445,15	4.682,71	4.966,92	4.952,26
Kontribusi terhadap PDRB (%)	22,08	21,91	21,87	21,95	22,38
Pertumbuhan (%)	5,82	4,53	5,34	6,07	8,07

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021

4) Pertumbuhan Industri

Sama halnya dengan sektor perdagangan, sektor industri juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan tingkatan perkembangan ekonomi suatu wilayah dilihat dari kemampuannya mengolah bahan baku dan tidak lagi bergantung pada kegiatan primer. Pada tahun 2016 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang mencapai 39.712 unit. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2018 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang sudah mampu mencapai 39.712 unit. Pada Tahun 2020 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Magelang turun menjadi 24.615 unit. Industri besar di Kabupaten Magelang didominasi oleh industri di sektor energi. Industri ini paling banyak berkembang di Kecamatan Tempuran, Mungkid, dan Mertoyudan

Tabel 2.161
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Besar	Unit	18	6	27	7	7
2	Industri Sedang*	Unit	39	*	*		*
3	Industri kecil	Unit	39.580	39.602	39.601	24.065	24.544
4	Industri menengah	Unit	132	132	144	71	71
5	Total usaha industri kecil dan menengah	Unit	39.712	39,734	39.745	24.136	24.615
6	Pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah	%	3,7	0,05	0,08	-39,27	1,98

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2021

Ket: * Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2017, kategori Industri terdiri dari : Industri Kecil, Menengah dan besar.

Apabila dilihat dari skala industri, hampir 99% merupakan jenis industri kecil. Pada tahun 2020, jumlah industri kecil mencapai 24.544 dari total unit usaha sebanyak 24.615 unit. Sedangkan jumlah industri menengah hanya sebesar 71 unit atau 0,3% dari total jumlah unit usaha. Perkembangan industri yang tengah berlangsung di Kabupaten Magelang menandakan sudah adanya usaha mewujudkan kemandirian

ekonomi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Tingginya pertumbuhan industri juga terbukti mampu melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sejak tiga tahun terakhir.

2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Konsistensi dan akurasi perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan dukungan aplikasi yang berbasis teknologi informasi, berupa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD), Sistem Informasi Usulan Masyarakat (SiUma), Sistem Informasi Daftar Usulan RKP Desa (Sidudes), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) Versi 2, Sistem Informasi Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (SiPokir), Sistem Informasi Pengendalian dan Pelaporan (Sidalap). Untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan telah digunakan data album kemiskinan yang berbasis aplikasi sistem penanggulangan kemiskinan (Sinangkis).

Kualitas perencanaan pembangunan daerah diukur dengan kesesuaian perencanaan program yang membandingkan kesesuaian antara rencana/indikator dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.162

Capaian Kesesuaian Perencanaan Program Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD	176	165	174	155	99
2	Jumlah Program RPJMD	176	185	184	191	99
3	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	89,19	94,57	81,15	100
4	Pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2021

Semua program dalam RKPD 2020 ada dalam RPJMD. Berarti bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang telah konsisten.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh sumberdaya yang memadai, salah satunya sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2020, di Bappeda dan Litbangda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, memiliki total pegawai 39 (tiga puluh sembilan) Orang dengan rincian : 1 (satu) pejabat eselon IV, 6 (enam) pejabat eselon III, 15 (Lima Belas) pejabat eselon IV, 6 (enam) JFU dan diperkuat oleh 10 (sepuluh) pejabat fungsional perencana dan 1 (satu) pejabat fungsional Peneliti. Dengan luasnya lingkup tugas dan tanggungjawab urusan perencanaan di Kabupaten Magelang, jumlah sumber daya manusia di Bappeda dan Litbangda masih kurang memadai.

b. Keuangan

1) Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.163

Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2016 hingga 2020 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

2) Persentase Peningkatan PAD

Salah satu sumber pendapatan dan belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah dimasukkan kedalam sumber APBD untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. PAD dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan/bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Tabel 2.164

Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	124.444.072.963	156.886.789.644	115.530.759.532
Retribusi daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	18.186.191.392	22.934.190.849	27.049.700.014
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	28.534.358.666	23.700.417.768	30.637.364.531
Lain-lain PAD yang sah	158.153.399.083	249.966.606.016	153.924.470.071	213.656.701.700	156.545.661.147
Total Pendapatan Asli Daerah	288.485.678.128	403.561.238.310	325.089.093.092	417.178.099.961	329.763.485.224
Persentase Kenaikan PAD	10,29	39,89	-19,44	28,33	-20,95

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sumber PAD terbesar Kabupaten Magelang adalah dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, pada tahun 2020 menyumbang masing-masing 35,03% dan 47,47% terhadap PAD kabupaten.

Tabel 2.165
Proporsi dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

Uraian	Proporsi					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Asli Daerah						
Pajak daerah	33,66	27,84	38,28	40,49	35,03	7,90
Retribusi daerah	5,40	5,07	5,59	5,92	8,20	1,46
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	6,12	5,16	8,81	6,12	9,29	17,45
Lain-lain PAD yang sah	54,82	61,94	47,32	47,47	47,47	10,83

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

Pertumbuhan rata-rata PAD selama tahun 2016 hingga 2020 sudah mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PAD tidak terlepas dari meningkatnya nilai realisasi masing-masing sumber PAD. Hampir seluruh sumber PAD juga mengalami pertumbuhan positif kecuali retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu indikator *good governance* adalah adalah APBD yang ditetapkan tepat waktu, oleh karena itu di bawah ini disajikan penetapan APBD yang tepat waktu.

Tabel 2.166
Persentase Tahapan Penetapan APBD Tepat Waktu Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan tahapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2021

3) Peningkatan Pengelolaan BUMD

Saat ini Pemkab Magelang mengelola 6 BUMD, dengan kepemilikan saham, sebagai berikut.

Tabel 2.167
Kepemilikan Saham BUMD di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham		
		2018	2019	2020
1	PT Bank Pembangunan Daerah	0,48 %	0,92 %	1,02%
2	PT PRPP	0,64 %	0,64 %	0,64 %
3	PD BPR BKK Muntilan	49 %	49 %	49%
4	PD BKK Tempuran*	49 %	-	-
	PT BKK Jateng (Perseroda)*	-	1,43 %	1,43%
5	PD BPR Bapas 69	100 %	100 %	100 %

No.	Nama BUMD	Kepemilikan Saham		
		2018	2019	2020
6	PDAM Tirta Gemilang	100 %	100 %	100 %
7	PD Aneka Usaha	100 %	100 %	100 %

Sumber : *Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2021*

* Catatan:

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD BKK Tempuran per tanggal 2 Juli 2019 hari Selasa bertempat di Ruang Rapat Gedung B Lantai V Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang, sudah di konsolidasi dengan 26 PD BKK se Jawa Tengah menjadi PT BKK JATENG (Perseroda). Secara akumulasi penyertaan modal sampai dengan tahun 2018 dan penerimaan dividen sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.168
Penyertaan Modal dan Penerimaan Dividen BUMD
di Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2020

NO.	Nama BUMD	Akumulasi s.d 2018		Akumulasi s.d 2019		Akumulasi s.d 2020	
		Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Dividen (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Dividen (juta)	Penyertaan Modal (juta)	Penerimaan Dividen (juta)
1	PT Bank Pembangunan Daerah	27.888,00	27.705,07	33.592,00	3.230,29	39.296,00	8.071,73
2	PT PRPP	560,00	0	560,00	0	280,00	0
3	PD BPR BKK Muntilan	9.800,00	5.762,22	9.800,00	1.000,63	9.800,00	919,87
4	PD BKK Tempuran	4.900,00	1.048,67	4.900,00	0	0	0
	PT BKK Jateng (Perseroda)	4.900,00	0	4.900,00	0	4.100,00	0
5	PD BPR Bapas 69	50.000,00	101.108,81	50.000,00	15.884,34	50.000,00	14.133,85
6	PDAM Tirta Gemilang	28.250,00	24.476,72	4.500,00	3.470,75	35.750,00	3.590,32
7	PD Aneka Usaha	3.100,00	382,35	3.100,00	114,10	3.100,00	0

Sumber : *Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang, 2021*

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan *audited* BUMD Kabupaten Magelang periode tahun 2015-2019. Beberapa kinerja keuangan BUMD yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.169
Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2016-2020 (Juta Rupiah)

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PT BPD	Pendapatan	5.673.340,00	6.563.629,00	6.875.885,00	7.600.613,00	4.478,50
		Laba bersih	980.770	1.191.497,00	1.249.134,00	1.053.659,00	1.122,22
2	PT PRPP *	Pendapatan	6.144,91	11.003,67	9.508,14	9.663,82	4.050,58
		Laba bersih	839,28	1.621,96	2.004,83	2.142,85	-2.549,74
3	BPR Bank Bapas 69	Pendapatan	107.971,61	116.601,79	123.319,86	135.418,28	99.322,61
		Laba bersih	25.207,03	26.217,62	29.094,64	33.467,07	33.487,30
4	BPR BKK Muntilan	Pendapatan	19.639,25	22.000,77	23.360,44	27.350,52	31.008,02
		Laba bersih	3.343,65	3.390,77	3.749,36	4.141,28	3.293,49
5	BKK Tempuran	Pendapatan	6.908,99	8.221,36	9.640,14	0	0
		Laba bersih	756,89	841,15	955,87	0	0

NO	BUMD	URAIAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	PT BKK Jateng (Perseroda)	Pendapatan	0	0	0	9.151,99	310.667,58
		Laba bersih	0	0	0	-2.337,68	38.480,46
8	PDAM Tirta Gemilang	Pendapatan	35.646,13	38.135,56	42.136,82	46.681,70	53.905,93
		Laba bersih	5.052,85	5.637,93	6.185,39	7.244,53	6.527,86
9	Aneka Usaha	Pendapatan	3.735,68	4.740,17	5.115,75	6.629,24	5.170,99
		Laba bersih	168,86	329,6	250,12	204,41	-37,68

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang Tahun 2021

* Catatan:

PT PRPP sampai dengan hasil usaha tahun 2018 belum menyetorkan deviden, laba PT PRPP digunakan untuk menutup kerugian kumulatif.

Secara kinerja dan keuangan, BUMD Pemkab Magelang menunjukkan kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan semakin meningkatnya beberapa aspek, yaitu keuangan, aset, pembinaan usaha baru (*startup*) dan UKM, pendapatan dan laba, serta pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain air bersih.

Namun untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, terdapat beberapa permasalahan, antara lain manajemen/pengelolaan, regulasi, SDM, modal, sinergi antar BUMD dan inovasi bisnis serta daya saing.

4) Alternatif pembiayaan non-APBD

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Magelang dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema pinjaman dan hibah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan obligasi daerah.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Magelang, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis dalam persiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu

skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi swa-pendanaan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Di samping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

c. Penelitian dan Pengembangan

Kelitbangan meliputi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian serta evaluasi kebijakan. Keluaran kelitbangan sebagai berikut.

- 1) Penelitian dan pengkajian baik yang strategis, aktual dan kompetitif yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi.
- 2) Pengembangan berupa Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, pemodelan kebijakan/program.
- 3) Perekayasa berupa Pedoman umum/teknis pelaksanaan model kebijakan/program.
- 4) Penerapan berupa uji coba model program pada daerah percontohan.
- 5) Pengoperasionalan berupa Penerapan model kebijakan/program secara lebih luas/ menyeluruh dan pendampingan.
- 6) Evaluasi Kebijakan berupa rekomendasi lanjut dengan perbaikan/dicabut/dihentikan.

Terdapat empat tahap pemanfaatan keluaran kelitbangan/proses inovasi yaitu inisiasi, internalisasi (adopsi, adaptasi, replikasi), institusionalisasi dan keberlanjutan. Sasaran inovasi berupa peningkatan layanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.170
Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penelitian/pengkajian/evaluasi kebijakan yang dibiayai APBD Kabupaten	Buah	-	1	3	18	9
2	Naskah akademik yang disusun	Buah	-	8	1	3	2
3	Inovasi yang didampingi	Buah	-	6	6	6	17
4	Jumlah Penelitian diluar APBD Kabupaten	Buah	430	450	461	471	450
5	Kerja sama kelitbangan	Buah	-	1	11	1	2
6	Diseminasi/penerapan	Buah	-	1	0	1	2
7	HAKI	Buah	-	0	2	1	1
8	Pameran Inovasi	Buah	-	2	2	2	0
9	Jurnal/publikasi yang diterbitkan	Edisi	-	2	1	1	2
10	Jumlah Kajian		-	4	4	6	9
11	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	-	-	66,7	100	100
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	-	0	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2021

Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong implementasi rencana kelitbangan di Kabupaten Magelang. Implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Magelang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.171

Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	buah	-	1	3	3	3
2	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Buah	-	1	3	3	3
3	Implementasi Rencana Kelitbangan	Buah	-	1	3	3	3

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa implementasi rencana kelitbangan semakin meningkat, hal ini diharapkan dapat mendorong hasil kegiatan kelitbangan dalam memberikan pertimbangan perencanaan pembangunan daerah serta penerapan teknologi dan inovasi daerah.

d. Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reuiu. Realisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini. Tren adanya temuan pemeriksaan cenderung mengalami fluktuasi baik itu pada pemeriksaan reguler untuk PD, kasus, desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal sebagai bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Untuk rata-rata jumlah temuan pemeriksaan terbanyak ada pada

pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemeriksaan reguler karena jumlah obyek pemeriksaan yang paling banyak yaitu desa dan PD. Capaian peningkatan Sistem Pengawasan Internal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.172
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020

No	Jenis Obrik	Hasil (LHP,LHE, LHR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemeriksaan Berkala/ Reguler	216	216	216	216	90
2	Pemeriksaan Khusus/ Kasus	62	4	7	18	22
3	Pemeriksaan Penyelenggara Pemerintahan Desa	150	160	172	172	51
4	Review Laporan Keuangan PD	2 LHR	2 LHR	8 LHR	14 LHR	24
6	Implementasi SPIP	1	10	12	15	16
7	Evaluasi LKJIP (PD)	27 LHE	24 LHE	23 LHE	23 LHE	23 LHE

Sumber : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2021

Evaluasi LKjIP pada tahun 2020 dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah. Dari jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi tersebut, sebanyak 20 Perangkat Daerah (87%) nilainya meningkat. Apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2019 dimana semua PD hasil evaluasinya meningkat (100%), maka tahun 2020 ini terjadi penurunan persentase PD yang hasil evaluasinya meningkat. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) PD yang baru dievaluasi sehingga belum mempunyai nilai pembandingan dan 1 (satu) PD memiliki nilai evaluasi tetap.

Untuk implementasi SPIP berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat kita lihat bahwa penilaian BPKP terhadap perangkat daerah menunjukkan posisi nilai maturitas SPIP Kabupaten Magelang tahun 2019 memiliki nilai dengan kategori terdefinisi (level 3). Nilai maturitas ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan praktik pengendalian intern, namun belum terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Pada tahun 2020, efektifitas pengendalian ini belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Nilai kapabilitas APIP di Kabupaten Magelang dari tahun 2016 s/d tahun 2020 cenderung meningkat, sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.173

Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP	level	2-	2	2+	3	3
2	Nilai Maturitas SPIP		2	2,92	3	3	3

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Magelang, 2021

e. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Aspek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK), Pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengembangan kompetensi pegawai yang meliputi diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan; diklat teknis dan diklat fungsional; penyelenggaraan bimbingan teknis, Pengembangan Karir meliputi promosi, uji Kompetensi dan penilaian kinerja; Kesejahteraan dan pembinaan pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penggajian, pensiun dan pembinaan pegawai.

Tabel 2.174

Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020

No	Golongan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	I	185	170	146	140	123
2	II	1.487	1.380	1.238	1.166	1061
3	III	4.511	4.469	4.310	4.381	4197
4	IV	3.446	3.209	2.905	2.573	2240
Jumlah		9.629	9.228	8.599	8.260	7.621

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 502. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dibanding tahun 2016 yaitu sejumlah 2.008. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah.

Pada tahun 2020 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 56,76%; kemudian lulusan SMA sebesar 14,57%. lulusan D-III sebesar 13,11%; lulusan D-II sebesar 4,59%; lulusan S2 sebesar 6,81%; lulusan SMP sebesar 2,35%; lulusan D-I sebesar 0,93%; serta lulusan SD sebesar 0,88%.

Tabel 2.175

Komposisi Pendidikan PNS (orang) Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Pendidikan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	281	181	291	192	280	193	273	199	289	230
3	S1/D-IV	1.970	3.214	1.885	3.176	1.735	2.994	1.642	2.964	1.500	2.826

No	Pendidikan	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
4	D – III	270	713	232	773	215	753	198	806	179	820
5	D – II	269	483	203	405	181	380	159	337	118	232
6	D – I	32	104	30	91	25	84	17	67	10	61
7	SMA	977	695	912	644	815	583	775	541	691	419
8	SMP	293	21	263	19	247	17	191	14	166	13
9	SD	122	4	108	4	93	4	73	4	63	4
Jumlah		4.214	5.415	3.924	5.304	3.591	5.008	3.328	4.932	3.016	4.605
		9.629		9.228		8.599		8.260		7.621	

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

Sedangkan pada tabel dibawah ini, disajikan data jumlah PNS yang telah mengikuti diklat jabatan struktural dari tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.176

Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020 (Orang)

No	Uraian	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	30	27	22	3	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	9	7	6	0	0
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	6	0	0	0	0

Sumber : BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

2.5 Pandemi COVID-19

Pandemi virus Corona 2019–2020 atau dikenal sebagai pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit virus korona 2019, diseluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus korona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini bisa menyebar dengan cepat dan menimbulkan gejala yang bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan segera dan benar. Selain itu, belum ada anti-virus atau vaksin untuk *Covid-19* ini. WHO memperkirakan masa inkubasi virus corona adalah 1-14 hari. Namun dalam catatan WHO dibanyak kasus, masa inkubasi virus ini umumnya hanya lima hari.

Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 17 Juni 2021, kurang lebih 177.048.031 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan 3.833.183 orang meninggal dunia. Total dosin vaksin yang telah diberikan kepada orang sebesar 2.255.070.739 dosis dan Jumlah orang yang telah divaksin secara tuntas sebanyak 480.289.387 orang. (Sumber: wikipedia)

2.5.1. Jumlah dan Sebaran COVID-19

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak *Covid-19*. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan ekonomi Nasional (KPCPEN), jumlah kasus *Covid-19* terus mengalami peningkatan dari hari ke hari. Adapun jumlah kasus virus korona di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.177
Jumlah Kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

No	Kasus	Nasional	Jawa Tengah	Magelang
1	Positif	125.303	15,863	756
2	Sembuh	1.771.220	195.276	10.209
3	Meninggal	53.753	14.417	338
	Jumlah	1.950.276	225.556	11.303
4	Vaksin 1	21.999.256	-	-
5	Vaksin 2	11.963.130	-	-
	Posisi data	17 Juni (21.30)	17 Juni (12.00)	17 Juni (20.45)

Sumber : <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, <https://corona.jatengprov.go.id>,
<https://infocorona.magelangkab.go.id/>

Kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang pertama kali terdeteksi pada kurun waktu 16 Maret 2020 yaitu terdapat 2 (dua) orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19*. Jumlah kasus ini terus bertambah setiap bulannya, dan terjadi penambahan yang cukup besar pada pada bulan tertentu. Secara lengkap kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang dari bulan Maret 2020 – 17 Juni 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.178
Jumlah Kasus COVID-19 di Kabupaten Magelang
Bulan Maret 2020 – 17 Juni 2021

No	Bulan	Penambahan kasus	Konfirmasi	Positif	Meninggal	Sembuh
1	31 Maret 2020		2		3	
2	30 April 2020	23	23		2	2
3	31 Mei 2020	80	103	60	3	40
4	30 Juni 2020	41	144	5	4	135
5	31 Juli 2020	30	174	21	6	147
6	31 Agustus 2020	88	262	42	9	211
7	30 September 2020	308	570	144	15	411
8	31 Oktober 2020	472	1.042	178	28	836
9	30 November 2020	1.816	2.858	865	83	1.910
10	31 Desember 2020	3.143	6.001	1448	145	4.408
11	31 Januari 2021	1.833	7.834	1379	207	6.248
12	28 Februari 2021	730	8.564	251	239	8.074
13	31 Maret 2021	485	9.049	241	268	8.540
14	30 April 2021	523	9.572	222	284	9.066
15	31 Mei 2021	749	10.321	256	310	9.755
16	17 Juni 2021	982	11.303	756	338	10.209

Sumber : <http://beritamagelang.id/>

Apabila dilihat dari jumlah kasus *Covid-19*, peningkatan jumlah kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan jumlah penambahan terbanyak adalah pada bulan Desember 2020 yaitu sebanyak 3.143 kasus.

Sedangkan sebaran kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang disetiap kecamatan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.179

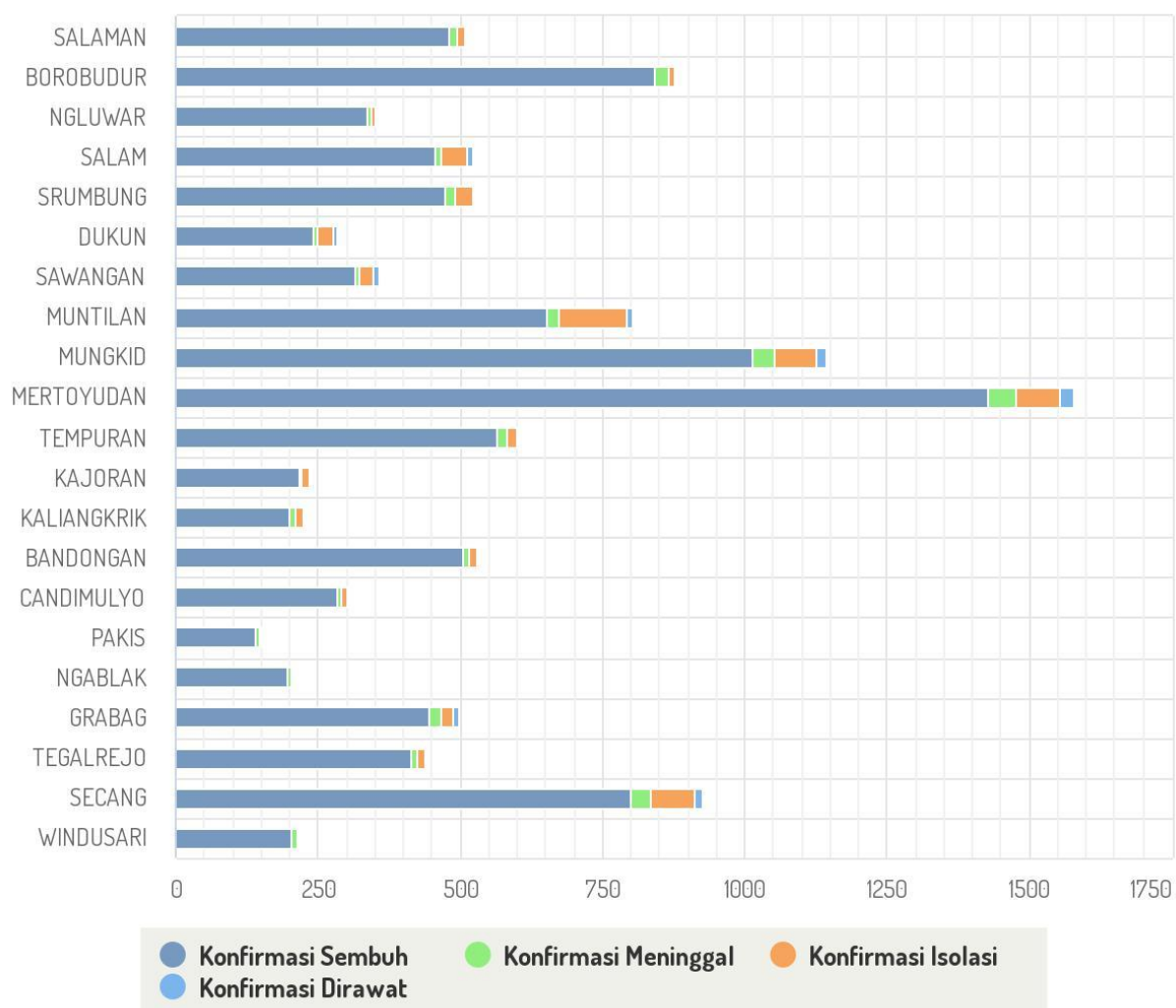
Jumlah Kasus Covid-19 Per Kecamatan di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021

No	Kecamatan	Dirawat	Isolasi	Meninggal	Sembuh
1	Salaman	2	14	13	480
2	Borobudur	4	12	22	843
3	Ngluwar	3	4	10	335
4	Salam	10	44	13	455
5	Srumbung	4	32	16	475
6	Dukun	7	26	9	241
7	Sawangan	10	26	6	316
8	Muntilan	10	117	22	653
9	Mungkid	19	72	39	1.013
10	Mertoyudan	25	77	48	1.427
11	Tempuran	2	18	16	566
12	Kajoran	1	12	5	217
13	Kaliangkrik	3	14	9	201
14	Bandongan	4	14	8	506
15	Candimulyo	1	12	7	283
16	Pakis	1	3	6	141
17	Ngablak	1	4	8	196
18	Grabag	12	22	21	444
19	Tegalrejo	5	12	12	414
20	Secang	15	76	36	800
21	Windusari	2	4	12	203
JUMLAH		141	615	338	10.209

Sumber : <https://infocorona.magelangkab.go.id/>

Gambar berikut ini menunjukkan, bahwa kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang tersebar di seluruh Kecamatan. Berdasarkan pada data tanggal 17 Juni 2021, Kecamatan dengan konfirmasi positif terbanyak adalah Kecamatan Muntilan yaitu 127 orang. Sedangkan Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi (1.577 kasus) dan jumlah konfirmasi meninggal tertinggi (48 jiwa).

KONFIRMASI PER KECAMATAN



Sumber : <https://infocorona.magelangkab.go.id/>

Gambar 2.48

Perkembangan Kasus *Covid-19* di Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 17 Juni 2021

2.5.2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net)

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat terdampak *Covid-19* dengan mempedomani Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan *Covid-19* yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa pemberian Hibah Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai terutama kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*.

Pemberian JPS untuk Program Perlindungan Sosial diutamakan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar bulan digunakan untuk memperbaiki kualitas perencanaan program,

memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Berdasarkan DTKS, di Kabupaten Magelang terdapat 590.328 jiwa/173.447 KK penduduk miskin. Sejumlah 141.922 KK mendapat bantuan berupa program sembako yang terdiri dari 84.507 KK sudah menerima bantuan pada bulan Maret 2020 dan sejumlah 57.415 KK pada bulan April 2020. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyalurkan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) sejumlah 15.292 KK dan bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah 16.233 KK.

Data Non DTKS berdasarkan usulan desa/kelurahan yang telah masuk data base Dinsos Provinsi Jawa Tengah sebanyak 114.000 KK. Provinsi Jawa Tengah membantu 57.000 KK dengan bantuan sebesar Rp. 200.000/bulan selama 3 bulan, sisanya sejumlah 57.000 KK penangannya melalui Dana Desa sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 3 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam penanganan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat terdampak *Covid-19* Pemerintah Daerah masih memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Desa.

2.5.3. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berlangsung sejak awal Maret tahun 2020 di Kabupaten Magelang telah membawa dampak pada berbagai sektor baik perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan.

2.5.3.1. Dampak Ekonomi

Adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian dari sisi permintaan dan penawaran. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan yang selanjutnya berdampak pada menurunnya paritas daya beli masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PPP Tahun 2020 di Kabupaten Magelang sebesar Rp. 9.301.000,- per orang per tahun. Nilai ini menurun 0,9% dari tahun 2019 yaitu Rp. 9.387.000,- per orang per tahun. Apabila dikaitkan dengan terjadinya pandemi Covid-19, penurunan PPP ini sangat wajar dialami oleh Kabupaten Magelang karena sektor-sektor penggerak perekonomian utama di Kabupaten Magelang adalah sektor-sektor yang paling rentan terhadap ancaman dampak pandemi Covid-19 yaitu sektor perdagangan dan industri termasuk di dalamnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian dan peternakan, serta sektor pariwisata.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda telah melakukan kajian/penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UKM yang dilihat dari lima aspek yaitu produksi, pemasaran, tenaga kerja, omset usaha, dan kebijakan layanan pemerintah. Kajian dilakukan terhadap pelaku UKM yang terdaftar dalam 21 (dua puluh satu) asosiasi/paguyuban/komunitas/klaster dengan total responden berjumlah 202 UKM. Data yang berhasil diidentifikasi dan dianalisis dalam kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar UKM telah melakukan usaha rata-rata selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu sebanyak 53%.
2. Sebagian besar UKM mempunyai aset kurang dari 100 juta yaitu sebanyak 81%.
3. Sebanyak 89% UKM memiliki aset yang statusnya adalah milik sendiri.
4. Sebagian besar UKM mempunyai modal di bawah 50 juta rupiah yaitu sebanyak 76%.
5. Sebanyak 63% modal yang dimiliki UKM adalah berasal dari modal sendiri.
6. Bahan baku yang digunakan oleh UKM sebagian besar diperoleh dengan cara membeli langsung dari produsen yaitu sebanyak 40%.
7. Sebanyak 39% pemasaran dilakukan secara *offline* kepada pembeli yang bukan pelanggan.
8. Pemasaran sebagian besar dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 48% dan hanya 4% yang dipasarkan sampai dengan luar negeri.
9. Asal tenaga kerja 99% dari wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.
10. Permasalahan berkaitan dengan tenaga kerja adalah sebanyak 49% tenaga kerja dirumahkan, 17% dilakukan pengurangan tenaga kerja, 13% dilakukan pemotongan upah, dan sisanya sebanyak 20% tidak mengalami permasalahan.
11. Sebanyak 63% UKM belum memiliki hak paten secara keseluruhan.
12. Sebanyak 77% UKM belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Adapun dampak pandemi *Covid-19* terhadap pelaku UKM berdasarkan hasil kajian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak pada sisi produksi dan dampak pada sisi pemasaran. Secara rinci, dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan sampai dengan penghentian produksi.
Hampir semua UKM mengalami penurunan produksi kecuali UKM yang tergabung dalam Klaster Salak Nglumut. Rata-rata penurunan produksi adalah sebesar 55,5%. Adapun UKM yang berhenti produksi adalah sebanyak 23,1%.
2. Penurunan omset usaha.
Semua UKM mengalami penurunan omset usaha rata-rata 57,8%.
3. Berhenti memasarkan hasil produksi.
Sebanyak 20,3% UKM berhenti melakukan pemasaran hasil produksi karena tidak ada permintaan dari konsumen.

Lebih lanjut kajian dilakukan dengan menginventarisir beberapa harapan dari pelaku UKM dalam rangka menangani dampak pandemi *Covid-19*. Adapun harapan dari pelaku UKM tersebut meliputi bantuan permodalan, pemasaran, sarana produksi, perijinan, dan pendampingan.

Sejalan dengan hasil kajian yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021. Stimulus ekonomi diberikan kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, koperasi maupun badan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan pembelian produk. Besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut :

- a. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah),- dan
- c. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Penerima stimulus ekonomi yaitu pelaku usaha yang terdaftar dalam basis data calon penerima stimulus ekonomi melalui Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi. Terhadap calon penerima stimulus ekonomi dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan saebagai penerima stimulus ekonomi, yaitu dalam hal masih menjalankan usahanya atau sudah tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan stimulus ekonomi usahanya dapat berjalan kembali.

Harapan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan adanya stimulus ekonomi bagi pelaku usaha adalah mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.

2.5.3.2. Dampak Bagi Pendidikan

Pandemi Covid -19 yang terjadi saat ini memberikan dampak yang besar di bidang pendidikan. Sekolah, di mana setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara guru dan siswa dapat menjadi sarana penyebaran Covid-19. Dalam rangka mencegah meluasnya penularan Covid-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan belajar dari rumah, yang dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik dan peserta didik melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan cara daring (dalam jaringan).

Perubahan pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran PJJ dengan daring ini secara umum membawa dampak negatif maupun positif bagi berbagai pihak, terutama bagi guru, murid dan orang

tua murid. Dampak positif bagi Guru adalah: (1). Guru mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan alat bantu mengajar yang mungkin belum pernah dipakai. Dampak negatifnya adalah : (1). Guru tidak bisa memandu proses pembelajaran dengan murid secara langsung; (2). Guru tidak bisa menggunakan sumber daya yang tersedia di sekolah; (3). Terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja dan pemimpin sekolah dan (4). guru yang berstatus guru tidak tetap (honorar) mengalami penurunan pendapatan.

Dampak positif bagi murid adalah : (1). Murid dapat lebih kompeten dalam bidang komputer atau teknologi digital (tidak gaptek) karena mereka terpaksa menggunakan teknologi digital sejak usia dini; (2). Kebiasaan mencari jawaban dengan mandiri dengan menggunakan internet juga perlu dikembangkan dan (3). System tugas dan ujian yang lebih kreatif, misalnya membuat video dan di unduh ke platform seperti Youtube mendorong siswa menjadi lebih inovatif. Adapun dampak negatifnya adalah : (1). Murid tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan guru secara langsung; (2). Murid tidak bisa melakukan aktivitas atau kegemaran sebagaimana biasa; (3). Terbatasnya komunikasi dengan teman bermain dan (4). Minimnya kesempatan belajar non akademik seperti pembelajaran terkait karakter dan ekstra kurikuler; (5). Adanya pengaruh terhadap mental dan kejiwaan siswa terutama usia remaja.

Dampak positif bagi orang tua adalah : (1). Bertambahnya waktu untuk mendidik putra-putrinya; (2). Meningkatnya kemampuan digital. Adapun dampak negatifnya adalah : (1). Bertambahnya energi untuk mendampingi pembelajaran anak; (2). Terbatasnya akses terhadap tempat kerja yang mempengaruhi pendapatan dan (3). Terbatasnya komunikasi dengan rekan kerja atau pergaulan sosial lain.

Dan dampak secara umum bahwa perkembangan digital yang pesat dan situasi darurat saat ini menuntut semua pemangku kepentingan dan semua lapisan masyarakat harus beradaptasi menyesuaikan perkembangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas PJJ secara keberlanjutan beberapa hal penting telah diupayakan, antara lain, **pertama**, lembaga pendidikan mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran *daring* seperti infrastruktur, *Learning Management System* (LMS), dan repositori yang memadai. Penggunaan media digital menjadi kunci penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran *online*. Diperlukan penyesuaian yang cepat bagi tempat pendidikan saat ini. **Kedua**, peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran secara daring. **Ketiga**, perluasan dukungan *platform* teknologi secara berkesinambungan untuk mendukung PJJ. Dukungan berbagai *platform* teknologi untuk kegiatan pembelajaran diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah masa darurat Covid-19 telah berakhir. Beberapa upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar PJJ dapat terlaksana secara optimal, bukan hanya dalam situasi darurat tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. **Keempat**, Peningkatan kapasitas orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak,




kelima, Mengoptimalkan aplikasi. Dalam penggunaan teknologi untuk membantu pembelajaran daring perlu mengoptimalkan kolaborasi antara guru dan murid dalam mengatasi keterbatasan yang ada. Selain itu perlu ada edukasi penggunaan teknologi dan kesepahaman visi misi akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan yang ada.

2.6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai Tahun 2020

Rata-rata persentase capaian indikator tahun 2020 akan dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.180

Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator pada akhir Tahun 2020 \geq 100% terhadap Target 2020.
2		Akan Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator akhir Tahun 2020 dalam interval $>$ 90% sampai dengan $<$ 100 % terhadap Target 2020.
3		Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indikator akhir Tahun 2020 \leq 90% terhadap Target 2020.
4	NA	Not Available	Indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten.

Untuk kriteria status evaluasi kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator telah memenuhi atau melebihi target tahun 2020.

2. **Akan Tercapai**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator mendekati target atau sesuai dengan perencanaan.

3. **Perlu Upaya Keras**

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator jauh dari target yang direncanakan. Hal ini memerlukan upaya keras dalam pencapaian target indikator tersebut.

2.6.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja. Pada tahun 2020, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 21 indikator tersebut sebanyak 7 indikator berstatus

tercapai, 11 indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.181

Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

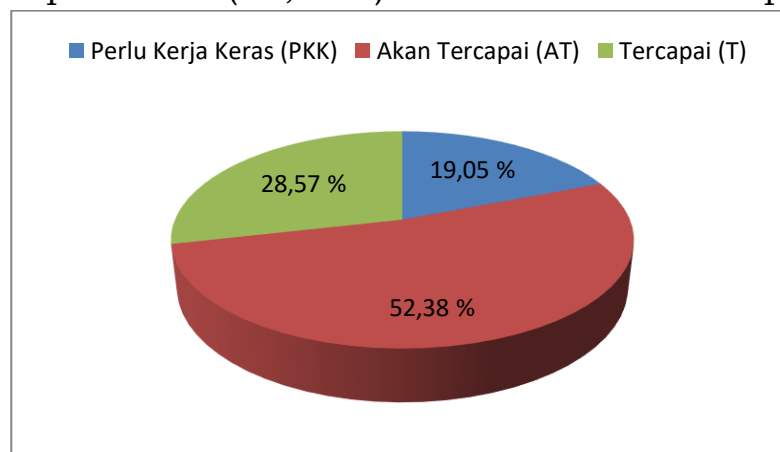
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	70,57	69,58	69,87	69,87	●	Setda
2	Angka Kemiskinan	6,83-7,83	9,43-10,43	11,27	11,27	▼	Setda
3	Indeks Pembangunan Gender	94,41	93,21	91,78*	91,78*	▶	Setda
4	Indeks Pemberdayaan Gender	70,53	69,33	67,74*	67,74*	▶	Dinsos PPKB PPPA
5	Persentase penurunan PMKS	0,58	0,58	0,63	0,63	●	Dinsos PPKB PPPA
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	utama	nindya	nindya	nindya	●	Dinsos PPKB PPPA
7	Angka Harapan Hidup	73,75	73,56	73,72	73,72	●	Dinkes
8	Rata-rata Lama Sekolah	8,41	7,86	7,78	7,78	▶	Disdikbud
9	Harapan Lama Sekolah	13,27	12,76	12,54	12,54	▶	Disdikbud
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	95,94	94,41	93,10	93,10	▶	Disdikbud
11	Indeks ketahanan pangan	82,62	78,42	79,51	79,51	●	Distan dan pangan
12	Cakupan hunian layak dan berkualitas	95,81	63,77	67,73	67,73	●	DPRKP
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5-6,0	5,1-5,6	-1,68	-1,68	▼	Setda
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25-2,55	2,4-3,0	4,27	4,27	▼	Disperinnaker
15	PDRB Per Kapita	32,72	26,70	24,94	24,94	▶	Setda
16	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	10.400,12	9.400,64	9.301	9.301	▶	Setda
17	Inflasi	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	1,56	▼	Setda
18	Nilai PDRB sektor perdagangan	6.227,11	4.868,86	4.455,79*	4.455,79*	▶	Disdagkop dan UKM
19	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8.875,03	7.373,16	6.914,81	6.914,81	▶	Distan dan pangan, Dispeterikan
20	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	9.613,39	7.648,60	7.264,81	7.264,81	▶	Disperinnaker
21	Nilai PDRB sektor pariwisata	1.951,00	1.523,19	1.379,38*	1.379,38*	▶	Disparpora

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

*) data sementara

Berdasarkan uraian indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari 21 indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat di tahun 2020, masih terdapat 4 (19,05%) indikator kinerja yang berstatus perlu upaya keras, 11 (52,38%) indikator akan tercapai dan 6 (28,57%) indikator telah tercapai.



Gambar 2.49

indikator Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2. Indikator kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang berstatus perlu upaya keras yaitu Angka Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi.
3. Faktor penghambat rendahnya capaian indikator kinerja Angka kemiskinan adalah:
 - a. Adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak Bulan Maret 2020
 - b. Database kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan *stakeholder* yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
 - d. Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani.
4. Faktor penghambat rendahnya capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah :
 - a. Stabilitas keuangan di Kabupaten Magelang, yang merupakan faktor sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil karena pandemi covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat
 - b. Sebagian besar sektor di Kabupaten Magelang menghadapi masalah dengan perputaran modal karena adanya pandemi covid-19, sehingga modal menjadi kurang produktif. Hal ini berimbas pada melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - c. Dengan adanya pandemi Covid-19, sumber daya manusia di Kabupaten Magelang secara umum tidak bisa bekerja secara efisien

dan optimal, sehingga mempengaruhi melambatnya laju pertumbuhan ekonomi

5. Faktor penghambat rendahnya capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Kebijakan pembatasan sosial karena pandemic covid 19, baik dalam skala kecil maupun skala besar berakibat pada terbatasnya kegiatan masyarakat untuk bekerja
 - b. Pandemi covid-19 menyebabkan pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga usaha-usaha di bidang ekonomi membatasi kegiatan produksinya atau bahkan tutup, dan hal ini menyebabkan terjadinya PHK dan lapangan kerja yang semakin menyempit
 - c. Adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk dirumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatas dalam bekerja ataupun melakukan usaha
6. Rendahnya capaian indikator kinerja Inflasi pada tahun 2020 di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh penurunan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat secara signifikan sebagai akibat pandemi Covid-19 yang mendorong penurunan daya beli masyarakat. Kondisi aktivitas ekonomi masyarakat yang rendah ini menyebabkan target indikator kinerja inflasi tidak tercapai

2.6.2. Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 12 indikator kinerja daerah. Pada tahun 2020 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 12 indikator kinerja pada aspek daya saing, 6 indikator berstatus tercapai, dan 6 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.182
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

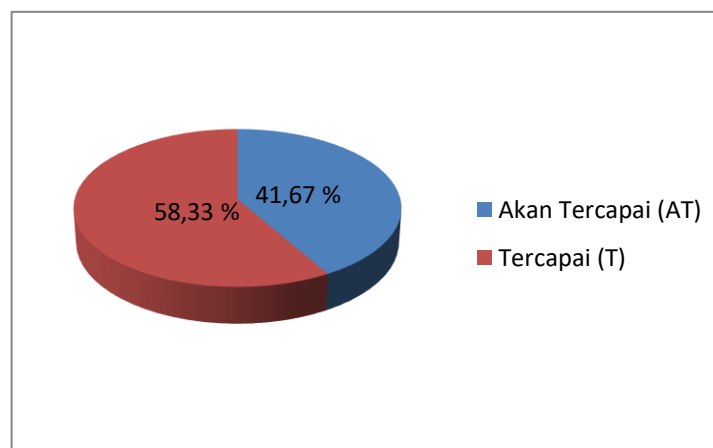
No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	83,29	69,93	66,60	66,60		Setda
2	IKLH	72,20	72,12	71,30	71,30		DLH
3	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	72,39	65,53	63,82*	63,82*		Setda
4	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,76	82,20	94	94		Satpol PP & PK, Kesbangpol, BPBD
5	Nilai AKIP	71,00 (BB)	63,03 (B)	61,04 (B)*	61,04 (B)*		Setda
6	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,86-3,1	2,31-2,50	2,94	3,12		Diskominfo
7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP		BPPKAD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	83,00	83,69	83,69	●	Setda
9	Indek Sistem Merit	0,71	0,55	0,60*	0,60*	●	BKPPD
10	Pertumbuhan Investasi	5,00	5,00	13*	13*	●	DPMPTSP
11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	94,38	67,74	61,90	61,90	▶	DPUPR dan Dishub
12	Indeks Desa Membangun	0,72	0,68	0,68	0,68	●	Dispermasdes

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras
 *) data sementara

Berdasarkan uraian indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya saing di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 12 indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing di tahun 2020, terdapat 5 (%) indikator kinerja yang berstatus akan tercapai dan 7 (%) indikator telah tercapai. Tidak ada indikator yang berstatus perlu upaya keras



Gambar 2.50
 Indikator Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing

2. Walaupun tidak ada indikator yang perlu upaya keras, ada hambatan yang menyebabkan belum tercapainya semua indikator kinerja terutama disebabkan adanya pandemic Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap hampir semua tatanan kehidupan.
3. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja pembangunan aspek daya saing adalah:
 - a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh OPD di Kabupaten Magelang;
 - b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber –sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Dokumen perencanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- d. Adanya transparansi dalam tata kelola pemerintahan;
- e. Dukungan kompetensi SDM yang memadai;

2.6.3. Aspek Pelayanan Umum

2.6.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.6.3.1.1. Pendidikan

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada tahun 2020, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator yaitu rerata nilai UN tidak ada statusnya karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan ujian nasional karena adanya pandemi *Covid-19*. Namun, karena tidak ada Ujian Nasional maka semua siswa diluluskan sehingga angka kelulusan menjadi 100%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.183

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Partisipasi Kasar APK)	93,41	89,02	85,47	91,50		Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	87,24	84,50	79,60	91,24		Disdikbud
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	98,28	95,96	88,18	95,96*		Disdikbud
4	Rerata Nilai UN	6,81	6,67	-	6,64*	NA	Disdikbud
5	Angka Kelulusan	100	99,92	100	100		Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan.
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik.
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan pendidikan adalah:

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu.

- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan.
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah.
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan faktor pendorong adalah:

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan).
- b. Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan partisipasi stakeholders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang

2.6.3.1.2. Kesehatan

Kinerja pada urusan kesehatan dilaksanakan dengan 5 (lima) program antara lain Program Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Sumber Daya Kesehatan, dan Program Kesehatan Masyarakat dengan kinerja yang diukur melalui 1 indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan 7 indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.184

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	45	25	25	25	●	Dinkes
2	Angka kesakitan	39,93	41,19	41,19	41,19	●	Dinkes
3	Jumlah Kematian Ibu	6	6	7	7	●	Dinkes
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	5,66	5,70	4,40	4,40	●	Dinkes
5	Angka Kematian Balita (AKABa);	6,64	6,68	5,28	5,28	●	Dinkes
6	Angka Kematian Neonatal (AKN)	3,94	3,98	3,40	3,40	●	Dinkes
7	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	80	60	60	60	●	Dinkes
8	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	●	Dinkes

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja urusan kesehatan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja, seluruh indikator atau 8 (delapan) indikator berstatus tercapai.

Berkaitan indikator angka kematian ibu melahirkan, Kabupaten Magelang sudah berhasil mencapai target SDGs. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang sebesar 7 pada tahun 2020, jauh dibawah target SDGs yaitu sebesar 70. Beberapa indikator lain juga menunjukkan tren yang semakin baik antara lain angka kematian bayi, Angka Kematian Balita dan angka kematian neonatal.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- a. Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Magelang.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun anggaran DAK

2.6.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh 1 indikator. Pada tahun 2020, capaian indikator pekerjaan umum dan penataan ruang berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	92,27	66,51	69,90	69,90		DPUPR

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Ketercapaian indikator cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2020 berada pada status tercapai. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah bahwa urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2019-2024. Oleh karena itu, banyak sumber daya yang diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

Namun walaupun begitu kinerja yang dicapai pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan sebagian besar anggaran pada urusan tersebut dialihkan alokasinya untuk penanganan covid-19.

2.6.3.1.3.1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman ditunjukkan dalam 2 indikator kinerja pembangunan daerah. Capaian indikator pada tahun 2020 sebanyak 2 indikator berstatus tercapai. Adapun capaian data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.186

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni	91,63	67,24	72,06	72,06	●	DPRKP
2	Persentase kawasan permukiman berkualitas	100	60,31	63,39	63,39	●	DPRKP

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor yang mendukung indikator kinerja persentase lingkungan pemukiman kumuh adalah telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi. Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi adalah adanya kolaborasi yang baik dalam penyediaan sarana sanitasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan lembaga donor.

Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Rumah Layak Huni adalah karena jumlah penanganan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai namun adanya bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari provinsi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan RTLH

2.6.3.1.3.2. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, BPBD, dan Kesbangpol dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Program Penegakan Perda dan Program Penanggulangan Kebakaran.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari 3 (tiga) indikator, 2 (dua) indikator dalam status tercapai dan 1 (satu) indikator dalam status akan tercapai. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.187

Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan penegakan hukum	89,68	84,53	84,53	84,53	●	Satpol PP dan PK
2	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	73,78	62,89	94	94	●	BPBD
3	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	99,83	99,17	99,00*	99,00*	▶	Kesbangpol

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong dan penghambat ketiga indikator kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain adalah: sebagai kabupaten yang terletak di kawasan rawan bencana, Kabupaten Magelang diwajibkan untuk memberi pengetahuan kepada penduduknya terkait kebencanaan, baik itu kerentanan, kapasitas, dan ancaman yang terdapat di kabupaten. Pengetahuan tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat terutama dalam menghadapi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Sampai tahun 2020, cakupan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Magelang relatif tinggi.

Indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah penduduk adalah karena selama ini menjadi anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Perekrutan anggota baru tidak sebanding dengan jumlah anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Selain itu personil Satpol PP dan PK sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan perda di lapangan juga belum sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang.

2.6.3.1.3.3. Sosial

Kinerja pada urusan sosial dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu : Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Program Pemberdayaan Sosial dengan kinerja yang diukur melalui dua indikator. Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial.

Tabel 2.188

Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan penanganan PMKS	49,8	47,46	104,52	104,52	●	Dinsos PPPK PPKB
2	Presentase keluarga Pra Sejahtera	18,00	20,15	20,15	20,15	●	Dinsos PPPK PPKB

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Status* : ● : Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Dari tabel diatas bisa dilihat, capaian 2 (dua) indikator kinerja urusan sosial dua indikator berada dalam status tercapai. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- Adanya pandemi Covid 19, mengakibatkan jumlah PMKS yang ditangani meningkat dari jumlah target sasaran yang ada.
- Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang.
- Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah.
- Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sarasannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.
- Adanya peranserta stakeholder serta masyarakat dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Magelang.
- Pendataan PMKS yang dilakukan secara periodik.


2.6.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.6.3.2.1. Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah urusan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2020 untuk indikator Indeks Produktivitas tenaga kerja berstatus tercapai

Tabel 2.189
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Produktivitas tenaga kerja	31.512.510	31.104.864	32.387.942	32.3879.42		Disperinaker

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.6.3.2.2. Perhubungan




Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 1 indikator kinerja pembangunan daerah. Pada tahun 2020, capaian indikator kinerja berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.190

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan	96,49	68,96	53,89	53,89		Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- a. Perencanaan kegiatan/program yang baik.
- b. Dukungan ketersediaan dana.
- c. Pelaksanaan kegiatan/program yang baik .
- d. Sarana dan prasarana mendukung.

Sedangkan faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai yaitu:

- a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini belum tercapai karena:

- 1) Adanya kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum.
- 2) Kurang nyamannya fasilitas angkutan umum dan fasilitas di terminal.
- 3) Waktu tunggu angkutan umum yang relatif lama.
- 4) Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.

- b. Jumlah ijin trayek

Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek. Namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi

karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan *online*.

c. Rasio Uji KIR Kendaraan

Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.

d. Jumlah Terminal Bis.





Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan Provinsi, dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karena gagalnya proses pengadaan tanahnya.

2.6.3.2.3. Lingkungan Hidup




Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup ditunjukkan dengan 4 indikator perangkat daerah yaitu (1) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru, (2) Persentase pengelolaan sampah, (3) Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan, dan (4) Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Tabel 2.191

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	22	10	2	10		DLH
2	Persentase pengelolaan sampah	54,91	41,20	34,29	34,29		DLH
3	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59	39,59	39,59	39,59		DLH
4	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	12,98	7,53	8,94	8,94		DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Secara umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan lingkungan hidup adalah:

- Sinergitas antar *stakeholder* baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan berbasis masyarakat.

2.6.3.2.4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu: Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah dengan kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.192

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK	99,75	97,48	97,68	97,68	●	Disdukcipil
2	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	96,67	66,67	81,57	81,57	●	Disdukcipil
3	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	95	77,5	75	75	▶	Disdukcipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Dari hasil evaluasi capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa 3 indikator kinerja, yaitu: Rasio Perekaman KTP - elektronik dan Keluarga yang Ber KK, Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian berada dalam status tercapai. Sedangkan indikator kinerja Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data berada dalam status akan tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- Disdukcipil sudah mulai melakukan upaya jemput bola pelayanan pencatatan sipil;
- Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan kepada masyarakat semakin diintensifkan;
- Pembebasan biaya untuk beberapa pelayanan pengurusan administrasi kependudukan

Faktor penghambat pencapaian kinerja program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Adanya perubahan aturan terkait perjanjian pemanfaatan data, sehingga harus mulai dari awal
- Adanya pandemi covid-19, sehingga pelayanan tatap muka dibatasi
- Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelayanan online

2.6.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 2 indikator. Dari 2 (dua) indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tercantum dalam RPJMD, yaitu: Rasio kekerasan dan Cakupan pemberdayaan perempuan menunjukkan dalam status tercapai dan akan tercapai.

Tabel 2.193

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pemberdayaan perempuan	67,22	66,46	66,45	66,45		Dinsos PPKB PPPA
2	Rasio kekerasan	0,02	0,03	0,03	0,03		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat serta mulai tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT. Sedangkan faktor penghambat ketercapaian indikator Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan adalah belum mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A semanah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

2.6.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dalam 1 indikator, yaitu laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2020 capaian kinerja dari 1 indikator tersebut berstatus perlu kerja keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.194

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,65	0,73	0,93	0,93		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Faktor yang menjadi penghambat indikator LPP adalah :

- 1) Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2020 menurun.

- 2) Komponen LPP terdiri dari Lahir, Mati, Datang, Pergi yang mana komponen itu berpengaruh pada jumlah penduduk awal (Po) dan jumlah penduduk akhir (Pt), sedangkan bidang KB hanya berwenang pada pengendalian kelahiran saja.

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kerjasama yang lebih baik lagi, kemudian menambah jangkauan pelayanan KB dengan memperluas jangkauan distribusi alat kontrasepsi terutama pil dan kondom secara langsung melalui PLKB dan kader PPKBD

2.6.3.2.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi kinerja dan 2) Program Pemberdayaan Usaha Mikro. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.195

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase koperasi aktif	81	78,13	38,31	66.21	▼	Disdagkop UKM
2	Peningkatan Omzet usaha Mikro	5	5	3,75	5	▼	Disdagkop UKM

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2020, keduanya berstatus perlu kerja keras.

2.6.3.2.8. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Jumlah nilai investasi PMA, Jumlah nilai investasi PMDN dan Survey kepuasan pelayanan perijinan. Pada tahun 2020 untuk indikator Jumlah nilai investasi PMA berstatus perlu kerja keras sedangkan Jumlah nilai investasi PMDN dan indikator Survey kepuasan pelayanan perijinan berstatus Tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.196

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai investasi PMA	95.721	78.750	69.679	69.679	▼	DPMPTSP
2	Nilai investasi PMDN	3.501	2.391	2.412	2.412	●	DPMPTSP
3	Survey kepuasan pelayanan perijinan	89	87	87,15	87,15	●	DPMPTSP

Sumber: DPMPTSP, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.6.3.2.9. Kebudayaan

Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 1 indikator kinerja. Pada tahun 2020, dari 1 indikator kinerja program urusan kebudayaan berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.197
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pengelolaan kebudayaan	34,6	32,86	32,26	32,26	►	Disdikbud

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021


Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya cakupan pengelolaan kebudayaan adalah karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya budaya yang oleh pemerintah daerah didukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan.




2.6.3.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui program: 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga; 2) Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahun 2020 indikator dimaksud berstatus Tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel di atas.

Tabel 2.198
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan prestasi generasi muda	52	41	53,63	53,63		Disparpora

Sumber : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

- Keaktifan pengurus organisasi pemuda khususnya KNPI dan karang taruna;
- Berkembangnya teknologi informasi mempermudah berkomunikasi;
- Meningkatnya motivasi pemuda untuk berorganisasi.

Ada beberapa kendala dalam mencapai indikator ini tetapi kendala tersebut dapat teratasi sehingga target bisa tercapai. Kendala tersebut adalah:

- Keterbatasan anggaran;
- Rentang usia pemuda menurut uu 40/2009 sementara pemuda aktif berusia diatas 30 tahun;
- Penyebab yg ketiga, belum adanya sarpras kepemudaan, antara lain gedung pemuda, ruang atau tempat untuk beraktualisasi, berkreasi dan berekspresi;
- Keterbatasan SDM sesuai cabang olahraga yg belum terbentuk di kabupaten magelang misal senam, anggar dan paralayang;
- Keterbatasan lahan sehingga sulit membuat lapangan baru;
- Pandemi covid-19 yang menyebabkan keterbatasan dalam beraktivitas




2.6.3.2.11. Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Ketersediaan Pangan Utama Beras, Stabilitas harga pangan dan Skor PPH. Pada tahun 2020 ketiga indikator tersebut capaian kerjanya berada pada status akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.199
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama beras	208,99	211,22	205,82	205,82		Distan & Pangan
2	Stabilitas harga pangan	94,3	93,97	92,41	92,41		Distan & Pangan
3	Skor PPH	88,4	87,98	87,90	87,90		Distan & Pangan


Sumber : Distan dan Pangan, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




2.6.3.2.12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 3 program, yaitu 1) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2) Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa; 3) Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa. Capaian Indikator Kinerja Daerah pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.200
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	100	85,01	95,37	95,37		Dispermades

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian kinerja Tahun 2020 indikator Indeks Desa Membangun dan Persentase status Desa Maju, Mandiri dan berkembang berada dalam status tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang adalah:

- a. Perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, efektif dan efisien; dan
- c. Koordinasi yang baik dan berkualitas antar pemangku kepentingan, baik di internal Dispermades maupun dengan pihak eksternal yang terkait.

2.6.3.2.13. Statistik

Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan indikator kinerja cakupan layanan informasi bagi desa dan Perangkat Daerah. Capaian indikator kinerja tersebut hingga pada akhir tahun 2020 berada pada status tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.201
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	98,32	48,16	56,46	56,46		Diskominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras


Nilai cakupan layanan informasi bagi Desa dan Perangkat Daerah pada tahun 2020 melebihi target, alasannya atau faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Telah diupayakan perbaikan aplikasi monografi desa dan pendampingan sampai ke tingkat desa dalam input data monografi desa.
2. Telah dilaksanakannya forum data sebagai wadah koordinasi data sektoral.



2.6.3.2.14. Persandian

Kinerja pembangunan urusan persandian ditunjukkan dengan indikator kinerja cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi. Capaian indikator kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 berada pada status tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.202
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	76,67	44,52	57,63	57,63		Diskominfo

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Nilai indikator cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi pada tahun 2020 melebihi target. Faktor yang mempengaruhinya adalah telah dilaksanakan pengamanan internet, intranet dan data center dengan *firewall*.




2.6.3.2.15. Kearsipan

Kinerja urusan kearsipan dilaksanakan melalui 2 Program yaitu 1) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan; dan 2) Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah di Bidang kearsipan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.203
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	100	38,46	30,76	30,76		Dispuspa

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021



Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Kearsipan, berdasarkan capaian kinerja Tahun 2020 untuk indikator Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku berstatus perlu kerja keras. Realisasi capaian kinerja yang belum mencapai target ini dikarenakan adanya pengurangan volume kegiatan yang telah direncanakan akibat adanya pengalihan alokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi *Covid-19*.




2.6.3.2.16. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja perangkat daerah yaitu (1) Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik dan (2) Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI. Capaian indikator kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2020 berada pada status akan tercapai dan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.204
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	94,15	83,94	80,18	80,18		Diskominfo
2	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	100	75	82,02	82,02		Diskominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

[Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Nilai Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik pada tahun 2020 lebih rendah dari nilai yang ditargetkan pada tahun 2020. Beberapa faktor yang mempengaruhinya adalah terjadinya refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan diantaranya yang meliputi indikator cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat. Disamping itu dimasa pandemi kegiatan dengan mengumpulkan massa tidak diperbolehkan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.


Sedangkan nilai cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI pada tahun 2020 melebihi nilai yang ditargetkan, faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah dalam masa pandemi pemanfaatan TI meningkat dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara online (daring).

2.6.3.2.17. Perpustakaan




Kinerja urusan perpustakaan dilaksanakan melalui 1 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan. Pencapaian kerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah di Bidang Perpustakaan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.205

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	0,10	0,07	0,0175	0,0175		Dispuspa

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Hasil evaluasi capaian kinerja urusan Perpustakaan, berdasarkan capaian kinerja Tahun 2020 untuk indikator rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten berstatus akan perlu upaya keras. Pencapaian yang masih rendah ini dikarenakan pelayanan perpustakaan harus memenuhi protokol kesehatan sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri No. 440/842 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri no. 440/830 tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Covid-19* bagi ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01. 07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja, Perkantoran dan Industri. Mempedomani peraturan-peraturan tersebut beberapa layanan di perpustakaan umum pada tahun 2020 ditiadakan karena berpotensi untuk memperluas penyebaran *Covid-19*. Apabila pandemi *Covid-19* tidak segera usai dan layanan perpustakaan umum tidak bisa segera dibuka, maka diperhitungkan pada akhir periode RPJMD tahun 2019-2024 target kinerja tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, besaran target pada indikator ini perlu dipertimbangkan untuk dikoreksi.

2.6.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.5.3.3.1. Pertanian

Kinerja pembangunan Urusan pertanian dilaksanakan melalui program: 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Olahraga; 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian; 5) Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian; 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Pencapaian kinerjanya diukur melalui 14 Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.206
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator	Satuan	2019 (Base line)	RKPD 2020		Target					Evaluasi
			Target	Realisasi	RKPD 2021	RPJMD 2022	RPJMD 2023	RPJMD 2024	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produksi Padi	Ton (GKP)	478.300	478.500	296.209	479.000	479.500	480.000	480.500	480.500	61,65
%Produksi Jagung	ton (pipilan kering)	51.448	51.450	40.611	51.500	51.550	51.600	51.650	51.650	78,63
Produksi Cabai	ton (segar)	21.534,6	39.457	32.578	40.071	40.399	40.783	41.183	41.183	79,11
Produksi Kopi	Ton (ose kering)	1.480	1.490	1.490,70	1.500	1.510	1.520	1.530	1.530	97,43
Produksi Cengkeh	ton (bunga kering)	163	165	165,70	167	169	171	173	173	95,78
Produksi kelengkeng	ton (segar)	90	93	75	95	97	99	100	100	75,00
Produksi jeruk	kuintal (segar)	2.650	2.655	2.379	2.660	2.665	2.670	2.675	2.675	88,93
Produksi kelapa dalam	ton (kopra)	7.525	7.530	7.531	7.535	7.540	7.545	7.550	7.550	99,75
Produksi Salak	ton (segar)	69.372	69.380	53.739	69.390	69.400	69.410	69.420	69.420	77,41
Produksi Bawang putih	ton (askip)	2.156,2	2.264	7.510	2.377,2	2.424,7	2.473,2	2.522,7	2.522,7	297,70
Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	persen	0,3	0,3	0,28	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5	18,67
Produksi daging	ton	16.111,40	16.393,3	16.484,37	16.680,2	16.972,1	17.269,1	17.571,3	90.997,4	18,11
Produksi Telur	ton	16.787,5	17.071,2	17.071,88	17.359,8	17.653,1	17.951,5	18.254,9	105.078	16,25
Produksi susu	ton	810.000	818.257	818.461	833.804	849.646	865.789	882.238	4.249.734	19,26

Sumber : Distan dan pangan, 2021

Status* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Kerja Keras

Sampai dengan tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian dari 14 indikator yang ada, 1 indikator status tercapai, 9 indikator status akan tercapai, dan 4 indikator status perlu upaya keras. Status perlu upaya keras ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19

2.5.3.3.2. Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan dan Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan. Pada tahun 2020 Indikator Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan berstatus Perlu Kerja Keras sedangkan indikator Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan tidak bisa di ukur capaian kerjanya karena data tersedia pada awal tahun 2021. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.207

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	25	5	-81,39	-81,39	▼	Disparpora
2	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	30	5,3	-8,42	-8,42	▼	Disparpora

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Sampai dengan tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan pariwisata untuk Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada status perlu kerja keras dan untuk indikator Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan pada status belum ada data. Penyebab tidak tercapainya Indikator tersebut karena adanya Pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas wisata.

2.5.3.3.3. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui program: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan. Pencapaian kerjanya diukur melalui 3 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.208

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi benih ikan	13.603.826	2.100.000	1.719.206,10	1.719.206,10	▼	Dinas Peterikan
2	Produksi ikan konsumsi	156.444,00	25.000,00	18.476,00	18.476,00	▼	Dinas Peterikan
3	Produksi perikanan tangkap	1.907,94	294,53	230,63	230,63	▼	Dinas Peterikan

Sumber : Dispeterikan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah urusan Kelautan dan Perikanan, ketiga indikator berstatus perlu upaya keras. Fenomena ini terjadi sebagai dampak pandemi *Covid-19*.

2.5.3.3.4. Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui program: 1) Program Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan; 2) Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar; 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolagian. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan.

Sampai dengan tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan untuk indikator Cakupan Pelayanan Perdagangan dan indikator Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur pada status akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.209

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan Pelayanan Perdagangan	78	70	68,99	68,99	▶	Disdagkop UKM
2	Jumlah Pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	12	8	7	7	▶	Disdagkop UKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2021

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.5.3.3.5. Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui Program Pengembangan Industri. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 1 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.210

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertumbuhan Industri	12,16	2,33	2,387	2,387	●	Disperinaker

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

Status* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Sampai dengan tahun 2020 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian untuk Persentase Pertumbuhan Industri status tercapai.

2.6.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.5.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dengan 1 indikator, yaitu Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah. Status ketercapaian indikator ini adalah tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Perencanaan untuk 1 (satu) indikator dalam status akan tercapai. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.211
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	93,38	85,38	85,38	85,38		Bappeda

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras




2.5.3.4.2. Keuangan

Kinerja urusan keuangan dilaksanakan melalui 3 Program yaitu 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Program Pengelolaan Aset Daerah. Pencapaian kinerjanya diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Daerah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kenaikan PAD	7	-6,3	-22,26	-22,26		BPPKAD
2	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100		BPPKAD
3	Persentase kejelasan status aset daerah	100	100	100	100		BPPKAD

Sumber: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Keuangan dari 3 (tiga) indikator, 2 (dua) indikator berstatus tercapai dan 1 (satu) indikator berstatus perlu upaya keras. Untuk Persentase kenaikan PAD dalam status perlu upaya keras, hal ini diakibatkan karena lesunya perekonomian akibat pandemi *Covid-19* yang berakibat terhadap berkurangnya penerimaan pendapatan asli daerah, (kondisi perekonomian baik Nasional maupun Regional mengingat

pencapaian indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat).


2.5.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan

Kinerja urusan kepegawaian dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur, dan Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai.




Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja urusan Kepegawaian berada dalam status akan tercapai dan hal ini diperhitungkan target akhir RPJMD akan dapat tercapai. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepegawaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.213

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indek profesionalitas ASN	76	67	63	63		BKPPD

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 karena :

1. Beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan sertifikasi Jabatan Fungsional pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian sampai dengan pemerintah menyatakan aman dari *Covid-19*, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian target peningkatan kompetensi, yang mana kompetensi tersebut dalam perhitungan IP ASN mempunyai bobot 40%.
2. Pengurangan anggaran sebesar 84,08% karena refocusing untuk penanganan pandemi *Covid-19*, termasuk untuk kegiatan peningkatan kompetensi (diklat dan bintek ASN) mengakibatkan capaian target di komponen kompetensi tidak tercapai.
3. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD belum terupdate dalam database, terutama data bintek dan diklat yang dilaksanakan ASN dan belum semua ASN melaporkan diklat/bintek yang diikutinya. Hal ini menyebabkan ada kompetensi ASN yang tidak terhitung, akibatnya nilai IP ASN lebih rendah dari yang sebenarnya

2.5.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan


Kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengkajian Daerah. Pencapaian kinerjanya diukur melalui Indikator Kinerja Daerah dengan kinerja sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.214

Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	100	100	100		Bappeda dan Litbangda

umber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

Faktor pendukung ketercapaian indikator kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Terjalannya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait kelitbangan di internal Kabupaten Magelang.
2. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal, baik perguruan tinggi, provinsi, kementerian terkait.

2.5.3.4.5. Pengawasan

Kinerja urusan Pengawasan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja urusan Pengawasan maka untuk indikator Level Kapabilitas APIP berstatus tercapai.

Realisasi Maturitas SPIP Tahun 2020 sebesar 3 dengan status tercapai. Dengan memperhatikan bahwa SDM atau Personil Assesor dalam penilaian maturitas SPIP masih sangat terbatas dan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 sedang dalam proses revisi yang akan berimplikasi pada perubahan Pedoman dan Aplikasi SPIP *Online* pada Tahun 2021. Hal ini mengakibatkan ditanggungkannya Penilaian Maturitas SPIP *Online* 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan di Tahun 2021, sehingga dapat menghambat pencapaian Target Maturitas SPIP Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja urusan Pengawasan dapat dilihat pada tabel Capaian Indikator Kinerja Daerah berikut.

Tabel 2.215

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Level kapabilitas APIP	3+	3	3	3		Inspektorat
2	Nilai maturitas SPIP	3,4	3	3	3		Inspektorat

Sumber: Inspektorat, 2021

Status* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Kerja Keras

2.6.3.5. Fokus Layanan Fungsi Lainnya

Kinerja pada layanan fungsi lainnya ditunjukkan dalam 3 indikator, meliputi indikator cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan

pemerintah daerah, nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah. Berdasarkan tabel di atas, kinerja layanan fungsi lainnya pada tahun 2020 tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja dari ketiga indikator yang berada pada status tercapai. Selengkapnya data capaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Capaian Kinerja Pada Layanan Fungsi Lainnya

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020	Status	PD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	80,00	70,00	70	70	●	Setda
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	83,75	83,77	83,77	●	Setda
3	Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah	100	94	100	100	●	Setwan

Sumber : Hasil Olahan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ▲ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

2.7 Evaluasi Kinerja Indikator Program

Dalam penilaian kinerja Indikator program Kabupaten Magelang tahun 2020, penentuan batas kriteria capaian sama dengan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kriteria capaian secara detail disajikan pada tabel 2.176. Adapun capaian kinerja indikator program pada tahun 2020, sebagaimana di sajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.217
Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Bidang : Pendidikan						
	Program Pendidikan Sekolah Dasar						
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	0,06	0,04	150,00	●	Disdikbud
2	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	92,5	91,95	104,17	113,29	●	Disdikbud
3	Persentase SD dengan Siswa Ideal	41,53	40	41,20	103,00	●	Disdikbud
4	Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	100	25,04	21,19	84,62	▼	Disdikbud
5	Persentase SD dengan sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	76,6	73,13	NA	NA	NA	Disdikbud
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
6	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,21	0,24	0,23	104,35	●	Disdikbud
7	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	81	79,95	100,58	125,80	●	Disdikbud
8	Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	100	38,46	26,92	69,99	▼	Disdikbud

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
9	Persentase SMP dengan Jumlah Siswa Ideal	39,06	35,94	36,64	101,95	●	Disdikbud
10	Persentase SMP dengan Sarpras sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	80,62	72,87	NA	NA	NA	Disdikbud
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal						
11	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)	89,13	60,87	52,27	85,87	▼	Disdikbud
12	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	93,93	48,99	43,14	88,06	▼	Disdikbud
	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						
13	Persentase Guru Bersertifikat	95	91	89,65	98,52	▶	Disdikbud
14	Persentase Guru Yang Lulus Uji Kompetensi Guru	70,53	65,4	69,86	106,82	●	Disdikbud
	Bidang : Kesehatan						
	Program Pelayanan Kesehatan						
15	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP	55	30	30	100	●	Dinkes
16	Cakupan Mutu Pelayanan FKTL	55	30	30	100	●	Dinkes
17	Cakupan Mutu Pelayanan Laboratorium	55	30	30	100	●	Dinkes
	Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit						
18	Persentase puskesmas/jejaring/jaringan/labkesmas/IFK yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	50	30	30	100	●	Dinkes
19	Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	50	30	30	100	●	Dinkes
20	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Yang Terpenuhi	75	67,5	69,48	102,93	●	Dinkes
21	Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	81	79,6	82,86	104,10	●	Dinkes
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
22	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)	100	100	57,94	57,94	▼	Dinkes
23	Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)	100	100	35,66	35,66	▼	Dinkes
24	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)	100	100	91,77	91,77	▼	Dinkes
25	Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)	100	100	5	5	▼	Dinkes
26	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	100	100	70	70	▼	Dinkes
27	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	●	Dinkes
28	Cakupan Surveilans dan Imunisasi	90	60	60	100	●	Dinkes
29	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)	100	100	7,32	7,32	▼	Dinkes
30	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)	100	100	41,88	41,88	▼	Dinkes
	Program Sumber Daya Kesehatan						Dinkes
31	Cakupan sumber daya manusia kesehatan	90	82	82	100	●	Dinkes
32	Cakupan sarana prasarana dan pembinaan sumber daya kesehatan	94	84	84	100	●	Dinkes
	Program Kesehatan Masyarakat						Dinkes
33	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir*)	100	100	99,02	99,02	▶	Dinkes
34	Pelayanan kesehatan balita*)	100	100	54,94	54,94	▼	Dinkes
35	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)	100	100	17,4	17,40	▼	Dinkes
36	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)	100	100	38,44	38,44	▼	Dinkes
37	Cakupan Kesehatan Ibu, Anak, Lansia, Gizi	70	62	62	100	●	Dinkes
38	Cakupan Kesehatan Lingkungan, Kesjaor	90	74	74	100	●	Dinkes
39	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	68	59	59	100	●	Dinkes

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
40	Pelayanan kesehatan ibu hamil *)	100	100	94,01	94,01		Dinkes
41	Pelayanan kesehatan ibu bersalin *)	100	100	100	100		Dinkes
	Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Program Peningkatan akses dan kualitas jalan						
42	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan	100	94,37	93,39	93,39		DPUPR
43	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik	82,47	77,71	77,74	77,74		DPUPR
	Program Peningkatan layanan Sumber Daya Air dan Jaringan irigasi						
44	Cakupan layanan jaringan irigasi	90,42	83,44	83,95	83,95		DPUPR
45	Cakupan layanan Sumber Daya Air	91,3	72,19	66,7	66,7		DPUPR
	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL						
46	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik	100	99,25	99,05	99,05		DPUPR
47	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	100	12,5	0	0		DPUPR
48	Cakupan layanan air minum*	93,27	88,79	89,03	89,03		DPUPR
49	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*	91,82	87,7	100	100		DPUPR
50	Persentase terbangunnya Landmark	100	66,67	58,33	58,33		DPUPR
	Program Pengembangan sarana dan prasarana ke PU an						
51	Cakupan sarana prasarana ke PU-an	100	82	92,67	92,67		DPUPR
52	Cakupan layanan Jasa konstruksi	100	51,33	57,64	57,64		DPUPR
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang						
51	Persentase Dokumen Rekomendasi Perijinan	65,8	39,49	50,65	50,65		DPUPR
52	Persentase kesesuaian tata ruang	76,64	42,39	69,5	69,5		DPUPR
53	Cakupan kinerja pertanahan	100	33,33	40	40		DPUPR
	Bidang : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman						
54	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	100	78,96	79,98	79,98		DPRKP
55	Persentase pengendalian kawasan permukiman	100	62,26	73,58	73,58		DPRKP
56	Persentase penyediaan TPU	100	0	0	0		DPRKP
57	Persentase penanganan PSU Permukiman	100	100	100	100		DPRKP
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan						
58	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	61,83	43,6	52,90	52,90		DPRKP
59	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR	100	33,33	66,67	66,67		DPRKP
60	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	96,3	59,26	40,74	40,74		DPRKP
61	Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi relokasi warga yang terdampak proyek pemerintah*	100	100	100	100		DPRKP
62	Persentase penanganan PSU Perumahan	100	100	100	100		DPRKP
	Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Program Penanggulangan Bencana						
63	Persentase Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62,9	34,4	223,16	223,16		BPBD

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
64	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	100	100	292,55	292,55	●	BPBD
65	Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	85	85	100	100	●	BPBD
66	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	47,91	32,17	156,9	156,9	●	BPBD
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat						
67	Persentase ormas yang aktif	99,5	97,5	NA	NA	NA	Kesbangpol
68	Persentase konflik sosial tertangani	100	100	100	100	●	Kesbangpol
69	Persentase kegiatan pembinaan politik	100	100	83,33	83,33	▼	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
70	Persentase penertiban yang dilaksanakan	100	100	100	100	●	Satpol PP&PK
71	Persentase satlinmas yang aktif	75	71	71,00	71,00	●	Satpol PP&PK
72	Persentase pengamanan dan pengawalan	100	100	100	100	●	Satpol PP&PK
	Program Penegakan Perda						
73	Persentase penegakan perda	96,2	95,6	95,6	95,6	●	Satpol PP&PK
	Program Penanggulangan Kebakaran						
74	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap	75	57	75	75	●	Satpol PP&PK
	Bidang : Sosial						
	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
75	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	33,92	33,95	104,52	104,52	●	Dinsos PPKB PPPA
76	Persentase PMKS dan korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	45,35	45,25	105	105	●	Dinsos PPKB PPPA
77	Persentase penyandang disabilitas, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial*	14,55	2,57	6,97	6,97	●	Dinsos PPKB PPPA
78	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten **	100	100	100	100	●	Dinsos PPKB PPPA
79	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **	100	100	82	82	▼	Dinsos PPKB PPPA
	Program Pemberdayaan Sosial						
80	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	48,59	8,96	8,75	8,75	▶	Dinsos PPKB PPPA
81	Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan	0,59	0,1	0	0	▼	Dinsos PPKB PPPA
82	Persentase fakir miskin yang divalidasi	100	100	100	100	●	Dinsos PPKB PPPA
	Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
	Bidang : Tenaga Kerja						
	Program Pengembangan Kompetensi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja						
83	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	80,6	80,6	80,6	80,60	●	Disperinaker
	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja						

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
84	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja	82,74	82,74	82,74	82,74	●	Disperinaker
	Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak						
85	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	46,85	44,27	42,83	42,83	▶	Dinsos PPKB PPPA
86	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	100	57	20,32	20,32	▼	Dinsos PPKB PPPA
87	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	100	100	85,22	85,22	▼	Dinsos PPKB PPPA
88	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	100	66,66	66,66	66,66	●	Dinsos PPKB PPPA
	Bidang : Pangan						
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						
89	Penanganan daerah rawan pangan	67,5	67,5	67,5	67,5	●	Distanpangan
90	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	91	91	91	91	●	Distanpangan
91	Stabilitas harga dan pasokan pangan	93,2	93,2	93,2	93,2	●	Distanpangan
92	Ketersediaan energi per kapita	2000	2000	2673	2673	●	Distanpangan
93	Ketersediaan protein per kapita	53	53	71,59	71,59	●	Distanpangan
94	Penguatan cadangan pangan	65	65	65,00	65,00	●	Distanpangan
95	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,8	87,9	87,90	87,90	●	Distanpangan
96	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	90	100	100	●	Distanpangan
	Bidang : Lingkungan Hidup						
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca						
97	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	64	31	11	35,48	▼	DLH
98	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	72	67	100	149,25	●	DLH
99	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	70	38	32	84,21	▼	DLH
100	Persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi	27	18	18	100	●	DLH
	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup						
101	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan	100	60	109	181,67	●	DLH
102	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	100	100	0	0	▼	DLH
103	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani	100	100	100	100	●	DLH
104	Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	48	48	0	0	▼	DLH
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah						
105	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	30,43	20	17,32	86,6	▼	DLH
106	Persentase cakupan area pelayanan sampah	13,44	8,06	7,8	96,77	▶	DLH
107	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*	24,48	21,2	19,02	89,71	▼	DLH
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						
108	Persentase Ketersediaan RTH Publik di	1,89	1,88	1,88	100	●	DLH

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Wilayah Perkotaan						
109	Persentase RTH Publik yang terkelola	25,86	25,2	25,69	101,94	●	DLH
110	Persentase Ketersediaan RTH Privat di Wilayah Perkotaan	37,71	37,71	37,71	100	●	DLH
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim						
111	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	3,68	2,27	2,56	112,77	●	DLH
112	Persentase luasan daerah rawan bencana yang dikonservasi	0,88	0,59	0,78	132,2	●	DLH
113	Persentase mata air yang dikonservasi	32	14	14	100	●	DLH
114	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim	9,95	4,57	4,57	100	●	DLH
115	Persentase sekolah Adiwiyata	18,11	15,88	15,88	100	●	DLH
	Bidang : Administrasi Kependudukan dan Capil						
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan						
116	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	100	97,7	97,87	97,87	●	Disdukcapil
117	Persentase penerbitan KK	99,5	97,25	97,87	97,87	●	Disdukcapil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil						
118	Persentase penerbitan Akta Kelahiran	100	90	131,11	131,11	●	Disdukcapil
119	Persentase Penerbitan Akta perkawinan	90	50	80,33	80,33	●	Disdukcapil
120	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	60	60	60	●	Disdukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data						
121	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90	70	70	70	●	Disdukcapil
122	Persentase Pemanfaatan Data	100	80	80	80	●	Disdukcapil
	Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
123	Persentase fasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	100	100	100	100	●	Dispermasdes
124	Persentase pasar desa dengan pengelolaan baik	100	32,79	34	103,69	●	Dispermasdes
125	Persentase BUMDES dalam strata maju, berkembang dan tumbuh	54,5	32,7	29,97	91,65	▶	Dispermasdes
126	Persentase TTG yang difasilitasi	100	28,35	0	0,00	▼	Dispermasdes
127	Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri	100	65,53	38,24	58,35	▼	Dispermasdes
128	Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	8,15	1,63	0	0,00	▼	Dispermasdes
	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa						
129	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	100	100	100	100	●	Dispermasdes
130	Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	23,8	4,76	0	0,00	▼	Dispermasdes
131	Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi	0,99	0,39	0,10	25,64	▼	Dispermasdes
132	Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	100	32,26	0	0,00	▼	Dispermasdes
	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa						
133	Persentase pemenuhan perencanaan desa tepat waktu	100	100	100	100	●	Dispermasdes
134	Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	100	100	100	100	●	Dispermasdes
135	Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan aset desa nya	100	24,52	22,89	93,35	▶	Dispermasdes

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Program Keluarga Berencana						
136	Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB	2,43	2,41	-1,96	-1,96	▼	Dinsos PPKB PPPA
137	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	91,75	90,84	90,8	90,8	●	Dinsos PPKB PPPA
138	Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*	10,5	12,4	12,35	12,35	▶	Dinsos PPKB PPPA
139	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*	77,8	74,7	74,9	74,9	●	Dinsos PPKB PPPA
140	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	37	34,8	35	35	●	Dinsos PPKB PPPA
	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga						
141	Usia Kawin Pertama (UKP)*	22	21	0	0	▼	Dinsos PPKB PPPA
142	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	62,29	54,09	25,64	25,64	▼	Dinsos PPKB PPPA
143	Persentase anggota UPPKS dari keluarga pra sejahtera	59,25	55,06	53,83	53,83	▶	Dinsos PPKB PPPA
144	Persentase perangkat daerah yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	39,6	39,6	39,60	39,60	●	Dinsos PPKB PPPA
	Bidang : Perhubungan						
	Program peningkatan pelayanan angkutan						
145	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	94,08	91,38	60,96	60,96	▼	Dishub
	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan						
146	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	100	81,1	78,41	78,41	▶	Dishub
	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas						
147	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	100	59,69	46,4	46,4	▼	Dishub
148	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	91,87	43,69	29,8	29,8	▼	Dishub
	Bidang : Komunikasi dan Informatika						
	Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi						
149	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	100	48,48	53,37	110	●	Diskominfo
150	Cakupan Layanan Komunikasi	82	75	75	100	●	Diskominfo
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						
151	Persentase urusan yang terintegrasi dalam pengelolaan BIG DATA	100	34,21	35	102	●	Diskominfo
152	Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah	94,96	10,27	34,40	334	●	Diskominfo
153	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pengelolaan TIK	100	100	100	100	●	Diskominfo
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						
154	Cakupan diseminasi informasi melalui media baru portal berita daerah	100	100	100	100	●	Diskominfo
155	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	100	100	119,05	119,05	●	Diskominfo
156	Cakupan Konten Literasi TIK yang ramah anak, wanita, disabilitas dan pelajar	100	50	50	100	●	Diskominfo
157	Persentase layanan website PD dan Desa yang memenuhi kriteria	64,92	13,63	24,40	179	●	Diskominfo
158	Cakupan diseminasi informasi melalui media	100	90	90	100	●	Diskominfo

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	massa						
159	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	100	100	66,67	66,67	▼	Diskominfo
160	Cakupan diseminasi informasi melalui media interpersonal	100	100	100	100	●	Diskominfo
161	Cakupan diseminasi informasi melalui media luar ruang	100	100	100	100	●	Diskominfo
	Bidang : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
162	Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	80	78,13	6,54	6,54	▼	Disdagkop & UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro						
163	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	3,71	0,73	0,02	0,02	▼	Disdagkop & UKM
	Bidang : Penanaman Modal						
	Program Peningkatan dan Pelayanan Investasi						
164	Persentase realisasi investasi	61,21	61,21	80,09	80,09	●	DPMPPTSP
	Program Pemantauan dan Pengendalian Investasi						
165	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi	0,02	0,01	41,15	41,15	●	DPMPPTSP
	Program Pelayanan perijinan						
166	Persentase pelayanan perijinan	1	1	0,7	0,7	▼	DPMPPTSP
	Bidang : Kepemudaan dan Olah Raga						
	Program Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga						
167	Cakupan pembinaan olahraga	53	41	41	41	●	Disparpora
	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan						
168	Cakupan pembinaan pemuda	51	41	32,41	32,41	▼	Disparpora
	Bidang : Statistik						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Statistik						
169	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100	100	97,5	97,5	▶	Diskominfo
170	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi	100	100	97,5	97,5	▶	Diskominfo
	Bidang : Persandian						
	Program Persandian						
171	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	48	10	10	10	●	Diskominfo
	Bidang : Kebudayaan						
	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan						
172	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	14,75	10,54	10,54	100	●	Disdikbud
173	Persentase Karya Budaya yang Terlayani	4,51	4,12	3,38	82,04	▼	Disdikbud
174	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	84,54	83,92	59,78	71,23	▼	Disdikbud
	Bidang : Perpustakaan						
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan						
175	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten	0,0264	0,0221	0,0203	91,86	▶	Dispuspa
176	Angka kepuasan pemustaka	81,5	79,5	85,66	107,75	●	Dispuspa
177	Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang Mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Workshop	100	43,75	41,86	95,68	▶	Dispuspa

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Bidang : Kearsipan						
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan						
178	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip	100	38,46	30,76	79,98	▼	Dispuspa
	Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip						
179	Persentase peningkatan Arsip yang dikelola	12,5	3,33	31,21	937,24	●	Dispuspa
	Urusan : Urusan Pilihan						
	Bidang : Kelautan dan Perikanan						
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan						
180	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	25	5	5	5	●	Dispeterikan
181	Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	100	100	100	100	●	Dispeterikan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan						
182	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	25	5	5	5	●	Dispeterikan
183	Angka konsumsi ikan	20,5	19,7	NA	NA	●	Dispeterikan
184	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	25	5	5	5	●	Dispeterikan
185	Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	15	3	3	3	●	Dispeterikan
	Bidang : Pariwisata						
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata						
186	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik	72,72	36,36	18,18	18,18	▼	Disparpora
	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif						
187	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	87	44	35,43	35,43	▼	Disparpora
	Bidang : Pertanian						
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						
188	Produktivitas cengkeh	2,08	1,86	1,80	1,80	●	Distanpangan
189	Produktivitas kelapa dalam	14,9	14,5	14,05	14,05	●	Distanpangan
190	Produktivitas salak	0,1	0,06	0,07	0,07	●	Distanpangan
191	Produktivitas jeruk	0,18	0,1	0,11	0,11	●	Distanpangan
192	Produktivitas kelengkeng	0,82	0,78	0,79	0,79	●	Distanpangan
193	Produktivitas padi	60,6	60,2	62,5	62,5	●	Distanpangan
194	Produktivitas jagung	59,35	59,31	66,1	66,1	●	Distanpangan
195	Produktivitas kopi	9,15	8,95	8,86	8,86	▶	Distanpangan
196	Produktivitas cabai	70,01	69,8	70,01	70,01	●	Distanpangan
197	Produktivitas bawang putih	62,18	61,57	70,62	70,62	●	Distanpangan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						
198	Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	10	2	2	2	●	Dispeterikan
199	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan	15	3	3	3	●	Dispeterikan
200	Cakupan penerapan teknologi peternakan	75	75	75	75	●	Dispeterikan
201	Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	15	3	3	3	●	Dispeterikan
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian						

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
202	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	100	20	16,67	16,67	▼	Distanpangan
203	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	6,76	5,01	5,82	5,82	●	Distanpangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian						
204	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	18,52	3,45	4,57	4,57	●	Distanpangan
	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian						
205	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	44,5	36,25	36,22	36,22	▶	Distanpangan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan						
206	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan	100	100	100	100	●	Dispeterikan
	Bidang : Perdagangan						
	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan						
207	Peningkatan pertumbuhan ekspor barang non migas	3	0	0	0	●	Disdagkop & UKM
208	Fluktuasi harga bapak (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu	<10	< 10	<10	<10	●	Disdagkop & UKM
209	Persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan	80	80	80	80	●	Disdagkop & UKM
	Program Pemberdayaan dan Penataan Pasar						
210	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik	92,25	85	85	85	●	Disdagkop & UKM
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrolgian						
211	Persentase peningkatan jumlah UTTP bertanda tera sah	70	58	-87,97	-87,97	▼	Disdagkop & UKM
	Bidang : Perindustrian						
	Program Pengembangan industri						
212	Cakupan Bina Industri Kecil	1,435	1,435	1,435	1,435	●	Disdagkop & UKM
	Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
	Bidang : Administrasi Pemerintahan						
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah						
213	Cakupan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
214	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	100	94	94	▶	Setda
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum						
215	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas	100	100	100	100	●	Setda
216	Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas	100	100	100	100	●	Setda
217	Persentase permasalahan hukum yang didampingi	100	100	100	100	●	Setda
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan						
218	Persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan	95	90	100	111,11	●	Setda
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan						
219	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100	100	●	Setda

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian						
220	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan	100	100	138	138	●	Setda
221	Persentase BUMD yang Berkinerja Baik	100	100	100	100	●	Setda
222	Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD	12	12	14,78	123,17	●	Setda
	Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan						
223	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100	100	100	100	●	Setda
	Program Pengembangan Kelembangan, Tatalaksana dan Peningkatan Kinerja Organisasi						
224	Persentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	●	Setda
225	Persentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan	100	100	100	100	●	Setda
226	Persentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik	100	100	100	100	●	Setda
227	Persentase dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	●	Setda
	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/ Jasa						
228	Indeks Kematangan UKPBJ	5	3	2	66,67	▼	Setda
	Program Kehumasan dan Layanan Keprotokolan						
229	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan	100	100	100	100	●	Setda
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD						
230	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Raperda	100	83,33	100	100	●	Setwan
231	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	100	100	100	100	●	Setwan
232	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	100	100	100	100	●	Setwan
	Program Pelayanan Publik Kecamatan						
233	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Salaman	90	90	100	100	●	Salaman
234	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Borobudur	100	90	100	100	●	Borobudur
235	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Ngluwar	100	100	100	100	●	Ngluwar
236	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Salam	100	90	90	90	●	Salam
237	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Srumbung	100	100	100	100	●	Srumbung
238	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP Dukun	100	100	100	100	●	Dukun
239	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Muntilan	100	100	100	100	●	Muntilsn
240	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Mungkid	100	100	100	100	●	Mungkid
241	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Sawangan	100	80	95	95	●	Sawangan
241	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP Candimulyo	100	100	100	100	●	Candimulyo
243	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Mertoyudan	100	100	100	100	●	Mertoyudan
244	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Tempuran	100	90	100	100	●	Tempuran
245	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Kajoran	100	100	100	100	●	Kajoran
246	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Kaliangkrik	100	100	100	100	●	Kaliangkrik
247	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Bandongan	100	100	100	100	●	Bandongan
248	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan	100	100	100	100	●	Windusari

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPDP 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	SP Windusari						
249	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Secang	100	100	100	100	●	Secang
250	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SPP Tegalrejo	100	100	100	100	●	Tegalrejo
251	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP Pakis	100	100	100	100	●	Pakis
252	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Grabag	100	100	100	100	●	Grabag
253	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP Ngablak	100	100	100	100	●	Ngablak
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						
	Salaman						
254	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Salaman
255	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	99,86	99,86	▶	Salaman
	Borobudur						
256	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Borobudur
257	Persentase desa yang tertib administrasi	85	80	80	80	●	Borobudur
	Ngluwar						
258	Persentase desa yang tertib Administrasi	100	70	70	70	●	Ngluwar
259	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Ngluwar
	Salam						
260	Prosentase Kegiatan yang Dikoordinasikan	100	100	95,54	95,54	▶	Salam
261	Prosentase Desa yang Tertib Adminstrasi	66,65	33,33	33,33	33,33	●	Salam
262	Srumbung						
263	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	87	87	100	100	●	Srumbung
264	Persentase desa yang tertib administrasi	100	45	47,05	47,05	●	Srumbung
	Dukun						
265	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Dukun
266	Persentase desa yang tertib Administrasi	100	100	100	100	●	Dukun
	Muntilan						
267	Persentase desa yang tertib administrasi	72	64	86	86	●	Muntilan
268	Pesentase kegiatan yang dikoordinasikan.	100	100	98	98	▶	Muntilan
	Mungkid						
269	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Mungkid
270	Prosentase desa yang tertib administrasi	86	82	78,95	78,95	▶	Mungkid
	Sawangan						
271	Persentase desa/kel yang tertib Administrasi	100	60	60	60	●	Sawangan
272	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Sawangan
	Candimulyo						
273	Persentase desa yang tertib Administrasi	100	78,94	78,95	78,95	●	Candimulyo
274	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Candimulyo
	Mertoyudan						
275	Persentase desa yang tertib administrasi	66	64	66	66	●	Mertoyudan
276	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	96,33	96,33	▶	Mertoyudan
	Tempuran						
277	Persentase desa yang tertib administrasi	100	75	75	75	●	Tempuran
278	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Tempuran

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Kajoran						
279	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	91	91	●	Kajoran
280	Persentase desa yang tertib administrasi.	68,97	41,38	67,45	67,45	●	Kajoran
	Kaliangkrik						
281	Prosentase desa yang tertib administrasi	86	81	85	85	●	Kaliangkrik
282	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Kaliangkrik
	Bandongan						
283	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100	●	Bandongan
284	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Bandongan
	Windusari						
285	Persentase desa yang tertib administrasi	100	85	78,95	78,95	▶	Windusari
286	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan.	100	100	100	100	●	Windusari
	Secang						
287	Persentase desa yang tertib administrasi	100	55	100	100	●	Secang
288	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Secang
	Tegalrejo						
289	Persentase desa yang tertib administrasi	90	83	100	100	●	Tegalrejo
290	Prosentase kegiatan yg dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Tegalrejo
	Pakis						
291	Persentase desa yang tertib administrasi	95	75	75	75	●	Pakis
292	Presentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Pakis
	Grabag						
293	Persentase desa yang tertib administrasi	100	100	100	100	●	Grabag
294	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Grabag
	Ngablak						
295	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	100	100	100	100	●	Ngablak
296	Persentase desa yang tertib administrasi	85	85	85	85	●	Ngablak
	Bidang : Pengawasan						
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
297	Persentase Laporan Hasil Pengawasan	100	100	100	100	●	Inspektorat
298	Persentase tindak lanjut yang terselesaikan	90	86	80	80	●	Inspektorat
299	Persentase dokumen SPIP PD yang memadai	100	66	73	73	●	Inspektorat
300	Angka capaian nilai aksi pencegahan korupsi	85	80	65,49	65,49	▶	Inspektorat
	Bidang : Perencanaan						
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
301	Persentase kesepakatan Musrenbang yang masuk ke dalam RKPD	100	100	100	100	●	Bappeda & Litbangda
302	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah daerah	100	100	100	100	●	Bappeda & Litbangda
303	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	●	Bappeda & Litbangda
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
304	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam	88	80	80	100	●	Bappeda & Litbangda

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Akhir RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020	Kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020	Status	PD
	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya						
305	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	83,1	63,38	75,56	75,56	●	Bappeda & Litbangda
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur						
306	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur	98,39	88,71	88,71	88,71	●	Bappeda & Litbangda
	Bidang : Keuangan						
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
307	Persentase kenaikan Pajak	9,69	10,39	-26,36	-26,36	▼	BPPKAD
308	Persentase kenaikan retribusi	-3,31	33,19	-4,57	-4,57	▼	BPPKAD
309	Persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah	100	100	100	100	●	BPPKAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
310	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	100	100	100	100	●	BPPKAD
311	Persentase serapan APBD	100	100	100	100	●	BPPKAD
312	Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	100	100	100	100	●	BPPKAD
313	Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	100	100	100	100	●	BPPKAD
	Program Pengelolaan Aset Daerah						
314	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	100	100	97,92	97,92	●	BPPKAD
	Bidang : Kepegawaian						
	Program Informasi dan Pengadaan Pegawai						
315	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG	79,97	71,97	71,97	71,97	●	BPPKAD
316	Persentase keterisian formasi pegawai	78,03	74,12	98,12	98,12	●	BPPKAD
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur						
317	Persentase ASN yang lulus diklat	100	100	100	100	●	BKPPD
318	Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	50,52	9,13	2,33	2,33	▼	BKPPD
319	Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	85	80	50,12	50,12	▼	BKPPD
320	Persentase ASN yang terevaluasi kerjanya	82	78	78	78	●	BKPPD
	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai						
321	Persentase pembinaan ASN	0,4	0,4	0,23	0,23	▼	BKPPD
322	Persentase ASN yang mendapat layanan administrasi kesejahteraan ASN	100	100	100	100	●	BKPPD
	Bidang : Penelitian dan Pengembangan						
	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah						
323	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100	100	100	100	●	Bappeda & Litbangda
324	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	100	100	100	●	Bappeda & Litbangda

Sumber : Hasil Olahan, 2021

Status* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Kerja Keras

Berdasarkan uraian capaian kinerja indikator program pada tahun 2020 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari 324 indikator Kinerja program pada tahun 2020, masih

terdapat 57 (17.%) indikator kinerja yang berstatus perlu upaya keras, 28 (9%) indikator akan tercapai 236(74%) indikator telah tercapai dan 4 indikator tidak ada datanya .

2. Indikator kinerja program yang berstatus perlu upaya keras adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.218

Indikator Kinerja Program Yang Berstatus Perlu Upaya Keras

No	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2020	Status capaian	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
	Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
	Bidang : Pendidikan			
	Program Pendidikan Sekolah Dasar			1. Pandemi Covid yang membawa dampak luar biasa dalam dunia pendidikan termasuk refocusing anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan tidak dapat terlaksana salah satunya penyusunan kurikulum pendidikan karakter untuk menyamakan persepsi tentang pendidikan karakter
1	Persentase SD yang Menerapkan Pendidikan Karakter	21,19	▼	
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2. Masih minimnya sarana prasarana pendukung pembe-lajaran daring serta SDM yang mendukung pembelajaran da-ring khususnya untuk jenjang SD
2	Persentase SMP yang Menerapkan Pendidikan Karakter	26,92	▼	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			
3	Persentase PNF Terakreditaasi (LKP, PKBM)	52,27	▼	1. Adanya refocusing anggaran, sehingga kegiatan tidak bisa optimal 2. Kuota akreditasi tergantung dari Badan Akreditasi Nasional, sehingga Daerah tidak bisa menambah kuota sendiri
4	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	43,14	▼	
	Bidang : Kesehatan			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat *)	57,94	▼	1. Pandemi COVID-19 menyebab-kan semua kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal, termasuk kegiatan pelayanan kesehatan 2. Kegiatan yang dapat berjalan dengan pembatasan waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan; 3. Adanya refocusing anggaran yang bersumber dana dari APBD yang digunakan untuk penanganan COVID-19
6	Pelayanan kesehatan orang terduga TB*)	35,66	▼	
7	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV *)	91,77	▼	
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif *)	5	▼	
9	Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	70	▼	
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi *)	7,32	▼	
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus *)	41,88	▼	
	Program Kesehatan Masyarakat			
12	Pelayanan kesehatan balita*)	54,94	▼	
13	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar *)	17,4	▼	
14	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut *)	38,44	▼	
	Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Bangunan Gedung dan AMPL			
15	Cakupan Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	0	▼	1. Dampak pandemi covid-19 2. Refocusing Anggaran
16	Persentase terbangunnya Landmark	58,33	▼	

No	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2020	Status capaian	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
	Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat			1. Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal 2. Kegiatan dapat berjalan dengan pembatasan pembatasan, baik waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan pembatasan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
17	Persentase kegiatan pembinaan politik	83,33	▼	
	Bidang : Sosial			
	Program Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Anggaran kegiatan terkenan refocusing tetapi target kegiatan tidak dirubah, masih tetap sama dengan sebelum refocusing, sehingga capaian indikator program tidak mencapai target
18	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti * **	82	▼	
	Program Pemberdayaan Sosial			
19	Persentase Fakir Miskin yang diberdayakan	0	▼	Anggaran kegiatan tahun 2020 kena refocusing karena pabdemi covid-10, sehingga kegiatan tidak ada.
	Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
	Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
	Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak			1. Adanya pandemi covid-19 sejak bulan Maret 2020 2. Kegiatan yang dilaksanakan tidak bisa berjalan opyimal 3. Refocusing anggaran
20	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standar	20,32	▼	
21	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	85,22	▼	
	Bidang : Lingkungan Hidup			
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Gas Rumah Kaca			
22	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	11	▼	1. Dampak pandemi covid-19 2. Refocusing Anggaran
23	Persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air	32	▼	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan Hidup			
24	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah		▼	1. Dampak pandemi covid-19 2. Kegiatan dinolkan anggarannya (Refocusing Anggaran)
25	Persentase Desa Bersih Sehat yang mendapat penghargaan di bidang LH	0	▼	
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah			
26	Persentase jumlah sampah yang tertangani*	17,32	▼	Tidak terealisasinya pembelian tanah TPST dan pembelian <i>incenerator</i>
27	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R*	19,02	▼	Dampak pandemi covid-19, banyak bank sampah yang tidak aktif, serta adanya refocusing anggaran
	Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
28	Persentase TTG yang difasilitasi	0	▼	Indikator program di bidang pemberdayaan masyarakat desa ini capaian kinerja indikatornya sangat rendah bahkan nol karena adanya refocusing anggaran, ssehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana dan bahkan
29	Persentase KP SPAMS yang berstatus mandiri	38,24	▼	
30	Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	0	▼	
	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa			

No	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2020	Status capaian	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
31	Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	0	▼	dihentikan
32	Persentase LKD (LPM, Karangtaruna, PKK, RT, RW dan POSYANDU) berprestasi	0,10	▼	
33	Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	0	▼	
	Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			1. Adanya Pandemi Covid-19 2. Terdapat Kegiatan yang anggarannya besar, yang pelaksanaannya melibatkan 21 Balai KB KS dan administrasinya terlambat 3. Kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya 4. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang kurang cepat, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validasi data yang kurang 5. Adanya refocusing anggaran di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana			
34	Persentase Peningkatan partisipasi ber-KB	-1,96	▼	
	Program Pembangunan Ketahanan Keluarga			
35	Usia Kawin Pertama (UKP)*	0	▼	
36	Cakupan pembangunan ketahanan keluarga	25,64	▼	
	Bidang : Perhubungan			
	Program peningkatan pelayanan angkutan			
37	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	60,96	▼	Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan uji kendaraan ditutup selama 2,5 bulan dan selanjutnya uji kendaraan hanya dilaksanakan 50% dari kuota normal
	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas			
38	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	46,4	▼	Belanja modal untuk fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu, marka jalan, guardrail dan LPJU anggarannya difocusing
39	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	29,8	▼	Kegiatan abiyasa dan pembinaan pelajar pelopor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang keselamatan berlalu lintas anggarannya difocusing
	Bidang : Komunikasi dan Informatika			
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			
40	Cakupan diseminasi informasi melalui media pertunjukan rakyat	66,67	▼	1. Dampak pandemi covid-19 sehingga kegiatan diseminasi informasi dengan mengumpulkan massa/orang banyak dilarang 2. Anggaran kegiatan tahun 2020 dikurangi untuk kegiatan penanganan pandemi covid-19
	Bidang : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
41	Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	6,54	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Program Pemberdayaan Usaha Mikro			
42	Cakupan pemberdayaan usaha mikro	0,02	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Bidang : Penanaman Modal			
	Program Pelayanan perijinan			

No	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2020	Status capaian	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
43	Persentase pelayanan perijinan	0,7	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Bidang : Kepemudaan dan Olah Raga			
	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan			
44	Cakupan pembinaan pemuda	32,41	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Bidang : Kebudayaan			
	Program Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan			
45	Persentase Karya Budaya yang Terlayani	3,38	▼	Adanya pembatasan aktifitas di masa pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan seni yang bersifat mengumpulkan masa tidak dapat dilaksanakan
46	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	59,78	▼	
	Bidang : Kearsipan			
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan			
47	Persentase pencipta Arsip yang tertib arsip	30,76	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Urusan : Urusan Pilihan			
	Bidang : Pariwisata			
	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Industri Pariwisata			
48	Cakupan peningkatan sarana prasarana dan industri pariwisata dalam kondisi baik	18,18	▼	
	Program Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif			
49	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif	35,43	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Bidang : Pertanian			
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian			
50	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	16,67	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Bidang : Perdagangan			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetropolitan			
51	Persentase peningkatan jumlah UTP bertanda tera sah	-87,97	▼	Anggaran untuk program ini difocusing sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana
	Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
	Bidang : Administrasi Pemerintahan			
	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa			
52	Indeks Kematangan UKPBJ	2	▼	1. Keterbatasan sarana dan sarana pendukung 2. Keterbatasan pelaksanaan kegiatan karena pandemi Covid-19 3. Adanya rasionalisasi anggaran 4. Adanya perubahan regulasi terkait Indeks Kematangan UKPBJ
	Bidang : Keuangan			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
53	Persentase kenaikan Pajak	-26,36	▼	Karena anggaran yang turun dan situasi covid-19 yang membuat pendapatan masyarakat, pajak dan retribusi juga turun
54	Persentase kenaikan retribusi	-4,57	▼	
	Bidang : Kepegawaian			
	Program Pengembangan Sumber Daya			

No	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2020	Status capaian	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5
	Aparatur			
55	Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya	2,33	▼	Kegiatan diklat, UKPPI dan kepemimpinan pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang belum tentu dan akan ditentukan kemudian sampai dengan pemerintah menyatakan aman dari Covid-19 dan/atau mengeluarkan kebijakan baru, sehingga hal ini berpengaruh terhadap capaian target kinerja
56	Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	50,12	▼	Karena pandemi Covid-19, tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan seleksi terbuka JFT Pratama dan mutasi sesuai rencana. Pandemi covid-19 sangat membatasi proses kegiatan, sementara belum ada kesiapan sarpras pendukung untuk melaksanakan kegiatan yg lebih luas yang sesuai pada masa pandemi
	Program Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai			
57	Persentase pembinaan ASN	0,23	▼	Kegiatan pembinaan ASN seperti sidang-sidang untuk menyelesaikan kasus yang ada tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 ini

Sumber: Hasil Olahan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa urusan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan memiliki indikator program yang berstatus perlu upaya keras paling banyak dibandingkan dengan urusan lain, yaitu sebanyak 10 indikator. Kalau diperhatikan, dari ke-10 indikator kinerja program tersebut, hanya 1 indikator yang bukan merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yaitu Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Indikator lain yaitu: (1). Pelayanan kesehatan balita; (2). Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; (3). Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (4). Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; (5). Pelayanan kesehatan orang terduga TB; (6). Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV; (7). Pelayanan kesehatan pada usia produktif; (8). Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan (9). Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, merupakan indikator SPM.

Data ini menunjukkan bahwa ada permasalahan krusial pada urusan kesehatan dimasa pandemi covid-19, yaitu ketika kebijakan bidang kesehatan berfokus pada penanganan covid-19, ternyata pelayanan dasar bidang kesehatan tidak terpenuhi. Permasalahan ini perlu segera ditangani sehingga target pelayanan kesehatan khususnya SPM kesehatan di Kabupaten Magelang dapat dipenuhi.

Sebagai upaya menangani permasalahan tersebut, dilakukan beberapa hal, diantaranya tetap melaksanakan kegiatan penimbangan, pengukuran TB, pemberian vit A di Posyandu secara terjadwal dengan memperhatikan protokol kesehatan serta kegiatan pemantauan perkembangan balita pada

pelayanan kesehatan balita. Karena keterbatasan peralatan, kegiatan pelayanan kesehatan balita belum optimal. Pada tahun 2022 direncanakan anggaran pengadaan alat DDKT kit di setiap posyandu.

Pada Pelayanan Kesehatan Pendidikan Usia dasar, Puskesmas melaksanakan koordinasi dengan lintas sektoral dalam hal ini Kepala Sekolah SD dan SMP diwilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan UKS/UKGS yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bila sekolah tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kegiatan UKS/UKGS dilaksanakan dengan penjadwalan kehadiran peserta didik di sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan UKS/UKGS diharapkan guru BK/guru UKS membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan: status gizi, tanda-tanda vital, kebersihan diri, kesehatan gigi dan mulut, ketajaman penglihatan dan pendengaran dan penilaian kesehatan reproduksi bagi siswa SMP. Kegiatan ini akan berlanjut pada tahun 2022.

Pada pelayanan kesehatan usia lanjut, posyandu bagi lansia diaktifkan pelaksanaannya dengan cara penjadwalan kehadiran di Posyandu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Pemantauan kondisi kesehatan lansia dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, dalam rangka pencapaian target SPM penyakit tidak menular yaitu: kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kesehatan orang terduga TB, kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, kesehatan pada usia produktif, kesehatan penderita hipertensi dan kesehatan penderita diabetes melitus, dilaksanakan inovasi berupa Pembentukan Pandu PTM (Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular), yaitu kegiatan terpadu dan terintegrasi dengan pelayanan yang sudah berjalan dalam rangka : Sekrining Faktor Risiko, Diagnosa, Pengobatan dan Konsultasi PTM yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas layanan kesehatan (Puskesmas), dengan sasaran penduduk Kabupaten Magelang usia 15 tahun ke atas.

2.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.8.1. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Pendidikan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

Target SPM Bidang Urusan Pendidikan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pada tahun 2018, SPM Bidang urusan Pendidikan terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar dengan 27 Indikator. Sejak tahun 2019, SPM Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Realisasi capaian kinerja Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.219
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.642	17.810.874.200	100	24.443	17.451.212.065	72,92
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	180.421	150.275.575.091	100	166.515	143.657.833.582	62,48
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	229.922	5.985.060.430	100	1.410	5.889.868.018	43,75
Jumlah/Rata-rata			448.985	174.071.509.721	100	192.368	166.998.913.665	59,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang pendidikan belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan kendala dalam pelaksanaan SPM Pendidikan antara lain:

- 1) Keterbatasan data Anak Tidak Sekolah (ATS)
- 2) Target angka 100% adalah angka mutlak 100% sesuai Permendikbud Nomor 32 tahun 2018, bukan 100% dari target daerah, sehingga angka tersebut sulit dicapai karena banyaknya alasan yang menjadi penyebab anak usia sekolah tidak bersekolah (ATS)
- 3) Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan yang diterapkan belum berbasis SPM.
- 4) Belum terpenuhinya sarpras sekolah, sebagai sarana pendukung proses pembelajaran untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM)

2.8.2. SPM Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target indikator SPM adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.220
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	18.752	660.878.833	100	17.629	521.177.030	94,01
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	17.034	19.695.450	100	17.033	15.159.307	99,99
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	17.044	59.975.284	100	16.877	52.190.675	99,02

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Target Capaian SPM (%)	Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020		Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86.115	76.789.033	100	47.363	69.423.674	54,97
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	170.698	381.734.200	100	29.696	293.815.377	17,40
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	805.244	72.000.000	100	40.062	52.500.000	4,98
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	165.710	493.734.200	100	63.707	380.020.182	38,44
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	390.336	17.290.478	100	28.586	16.964.775	7,32
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.249	17.290.478	100	7.642	16.964.345	41,88
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan stndr	3.226	100.000.000	100	1.869	98.889.055	57,94

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Target Capaian SPM (%)	Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020		Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.024	500.000.000	100	5.001	433.000.000	35,66
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	19.053	333.440.768	100	17.485	288.848.912	91,77
Jumlah			1.000.765	2.732.828.724	100	292.293	2.238.953.332	53,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang kesehatan belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan kendala dalam pelaksanaan SPM Kesehatan antara lain:

- 1) Target angka 100% adalah angka mutlak 100% sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2020, bukan 100% dari target daerah, sehingga angka tersebut sulit dicapai
- 2) Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia, peralatan, anggaran dan sebagainya. Sumber daya yang ada di Kabupaten Magelang masih kurang, sehingga masih diperlukan dukungan untuk pemenuhan hal tersebut
- 3) Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan semua kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal seperti kegiatan pengumpulan massa (rapat-rapat koordinasi, peningkatan kapasitas petugas, kader maupun kelompok sasaran) dan sebagainya;
- 4) Kegiatan yang dapat berjalan dengan pembatasan waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan;

- 5) Adanya *refocusing* anggaran yang bersumber dana dari APBD yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Magelang.
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yg menjamin keamanan penularan COVID-19 terutama saat dilaksanakannya *skrining*.

2.8.3. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar di Bidang pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target indikator SPM adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.221

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.300.195	14.311.493.470	100	1.157.564	14.292.317.706	89,37
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.255.195	6.660.925.000	100	1.124.893	6.649.115.342	47,86
Jumlah/Rata-rata			1.300.195	20.972.418.470	100	1.165.155	20.941.174.787	68,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang, 2021

Pada tahun 2020, SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pencapaian target SPM ini adalah :

- 1) Tahun 2020 bersamaan dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdampak *refocusing*.

Dalam penilaian Capaian Layanan Pengelolaan Air limbah Domestik terdapat perbedaan kriteria penilaian, pada tahun 2019 penilaian dihitung berdasarkan capaian akses layanan dalam STBM yaitu Akses Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan Sharing serta Akses IPAL

Komunal. Sedangkan untuk tahun 2020 penilaian akses layanan hanya kreteria JSP, JSSP dan IPAL Komunal sehingga capaian akses layanan Sanitasi menurun dari Tahun 2019.

2.8.4. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar di Bidang perumahan rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target kinerja indikator SPM adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.222

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	21	843.361.000	100	9	67.419.800	21,43
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100	0	0	0
Jumlah/Rata-rata			21	843.361.000	100	9	67.419.800	10,72

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Pada tahun 2020, SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat belum mencapai target. Bahkan untuk jenis pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah

Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan dan dianggarkan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM ini adalah :

- 1) Tidak ada rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati (lewat BPBD) sehingga tidak ada dasar untuk pelaksanaan kegiatan;
- 2) Refokusing anggaran untuk mengatasi covid19;
- 3) Tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

2.8.5. SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar di Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi;
- b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu;
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- f. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebesar 100% Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.223

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	100	0		0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	28	95.425.000	100	28	79.478.500	100
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.295.019	10.553.531.055	100	822.310	10.290.606.166	92,70
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	1.030.230.295	100	0	972.804.545	0
5.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.302.706	1.539.625.760	100	1.302.706	1.431.342.761	100
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.429	7.569.654.000	100	1.429	7.508.554.300	100
Jumlah/Rata-rata			2.599.182	10.553.531.055	100		10.290.606.166	65,45

Sumber : Satpol PP & PK serta BPBD, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat belum mencapai target. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2020 adalah:

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2020 belum dianggarkan.

- 2) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda dan perkara, sehingga capaian 0%.
- 3) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 1429 orang, dari Jumlah Warga Negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 1429 orang dari 91 kejadian kebakaran sehingga capaian 100%, yang dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 4) Pada sasaran Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setiap tahun ditargetkan tidak terjadi korban bencana realisasinya 0 korban bencana sehingga capaiannya 100 %.
- 5) Pada sasaran Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setiap tahun ditargetkan tidak terjadi bencana dan ada warga negara yang diselamatkan dan dievakuasi, namun pada tahun 2020 terdapat 526 warga yang mengungsi untuk diselamatkan dan dievakuasi

2.8.6. SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar di Bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Mentri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target SPM bidang urusan sosial adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.224
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM			Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2020
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2020	Target Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2020	
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20	37.560.000	100	18	25.127.696	48,00
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	15	25.170.000	100	11	18.843.772	39,11
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5	8.390.000	100	3	6.281.924	32,00
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	10	16.780.000	100	9	12.563.848	42,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kab/Kota	80	310.220.000	100	80	309.586.362	20,00
Jumlah/Rata-rata			130	398.120.000	100	121	372.403.602	36,22

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa SPM bidang urusan Sosial belum mencapai target. Penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang tahun 2020 mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan dasar karena di samping jumlah tenaga yang sangat terbatas, adanya *refocusing* anggaran karena Pandemi *Covid 19* sehingga pengiriman PMKS dari pihak luar ke Rumah Singgah juga menjadi sangat terbatas.

2.9 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai kondisi ideal, yaitu kondisi yang ingin dicapai sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Namun, sering terjadi adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Hasil identifikasi gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, ini memunculkan permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab 2, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang yang harus diselesaikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

2.9.1. Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan

1. Urusan Pendidikan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan; dan
 - b. Belum optimalnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Perpustakaan
 - a. Kurangnya pembinaan perpustakaan dalam membudayakan kegemaran membaca.
3. Urusan Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pengembangan Kebudayaan;
 - b. Belum optimalnya Pengembangan Kesenian tradisional; dan
 - c. Belum optimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
4. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Rendahnya kapasitas daya saing pemuda dan olahraga;

2.9.2. Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan

1. Urusan Kesehatan
 - a. Belum optimalnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. Ketersediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan serta penjaminan kesehatan Makanan Minuman di masyarakat belum optimal;
 - d. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan belum optimal; dan
 - e. Belum optimalnya kualitas rumah sakit dan puskesmas.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya pelayanan dan pembinaan KB, dan kesehatan reproduksi;
 - b. Belum optimalnya pengendalian penduduk; dan

- c. Belum optimalnya pemberdayaan pembangunan ketahanan keluarga.

2.9.3. Masih Tingginya Jumlah PMKS

- a. Belum optimalnya rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih relatif rendah; dan
- c. Pemberdayaan sosial relatif rendah.

2.9.4. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah

- a. Belum optimalnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- b. Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan;
- c. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.

2.9.5. Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka

- a. Belum optimalnya akses, kesempatan kerja penduduk usia kerja dan kompetensi tenaga kerja.

2.9.6. Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender

- a. Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- b. Belum optimalnya perlindungan perempuan
- c. Belum optimalnya Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak

2.9.7. Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik

- a. Belum optimalnya penataan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3;
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
- d. Minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas;
- e. Kasus Lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal;
- f. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- g. Belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim; dan
- h. Kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup masih kurang.

2.9.8. Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur

- 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air;
 - c. Belum optimalnya penataan bangunan gedung;
 - d. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan;

- e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - f. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
 - g. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - h. Belum optimalnya pengembangan permukiman;
 - i. Belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS;
 - j. Belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi;
 - k. Belum optimalnya penyelenggaraan penataa ruang; dan
 - l. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
2. Urusan Perhubungan
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Belum optimalnya pengembangan perumahan;
 - b. Belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh;
 - c. Belum optimalnya penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan
 - d. Belum optimalnya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman layak;

2.9.9. Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Urusan Pertanian
 - a. Kurangnya daya saing produksi pertanian.
2. Urusan Pangan
 - a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kemandirian pangan; dan
 - b. Belum optimalnya ketersediaan, stabilitas harga dan konsumsi pangan.
3. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a. Produktifitas usaha perikanan belum optimal; dan
 - b. Produktifitas usaha peternakan belum optimal
4. Urusan Perindustrian
 - a. Belum optimalnya hubungan industrial dengan Stakeholder; dan
 - b. Belum optimalnya perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri.
5. Urusan Tenaga Kerja
 - a. Belum optimalnya informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif; dan
 - b. Belum optimalnya sarana, prasarana, jumlah Instruktur pelatihan, serta produktivitas tenaga kerja
6. Urusan Perdagangan
 - a. Terganggunya stabilisasi harga barang terutama barang kebutuhan pokok;
 - b. Belum optimalnya pengembangan produk yang berdaya saing;

- c. Sarana dan prasarana pasar rakyat belum secara optimal menunjang peningkatan sektor perdagangan;
 - d. Belum optimalnya standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen;.
7. Urusan Koperasi dan UKM
- a. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi
 - b. Belum optimalnya SDM Koperasi
 - c. Rendahnya omset penjualan produk usaha mikro (UMKM)
 - d. Belum optimalnya keberdayaan UMKM
8. Urusan Pariwisata
- a. Atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi pariwisata belum optimal dan
 - b. Belum optimalnya peran ekonomi kreatif dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata.
9. Penanaman Modal
- a. Belum optimalnya upaya meminimalkan hambatan-hambatan Investasi;
 - b. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan.
10. Belum Optimalnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya penertiban dan penegakan perda dalam mendukung; peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. Belum optimalnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - c. Belum optimalnya Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak;
 - d. Tingkat wawasan kebangsaan masyarakat yang belum optimal;
 - e. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - f. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan masih lemah;
 - g. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - h. Adanya kerentanan dalam kewaspadaan nasional serta Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
 - i. Belum optimalnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan dalam menjaga ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - j. Belum optimalnya wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.
11. Belum optimalnya kemandirian dan kemandirian desa
- a. Belum optimalnya peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan Desa
 - b. Masih lemahnya Kerjasama antar Desa maupun kerjasama Desa dengan stakeholder
 - c. Fasilitas terhadap administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih kurang

- d. Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya

2.9.10. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan
 - a. Belum terpadunya perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum terintegrasinya hasil kajian penelitian dan pengembangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
3. Urusan Pengawasan
 - a. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pengawasan; dan
 - b. Belum optimalnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan
4. Urusan Administrasi Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Belum optimalnya perumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan;
 - c. Belum optimalnya kualitas urusan pemerintahan daerah dibidang penataan organisasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum; dan
 - d. Belum optimalnya Dukungan Pelaksanan Tugas dan Fungsi DPRD

2.9.11. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. Belum optimalnya diseminasi informasi publik dan pemanfaatan TI di tingkat masyarakat.
2. Urusan Persandian
 - a. Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi.
3. Urusan Statistik
 - a. Belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah.

2.9.12. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

1. belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
3. Belum optimalnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan aset daerah

2.9.13. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Belum optimalnya pendataan dan penataan administrasi kependudukan;
 - b. Belum optimalnya Pencatatan sipil, terutama kepemilikan anak yang berakta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan; dan
 - d. Pengelolaan Profil Kependudukan belum optimal
2. Kecamatan
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan;
 - b. Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - c. Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - d. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Kearsipan
 - a. Pengelolaan kearsipan belum sesuai standar baku; dan
 - b. Upaya Perlindungan dan Penyelamatan terhadap arsip masih rendah

2.9.14. Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah

2.10 Penerapan Inovasi Daerah sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Daerah

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran masih merupakan kendala pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Inovasi merupakan solusi terbaik dalam mengatasi keterbatasan tersebut maka peran pemerintah sangat penting dalam mendorong dan mendukung berkembangnya inovasi. PKK Milenial merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Magelang. Inovasi dalam kelembagaan Tim Penggerak PKK di Kabupaten Magelang yang melibatkan generasi muda dalam kepengurusannya. Keberadaan kaum milenial dalam kepengurusan TP PKK sangat membantu dalam pelaksanaan dan penyampaian 10 program pokok PKK kepada masyarakat dengan mengoptimalkan sosial media dan media digital lainnya di berkembang di era milenial ini. Penggunaan media ini menjadi suatu keniscayaan yang apabila PKK tidak memulainya maka konsep pemberdayaan keluarga yang tercermin dalam 10 program pokok PKK ini hanya akan menjadi konsep yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga sudah sangat dikenal oleh masyarakat hingga lapisan terbawah (Dasawisma) melalui kegiatan PKK. Inovasi dalam kelembagaan PKK dengan pelibatan generasi muda telah mengubah mindset PKK yang selama ini dikenal dengan ibu-ibu dengan kegiatan yang monoton. Kegiatan PKK di Kabupaten Magelang saat ini telah menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun dan

menyumbangkan pemikiran dan ide kreatifnya. Sejak dibentuknya PKK Milenial pada awal Tahun 2020 saat ini telah terbentuk 21 PKK Milenial di tingkat Kecamatan. Namun demikian, baru 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Grabag, PKK Milenial telah berkembang dengan baik serta dapat dijadikan pilot project penerapan inovasi PKK Milenial. Di kedua Kecamatan ini PKK Milenial telah membentuk PKK Milenial di tingkat desa dengan beragam kegiatannya yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dikemas dalam kegiatan yang inovatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga.

Berangkat dari keberhasilan pelaksanaan program PKK di Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Grabag maka pada tahun 2022 inovasi ini akan didorong penerapannya pada 19 kecamatan yang lain. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengawali dengan penganggaran alokasi demplot PKK Milenial pada 21 Kecamatan di Tahun Anggaran 2021. Tujuan pembentukan demplot ini adalah sebagai pilot project yang dapat dikembangkan dan direplikasikan oleh desa-desa untuk mengembangkan potensi unggulan masing-masing kecamatan.

Beberapa hasil karya PKK Milenial yang saat ini diklaim dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Pengembangan pojok baca dan perpustakaan desa (Pilar Literasi);
- b. Pengembangan sistem pemasaran *online* bagi pelaku UMKM (*UMKM Fest*, *Lapak Pilar*);
- c. Pengelolaan sampah mandiri yang dipadukan dengan konsep pojok baca (*Demplot Bank Sampah Jogo Jagad*);
- d. Metode pembelajaran berbasis budaya lokal bagi anak-anak usia dini dan sekolah dasar (*Yo Prokonco*), *Beling* (*belajar keliling*) metode pembelajaran di tengah pandemi;
- e. Media sosialisasi dalam penyampaian program pokok PKK dengan media sosial YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain (*GrabMill*);
- f. *Bank Sayur*, metode pemasaran produk sayur dalam pot yang dikembangkan oleh ibu-ibu PKK;
- g. *Sekolah Genre*, *Posyandu Remaja* yang memotivasi generasi muda untuk terus berkarya, mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran menjaga keseimbangan gizi dan kesehatan;
- h. Dan lain-lain.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB perindustrian pengolahan, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), persentase peningkatan SHU koperasi (di atas rata-rata inflasi), persentase kenaikan kelas usaha mikro, peningkatan PDRB sektor pariwisata, jumlah nilai investasi PMA, jumlah nilai investasi PMDN, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, cakupan prestasi generasi muda, dan Indeks Desa Membangun (IDM).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4-2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya pandemi global Covid-19 di akhir tahun 2019 secara global telah memunculkan krisis yang dampaknya bersifat multisektor dengan cakupan yang sangat luas pada tingkatan global, regional, nasional sampai dengan level lokal dan mikro, dimana krisis tersebut juga menyebabkan tekanan yang sangat kuat pada perekonomian Jawa Tengah pada berbagai lapangan usaha, khususnya pada terutama dari sisi perdagangan luar negeri dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 semakin menurun akibat terganggunya produksi global dan melemahnya konsumsi global.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020, meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Berdasarkan rilis

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2020 tumbuh -3,93% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan II 2020 sebesar -5,92% (yoy). Perbaikan tersebut juga ditunjukkan dari pertumbuhan triwulanan yang tumbuh positif 4,66% (qtq) atau berbalik arah dari -5,16% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Pelonggaran pembatasan sosial yang disertai protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu pendorong utama membaiknya perekonomian Jawa Tengah.

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 6,39% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan panen raya pada komoditas padi disertai peningkatan permintaan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sektor perdagangan juga tercatat membaik seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada beberapa tempat seperti tempat rekreasi, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah pun mulai bergerak meski masih sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor konstruksi sedikit membaik dari -5,85% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -5,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan masih belum mengalami perbaikan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor migas.

Memasuki triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik pada triwulan IV 2020. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian triwulan IV 2020 bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah. Hal itu membuat aktivitas perekonomian dapat bergerak lebih jauh dibanding triwulan II dan III 2020. Selain itu, bantuan sosial yang dicanangkan hingga akhir 2020, juga dapat menopang konsumsi rumah tangga. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester I 2020 akan mulai direalisasikan pada semester II 2020. Sementara, kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat terutama dari sektor nonmigas yang permintaannya membaik. Berdasarkan lapangan usaha, pelonggaran pembatasan sosial akan menyebabkan seluruh lapangan usaha bergerak ke arah positif. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh lebih baik dari triwulan III 2020.

Pada Triwulan III tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dan refocusing penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah menurun sebesar 8,21% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara anggaran belanja juga menurun sebesar 7,98% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Namun demikian, penurunan anggaran belanja sejatinya adalah refocusing penggunaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kepada penanggulangan COVID-19 yang nantinya akan tercermin pada anggaran belanja tidak terduga pada APBD.

Pemulihan ekonomi Jawa Tengah akan berlanjut pada triwulan I 2021. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek relokasi pabrik dari beberapa kawasan di Asia ke Jawa Tengah, diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah telah kembali normal terutama pada groceries.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.26,232 triliun. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 7,44% menjadi Rp.28,183 triliun dan meningkat menjadi Rp.30,339 triliun pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 7,65%. Pada tahun 2019 naik sebesar 7,09% menjadi Rp.32.490 triliun, sedangkan tahun 2020 turun sebesar 0,11% menjadi Rp.32,454 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sebesar Rp.19,882 triliun, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.20.974 triliun atau mengalami kenaikan 5,50 %. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,28% menjadi Rp.22,082 triliun dan tahun 2019 naik sebesar 5,30% menjadi

Rp.23,253 triliun, sedangkan tahun 2020 menurun sebesar 1,68% menjadi Rp.22,861 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2016	26.232,35	19.882,24
2	2017	28.183,85	20.974,80
3	2018	30.339,47	22.082,80
4	2019	32.490,80	23.253,15
5	2020	32.454,72	22.861,47

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2020, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 22,38%, disusul pertanian sebesar 21,31% dan perdagangan sebesar 13,27%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2020 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,19%, disusul sektor sekunder sebesar 31,85% dan sektor primer sebesar 25,97%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2016-2020, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sebesar 27,4% menjadi 25,97% pada tahun 2020.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2016–2020 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,44% meningkat menjadi 31,85% pada tahun 2020.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor tersier sebesar 41,16% meningkat menjadi 42,19% pada tahun 2020.

Tabel 3.2.

Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Primer	27,40	26,54	26,12	25,23	25,97
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,92	22,01	21,59	20,77	21,31
B	Pertambangan dan Penggalian	4,48	4,53	4,53	4,46	4,66
2	Sekunder	31,44	31,37	31,55	31,72	31,72
C	Industri Pengolahan	22,08	21,91	21,87	21,95	22,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
F	Konstruksi	9,23	9,33	9,55	9,64	9,33
3	Tersier	41,16	42,09	42,32	43,05	43,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,43	13,63	13,58	13,71	13,27
H	Transportasi dan Pergudangan	3,36	3,37	3,34	3,45	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,14	4,15	4,25	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	3,13	3,44	3,60	3,79	4,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,79	2,78	2,76	2,81
L	Real Estate	1,84	1,87	1,87	1,87	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,24	0,25	0,27	0,28	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,59	3,54	3,43	3,38	3,39
P	Jasa Pendidikan	5,82	6,07	6,23	6,42	6,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,82	0,84	0,85	0,95
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,10	2,17	2,23	2,29	2,16

c. PDRB Per Kapita

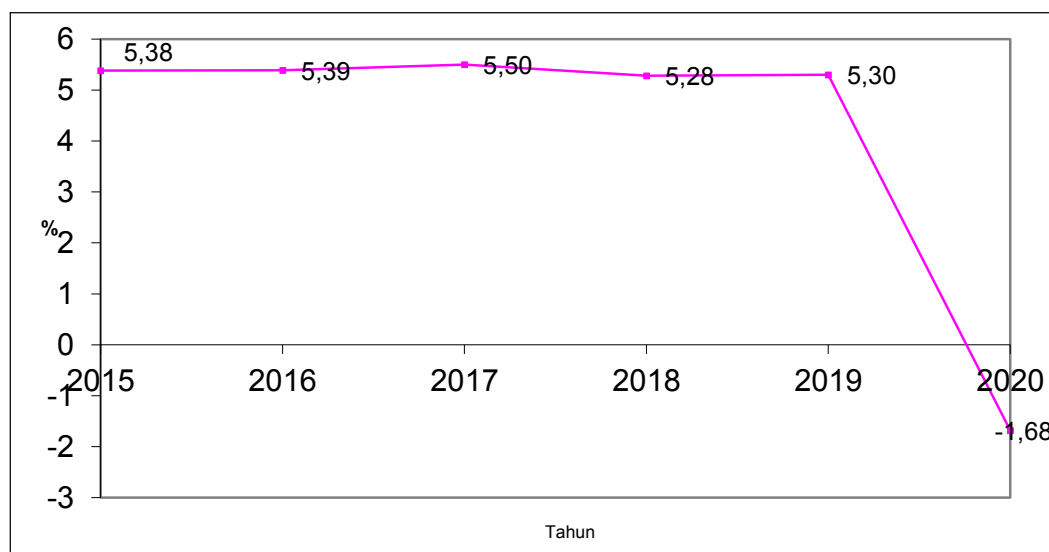
PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar Rp.20,87 juta, meningkat menjadi Rp.22,22 juta pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp.23,71 juta pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 PDRB perkapita sebesar Rp.25,18 juta dan menurun menjadi Rp.24,94 juta pada tahun 2020. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
 Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2016	20,87
2	2017	22,22
3	2018	23,71
4	2019	25,18
5	2020	24,94

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 – 2019 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 5,38 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,39 % pada tahun 2016 dan 5,50 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 5,28% dan pada tahun 2019 naik menjadi 5,30%.



Gambar 3.1
 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2015-2020

Tabel 3.4.
 Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
 Tahun 2016 – 2020

NO	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32	2,52	2,39	0,79	0,16
2	Pertambangan dan Penggalian	3,14	4,51	3,33	4,74	2,15
3	Industri Pengolahan	5,63	4,88	5,34	6,07	-0,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,84	4,91	5,39	5,55	1,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	7,03	5,48	4,40	2,35
6	Konstruksi	6,32	6,47	5,97	4,87	-3,71
7	Perdagangan Besar dan	5,48	6,38	4,80	5,88	-4,47

NO	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8	Transportasi dan Pergudangan	6,61	6,13	6,20	8,55	-26,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	6,36	7,27	8,16	-8,00
10	Informasi dan Komunikasi	8,30	13,35	12,77	11,38	15,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,74	5,98	4,08	3,77	1,65
12	Real Estate	6,76	6,50	5,06	5,68	-0,26
13	Jasa Perusahaan	10,40	9,30	9,89	9,97	-7,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,22	2,57	3,05	3,78	-1,22
15	Jasa Pendidikan	6,65	7,67	8,15	7,58	-0,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	9,15	8,68	6,81	8,2
17	Jasa lainnya	8,85	9,31	9,86	9,25	-6,93
	PDRB	5,39	5,50	5,28	5,30	-1,68

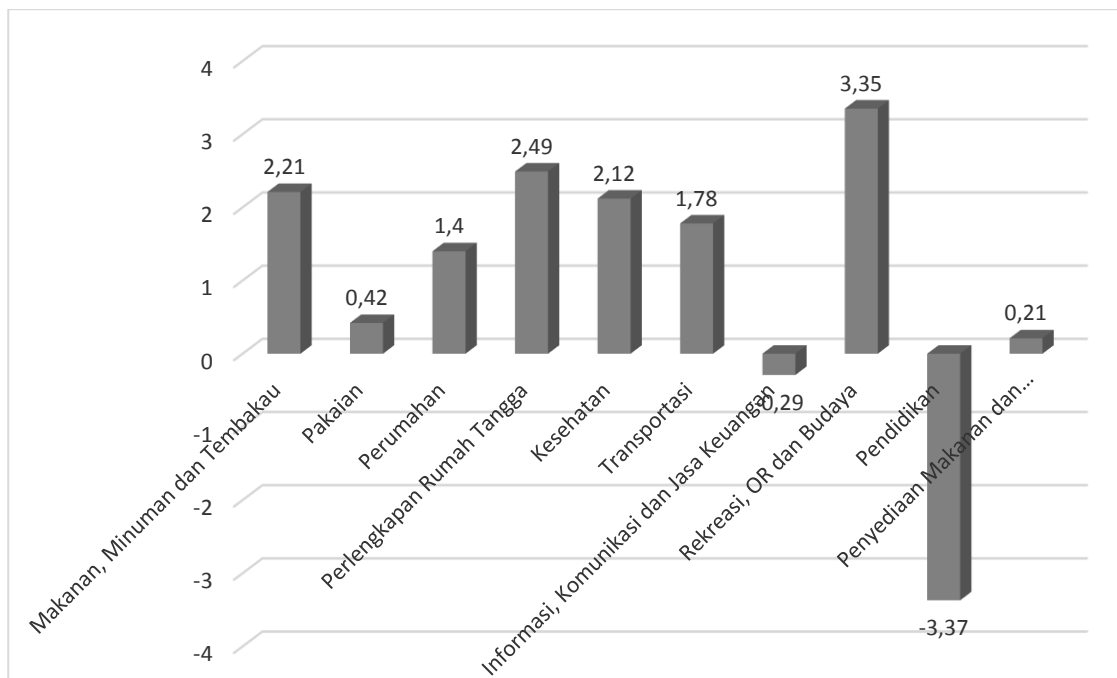
e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Untuk tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Selama Tahun 2020, laju inflasi di Kota Purwokerto mencapai 1,98 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang laju inflasinya sebesar 1,77 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,59 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,59 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2020 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2020 tertinggi pada kelompok rekreasi, OR dan Budaya sebesar 3,35%, kelompok perlengkapan Rumah Tangga 2,49%, kelompok Makanan/Minuman/Tembakau sebesar 2,21%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,12%, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,78%, kelompok perumahan sebesar 0,42%, kelompok Penyediaan Makanan/Minuman/Restoran sebesar 0,21%, kelompok informasi/komunikasi/jasa keuangan sebesar minus 0,29% dan terakhir kelompok pendidikan sebesar minus 3,37%.



Gambar 3.2

Grafik laju inflasi Tahun 2020 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2020 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi tahun 2020 menghadapi tekanan sejumlah faktor sebagai dampak pandemi Covid-19, namun diharapkan perekonomian tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5. Target tersebut mempedomani Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tabel 3.5.

Target indikator makro ekonomi Tahun 2022

No.	Indikator Ekonomi	Target 2021	Target 2022 (dalam RPJMD)
1	Pertumbuhan ekonomi	3,3 – 4,3 %	3,4 - 4,4 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 24,73 Juta	Rp. 27,75 Juta
3	Inflasi	2,5 – 4,0 %	2,0 – 4,0 %
4	Tingkat Kemiskinan	12,44 – 11,52 %	11,27 – 10,52 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54 – 5,17 %	2,25 – 2,65 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/update teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti tapping box;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Pemberian punishment yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;

- f. Pemberian reward kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti NJOP PBB, NPOP BPHTB;
- h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- j. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 – 2020 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Selisih	%
I	PENDAPATAN DAERAH	2.575.439.825.755	2.380.457.680.604	(194.982.145.151)	(7,57)
A	Pendapatan Asli Daerah	417.178.099.961	329.769.193.224	(87.408.906.737)	(20,95)
1	Pajak Daerah	156.886.789.644	115.530.759.532	(41.356.030.112)	(26,36)
2	Retribusi Daerah	22.934.190.849	27.049.700.014	4.115.509.165	17,94
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.700.417.768	30.637.364.531	6.936.946.763	29,27
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	213.656.701.700	156.551.369.147	(57.105.332.553)	(26,73)
B	Pendapatan Transfer	2.063.644.057.920	1.940.323.473.805	(123.320.584.115)	(5,98)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.883.657.363.102	1.781.723.641.760	(101.933.721.342)	(5,41)
	DBH	28.247.886.437	34.364.292.995	6.116.406.558	21,65
	DAU	1.097.366.974.000	987.675.947.000	(109.691.027.000)	(10,00)
	DAK Fisik	86.083.983.521	70.434.721.979	(15.649.261.542)	(18,18)
	DAK Non fisik	241.105.215.144	239.039.109.804	(2.066.105.340)	(0,86)
	DID	47.781.527.000	59.165.462.000	11.383.935.000	23,82
	Dana Desa	383.071.777.000	391.044.107.982	7.972.330.982	2,08
2	Transfer Pemerintah Daerah	179.986.694.818	158.599.832.045	(21.386.862.773)	(11,88)
	Pendapatan Bagi Hasil	167.256.161.818	147.910.429.045	(19.345.732.773)	(11,57)
	Bantuan Keuangan	12.730.533.000	10.689.403.000	(2.041.130.000)	(16,03)
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.617.667.874	110.365.013.575	15.747.345.701	16,64
1	Pendapatan Hibah	94.617.667.874	110.365.013.575	15.747.345.701	16,64
2	Dana Darurat	0	0	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	-

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Sedangkan Perubahan pendapatan daerah tahun 2021 dan

proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Target 2021	PROYEKSI 2022	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.461.908.466.781	2.502.177.507.413	40.269.040.632	1,64
4.1	Pendapatan Asli Daerah	291.447.681.781	352.805.306.413	61.357.624.632	21,05
4.1.01	Pajak Daerah	92.919.144.504	120.827.282.454	27.908.137.950	30,03
4.1.02	Retribusi Daerah	23.813.521.277	24.640.375.633	826.854.356	3,47
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.329.000.000	29.084.407.273	8.755.407.273	43,07
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.386.016.000	178.253.241.053	23.867.225.053	15,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.056.191.185.000	1.999.817.701.000	(56.373.484.000)	(2,74)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.861.259.085.000	1.821.587.601.000	(39.671.484.000)	(2,13)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.442.272.400.000	1.413.988.311.000	(28.284.089.000)	(1,96)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	34.554.688.000	36.277.374.000	1.722.686.000	4,99
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	1.007.277.736.000	975.296.878.000	(31.980.858.000)	(3,17)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fis	150.745.342.000	155.153.058.000	4.407.716.000	2,92
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK No	249.694.634.000	247.261.001.000	(2.433.633.000)	(0,97)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	27.942.576.000	14.367.981.000	(13.574.595.000)	(48,58)
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.109.000	393.231.309.000	2.187.200.000	0,56
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Da	194.932.100.000	178.230.100.000	(16.702.000.000)	(8,57)
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	178.230.100.000	0	0,00
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	16.702.000.000	0	(16.702.000.000)	(100,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114.269.600.000	149.554.500.000	35.284.900.000	30,88
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.675.800.000	149.554.500.000	127.878.700.000	589,96
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.593.800.000	0	(92.593.800.000)	(100,00)

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2022 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2021 dikarenakan:

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan:
 - a. Sudah mulai membaiknya perekonomian walaupun belum normal seperti pada saat belum adanya Pandemi Covid-19;
 - b. Sudah mulai membaiknya daya beli masyarakat;
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan sudah mulai adanya aktivitas dunia usaha di masyarakat sehingga roda perekonomian mulai membaik walaupun belum normal seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Tahun 2021 dikarenakan Laba Perusahaan Tahun 2022 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2021 yang dampak pandemi covid-19 sudah bisa dikendalikan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan karena pada tahun 2021 terdapat penambahan penerimaan dari klaim pasien Covid pada BLUD dari RSUD Muntilan sedangkan proyeksi tahun 2022 tidak ada asumsi klaim Covid.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 terutama dalam penerapan tatanan normal baru.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNS formasi 2019, 2021 dan PPPK formasi 2021. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
 - c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya.
 - d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - e. Anggaran Tunjangan keluarga, tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - f. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
 - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022

melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
 - i. Memperhitungkan Belanja Jasa Pengelolaan BMD dan Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :
- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai.
 - b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
 - c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis

nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.

3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2022 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah Belanja Transfer Tahun 2022 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun rincian alokasi belanja dari tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Target Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
5	BELANJA DAERAH	2.526.347.858.335	2.658.465.494.940
5.1	Belanja Operasi	1.546.948.721.529	1.709.228.848.814
5.1.01	Belanja Pegawai	949.427.565.614	1.071.778.726.323
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	494.413.609.326
5.1.03	Belanja bunga	0	0
5.1.04	Belanja subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	103.013.021.200	135.790.912.165
5.1.06	Belanja bantuan Sosial	5.859.475.000	7.245.601.000
5.2	Belanja Modal	236.910.639.213	199.474.134.446
5.1.01	Belanja Tanah	1.500.000.000	8.807.326.000
5.1.02	Belanja Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	77.634.234.178
5.1.03	Belanja Bangunan dan gedung	133.467.741.947	48.323.227.512
5.1.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.696.129.885	57.182.533.565
5.1.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	7.526.813.191
5.3	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	88.023.558.387
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	88.023.558.387
5.4	Belanja Transfer	645.166.440.913	661.738.953.293
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.207.228.020	14.745.590.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	631.959.212.893	646.993.363.293

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 dan proyeksi 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.9.

Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan daerah	70.143.391.554	181.287.987.527
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	70.143.391.554	181.287.987.527
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.143.391.554	181.287.987.527
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	5.704.000.000	25.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.704.000.000	25.000.000.000
	Pembiayaan neto	64.439.391.554	156.287.987.527

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Proyeksi kapasitas riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2022 sebesar Rp1.663.154.048.848,00 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 murni sebesar Rp1.646.913.707.160,00.

Secara keseluruhan, Target Tahun 2021 dan dan Proyeksi Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Target APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI 2022
	PENDAPATAN DAERAH	2.461.908.466.781	2.502.177.507.413
1	Pendapatan Asli Daerah	291.447.681.781	352.805.306.413
a	Pajak Daerah	92.919.144.504	120.827.282.454
b	Retribusi Daerah	23.813.521.277	24.640.375.633
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.329.000.000	29.084.407.273
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.386.016.000	178.253.241.053
2	Pendapatan Transfer	2.056.191.185.000	1.999.817.701.000
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.861.259.085.000	1.821.587.601.000
1)	Dana Perimbangan	1.442.272.400.000	1.413.988.311.000
a)	Dana Transfer Umum	1.041.832.424.000	1.011.574.252.000
(1)	- DBH	34.554.688.000	36.277.374.000
(2)	- DAU	1.007.277.736.000	975.296.878.000
b)	Dana Transfer Khusus	400.439.976.000	402.414.059.000
(1)	- DAK Fisik	150.745.342.000	155.153.058.000
(2)	- DAK Non Fisik	249.694.634.000	247.261.001.000
2)	Dana Insentif Daerah	27.942.576.000	14.367.981.000
3)	Dana Otonomi Khusus	-	-
4)	Dana Keistimewaan	-	-
5)	Dana Desa	391.044.109.000	393.231.309.000
B	Transfer Antar Daerah	194.932.100.000	178.230.100.000
1)	Pendapatan Bagi Hasil	178.230.100.000	178.230.100.000
2)	Bantuan Keuangan	16.702.000.000	-
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	114.269.600.000	149.554.500.000
a	Hibah	21.675.800.000	149.554.500.000
b	Dana Darurat	-	-
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	92.593.800.000	-
	BELANJA DAERAH	2.526.347.858.335	2.658.465.494.940
1	Belanja Operasi	1.546.948.721.529	1.709.228.848.814
a	Belanja Pegawai	949.427.565.614	1.071.778.726.323
b	Belanja Barang dan Jasa	488.648.659.715	494.413.609.326
c	Belanja bunga	-	-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	103.013.021.200	135.790.912.165
f	Belanja bantuan Sosial	5.859.475.000	7.245.601.000
2	Belanja Modal	236.910.639.213	199.474.136.446
a	Belanja Tanah	1.500.000.000	8.807.326.000
b	Belanja Peralatan dan Mesin	60.171.920.028	77.634.234.178
c	Belanja Bangunan dan gedung	133.467.741.947	48.323.227.512

NO	URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI 2022
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	32.696.129.885	57.182.533.565
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.074.847.353	7.526.813.191
3	Belanja Tidak Terduga	97.322.056.680	88.023.558.387
4	Belanja Transfer	645.166.440.913	661.738.953.293
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	13.207.228.020	14.745.590.000
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	631.959.212.893	646.993.363.293
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.526.347.858.335	2.658.465.494.940
	SURPLUS/(DEFISIT)	(64.439.391.554)	(156.287.987.527)
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	70.143.391.554	181.287.987.527
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	70.143.391.554	181.287.987.527
b	Pencairan Dana Cadangan	-	-
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
d	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	287.691.855.626	181.287.987.527
	Pengeluaran Pembiayaan daerah	5.704.000.000	25.000.000.000
c	Pembentukan Dana Cadangan	-	25.000.000.000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.704.000.000	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.704.000.000	25.000.000.000
	Pembiayaan neto	64.439.391.554	156.287.987.527
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-

Sumber : BPPKAD, 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 mengacu kepada (1) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, (4) arah kebijakan dan prioritas nasional Tahun 2022.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema pembangunan tahun 2022 yang semula “Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan pengembangan Ekonomi Lokal” dengan melihat dinamika yang ada terutama pandemi Covid 19 maka untuk tema pembangunan diubah menjadi “Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi” Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen yang besar untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM, infrastruktur yang baik dan pengembangan ekonomi, secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya kejadian luar biasa berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sangat berimbas pada timbulnya permasalahan pada aspek kesehatan, sosial masyarakat dan melemahnya perekonomian mikro maupun makro, oleh karena itu diperlukan perubahan tema pembangunan.

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD dilakukan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang

merubah kodefisikasi dan nomeklatur program serta kegiatan. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan penanganan pandemi Covid 19. Perubahan RPJMD tersebut membawa konsekwensi penyesuaian terhadap target pada indikator indikator-yang sudah ditetapkan.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH). Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 15 (lima belas) sasaran daerah dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran daerah. Secara rinci, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.
 - a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
 - (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
 - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
 - (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
 - (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
 - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan predikat kabupaten layak anak.
- 2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:
 - a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
 - c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor

pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:
- meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
 - meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
 - meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Selengkapnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target yang akan dicapai pada tahun 2022 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2022

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH						
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target 2022
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka (0-100)	70,64
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,00
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,60
				3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	94,79
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan		4. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,97
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		2. Inflasi		Persen	2,0-4,0

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target 2022
			3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan		ribu rupiah	9.587,62
			4. Angka Kemiskinan		Persen	11,27-10,52
		Menurunnya jumlah PMKS		5. Persentase penurunan PMKS	Persen	0,58
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		6. Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	81,30
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93-3,87
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender		5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		angka (0-100)	92,40
		Meningkatnya keberdayaan gender		8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,93
				9. Predikat Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan		Persen	73,45
			7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		persen	3,4-4,4
			8. PDRB Perkapita		juta rupiah	27,78
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		10. IKLH	angka (0-100)	71,34
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		11. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	75,56
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		12. Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	5.547,99
				13. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	8.124,10

Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2022
			14. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	8.631,00
			15. Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.737,10
			16. Pertumbuhan Investasi	Persen	10
			17. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	Persen	84,99
			18. Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,70
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	angka (0-100)	68,96
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	19. Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	61,04 (B)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	20. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	3,0-3,20
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	21. Opini BPK	-	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	84,50
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	23. Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,60

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

- a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi “*Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa *Major Project* yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Magelang termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanaan *Major Project* untuk penyelesaian

kawasan pariwisata prioritas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo –Magelang-Temanggung, dan Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2022

Rencana pembangunan nasional tahun 2022 dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19. Dalam rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022, tema yang diangkat merupakan tema pembangunan yang sifatnya adaptif dan responsif terhadap pandemi Covid-19 dan proses pemulihannya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal untuk tahun 2022, maka kata kunci untuk tema RKP 2022 adalah Kemiskinan, Lapangan Kerja, UMKM, dan Industri. Oleh karena itu alternatif tema adalah memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif. Tahun 2022 akan melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sementara, terdapat 10 *major project*, yaitu, Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, *Food Estate* dan Energi Terbarukan.

4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan untuk “Penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing daerah”. Selanjutnya berdasarkan rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berubah menjadi “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia” dengan prioritas:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdayasaing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Dengan memperhatikan kebijakan pemulihan dampak Covid-19 di Jawa Tengah pada tahun 2020 dan 2021 dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 akan disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi di Kabupaten Magelang. Kerugian ini antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena Covid-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan melalui tiga hal yaitu Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi dan Penanganan Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Penanganan Kesehatan

Sejalan dengan kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2022 disusun skenario pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak. Arah kebijakan yang telah disusun sebelum dan selama pandemi Covid-19 tetap diterapkan, dengan beberapa penyesuaian yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Prioritas penting dan mendesak lainnya.

Berdasarkan data BPS bulan Maret 2020 saat kondisi awal pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan sebesar 8.890 orang dibanding jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019. Mempertimbangkan pandemi covid-19 yang masih berlangsung

sepanjang tahun 2020, kemungkinan besar jumlah penduduk miskin akan meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Sebagai antisipasi kenaikan jumlah penduduk miskin dan dalam rangka *recovery*/pemulihan dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Magelang telah menyiapkan langkah-langkah strategis pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pemulihan sosial ekonomi pasca Covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak, terutama di beberapa sektor berikut:
 - a. Pariwisata, dengan langkah-langkah:
 - 1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati ;
 - 2) Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - 3) Memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, serta relaksasi pinjaman..
 - b. Perdagangan dan industri manufaktur
 - 1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati;
 - 2) Intervensi Pemerintah Daerah untuk mencari pasar alternatif untuk ekspor, selain ke Tiongkok;
 - 3) Sosialisasi kepada para pedagang di pasar untuk mengembangkan metode pemasaran *online* (pesan antar);
 - c. Pertanian dan peternakan
 - 1) Bantuan-bantuan pada sektor pertanian dan peternakan (bantuan benih dan bibit kepada petani yang terdaftar sebagai anggota Poktan atau Gapoktan);
 - 2) Memperluas dan memperlancar distribusi dan transportasi hasil pertanian dan peternakan;
 - 3) Memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan;
 - 4) Mendukung usaha ekonomi informal di sektor pertanian dan peternakan;
 - 5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
 - 6) Stabilisasi stok dan harga pangan;
 - 7) Mendorong optimalisasi lahan;
 - 8) Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani, misalnya dengan memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online, mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani.
 - d. UMKM
 - 1) Mendorong BUMDes untuk melaksanakan konversi usaha, termasuk sinergi dan kolaborasi antar BUMDes seperti tukar menukar produk BUMDes;

- 2) Dimasukkannya produk UMKM sebagai salah satu komponen barang E-Warung yang telah berjalan di desa-desa;
 - 3) Memfasilitasi kemudahan berusaha atau Investasi;
 - 4) Fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya;
 - 5) Strategi digitalisasi UMKM untuk mempertahankan UMKM agar tetap berjalan dan meningkatkan keuntungan dengan melebarkan pasar penjualan sehingga dapat dijangkau oleh semua konsumen dengan bantuan teknologi.
- e. Pendidikan
- 1) Program rekonstruksi semangat belajar
 - 2) Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah; khususnya untuk warga miskin
 - 3) Mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
 - 4) Pembudayaan Hidup sehat
- f. Kesehatan
- 1) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan jiwa masyarakat
 - 2) Pengadaan *Extra Fooding*
 - 3) Pelayanan RS Merah Putih
 - 4) Pelayanan RS Candi Umbul
 - 5) Pelayanan RS Bukit Menoreh
- g. Sosial
- 1) Memperkuat jaring pengaman sosial daerah (*social safety net*)
 - 2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan
 - 3) Penguatan masyarakat tangguh bencana
2. Melaksanakan 5 (lima) Arahannya Utama Presiden:
- a. Pembangunan sumber daya manusia
 - b. Pembangunan infrastruktur
 - c. Penyederhanaan regulasi
 - d. Penyederhanaan birokrasi
 - e. Transformasi ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2022 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia difokuskan pada:

- a) Pembangunan *Islamic Center*.
- b) Bantuan pembangunan tempat ibadah.
- c) Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
- d) Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.



Gambar 4.1
Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2022

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan (2) peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

- a) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu
- c) Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya

- d) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, melalui bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru
- e) Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal,
- f) Pencapaian wajib belajar 9 tahun, melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak; pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan teknologi
- g) Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
- h) Penguatan basis data pendidikan;
- i) Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat
- j) Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi Covid-19

3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada (1) peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada:

- a) Bantuan ambulan desa.
- b) Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
- c) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
- d) Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
- e) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
- f) Penguatan basis data kesehatan.
- g) Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
- h) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
- i) Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
- j) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.

k) Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

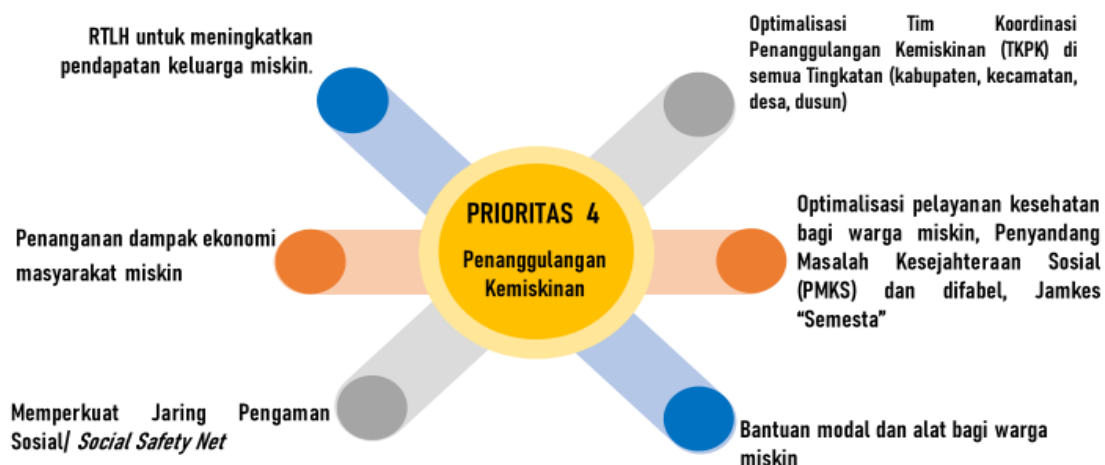
Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2022, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada:

a. RTLH untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

- 1) Masyarakat yang masuk data *by name by adres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
- 2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
- 3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
- 4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
 - a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
 - b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel,
 - c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
 - d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;
 - e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.



Gambar 4.2

Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2022

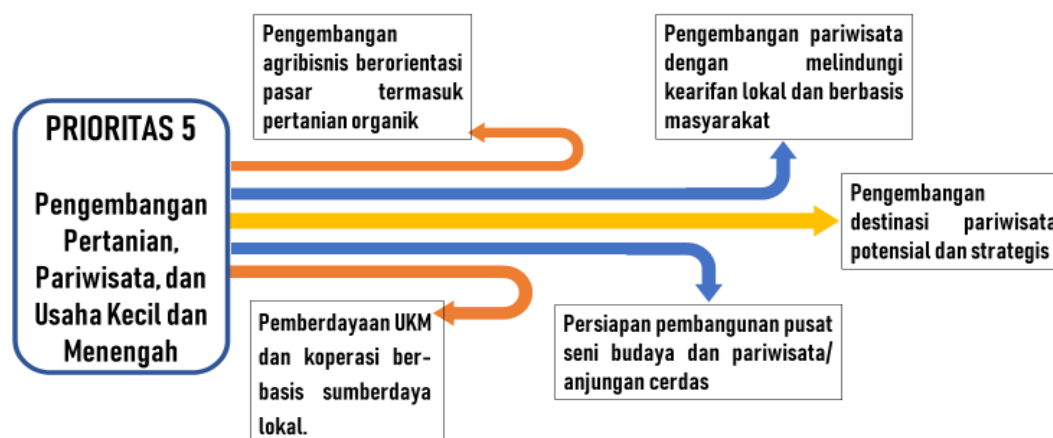
5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2022, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

- a) Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
- b) Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
- c) Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
- d) Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
- e) Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan

kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.



Gambar 4.3
Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2022

6. Prioritas sarana dan prasarana publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2022, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik difokuskan pada:

- a) Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;
- c) Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;
- d) Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan

- permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;
- e) Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;
 - f) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, *guardrail*, marka jalan, *zebra cross* serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan. Pada tahun 2022, pembangunan bidang lingkungan hidup difokuskan pada:

- a) Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
- c) Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;
- d) Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;
- e) Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;
- f) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2022 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan pada:

- a) *E-government/smart regency*, antara lain melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
- b) Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c) Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-

- konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d) Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;
 - e) Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
 - f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK);
 - g) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;
 - h) Melanjutkan reformasi birokrasi;
 - i) Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda pendidikan dan pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

9. Prioritas ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), (2) meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2022, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada:

- a) Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- b) Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2022, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

- a) Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- b) Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
- c) Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d) Penghargaan atlet berprestasi.



Gambar 4.4
Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2022

Arah Kebijakan dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 juga mengakomodir amanat Standar Pelayanan Minimal SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal* (SDGs). Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target TPB/SDG's pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Memetakan tujuan, target dan indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
4. Mengisi matrik capaian indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
5. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten dan non pemerintah;
6. Pelibatan unsur Non Pemerintah (OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) dalam pencapaian tujuan SDGs;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2022, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Tegal – Brebes – Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang–Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50 – 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta – Dieng (Wonosobo) – Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi – Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi

pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 (tiga) tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu: (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung; (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian; (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan yang cukup tinggi

Untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyusun dokumen perencanaan baik study kelayakan maupun Detail Engineering Desain (DED) dan dokumen lingkungan serta pengadaan tanah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang
Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Belum Tersedia	2017	2018	AMDAL	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR melalui BBWSO	koordinatif
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Belum Tersedia				Bentuk Dukungan: Koordinasi & Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja PD: Bappeda & Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115.000	Kementerian PUPR melalui Badan Penyelenggara Jalan Tol	koordinatif

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pemprov				Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Kab. Wonosobo. PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Binamarga Prov. Jateng	koordinatif
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Tersedia	-	2020	-	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Fasilitasi dan koordinasi teknis PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	DPUPR	Penataan alinyemen jalan dan pembebasan lahan tahun 2021.
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab.	65	APBN	Belum Tersedia	belum	belum		-	-	Satpol PP dan Damkar / Kementerian PUPR	Penyiapan FS tahun 2023.

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Magelang										
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Penyusunan DED Jalan, Drainase ruas jalan di Kawasan Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	Kementerian PUPR	
	a. Revitalisasi terminal Borobudur					2019	UKL-UPL Andallalin			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	b. Revitalisasi terminal Secang					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	c. Revitalisasi terminal Salaman					2019	UKL-UPL			Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	d. Drainase jalan dan					Sudah disusun				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	trotoar										
	e. Peningkatan jalan lingkungan Borobudur					2019- 2020				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN					Bentuk dukungan: Operasional TPS3R PD: Dinas Lingkungan Hidup Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	DLH	Sudah dilakukan studi kelayakan. Penyiapan lahan Penyusunan dokumen perencanaannya dan dokumen lingkungan dimulai tahun 2020.
	a. TPST di Desa Kebonsari Kec. Borobudur				1	2021	UKL-UPL (2021)			DLH	Penyiapan lahan
	b. TPST di Desa Krasak Kec. Salaman					2017	2022	UKL-UPL (2022)		DLH	Penyiapan lahan
	c. TPST di Desa Sugimas					2017	2023	UKL-UPL (2023)		DLH	Penyiapan lahan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kec. Grabag										
	d. TPST di Desa Krincing Kec. Secang				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	e. TPST di Desa Gandusari Kec. Bandongan				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	f. TPA di Desa Klegen Kec. Grabag				-	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Menggunakan lahan eksisting dengan penyiapan lahan untuk perluasan pada tahun 2022.
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	2020- 2021 oleh Pemprov Jateng	2019 (Prov. Jateng)	-	Ijin Lingkungan 2020 (Prov. Jateng)			DLHK Provinsi Jateng	Telah disiapkan DED dan UKL UPL untuk pembangunan jembatan Rejosari serta pembebasan lahan untuk akses jembatan sebagai penghubung dengan Kota

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Magelang
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020	2021		Bentuk dukungan: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur PD: DPUPR Program: Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan lahan
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/Rest	50	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur PD: DPUPR Program:	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya	Koordinatif, Penyiapan relokasi untuk SD Negeri Blondo. Usulan perubahan lokasi pembangunan gerbang dari Desa

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang							Penyelenggaraan Jalan PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Kembanglimus Kec. Borobudur ke Desa Salaman Kec. Salaman
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Tersedia, PT TWC dan Kement rian PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Belum tersedia				Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur	115.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Pra FS (2017) Penyusunan dokumen kajian kelayakan. Dokumen perencanaan dan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			penyiapan lahan diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN					-	-	Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	a. Pasar Ngablak			Tersedia milik Pemda	2019	2019	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	b. Pasar Kaponan			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Andallalin			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	c. Pasar Salaman,			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Belum tersedia			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	d. Pasar Mungkid			Tersedia milik Pemda	2012	2018 (review DED)	Andallalin (2017) AMDAL (2017)			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
	e. Pasar Windusari,			Tersedia milik Pemda	ada	ada	Andallalin AMDAL			Disdagkop UKM	Perlu penyiapan lahan untuk penampungan pasar sementara
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut / Museum Widayat / Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Tersedia milik Pemda	2021	Belum tersedia	Andallalin belum tersedia	Bentuk dukungan: Penyusunan Dokumen Lingkungan PD: Disparpora Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	700.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyiapan DED pada tahun 2022, kajian pengembangan kawasan simpang Mendut telah dilaksanakan pada tahun 2020
15	Pembangunan Sekolah vokasi	200	APBN	Belum tersedia	2021	Belum Tersedia	Andallalin belum			Pemprov Jateng	Penyusunan studi kelayakan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kabupaten Magelang) th. 2022		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang						tersedia				

4.3 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendukung pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” maka keberadaan inovasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan Daya Saing ini. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori “Tinggi”.

Berdasarkan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Sangat Inovatif”. Dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) ini, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Magelang berkewajiban melaporkan inovasi dengan 21 indikator penilaian disertai dengan bukti dukungannya. Pada tahun 2020 Kabupaten Magelang telah melaporkan 70 inovasi diantaranya adalah: Paseso Merapi atau *Sister Village*, Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan), *Centre of Service for Research (COSFRE)* / Klinik Penelitian, PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan), Pancen A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten), Budidaya tanaman bawah tegakan penghasil emas hijau (BINTANG HIJAU), Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air), PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten), *Covid Information System (CIS)* dan lain-lain. Selain inovasi-inovasi tersebut yang berkelanjutan di tahun 2021, ada beberapa inovasi baru yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Milenial (PKK Milenial) dan Universitas Pemuda Desa Indonesia (UNIDES)

4.3.1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Milenial (PKK Milenial)

PKK Milenial merupakan bagian dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magelang. Merupakan inovasi TP PKK dimana dalam kelebagaannya melibatkan kaum muda untuk mendukung dan berkarya dalam kegiatan PKK. Dengan pelibatan generasi muda ini diharapkan akan banyak memunculkan ide kreatif dan inovatif yang dapat diterapkan dalam program-program PKK sehingga akan lebih mudah diterima oleh keluarga dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Pelaksanaan pembinaan 10 program pokok PKK di Kabupaten Magelang telah rutin dilaksanakan secara menyeluruh di semua tingkatan baik di tingkat kecamatan maupun desa hingga dasa wisma. Seiring perjalanan waktu terdapat banyak permasalahan yang dialami PKK dalam menjalankan program kerjanya antara lain:

a. Sulitnya mencari kader PKK

Hal ini dialami hampir di setiap daerah, dalam kepengurusannya, PKK terdiri dari para istri pejabat, yang notabene memiliki kesibukan sendiri, sehingga dirasakan perlu merekrut pelaksana untuk memperkuat struktur yang sudah ada

b. Program kerja yang monoton

Pelaksanaan program kerja PKK selama ini hanya sekedar melaksanakan hasil Rakernas VIII dan laporan dari desa, kecamatan hingga kabupaten

sekedar *copypaste* setiap tahunnya, sehingga diperlukan adanya penyegaran program-program PKK di semua tingkatan.

c. Mindset Ibu-Ibu PKK

Mindset selama ini mengidentikan bahwa PKK hanya beranggotakan Ibu-ibu, padahal tugas pemberdayaan kesejahteraan keluarga tidak hanya menjadi tugas para ibu, namun perlu didukung peran anggota keluarga yang lain termasuk para ayah dan anak-anaknya. Sehingga perlu menanamkan 10 program pokok PKK dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan PKK Milenial

d. Pemenuhan Administrasi

Kegiatan administrasi sering menjadi beban dalam evaluasi/penilaian pelaksanaan 10 program PKK. Pemenuhan administrasi PKK ini sering dilaksanakan secara "*rape!*" sehari jadi. Maka perlu pembenahan dalam pengadministrasian PKK mulai dari tingkatan terbawah (Dasa Wisma) melalui SIM PKK.

e. Akselerasi Program

Pelaksanaan sosialisasi program kerja PKK selama ini jika dilaksanakan melalui media *offline* dari tingkat kabupaten hingga ke desa, terkendala dengan terbatasnya anggaran dan SDM. Informasi yang disampaikan ke tingkat dibawahnya tidak sama dengan informasi yang diterima. Mengingat kondisi ini maka perlu dilaksanakan sosialisasi melalui media *online* agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara utuh di semua tingkatan.

Pada awal tahun 2020, kegiatan PKK yang dilaksanakan secara langsung dan tatap muka mengalami kendala dengan adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran. Kegiatan pertemuan dan pembinaan PKK yang biasanya dilaksanakan secara rutin menjadi sangat terbatas bahkan nyaris terhenti. Sebagai solusinya TP PKK Kabupaten Magelang menginisiasi pelibatan generasi muda dalam kepengurusan TP PKK dengan pembentukan PKK Milenial melalui Surat Tugas Ketua TP PKK Kabupaten Magelang Nomor 37/ST/PKK.KAB/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020. Awalnya, pelibatan generasi Milenial ini bertujuan untuk membantu TP PKK Kabupaten Magelang dalam mengembangkan strategi sosialisasi dan pembinaan program pokok PKK secara virtual melalui media sosial Instagram (IG). Pada akhirnya semakin banyak ide-ide kreatif yang dikembangkan oleh kaum muda dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, sehingga pada Bulan Agustus 2020 secara bertahap dibentuklah PKK Milenial di setiap kecamatan untuk mendukung kepengurusan TP PKK Kecamatan.

Pembentukan PKK Milenial Kabupaten Magelang ditindaklanjuti dengan pembentukan PKK Millenial di Tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini telah terbentuk PKK Millenial di 21 Kecamatan. Adapun beberapa kecamatan telah membentuk PKK Milenial di tingkat desa antara lain 15 desa di Kecamatan Tempuran, 5 desa di Kecamatan Grabag dan 2 desa di Kecamatan Dukun. Ruang lingkup inovasi meliputi kelembagaan PKK dengan melibatkan generasi muda dan pelaksanaan 10 program pokok PKK melalui media dan cara yang aplikatif dan inovatif dengan cara mengemas pelaksanaan program PKK secara menarik dan kekinian oleh anak-anak muda yang memiliki potensi yang menguasai IT untuk dikembangkan.

Tujuan dibentuknya PKK Milenial adalah regenerasi kader PKK di Kabupaten Magelang, mendorong keterlibatan anak muda dalam pembangunan desa, mengupayakan akselerasi program kegiatan PKK dan memperbaiki administrasi. Sasaran PKK Milenial adalah generasi muda usia produktif yang memiliki potensi dan kemauan untuk mendukung pembangunan desa melalui TP PKK. Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan meliputi inovasi dalam kelembagaan TP PKK di semua tingkatan melalui pelibatan generasi muda yang memiliki latar belakang potensi kreatif dan inovatif dalam kepengurusan TP PKK di berbagai tingkatan, pengembangan metode penyampaian program kegiatan PKK dalam rangka menanamkan 10 program pokok PKK dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 4.7

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Inovasi PKK Milenial

4.3.2. Paseso Merapi atau *Sister Village*

Paseduluran Deso (PASESO) MERAPI atau *sister village* merupakan sebuah sistem dalam penanganan pengungsi letusan Gunung Merapi yang dikembangkan oleh Kabupaten Magelang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pendekatan yang dilakukan pada sistem ini adalah pendekatan kelembagaan melalui persaudaraan dengan membentuk desa bersaudara (*sister village*) untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Konsep inovasi dari sistem ini adalah memperbesar skala pengungsian, yang semula dari rumah ke rumah menjadi Desa ke Desa. Dalam praktek PASESO atau *sister village*, ada desa penyangga di daerah aman sebagai penampung masyarakat dari desa yang tertimpa bencana yaitu dengan cara seperti melamar pengantin. Lamaran desa tersebut dapat diterima, ditolak atau sudah diterima namun gagal menjadi pasangan. Apabila lamaran diterima, maka perpasangan atau persaudaraan antara kedua desa ini dikuatkan dengan MOU, selayaknya pengantin dengan buku nikahnya.

Setelah diterapkannya PASESO di Kabupaten Magelang, sudah terbentuk 19 pasang desa bersaudara berbasis situs dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) di Kawasan Rawan Bencana dan di 42 desa penyangga sehingga penanganan pengungsi lebih tertata dan korban dapat diminimalisir. Sebelumnya, jika korban bencana gunung Merapi mengungsi, terjadi kesemrawutan dan ketidakpastian tempat mengungsi.

Contoh praktek PASESO/*Sister Village* adalah persaudaraan antara Desa Sumber dan Desa Ngargomulyo di Kecamatan Dukun dengan Desa Ngawen dan Desa Tamanagung di Kecamatan Muntilan. Jika aktivitas Gunung Merapi meningkat, warga Desa Sumber dan Ngargomulyo telah siap. Mereka mengetahui akan mengungsi kemana. Misalnya warga Desa Sumber mengungsi ke desa saudaranya yakni Desa Ngawen Muntilan. Sedangkan Desa Ngargomulyo bersaudara dengan Desa Tamanagung Muntilan.

PASESO/*Sister Village* ini mampu menjawab permasalahan manajemen dari pengelolaan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Sistem ini mampu menciptakan “perasaan nyaman di zona aman” pada para pengungsi bencana Gunung Merapi. Keberhasilan Paseso dapat dilihat dari sudah direplikasinya inovasi ini di berbagai daerah lain dalam penanganan pengungsi, seperti Gunung Kelud di Kediri, Gunung Agung di Bali dengan (program Semeton), dan Gunung Sinabung di Medan.



Gambar 4.8

Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Paseso Merapi
Sebagai Top 45 Inovasi Nasional

4.3.3. Program MACAK (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan)

Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui penyediaan informasi, baik cetak maupun *online*. Literasi didapat melalui pendidikan sekolah maupun program *adult literacy* (literasi untuk orang dewasa). Program Literasi untuk Orang Dewasa menghasilkan beberapa manfaat, khususnya membangun *self esteem* (kepercayaan diri) dan *empowerment* (pemberdayaan).

Paradigma masa lalu beranggapan bahwa perpustakaan adalah sebuah gudang buku yang bersifat statis. Agar perpustakaan mampu mengambil peran untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat guna mendorong kesejahteraan, paradigma lama ini harus ditransformasi, dengan memosisikan perpustakaan sebagai wahana untuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Magelang telah melakukan transformasi perpustakaan daerah. Guna mendorong terwujudnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi

sosial di Kabupaten Magelang, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melakukan inovasi melalui program “MACAK” (Magelang Membaca Untuk Kesejahteraan). Program MACAK memfungsikan perpustakaan sebagai sarana yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, yang merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program revolusi mental yang digaungkan Pemerintah pusat. Program “MACAK” dilaksanakan dengan kegiatan berupa pemberian wawasan, pengetahuan, dan sekaligus keterampilan bagi masyarakat pengguna perpustakaan. Kegiatan ini memiliki tujuan memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi, sebagai upaya penguatan kesejahteraan sosial.



Gambar 4.9

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi MACAK

4.3.4. Centre of Service for Research (COSFRE) / Klinik Penelitian

Salah satu input dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan adalah hasil penelitian. Penelitian yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan anggaran yang cukup. Akan tetapi hampir di semua level pemerintahan SDM dan anggaran menjadi penyebab minimnya jumlah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, padahal salah satu indikator perencanaan dan pengambilan kebijakan yang baik adalah berdasarkan pada hasil penelitian. Disisi lain terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga, seperti mahasiswa, perguruan tinggi dan lembaga swasta lainnya. Peneliti meminta ijin penelitian kepada pemerintah Kabupaten Magelang.

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak non pemerintah ini belum difasilitasi secara substansial dan hasilnya belum dimanfaatkan oleh

Pemerintah Kabupaten Magelang karena ada keraguan terhadap kualitas hasil penelitian. Di samping itu hanya sedikit hasil penelitian yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Pada tahun 2018 terdapat 464 buah penelitian. Apabila satu penelitian diasumsikan memerlukan pembiayaan Rp. 10 juta, maka terdapat sumber daya senilai kurang lebih Rp. 4,64 milyar yang dapat dimanfaatkan. Hasil-hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sehingga akan mendukung *planning by research*.

Guna mendukung kegiatan penelitian, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda menyediakan fasilitas *COSFRE (Centre of Service For Research)*, yaitu fasilitas yang diberikan kepada para peneliti berupa layanan sebelum penelitian, saat pelaksanaan penelitian maupun paska penelitian, dengan kewajiban menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Peneliti dilayani baik data, fasilitasi bertemu *stakeholders*, diskusi dan seminar, sehingga hasil penelitian yang dilakukan semakin berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Penelitian yang difasilitasi secara menyeluruh adalah penelitian terpilih yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Magelang. *COSFRE* ini diharapkan memiliki *multiplayer effect* dalam menciptakan iklim yang kondusif dan ramah bagi para peneliti baik tingkat lokal, regional nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan penelitiannya di Kabupaten Magelang.



Gambar 4.10

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi COSFRE

4.3.5. UNIDES (Universitas Pemuda Desa Indonesia)

Universitas Pemuda Desa Indonesia (UNIDES) ini merupakan inovasi yang dikembangkan pemuda Dusun Ngetos Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan. Inovasi ini merupakan model optimalisasi pemuda dalam rangka mengoptimalkan SDM (sumber daya alam) dan SDA (sumber daya alam) yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan sebuah desa menuju masyarakat Indonesia yang berdaya menuju dunia. Pemuda merupakan aset besar bagi sebuah bangsa. Fakta sejarah sudah banyak membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam sebuah pencapaian suatu bangsa.

Berangkat dari permasalahan yang banyak dijumpai di tingkat desa dalam hal penerapan kebijakan penanganan kemiskinan berupa bantuan sosial dimana kategori penerima Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang menerima program pemerintah berupa: Program

satu juta rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , subsidi bunga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk usaha kecil, Program Keluarga Harapan dari Kemensos, jaminan kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar. Berdasarkan hasil observasi, PKH yang diterima oleh keluarga tersebut berlipat-lipat menyebabkan masyarakat penerima program tersebut masuk ke zona nyaman dan hanya mengandalkan bantuan-bantuan tersebut. Akibatnya warga menjadi kurang semangat untuk bekerja atau kegiatan lain yang produktif. Selain itu, pengelolaan organisasi kepemudaan masih sangat minim. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dikelola oleh pemuda nyatanya tidak bisa berjalan. Pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal, contohnya program kejar paket. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, sebab bayi atau anak pertama kali mengenali lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Pendidikan pertama ini dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan-pengembangan berikutnya

Potensi SDA yang ada di desa pun belum mampu dioptimalkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Aliran sungai yang jernih belum mampu dimanfaatkan. Bahkan ada area tertentu di pinggi sungai yang digali untuk diambil pasir secara besar-besaran. Akibatnya sawah yang dulu produktif kini hanya tersisa kubangan dan lahan kering yang tandus. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah tindakan solutif yang komprehensif untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di Desa Sriwedari dan desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang.

4.3.6. PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan)

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang mencapai 12,98% atau sebesar 160,48 ribu jiwa. Angka ini terus mengalami penurunan secara perlahan hingga mencapai angka 10,67% atau 137,45 ribu jiwa pada tahun 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren positif, dari 2,07 pada tahun 2014, turun menjadi 0,98 pada tahun 2019. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*), menunjukkan tren penurunan, dari 0,47 pada tahun 2014 menjadi 0,17 pada tahun 2019. Pada tahun 2019, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (10,8%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,41 %).

Walaupun angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi capaian tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 dan Target SDGs sebesar 8% pada tahun 2019

Amanat RPJMD Kabupaten tahun 2019-2024, angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,43-10,43 dan pada akhir periode (tahun 2024) ditargetkan 6,83-7,83. Guna mempercepat penurunan angka kemiskinan agar target pembangunan tercapai, maka pemerintah Kabupaten Magelang melakukan Program PEPAK (Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan). Program ini merupakan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan multisektor, multistakholder dan dilakukan secara komprehensif. Selain itu kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, dimana pada semua tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun) ada kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinannya; sistematis, dimana penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada dengan melibatkan multisektor dan multistakeholder serta masif, yaitu dilaksanakan secara terus menerus dan merata.



Gambar 4.11

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi PEPAK

4.3.7. Pancen A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)

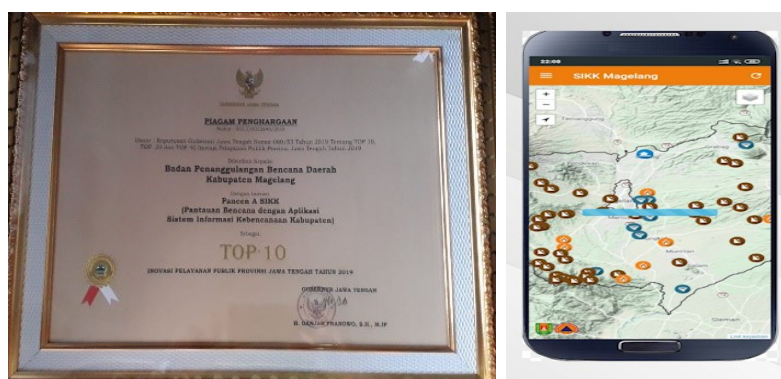
Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana. Jenis bencana yang ada di Kabupaten Magelang yaitu erupsi merapi, banjir, tanah longsor, kebakaran, angin kencang, kekeringan, gempa bumi dan kejadian lain. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Kejadian bencana di Kabupaten Magelang dari tahun 2013 – 2018 adalah 301, 172, 187, 204, 352, 477 kejadian. Didominasi oleh tanah longsor dan angin kencang.

BNPB sebagai badan negara yang menangani masalah bencana telah membakukan dan menyeragamkan data bencana di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi data kebencanaan disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi BPBD dalam pelaporan kejadian bencana. Dalam standardisasi

data kebencanaan ini, terdiri dari data pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

BPBD Kabupaten Magelang menggunakan standarisasi data kebencanaan tersebut sebagai acuan dalam membangun Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK). Melalui dukungan SIKK diharapkan BPBD Kabupaten Magelang akan lebih mudah mewujudkan kabupaten yang tanggap, cepat, tepat dan tangguh menghadapi bencana.

Tersedianya Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (Pancen A SIKK) berbasis Web. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk menghimpun, mengelola dan mendiseminasikan informasi kebencanaan di Kabupaten Magelang. Pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memantau informasi kebencanaan melalui link <http://sikk.bpbdmagelang.id>. Dapat juga melihat informasi bencana melalui smartphone dengan mengunduh dari playstore beralamat <https://play.google.com/store/apps/details?id=info.sikk.bpbdmagelang>.



Gambar 4.12

Penghargaan Pancen A SIKK Sebagai Top 10 Inovasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah

4.3.8. Budidaya Tanaman Bawah Tegakan Penghasil Emas Hijau (BINTANG HIJAU)

Bintang Hijau merupakan sebuah gagasan ide pengelolaan hutan bersama masyarakat di sekitar kecamatan Tempuran melalui budidaya tanaman bawah tegakan seperti bio farmaka. Gagasan ini berawal dari kegiatan masyarakat yang menebang kayu secara sembarangan tanpa memedulikan kelestarian hutan bahkan cenderung merusak hutan dan mengganggu ekosistem alam. Dampak dari terganggunya ekosistem hutan/alam adalah berkurangnya keragaman hayati, yang dapat menjadi pengendali hama atau penanda musim, kemudian terjadi longsor dan yang cukup dirasakan masyarakat adalah berkurangnya sumber-sumber mata air. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ada cara pengelolaan hutan yang berkelanjutan, baik ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Konsep inovasi Bintang hijau adalah mengelola hutan untuk kesejahteraan masyarakat melalui budidaya tanaman di bawah tegakan yaitu bio farmaka. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, tanaman bio farmaka yang dapat dikembangkan adalah tanaman yang memerlukan naungan 70 % seperti kunyit, temulawak, lempuyang dan kunci. Petani memperoleh

penghasilan tanpa mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Setiap tahapan prosesnya mulai dari budidaya sampai pengolahan mampu menarik tenaga kerja. Pemuda Tani mulai memanfaatkan wisata herbal dan ibu-ibu tani dapat mengisi waktu luang memproses produk seperti mulai dari pengeringan, pemotongan, pembuatan simplisia sampai pembuatan sabun. Tidak hanya sebatas itu sebagian masyarakat lain juga terdorong untuk berperan sebagai pedagang/supplier, usaha transportasi.

Saat ini kegiatan “Bintang Hijau” yang berawal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Temanggal dan Desa Growong di Kecamatan Tempuran telah berkembang ke 7 desa yang lain yaitu Desa Pringombo, Desa Kemutuk, Desa Bawang, Desa Tugurejo, Desa Jogomulyo dan Desa Ringinanom. Apabila dilihat jumlah lahan, awal kegiatan hanya 2 Ha sekarang sudah berkembang menjadi 90 Ha.

Bintang Hijau sudah membantu menjawab permasalahan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Konservasi hutan berjalan, masyarakat berpenghasilan dan merata. Selain itu, investor/pabrik juga tertarik untuk bekerjasama, serta kalangan akademisis seperti UNTID dan UMM juga berkontribusi memberikan pelatihan diversifikasi produk.



Gambar 4.13
Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi BINTANG HIJAU

4.3.9. Jogo Tuk (Komunitas Penyelamat Mata Air)

Bertambah tahun, keadaan iklim semakin tidak menentu. Jangka waktu musim kemarau Panjang sehingga banyak mata air yang mati atau mengecil debitnya, sumur kandas hingga dasarnya, dan sungai-sungai mengering. Alam telah mengalami penurunan kualitas dan tak lagi bisa menopang kebutuhan air bersih. Apabila tidak ada tindakan penyelamatan mata air secepatnya, maka tidak mustahil dalam waktu tidak lama akan terjadi kekeringan dan krisis air bersih. Penurunan potensi air baik secara kualitas maupun kuantitas akan menjadi masalah serius apabila dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan baik dan bijaksana dengan memperhatikan aspek konservasi, pemanfaatan dan pengendaliannya.

Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bahwa aspek Konservasi Sumber Daya Air memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa dampak dari kerusakan lingkungan sebagai akibat degradasi hutan dan lahan, selain menyebabkan kelangkaan air juga akan menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu perlu suatu tindakan konkret untuk memulihkan keseimbangan ketersediaan air, seperti penanaman tanaman keras terutama yang bersifat menahan air, pengelolaan air hujan maupun pemanfaatan air secara bijak oleh semua pihak.

Guna menyelamatkan mata air terhindar dari krisis air bersih, kabupaten Magelang melakukan inovasi membentuk komunitas penyelamat mata air yang diberi nama JOGO TUK. Komunitas ini dibentuk di tingkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Kegiatan yang dilakukan komunitas Jogo Tuk diantaranya adalah melaksanakan inventarisasi mata air, menghitung debit mata air dan melaksanakan konservasi mata air baik secara vegetative maupun sipil teknis. Dengan berkembangnya komunitas Jogo Tuk ini diharapkan mata air yang ada di Kabupaten Magelang akan tetap bertahan dan ketersediaan air bersih tetap melimpah sehingga terhindar dari krisis air.



Gambar 4.14

Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi JOGO TUK

4.3.10. PUSAKA GEMILANG (Pusat Informasi dan Komunikasi Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Magelang menghadapi kesulitan dalam melakukan integrasi data lintas sektoral. Data lintas sektoral dari OPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Akademisi, Masyarakat dan Stakeholder sulit untuk dihimpun dan kurang bias dipertanggungjawabkan validitasnya.

Validitas data yang rendah mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang. Permasalahan data yang sering tidak konsisten antar OPD maupun dengan stakeholder lainnya diharapkan dapat diselesaikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada era revolusi industri 4.0 ini.

Beberapa kendala pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Magelang yang sering terjadi di masyarakat antara lain adalah lambatnya penanganan, mahalnya biaya pelayanan, tidak transparannya pelayanan hingga sulitnya prosedur pelayanan. Selain itu data dan pelayanan publik pada OPD masih

banyak yang bersifat sektoral, sehingga terdapat banyak layanan publik. Hal ini menyulitkan masyarakat pengguna layanan publik. Guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik, diperlukan upaya untuk memperbaiki pelayanan publik serta mengantisipasi kekurangan atas kualitas layanan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengintegrasikan seluruh layanan publik yang meliputi layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan, layanan kedaruratan serta layanan publik lainnya dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan sebuah inovasi dalam bentuk portal data terintegrasi dan layanan terpadu melalui PUSAKA GEMILANG.

Program Pusaka Gemilang memiliki 2 fokus utama yaitu integrasi data dan layanan publik terpadu. meliputi :

a. Portal Data Terbuka Terintegrasi.

Portal data ini digerakan secara *online* oleh produsen data dari OPD, universitas, lembaga swasta, dan instansi vertikal pemilik data strategis daerah. Data yang dihimpun merupakan data yang digunakan untuk menyusun atau menyampaikan perencanaan pembangunan dan monitoring maupun evaluasi yang ada di Kabupaten Magelang. Selain itu pemanfaatan portal data dalam Pusaka Gemilang merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyajian data daerah yang lebih valid, mudah, dan cepat.

b. Portal Layanan Terpadu.

Portal layanan terpadu ini mengintegrasikan beberapa layanan publik pada beberapa OPD seperti layanan perizinan, administrasi kependudukan, aduan masyarakat, layanan kedaruratan serta layanan publik lainnya dalam satu Portal yang memudahkan masyarakat.



Gambar 4.15

Bupati Magelang berada di *Command Center Room* Pusaka Gemilang

4.3.11. Pengembangan Desa Wisata

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan

melakukan pengembangan pariwisata. Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang memiliki potensi wisata yang memadai dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi wisatawan terlebih adanya dukungan keberadaan candi Borobudur.

Saat ini minat wisatawan cenderung pada konsep wisata alam pedesaan (*back to nature*). Pengembangan desa wisata adalah salah satu pilihan wisata yang tepat, dan pengembangan desa wisata ini menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan desa wisata di Kabupaten Magelang dilakukan melalui konsep Pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada serta memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan.

Untuk mewujudkan pengembangan desa wisata dapat berjalan dan dikelola dengan baik maka pemerintah Kabupaten Magelang memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Magelang diarahkan untuk:

- a. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
- b. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan.

1.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda dan Litbangda.

Berdasarkan pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil

telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah dituangkan kedalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 170/01/Kep/Pimp.DPRD/2021 Tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang merupakan hasil penjarangan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Magelang. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Magelang yang telah diinput dan terverifikasi melalui SIPD sejumlah 3.464 usulan kegiatan dari 50 anggota DPRD dengan total anggaran sebesar Rp 132.388.791.500.

Dari jumlah pikir yang masuk tersebut, yang dominan adalah usulan kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Air Bersih Perdesaan, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Bantuan Majelis Taklim, bantuan pondok pesantren, bantuan UMKM, bantuan TPA/TPQ/Madin/PAUD, bantuan ambulance desa, bantuan masjid/mushola, bantuan kesenian, bantuan sarana prasana olah raga, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program kegiatan yang diusulkan melalui pokok-pokok pikiran sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan dapat terealisasi.

BAB V

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

5.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Perencanaan pengembangan wilayah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Di Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kebijakan/pengaturan terkait pengembangan wilayah, diantaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030,
Tujuan penataan ruang dalam Perda 5 tahun 2011 adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin kelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Taman Nasional Gunung Merapi.
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berperan sebagai alat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal –Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, berdasarkan amanat Perpres 79 Tahun 2019 terdapat kurang lebih 15 kegiatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

5.2 Arah Pengembangan Wilayah

5.2.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan rencana pengembangan struktur ruang sebagai berikut :

- a. sistem perdesaan;
- b. sistem perkotaan;
- c. sistem perwilayahan; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem Perwilayahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Pembagian Wilayah Pengembangan yang meliputi :

- a. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;
- b. Wilayah Pengembangan Purwomanggung;
- c. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten;
- d. Wilayah Pengembangan Banglor;
- e. Wilayah Pengembangan Wanarakuti;
- f. Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
- g. Wilayah Pengembangan Petanglong; dan
- h. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.

Kabupaten Magelang menjadi Wilayah Pengembangan Purwomanggung meliputi : Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang dan Kab. Temanggung

Wilayah Pengembangan Purwomanggung berpusat di Kawasan perkotaan Magelang dengan arahan pengembangan meliputi:

1. memadukan pembangunan Kota Magelang dan wilayah disekitarnya;
2. menerpadukan pembangunan perbatasan dengan Provinsi DIY;
3. mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah;
4. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) pariwisata;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) industri; dan
 - e) panas bumi.

5.2.2. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang

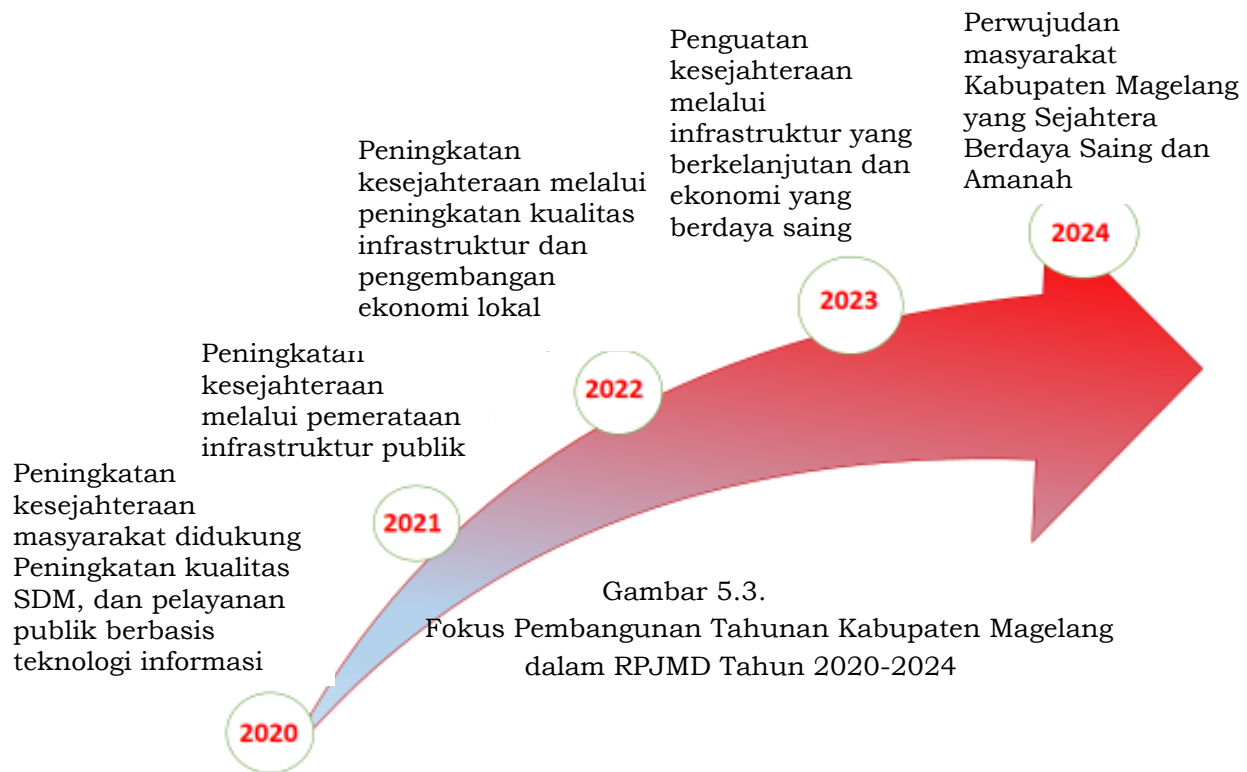
Pengembangan wilayah Kabupaten Magelang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Magelang sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata, dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah

resapan air. Pengembangan Kabupaten Magelang berdasarkan sistem perwilayahan meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan Sapujoran (Salaman-Tempuran-Kajoran), dengan fungsi Pusat perdagangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan pendukung pengembangan pariwisata, pengembangan industri, peternakan, perikanan.
- b. Wilayah Pengembangan Mertomundur (Mertoyudan-Mungkid-Borobudur), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian dan aktivitas pendukung pariwisata, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pariwisata.
- c. Wilayah Pengembangan Tilawar (Muntilan-Salam-Ngluwar), dengan fungsi Pusat perdagangan, aktivitas pendukung pariwisata, pengembangan pertanian
- b. Wilayah Pengembangan Sawangrukun (Sawangan-Srumbung-Dukun), dengan fungsi Pusat pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian dan peternakan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam.
- c. Wilayah Pengembangan Grapala (Grabag-Pakis-Ngablak), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam
- d. Wilayah Pengembangan Segamulyo (Secang-Tegalrejo-Candimulyo), dengan fungsi Pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktivitas pendukung pariwisata, konservasi alam.
- e. Wilayah Pengembangan Bakalsari (Bandongan, Kaliangkrik dan Windusari), dengan fungsi Pengembangan pertanian, pendidikan, perdagangan, aktivitas pendukung pariwisata, dan konservasi alam.

5.2.3. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.



Gambar 5.3.
Fokus Pembangunan Tahunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2022, fokus pembangunan diarahkan pada Peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan
- Meningkatkan pelayanan kesehatan
- Meningkatkan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman
- Meningkatkan kuantitas atraksi pariwisata
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
- Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan
- Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi
- Meningkatkan infrastruktur sumber daya air
- Meningkatkan pengamanan dan keselamatan lalu lintas

Tabel 5.1.
Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2022

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang dan Angkutan Barang	Program Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah terminal yang dikembangkan	1 lokasi	585.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	7 unit	735.000.000	
Pengembangan sistem Jaringan Telekomunikasi	Program Aplikasi Informatika				
1. Pengembangan Sistem Jaringan Kabel	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PD danDesa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil	83,61 %	5.808.553.000	
2. Pengembangan Sistem Jaringan Nirkabel	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan danpelaporan kinerjajapengelolaan TIK	100 %	450.000.000	
3. Pengembangan Sistem Jaringan Satelit					
Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Lainnya					
Pengembangan Sarana Olahraga dan taman rekreasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Jumlah bahan konstruksi pengelolaan RTH	1 paket	4.000.000.000	
		2. Jumlah bahan (pupuk dan obat) pengelolaan RTH	1 paket		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3. Jumlah bibit tanaman yang di beli	1 paket	1.000.000.000	
		4. Jumlah mechanical elektrikal yang di kelola	2169 permeter		
		5. Jumlah pengelola RTH Publik yang di kelola	61 orang		
		6. Pembangunan RTH	1 paket		
		1. Jumlah alat yang di beli	0 paket		
		2. Jumlah alat yang di kelola	53 paket		
		3. Jumlah kendaraan yang dibeli	0 unit		
		4. Jumlah kendaraan yang dikelola	9 unit		
Perwujudan kawasan lindung Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH				
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Tersedianya Sistem Informasi Sumber Mata Air*	1 Dokumen	100.000.000	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	terkait PPLH				
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah komunitas mata air yang dibentuk	10 kelompok	800.000.000	
Pengembangan sistem Jaringan Prasarana Lainnya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang terencana	1 kawasan	20,000,000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah perumahan dengan sarpras yang terdata	1 kecamatan	15,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU yang dikoordinasikan	1 kawasan	180,000,000	
Pengembangan Sarana Perumahan	Program Pengembangan Perumahan				
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Teridentifikasinya permukiman dan perumahan yang berpotensi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	1 dokumen	10.000.000	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Teridentifikasinya lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1 dokumen	120.000.000	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang	Terkumpulnya data rumah korban bencana yang belum	1 dokumen	10.000.000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Belum Tertangani	tertangani			
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terkumpulnya data tingkat kerusakan rumah akibat bencana	1 dokumen	10.000.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terverifikasinya data penerima rumah bagi korban bencana atau terkena relokasi program kabupaten	1 dokumen	10.000.000	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat	1 kali	5.000.000	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya sosialisasi mekanisme pergantian hak atas tanah dan bangunan	1 kali	5.000.000	
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya sosialisasi pengembangan rumah baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	1 kali	5.000.000	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Terlaksananya pembentukan dan pelatihan fasilitator pendamping	1 kali	10.000.000	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya rebug warga penentuan calon penerima rumah bagi korban bencana	1 kali	5.000.000	
	Rebug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya koordinasi penyepakatan penerima dan jenis layanan	1 kali	5.000.000	
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Terlaksananya sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat	1 kali	5.000.000	
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembagian rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 kali	5.000.000	
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya tertib administrasi serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	1 kali	5.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan rumah susun	4 kali	15.000.000	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan rumah khusus	4 kali	15.000.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen secara elektronik	10 izin	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengembangan perumahan	10 kali	100.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya koordinasi dan	5 kali	10.000.000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	sinkronisasi penerbitan SKBG			
Pembangunan Prasarana Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 km	79.071.376.690	
		2. Panjang Jalan yang dilebarkan 5,5 m	6 km		
		3. Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan kecepatannya 40 km/jam	2 ruas		
		4. Jumlah jembatan yang dilebarkan 5,5 m	7 paket		
		5. Panjang jalan kabupaten kondisi baik	772,44 km		
		6. Jumlah Jembatan kabupaten kondisi baik	364 jembatan		
		7. Panjang drainase kabupaten kondisi baik	280,13 km		
		8. Panjang trotoar kabupaten kondisi baik	60,62 km		
		9. Panjang dinding penahan (talud) jalan kondisi baik	76,66 %		
		10. Jumlah jembatan yang dibangun/ditingkatkan	13 paket		
		11. Panjang drainase jalan yang dibangun /ditingkatkan	2,5 km		
		12. Panjang trotoar yang dibangun/ditingkatkan	2 km		
		13. Panjang tanggul yang dibangun/ditingkatkan	1 km		
Pengembangan Jaringan Air Bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa terbangun SPAM	9 Desa	4.457.922.000	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1. Jumlah BP SPAM terbina	40 BP SPAM	10.381.698.481	
Pengembangan sistem jaringan sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah yang tersedia	50 buah	200.000.000	
		Jumlah data pemetaan Daerah Irigasi yang akurat tentang Jaringan Irigasi	178 D.I	107.200.000	
		Jumlah data studi potensi pengembangan Jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) yang tersedia	8 Lokasi	180.000.000	
		Jumlah data Daerah Irigasi yang di laksanakan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	11 D.I	257.500.000	
		Jumlah Dokumen perencanaan Daerah Irigasi	64 Dokumen	662.474.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Airnya yang terpelihara	7 pintu air	300.000.000	
	Pembangunan Infrastruktur untuk	Meningkatnya debit air	3 Mata Air		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air		1.621.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah tanggul percontohan saluran terbangun	27 D.I	5.341.629.000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi peningkatan pengelola irigasi dan SDA	15 kali rapat	150.000.000	
		Jumlah rapat koordinasi forum koordinasi daerah irigasi	6 kali rapat	100.000.000	
		Jumlah dokumen AKNPI dan Penyediaan Air yang tersusun	30 Dokumen (30 D.I.) Dokumen	120.000.000	
		Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang di OP	6 kali rapat	95.400.000	
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomtek pemanfaat SDA	60 Lokasi	19.000.000	
Pengembangan jaringan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan jaringan irigasi permukaan	1. Cakupan akses sawah beririgasi	23512,8 ha	12.709.968.472	
		2. Jumlah bangunan irigasi yang dibangun	887 unit		
		3. Penyusunan Studi dan Perencanaan untuk pembangunan irigasi dan layanan SDA	2 dokumen		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		4. Pembangunan embung	5 embung		
	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	1. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhab	328 ha	3.958.402.000	
		2. Jumlah D.I yang direncanakan pembangunan	9 D.I		
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Luas daerah irigasi yang terpelihara	1.873 Ha	1.350.000.000	
		Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	604.153 m	6.302.000.000	
		Jumlah bangunan irigasi kondisi baik	702 unit		
		Jumlah D.I yang dibangun bangunan ukur	14 D.I		
	Operasi unit pengelola irigasi (THL)	Jumlah D.I yang dioptimalkan pengelolaannya	21 D.I	750.000.000	
	Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi (RTT dan data debit)	jumlah dokumen pedoman pola tanam	1 dokumen (21 kec)	200.000.000	
Pembuatan zona-zona bencana alam	Program Penanggulangan Bencana				
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penyebarluasan informasi penanggulangan	10 kali	152,691,200	
		Jumlah Rakor kasi kesra dan trantib			
		Jumlah rambu evakuasi	50 buah		
		bencana Jumlah sosialisasi	6 kali		
		Jumlah studi komparasi kasi trantib dan kesra	1 kali		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
Mitigasi Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB yang Disusun	2 dokumen	250,000,000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan desa bersaudara	2 pasang	1,368,888,000	
		Jumlah Pembentukan Destana	5 Desa		
		Jumlah pengembangan desa bersaudara	33 pasang		
		Jumlah peserta fasilitasi sosek	50 orang		
		Jumlah peserta latihan dan gladi evakuasi (gladilapangan)	200 orang		
		Jumlah peserta latihan dangladi evakuasi (gladi posko)	80 orang		
		Jumlah peserta latihan dangladi evakuasi (pelantikan)	50 orang		
		Jumlah peserta pelatihan PB	100 orang		
		Jumlah Peserta simulasi darurat pelajar	200 orang		
		Jumlah Peserta simulasi PRB untuk warga Huntap	50 orang		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah LEWS	5 Unit	935,408,800	
		Jumlah Medsos	5 Medsos		
		Jumlah sistem	1 sistem		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		informasikebencanaan			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah APD	60 set	700,000,000	
		Jumlah peralatan PB (antenarepeater)	1 set		
		Jumlah peralatan PB (gergajimesin)	2 unit		
		Jumlah peralatan PB (kabelrepeater)	1 set		
		Jumlah peralatan PB(peralatan perbengkelan)	1 set		
		Jumlah peralatan PB (pompaair)	1 set		
		Jumlah peralatan PB(repeater portable)	1 set		
		Jumlah peralatan PB (selangpompa air)	1 set		
		Jumlah peralatan PB(timbangan duduk))	1 unit		
		Jumlah peralatan PB (verticalrescue)	1 set		
	Ketentraman,Ketertiban danPenanggulangan Bencana Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Bidang Tanah	10 bidang	2,330,962,000	
		Jumlah Dokumen PDNA dan ITUPASNA	1 dokumen		
		Jumlah peserta pelatihan PDNA dan JITUPASNA Vetiver System untuk penanganan longsor	40 orang 8 lokasi		
	Pengembangan KapasitasTim	Frekuensi pembinaan ASN dan	60 orang	60,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Reaksi Cepat (TRC)Bencana Kabupaten/Kota	jumlah ASN yang dibina			
		Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan (pakaian PDH / PDL / olahraga)	60 stel		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi DSP dan DTT	2 kegiatan	508,284,000	
		Jumlah Hari Piket TRC	365 hari		
		Jumlah Pengerahan TRC	1350 orang		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah hari piket Jumlah	365 hari	1,310,000,000	
		Pengelola Penanggulangan Bencana	25 orang		
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jml Dropping Air	500 tangki	1,290,000,000	
		Jumlah Distribusi Logistik	100 kali		
		Jumlah paket logistik	3 paket		
		Jumlah Pengambilan logistik	5 kali		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Chainsaw)	8 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Gas Apar)	6 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Genset)	7 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Lampu sorot)	4 unit		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Peralatan Dapur)	1 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Pompa Air)	4 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Tandu)	1 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (Velbed)	1 unit		
		Jumlah Peralatan Kebencanaan (WaterTreatment)	1 unit		
		Jumlah Proposal	20 proposal		
		Jumlah Rapat Koordinasi	2 kali		
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang Disusun (SK, Perbup, Perda)	1 dokumen	10,000,000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan (Penilaian IKD, Tindak Lanjut RAD PRB, Monev Perbup 18/2016)	3 kali	130,000,000	
		Jumlah Rakor PRB (sinergitas multi sektor penanggulangan bencana)	5 kali		
		jumlah tim pengarah Penanggulangan Bencana	22 orang		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga (MOU, MOA)	1 dokumen	10,000,000	
Gladi Penanganan Bencana kepada masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Kebakaran				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	6 Lokasi	194,595,000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah THL Pemadam Kebakaran tersedia	249 orang	15,000,000,000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Frekuensi pelaksanaan Pemadaman Kebakaran	100 kali	768,000,000	
Studi Cagar budaya	Program Pengembangan Kebudayaan				
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Juru Pelihara yang mendapat pembinaan	90 orang	1,146,876,600	
		Jumlah BCB yang dipelihara	949 BCB		
		Jumlah peserta edukasi berbasis budaya	80 orang		
		Jumlah peserta kemah Budaya	250 orang		
		Jumlah peserta lomba karya ilmiah	80 orang		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah festival	4 festival	3,610,000,000	
		Jumlah kesenian yang	19 Kesenian		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		didokumentasikan			
		Jumlah kesenian yang dikirim	6 kelompok		
		Jumlah penerima bantuan	0 lembaga		
		Jumlah Pertunjukan	10 pertunjukan		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Kelompok Adat yangdibina	21 Kelompok	967,327,700	
		Jumlah Naskah Jawa dan Geguritan yang dihasilkan	20 Naskah		
		Jumlah OPK WBTB	3 Kelompok		
		Jumlah Permainan Tradisional yang dilestarikan	15 Jenis		
		Jumlah peserta lawatan sejarah	90 orang		
		Jumlah peserta penghayat kepercayaan	11 organisasi		
		Jumlah Tosan aji yang dijamas dan dipamerkan	152 buah		
		Jumlah upacara tradisi yang difasilitasi	21 upacara		
Pengembangan Sarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan pengembangan rumah sakit	2 paket	1,746,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas	2 paket	500,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya			
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	594,000,000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	5 paket	71,832,793,204	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan alat kesehatan	1 paket	3,630,000,000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah pemeliharaan Alat	1 paket	181,500,000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan perencanaan ,pengusulan, monev dan pembinaan obat di UPT	100 %	13,114,483,314	
		Persentase distribusi obat dan E logistik di UPT	100 %		
		Persentase fasilitasi manajemen pengelolaan obat di UPT	100 %		
		Persentase IRT yang Diawasi Persentase ketersediaan obat dan buffer stock (DAK)	100 %		
		Persentase ketersediaan obat dan buffer stock (DBHCHT)	100 %		
		Persentase lokasi pembinaan pengawasan obat dan makanan	100 %		
		Persentase penjamah makanan yang meningkat pengetahuannya	100 %		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	100 %	14,405,158,084	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	29 puskesmas	800,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada penderita	29 puskesmas	600,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		hipertensi sesuai standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus sesuai standar	29 puskesmas	600,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis sesuai standar	29 puskesmas	500,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Risiko terinfeksi hiv sesuai standar	29 puskesmas	1.000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizikurang/buruk dilayani	600 balita	3,394,720,000	
		Jumlah ibu hamil diperiksa HB	1000 ibu hamil		
		Jumlah ibu hamil KEK dilayani	700 ibu hamil KEK		
		Jumlah keluarga memahami dan disurvei kadarzi	70 %		
		Jumlah monitoring garam beryodium	2 kali		
		Jumlah WUS Ratri diperiksa HB	1000 ratri		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kelompok/klub olahraga yang dibina	40 kelompok/klub	60,000,000	
		Persentase pengukuran kebugaran calon jemaah haji	70 %		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa melaksanakan STBM	17 desa	400,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Jumlah Desa ODF/ Stop buang Air Besar Sembarangan	372 desa		
		Jumlah TPA yang diintervensi	2 TPA		
		Jumlah TPS yang diintervensi	5 TPS		
		Persentase penduduk dengan akses air bersih			
		Persentase pengelolaan limbah cair rumah tangga memenuhi syarat	80 %		
		Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat	80 %		
		Persentase Rumah Tanggasehat	80 %		
		Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	80 %		
		Persentase TTU memenuhi syarat	74 %		
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan UKM rujukan mendukung preventif dan promotive kesehatan	100 %	4,856,304,000	
		Persentase ketersediaan media dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan	75 %		
		Persentase UKBM yang terbentuk	50 %		
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah puskesmas mengelola surveilans kesehatan	29 puskesmas	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase desa siaga sehat jiwa yang terbentuk	70 %	1,000,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penanganan kasus DBD	80 %	2,420,000,000	
		Cakupan penanganan kasus	80 %		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		zoonosis			
		Cakupan penanganan malaria	80 %		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Presentase pembayaran klaim Jampersal Yang Benar	100 %	72,436,726,000	
		Presentase pembayaran Klaim Masyarakat Miskin (Maskin) yang benar	100 %		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Presentase layanan RS Bukit Menoreh	100 %	24,400,000,000	
		Presentase layanan RS Candi Umbul	100 %		
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah hibah pmi	1 paket	1,400,000,000	
		Jumlah parameter yang diperiksa	142 parameter		
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi	29 puskesmas	1,713,978,000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan mutu pelayanan puskesmas	100 %	6,017,433,700	
Pengembangan Sarana Olahraga dan taman rekreasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Peserta yang terampil	5 orang	100,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	berwirausaha			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda KaderK abupaten/Kota	Jumlah Peserta Fasilitasi Kegiatan Pramuka	200 orang	100,000,000	
		jumlah Peserta Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Provinsi	42 orang		
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program StrategisKepemudaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	300 orang	44,500,000	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta Lomba Kepemudaan	84 orang		
		Jumlah Peserta yang lolos Seleksi Pemuda berprestasi	12 orang		
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris	126 orang	570,000,000	
		Jumlah Peserta Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	160 orang		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan	jumlah hibah organisasi	1 organisasi	1,050,000,000	

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kepemudaan yang terfasilitasi			
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta RakorKepemudaan	42 orang	530,000,000	
		Jumlah Peserta Upacara Hari Besar Nasional	200 orang		
		Jumlah Peserta yang memahami Manajemen Organisasi Masyarakat Pemuda	60 orang		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi	600 orang	16,855,000,000	
		Jumlah dokumen lingkungan dan ANDALALIN yang tersusun	2 dokumen		
		Jumlah Pengadaan Alat Olahraga	200 buah		
		Jumlah Pengadaan Perlengkapan GOR	1 paket/set		
		Jumlah Stadion yang dipelihara	1 buah		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi Jumlah Atlet yang dikirim	210 orang		
		Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya	600 orang		
		Jumlah atlit yang dikembangkan sesuai dengan potensinya	750 orang		
		Jumlah Kegiatan Olahraga	17 kegiatan		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah hibah organisasi yang terfasilitasi	1 organisasi	1,250,000,000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta Olahraga Rekreasi	2500 orang	150,000,000	
Pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan sistem penyuluhan				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan pembenihan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan	12 kelompok	1,200,000,000	
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam	10 lokasi/kelompok		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan			
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan	60 orang	10,000,000	
		Jumlah yang terfasilitasi sertifikat CPIB dan CBIB padayang terfasilitasi (RTP/Kelompok)	14 RTP/kelompok		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok)	4 kelompok		
		Jumlah kelompok perikanan penerima hibah bansos uang	0 kelompok		
		jumlah kemitraan usaha yang terbentuk	3 MOU		
		Jumlah pokdakan mina padi yang terfasilitasi	10 kelompok		
		Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan	10 kelompok		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Demplot UPR secara terpadu	6 lokasi/kelompok	60,000,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong	0 dokumen	500,000,000	
		Jumlah	2		

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	paket/kelompok		
		Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasarikan bojong	0 paket		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikanBBI	4000000 ekor	328,000,000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan	1 paket	70,000,000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket)	19 paket/kelompok	1,010,430,000	
Pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			140,000,000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi ijin usaha perikanan	20 ijin usaha		
		Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan	21 kelompok		
		Pemantauan peredaran ikan konsumsi	21lokasi/kecamatan		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				

Program Utama Dalam Indikasi Program RTRW	Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Keterangan	Anggaran	Lokasi
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang)	200 orang	125.000.000	
		Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit)	3 unit	500,000,000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota				
	Peningkatan Ketersediaan dan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta Gemarikan (orang)	3150 orang		
		Jumlah promosi/ jaringan pemasaran produksi perikanan	4 event/kegiatan	450,000,000	
		Sosialisasi Forikan Kecamatan	4 event/kegiatan		
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi edukasi perikanan (orang)	10.000 orang		
		Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan	150 orang		
		Sarpras pemasaran hasil perikanan	2 Kelompok		

Sumber: Hasil Olahan, 2021

5.3 Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, telah diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, terdapat 15 usulan program/kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Program/kegiatan tersebut dipastikan akan berdampak pada pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang sehingga diperlukan dukungan pemerintah Kabupaten untuk memastikan integrasi program/kegiatan ke dalam pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Magelang yang saat ini masuk pada tahap revisi RTRW.

Tabel 5.2.
Kesesuaian RTRW dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Magelang

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Rencana pembangun sudah sesuai dengan RTRW Pasal 15 berupa kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Pembangunan jalan tol ruas Bawen – Yogyakarta sudah sesuai dalam RTRW Pasal 51 dan indikasi program RTRW, namun detail trasenya akan diakomodir dalam revisi RTRW
3	Pembangunan Jalan Magelang -Kaliangkrik B.ts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW, berupa pengembangan jalan strategis Magelang - Wonosobo
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Pembangunan ruas jalan ini sudah sesuai dengan lampiran II RTRW berupa rencana pengembangan jaringan jalan kabupaten
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
				peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana peningkatan infrastruktur sudah sesuai dengan indikasi program dalam RTRW berupa perwujudan kawasan strategis sosial budaya di Borobudur, secara detail akan dimasukkan dalam revisi RTRW
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	Rencana penyediaan TPST sudah sesuai dengan RTRW berupa pembangunan pengolahan sampah di Kabupaten Magelang, secara detail kegiatan ini akan dimasukkan dalam revisi RTRW
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan TPA/TPST Regional sudah sesuai dengan RTRW dan lampiran RTRW berupa pembuatan rencana pengolahan sampah regional
9	Penataan akses poros Mendut-Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/ Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Rencana penataan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ESTIMASI BIAYA (MILYAR)	SUMBER DANA	KESESUAIAN DENGAN RTRW
				peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan lampiran indikasi program RTRW yaitu perwujudan kawasan peruntukan pariwisata berupa peningkatan fasilitas penunjang obyek daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 58 yaitu Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya berupa fasilitas ekonomi, berupa pembangunan pasar tradisional dan modern skala wilayah di lokasi strategis kawasan perkotaan PKL
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/ Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RTRW Pasal 37 yaitu Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata berupa pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yang ramah lingkungan dimana Taman Rekreasi Mendut masuk dalam pariwisata buatan
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Rencana pembangunan sudah sesuai dengan RTRW Pasal 18 yaitu salah satu Strategi pengembangan fasilitas pendidikan berupa meningkatkan pelayanan fasilitas pendidikan menengah secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan

Sumber: Hasil Olahan, 2021

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

6.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2022

Uraian	Proyeksi Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH	2.502.177.507.413
Pendapatan Asli Daerah	352.388.120.890
Pajak Daerah	120.827.282.454
Retribusi Daerah	24.640.375.633
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	178.253.241.053
PENDAPATAN TRANSFER	1.999.817.701.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.587.601.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	178.230.100.000
Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	149.554.500.000
Pendapatan Hibah	149.554.500.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
BELANJA DAERAH	2.658.465.494.940
Belanja Operasi	1.709.228.848.814
Belanja Pegawai	1.071.778.726.323
Belanja Barang dan Jasa	494.413.609.326
Belanja bunga	
Belanja subsidi	
Belanja Hibah	135.790.912.165
Belanja bantuan Sosial	7.245.601.000
Belanja Modal	199.474.134.446
Belanja Tanah	8.807.326.000
Belanja Peralatan dan Mesin	77.634.234.178
Belanja Bangunan dan gedung	48.323.227.512
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.182.533.565
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.526.813.191
Belanja Tidak Terduga	88.023.558.387
Belanja Tidak Terduga	88.023.558.387
Belanja Transfer	661.738.953.293
Belanja Bagi Hasil	14.745.590.000
Belanja Bantuan Keuangan	646.993.363.293
Penerimaan Pembiayaan daerah	181.287.987.527
Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.000.000.000
Pembiayaan neto	156.287.987.527

Sumber : BPPKAD Kab. Magelang Tahun 2021

6.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut.

6.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (PKBM).

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan

Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS.

- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan.
- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan Sumber Daya Air
Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air.

- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum.
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.
- e. program pengembangan permukiman;
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman.
- f. program penataan bangunan gedung;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung.
- g. program penataan bangunan dan lingkungannya;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.
- h. program penyelenggaraan jalan;
Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan.
- i. program pengembangan jasa konstruksi;
Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi.

- j. program penyelenggaraan penataan ruang.

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pengembangan Perumahan;

Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.

- b. Program Kawasan Permukiman;

Program ini diarahkan pada Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan PSU perumahan.

- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penertiban yang dilaksanakan.

- b. program penanggulangan bencana;
Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.
- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak

terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

b. Program penempatan tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

c. Program hubungan industrial;

Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.

b. Program perlindungan perempuan;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

- c. Program pemenuhan hak anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.
- d. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.
- b. Program penanganan kerawanan pangan;
Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.
- c. Program pengawasan keamanan pangan.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanahan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.
- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air.

- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan.
- f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi.
- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.
- h. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.
- i. program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP.
- b. program pencatatan sipil;
Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mendapau indikator persentase penerbitan akta kelahiran.
- c. program pengelolaan informasi administasi kependudukan;
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penataan desa;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan.
- b. Program peningkatan kerjasama desa;
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.
- c. Program administrasi pemerintahan desa;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengendalian penduduk;
Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.
- b. program pembinaan keluarga berencana;

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.

- c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan komunikasi publik;

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media massa.

- b. program aplikasi informatika.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain dan pengelolaan e-government dengan indikator capaian Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi dan Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan

- koperasi.
- b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.
 - c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerjasama antas koperasi dan lembaga lain.
 - d. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.
 - e. Program pengembangan UMKM.
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase peningkatan omset usaha mikro.

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;
Program ini diarahkan pada pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.
- b. program promosi penanaman modal;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal.
- c. program pelayanan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perijinan.
- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.
- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan

Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.

- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.
- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

14. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

15. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan kebudayaan;
Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.
- b. program pengembangan kesenian tradisional;
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.
- c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah,

pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan perikanan budidaya;
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.
- b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.
- c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.
- b. Program pemasaran pariwisata;
program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
- b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
- c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
- d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- e. program perizinan usaha pertanian;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator capaian cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.
- f. program penyuluhan pertanian.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.
- c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.
- d. program pengembangan ekspor;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.
- e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi.

C. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata

pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

D. Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan keuangan daerah;

Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.

b. program pengelolaan barang milik daerah;

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.

c. program pengelolaan pendapatan daerah.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

3. Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, persentase keterisian jabatan, persentase ASN yang lulus diklat, dan persentase evaluasi kinerja ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

E. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penyelenggaraan pengawasan;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan.
- b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen SPIP PD yang memadai.

F. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
- b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
- c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
- d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.

- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.

- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.

Di samping program prioritas, terdapat program untuk mendukung operasional perangkat daerah yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah dan persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.

Secara keseluruhan rekapitulasi anggaran rencana program prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Rencana Program Prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.298.916.420.480
Pendidikan	731.022.351.091
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	506.298.959.431
Program Pengelolaan Pendidikan	193.339.751.660
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.383.640.000
Kesehatan	424.436.417.370
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	298.196.659.958
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	116.069.600.945

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.516.740.952
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	267.502.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.385.913.515
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.118.512.497
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.590.805.517
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	4.609.991.900
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.002.323.605
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	39.999.715
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.904.557.450
Program Pengembangan Permukiman	202.499.855
Program Penataan Bangunan Gedung	2.530.697.110
Program Penyelenggaraan Jalan	54.894.638.990
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	69.999.620
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	272.998.735
Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.938.179.413
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.777.336.673
Program Pengembangan Perumahan	77.898.310
Program Kawasan Permukiman	128.500.000
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.899.183.095
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	55.261.335
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	27.788.680.875
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.361.030.240
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.668.972.000
Program Penanggulangan Bencana	1.800.024.635
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.958.654.000
Sosial	9.612.279.234
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.389.099.634
Program Pemberdayaan Sosial	130.000.000
Program Rehabilitasi Sosial	2.438.179.600
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	411.457.000
Program Penanganan Bencana	243.543.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	152.096.420.033
Tenaga Kerja	8.580.505.703
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.727.901.248
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	718.201.465
Program Penempatan Tenaga Kerja	102.697.600
Program Hubungan Industrial	31.705.390
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	754.962.170
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	137.867.500
Program Perlindungan Perempuan	225.915.000
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	165.264.670
Program Perlindungan Khusus Anak	225.915.000

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
Pangan	982.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	872.000.000
Program Penanganan Kerawanan Pangan	28.000.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	82.000.000
Pertanahan	49.999.090
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	49.999.090
Lingkungan Hidup	25.789.119.101
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.079.068.101
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	225.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	404.000.000
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.347.000.000
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	440.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.000.000
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	103.000.000
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	75.000.000
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	24.000.000
Program Pengelolaan Persampahan	11.032.051.000
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.906.552.917
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.209.128.257
Program Pendaftaran Penduduk	685.501.500
Program Pencatatan Sipil	500.856.520
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	511.066.640
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.276.956.885
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.371.626.912
Program Peningkatan Kerjasama Desa	29.999.785
Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.309.817.693
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.565.512.495
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.643.533.500
Program Pengendalian Penduduk	121.641.500
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	14.449.892.000
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	72.000.000
Perhubungan	28.125.495.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.309.708.000
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	21.815.787.000
Komunikasi dan Informatika	10.803.542.277
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.481.244.872
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.172.365.255
Program Aplikasi Informatika	4.149.932.150
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9.788.035.869
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.028.058.085
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.773.209

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	210.304.000
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	23.848.806
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	475.146.265
Program Pengembangan UMKM	14.905.504
Penanaman Modal	4.201.114.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.437.653.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40.000.000
Program Promosi Penanaman Modal	10.000.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	303.297.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26.250.000
Kepemudaan dan Olahraga	21.998.314.355
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.534.708.175
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	656.724.780
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.606.881.400
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000
Statistik	115.000.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	115.000.000
Persandian	475.487.250
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	475.487.250
Kebudayaan	1.495.135.000
Program Pengembangan Kebudayaan	125.000.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.135.900.000
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	234.235.000
Perpustakaan	5.004.210.916
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.049.094.576
Program Pembinaan Perpustakaan	955.116.340
Kearsipan	106.456.000
Program Pengelolaan Arsip	106.456.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	87.702.513.627
Kelautan dan Perikanan	7.967.216.413
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.178.545.413
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	542.612.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	246.059.000
Pariwisata	9.518.086.393
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.178.276.316
Program Pemasaran Pariwisata	238.488.061
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	15.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86.322.016
Pertanian	61.085.049.174
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.239.254.500
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.304.079.561

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.253.505.000
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	382.480.700
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	133.000.000
Program Perizinan Usaha Pertanian	41.000.000
Program Penyuluhan Pertanian	731.729.413
Perdagangan	6.477.348.713
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.227.000
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5.962.200
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.188.747.672
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	77.508.000
Program Pengembangan Ekspor	11.924.400
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	178.979.441
Perindustrian	2.642.888.530
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.642.888.530
Transmigrasi	11.924.404
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	11.924.404
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	97.780.946.041
Sekretariat Daerah	51.286.535.041
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.022.664.921
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.735.483.610
Program Perekonomian dan Pembangunan	6.528.386.510
Sekretariat DPRD	46.494.411.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.153.581.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	10.340.830.000
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	957.547.236.030
Perencanaan	6.959.397.691
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.417.840.085
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	607.889.251
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	933.668.355
Keuangan	783.035.797.619
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.449.005.994
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	754.355.948.279
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.215.445.122
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.465.398.224
Kepegawaian	167.107.932.720
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160.221.311.450
Program Kepegawaian Daerah	6.886.621.270
Penelitian dan Pengembangan	444.108.000
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	444.108.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.519.575.869

Urusan/Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif (Rp)
Inspektorat Daerah	5.519.575.869
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.120.423.336
Program Penyelenggaraan Pengawasan	171.219.353
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	227.933.180
UNSUR KEWILAYAHAN	53.871.776.960
Kecamatan	53.871.776.960
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	45.599.581.513
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	656.778.270
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.823.310.735
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	563.948.010
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.173.158.432
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.030.605.900
Kesatuan Bangsa dan Politik	5.030.605.900
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.897.043.276
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	184.656.494
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.696.206.130
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85.900.000
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	166.800.000
Jumlah	2.658.465.494.940

Sumber : Bappeda & Litbangda Kab. Magelang, 2021

Secara rinci, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagai berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2022. Target yang dicantumkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini beberapa telah terkoreksi sesuai dengan target yang terdapat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi *covid-19* berdampak pada *refocussing* anggaran tahun 2020 sehingga menyebabkan tidak tercapainya target RPJMD untuk indikator makro.

7.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak	angka (0-100)	70,64	Sekretariat Daerah
2	Inflasi	Persentase kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu	persen	2,0-4,0	Sekretariat Daerah
3	Pengeluaran per kapita riil	Pengeluaran per kapita riil/konstan dengan tahun dasar	ribu	9.587,62	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang disesuaikan	2012=100 yang kemudian disesuaikan dengan Paritas Daya Beli (PPP)	rupiah		
4	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	persen	11,27-10,52	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pembangunan Gender	IPM Perempuan dibagi dengan IPM Laki-laki dikali 100	angka (0-100)	92,40	Sekretariat Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) dikali 100 dibagi dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t-1 (nominal)) dikurangi 100	persen	3,4-4,4	Sekretariat Daerah
7	PDRB Per Kapita	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk	juta rupiah	27,78	Sekretariat Daerah
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	(Persentase ketercapaian IKLH+Indeks pembangunan infrastruktur wilayah)/2	persen	71,91	Sekretariat Daerah
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Th. 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	-	68,96 (Baik)	Sekretariat Daerah

Di samping indikator tujuan pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja utama daerah Kabupaten Magelang, tabel berikut ini menyajikan indikator sasaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

Tabel 7.2
Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.	tahun	8,00	Disdikbud
2	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dimana dalam penghitungan IPM dengan metode baru, umur yang digunakan adalah 7 (tujuh) tahun	tahun	12,60	Disdikbud
3	Persentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	$((\text{Jumlah SD berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SD}) \times 100\% + (\text{jumlah SMP berakreditasi minimal B} / \text{Jumlah SMP}) \times 100\%) / 2$	persen	94,79	Disdikbud
4	Angka Harapan Hidup	Rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang dicapai oleh sekelompok penduduk (BPS)	tahun	73,97	Dinkes
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	(Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + Cakupan Penyeleng garan Layanan Perhubungan + Cakupan hunian layak dan berkualitas)/3	persen	72,48	DPUPR
6	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	(Cakupan pelayanan trantibumlinmas+Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana+Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat)/3	persen	84,99	Satpol PP dan PK, Kesbangpol, BPBD

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks yang tersusun dari komponen sebagai berikut: Ipar=Indek keterwakilan perempuan di parlemen; IDM=Indek pengambilan keputusan, dan Linc-dist=indek distribusi pendapatan	angka (0-100)	69,93	Dinsos PPKB PPPA
8	Persentase penurunan PMKS	(Jumlah PMKS tahun n - jumlah PMKS tahun 2018) x 100%	persen	0,58	Dinsos PPKB PPPA
9	Kategori Kabupaten Layak Anak	Mengacu Permen PPPA RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) „Indikator Pemenuhan Hak Anak	Kategori	nindya	Dinsos PPKB PPPA
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 persen	persen	3,93-3,87	Disperinnaker
11	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Total nilai tambah dari sektor industri pengolahan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	8.631	Disperinnaker
12	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil penghitungan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	angka (0-100)	81,30	Distan dan Pangan
13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Total nilai tambah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	8.124,10	Distan dan Pangan, Dispeterikan
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219) Berdasar pembobotan antara lain: Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (IKTL) sesuai surat dirjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Nomor S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020	angka (0-100)	71,34	DLH

No	Indikator Sasaran Daerah	Rumusan Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Indeks Desa Membangun	Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa ($IDM = 1/3 (IKS+IKE+IKL)$)	angka (0-1)	0,70	Dispermades
16	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	angka (0-5)	3,0-3,20	Diskominfo
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	Total nilai tambah dari sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	5.547,99	Disdagkop dan UKM
18	Nilai PDRB sektor pariwisata	Total nilai tambah dari subsektor gabungan dari sektor industri pengolahan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa-jasa (termasuk upah tenaga kerja)	miliar rupiah	1.737,10	Disparpora
19	Pertumbuhan Investasi	$((\text{Investasi tahun } n - \text{Investasi tahun } n-1) / \text{Investasi tahun } n-1) \times 100$	persen	10	DPMPTSP
20	Nilai AKIP	Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	-	61,04 (Baik)	Setda
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	-	84,5 (Baik)	Setda
22	Opini BPK	Opini BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang	-	WTP	BPPKAD
23	Indeks Sistem Merit	Peraturan KASN No 9 Th 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah	angka (0-1)	0,60	BKPPD

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
1	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)	$(APK\ PAUD + APK\ SD/MI/Paket\ A + APK\ SMP/MTS/Paket\ B)/3$	angka (0-100)	88,64	91,44
2	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Murni (APM)	$(APM\ SD/MI/Paket\ A + APM\ SMP/MTS/Paket\ B)/2$	angka (0-100)	80,97	82,34
3	DISDIKBUD	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	$(APS\ PAUD + APS\ SD/MI/Paket\ A + APS\ SMP/MTS/Paket\ B)/3$	Angka (0-100)	89,06	90,00
4	DISDIKBUD	Angka Kelulusan	$(Angka\ Kelulusan\ SD + Angka\ kelulusan\ SMP)/2$	angka (0-100)	99,96	100
5	DISDIKBUD	Cakupan pengelolaan kebudayaan	$((Persentase\ Benda\ Situs\ dan\ Kawasan\ cagar\ Budaya\ yang\ dilestarikan) + (Persentase\ Karya\ Budaya\ yang\ Terlayani) + (Persentase\ Kelompok\ Seni\ Budaya\ yang\ Aktif))/3$	persen	33,69	34,60
6	DINKES	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	$(Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ terakreditasi)/(Jumlah\ FKTP/FKTL/Lab\ yang\ ada) \times 100\ %$	persen	35	45

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
7	DINKES	Angka kesakitan	Jumlah penderita baru yang ditemukan pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun n	persen	40,55	39,93
8	DINKES	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun	jumlah kasus	6	6
9	DINKES	Angka Kematian Bayi (AKB)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	5,68	5,66
10	DINKES	Angka Kematian Balita (AKABa)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	6,66	6,64
11	DINKES	Angka Kematian Neonatal (AKN)	(Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu / Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu) x 1000 KH	per 1000 KH	3,96	3,94
12	DINKES	Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	(Jumlah puskesmas/RS yang berkualitas) / (jumlah puskesmas/RS yang ada) x 100 %	persen	70	80
13	RSUD MUNTILAN	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi RS	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
14	DPUPR	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	(Cakupan Penyelenggaraan jalan + cakupan pengelolaan SDA + Cakupan penataan bangunan gedung + Cakupan layanan air minum + Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik+ Cakupan layanan drainase lingkungan + cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan + Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang)/8	persen	63,30	93,42
15	DPRKP	Cakupan hunian layak dan berkualitas	((Persentase penanganan RTLH + persentase penanganan Kawasan permukiman kumuh) /2	persen	94,78	95,73
16	SATPOL PP PK	Cakupan penegakan hukum	((jml penindakan/jml pelanggaran) x 100% + (jml penertiban/(jml target perencanaan penertiban + jml aduan)) x 100%)/2)	persen	86,87	89,58

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
17	BPBD	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	$((\text{jml penduduk di Kawasan rawan bencana yang mendapat informasi bencana} / \text{jml penduduk di kawasan rawan bencana}) \times 100\%) + ((\text{jml desa tangguh bencana} / \text{jml desa rawan bencana}) \times 100\%) + ((\text{jml penanganan tanggap darurat yg dilakukan} / \text{jml sasaran dampak bencana yg harus dilakukan tanggap bencana}) \times 100\%) + ((\text{jml kejadian bencana yg direkomendasikan rehabilitasi dan rekonstruksi} / \text{jml kejadian bencana yg harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}) \times 100\%) / 4$	persen	100	100
18	KESBANGPOL	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	$(\text{Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Wasbang} + \text{Persentase Peningkatan Ormas Yang Aktif} + \text{Persentase Peningkatan Pemahaman}) / 3$	persen	98,50	99,50
19	KESBANGPOL	Persentase peningkatan pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	$(\text{Prosentase Realisasi Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Tahun n} / \text{Prosentase Realisasi Kegiatan Pembinaan Partai Politik dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah Tahun n-1}) \times 100\%$	persen	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
20	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan penanganan PMKS	$\{(Persentase\ PMKS\ yang\ tertangani\ +\ Persentase\ PSKS\ yang\ berperan\ dalam\ penanganan\ PMKS)/2\} \times 100\%$	persen	48,63	49,80
21	DINSOS PPKB PPPA	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	$(((((Jumlah\ perempuan\ di\ legislatif/jumlah\ jabatan\ legislatif) \times 100\% + (jumlah\ peserta\ perempuan\ yang\ dilatih\ atau\ sosialisasi/ jumlah\ sasaran\ peserta\ perempuan\ yang\ akan\ dilatih\ atau\ sosialisasi) \times 100\% + (jumlah\ OPD\ (kecamatan,\ SKPD,\ desa)\ yang\ akan\ dilatih\ PPRG/ Jumlah\ OPD\ (kecamatan,\ SKPD,\ desa)) \times 100\%))) / 3)$	persen	22,59	24,34
22	DINSOS PPKB PPPA	Rasio kekerasan	$(jumlah\ kasus\ ditangani/jumlah\ rumah\ tangga) \times 100\%$	persen	0,02	0,02
23	DINSOS PPKB PPPA	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$P_t = P_o (1+r)^t$	persen	0,93	0,89
24	DINSOS PPKB PPPA	Persentase keluarga Pra Sejahtera	$(Jumlah\ Keluarga\ Pra\ sejahtera/Jumlah\ keluarga) \times 100\%$	persen	19,07	18
25	DISPERINNAKER	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$((jumlah\ penduduk\ usia\ 15\ tahun\ ke\ atas\ yang\ bekerja\ +\ jumlah\ penduduk\ yang\ punya\ pekerjaan\ namun\ sementara\ tidak\ bekerja\ +\ jumlah\ pengangguran)/jumlah\ penduduk\ 15\ tahun\ ke\ atas) \times 100\%$	persen	74,34	74,14

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
26	DISPERINNAKER	Indeks industri yang terbina	((Jumlah industri terbina/jumlah industri) x 0.7) + ((jumlah industri terdaftar IUI/jumlah industri) x 0.3))	persen	1,1	1,3
27	DISTAN PANGAN	Stabilitas harga dan pasokan pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$	persen	93,20	93,20
28	DISTAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	(konsumsi pangan riil masyarakat/standar konsumsi pangan nasional) x 100%	persen	84,90	85,10
29	DISTAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	Jumlah seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan	persen	70,80	71,00
30	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	Persentase kenaikan produksi tanaman : Padi, jagung, cabai, bawang putih, kopi, cengkeh, kelapa dalam, salak, jeruk, kelengkeng/ jumlah komoditas (10 Komoditas) x 100%	persen	0,73	2,19
31	DISTAN PANGAN	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	Persentase kenaikan luas lahan pertanian organik (padi, kopi, kelapa, salak, empon-empon)/ Jumlah komoditas pertanian organik (5 komoditas) X 100%	persen	3,40	13,20
32	DLH	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin	persen	6,98	11,63

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
		terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, ijin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%			
33	DLH	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor K.333/menlhk/setjen/set.1/8/2020 tentang IKU KLHK tahun 2020-2024	persen	45	55
34	DLH	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi joko tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup + Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup)/4	persen	40,25	41,15
35	DISDUKCAPIL	Rasio Perekaman KTP-elektronik, Keluarga yang Ber KK dan penerbitan KIA	(Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP + Persentase penerbitan KK + persentase penerbitan KIA)/3	persen	89,65	93,67
36	DISDUKCAPIL	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	(Persentase penerbitan Akta Kelahiran+Persentase Penerbitan Akta perkawinan+Persentase Penerbitan Akta Kematian)/3	angka	81,67	96,67

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
37	DISDUKCAPIL	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	$(\text{Persentase Pengelolaan Informasi} + \text{Persentase Pemanfaatan Data}) / 2$	angka	87,5	95
38	DISPERMADES	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	$(\text{Jumlah Desa Maju, Mandiri dan Berkembang}) / \text{Jumlah Seluruh Desa} * 100\%$	persen	90,46	100
39	DISHUB	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	$(\text{Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan} + \text{Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas} + \text{Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan}) / 3$	persen	59,35	90,00
40	DISKOMINFO	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	$(\text{Jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah}) / \text{Jumlah PD} * 100\%$	persen	61,70	76,69
41	DISKOMINFO	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	$(\text{Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi}) / \text{jumlah data statistik sektoral yang tersedia} * 100\%$	persen	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
42	DISKOMINFO	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	((Jumlah informasi melalui media luar ruang yang terlaksana/jumlah informasi melalui media luar ruangan yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media publik yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui media publik yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang dilaksanakan/jumlah informasi melalui pertunjukan rakyat yang direncanakan) x 100% + (jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang dilaksanakan/jumlah pengembangan dan pemberdayaan KIM yang direncanakan) x 100% + (jumlah informasi melalui media surat kabar yang dilaksanakan /jumlah informasi melalui media surat kabar yang direncanakan) x 100%)/5	persen	100	100
43	DISKOMINFO	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	((Jumlah PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil/jumlah PD dan desa atau kelurahan) x 100% + (jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang terfasilitasi/jumlah aplikasi PD dan desa atau kelurahan yang diajukan fasilitasi) x 100 %)/2	persen	86,81	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
44	DISDAGKOP UKM	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	$((\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)) / (\text{Nilai ekspor tahun } (n-1))) \times 100 \%$	persen	1	1
45	DISDAGKOP UKM	Persentase koperasi aktif	$((\text{jumlah koperasi aktif} / \text{Jumlah total koperasi})) \times 100 \text{ persen}$	persen	80,40	81
46	DISDAGKOP UKM	Peningkatan Omzet usaha Mikro	$(\text{nilai omzet tahun } n - \text{nilai omzet tahun } (n-1)) / (\text{nilai omzet tahun } (n-1)) \times 100 \text{persen}$	persen	5	5
47	DPMPTSP	Nilai investasi PMA	Jumlah investasi yang masuk dari LN (PMA)	milyar rupiah	69.451	69.794
48	DPMPTSP	Nilai investasi PMDN	Jumlah investasi yang masuk dr DN (PMDN)	triliun rupiah	2.792	3.379
49	DPMPTSP	Survey kepuasan pelayanan perijinan	Mengacu pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	angka	88	89
50	DISPARPORA	Cakupan prestasi generasi muda	$((\text{jumlah pemuda berprestasi} / \text{jumlah pemuda peserta lomba}) \times 100) + ((\text{jumlah atlet berprestasi} / \text{jumlah atlet yang ikut kejuaraan}) \times 100) / 2$	persen	43,89	45,00

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
51	DISPARPORA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	$((\text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) * x 100) \times 0.35 + ((\text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{jumlah kunjungan wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) \times 100) \times 0.65$	persen	5	25
52	DISPARPORA	Persentase Peningkatan lama tinggal wisatawan	$((\text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan nusantara tahun ke } n - 1) \times 100) \times 0.35 + ((\text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - \text{lama tinggal wisatawan manca negara tahun ke } n - 1 / \text{lama tinggal wisatawan mancanegara tahun ke } n - 1) \times 100) \times 0.65$	persen	3,70	20,13
53	DISPUSPA	Rasio pengunjung perpustakaan di kabupaten	$(\text{Jumlah pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten} / \text{jumlah penduduk}) \times 100 \%$	persen	0,0188	0,0224

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
54	DISPUSPA	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	(Pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku / jumlah pengolah arsip) x 100 %	persen	69,23	100
55	DISPETERIKAN	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Jumlah produksi daging dalam 1 tahun	ton	16.831,6 5	51.306,17
56	DISPETERIKAN	Produksi telur	Jumlah produksi telur dalam 1 tahun	ton	17.653,1 0	105.078
57	DISPETERIKAN	Produksi susu	Jumlah produksi susu dalam 1 tahun	liter	849.646	4.249.734
58	DISPETERIKAN	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Jumlah produksi benih ikan dalam satu tahun	Ekor (x1000)	1.788.66 2	5.528.395
59	DISPETERIKAN	Produksi ikan konsumsi	Jumlah produksi ikan (konsumsi) dalam 1 tahun	ton	19.224,6 0	103.276,10
60	DISPETERIKAN	Produksi ikan hias	Jumlah produksi ikan hias dalam satu tahun	ekor	2.457.20 0	7.595.000
61	SETDA	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	(((Jumlah kebijakan yang tidak bermasalah/jumlah kebijakan yang ada (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan Bersama))+((Jumlah kebijakan yang ada/jumlah kebijakan yang seharusnya ada) x 100%)))/2	persen	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
62	SETDA	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)	((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)	-	84,25 (Baik)	85 (Baik)
63	SETDA	Capaian perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	(Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang tersusun/Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang seharusnya) x 100%	persen	90	100
64	SETWAN	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	((jumlah fasiltasi raperda yang dikeluarkan/jumlah fasilitasi propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100%) + (jumlah fasilitasi rekomendasi DPRD yang dikirim kepada bupati /jumlah fasiltasi rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan) x 100%)))/3	persen	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
65	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	$((\text{Jumlah indikator kinerja program daerah yang berpredikat sangat tinggi } (\geq 91 \text{persen}) \text{ dan tinggi (76persen-90persen) / Jumlah indikator kinerja program}) * 100\%) + (\text{jumlah program RPJMD yang dijabarkan pada RKPD pada tahun berkenaan}) / \text{jumlah program pada RPJMD tahun berkenaan}) \times 100\%)) / 2$	persen	84,71	90,29
66	BAPPEDA & LITBANGDA	Persentase implementasi rencana kelitbangan	$(\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD} / \text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}) \times 100\%$	persen	100	100
67	BPPKAD	Persentase kenaikan PAD	$((\text{PAD th-n} - \text{PAD th-n-1}) / \text{PAD th n-1}) \times 100\%$	persen	7	7
68	BPPKAD	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	$(\text{Jumlah APBD yang ditetapkan tepat waktu} / \text{jumlah APBD}) \times 100\%$	persen	100	100
69	BPPKAD	Persentase kejelasan status aset daerah	$(\text{Jumlah Aset yang jelas statusnya} / \text{Jumlah aset seluruhnya}) \times 100$ persen	persen	100	100
70	BKPPD	Indek profesionalitas ASN	$\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{Koef}(Kj) + \text{Koef}(1 - 6 \text{ SI}(\text{inex})) + \text{Koef}(1-\text{inDiscpl})$	angka (0-100)	53	64

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
71	INSPEKTORAT	Level kapabilitas APiP	Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	level	3	3
72	INSPEKTORAT	Nilai maturitas SPIP	Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP	level (0-5)	3	3
73.1	KECAMATAN BANDONGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85 (Baik)	87 (Baik)
73.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87,19 (Baik)	88,68 (Sangat Baik)
73.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85,31 (Baik)	87,95 (Baik)
73.4	KECAMATAN DUKUN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84 (Baik)	86 (Baik)
73.5	KECAMATAN GRABAG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87,19 (Baik)	90,16 (Sangat Baik)
73.6	KECAMATAN KAJORAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87,19 (Baik)	90,16 (Sangat Baik)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
73.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	80 (Baik)	80 (Baik)
73.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84,50 (Baik)	86 (Baik)
73.9	KECAMATAN MUNGKID	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87,70 (Baik)	87,90 (Baik)
73.10	KECAMATAN MUNTILAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	86,35 (Baik)	86,45 (Baik)
73.11	KECAMATAN NGABLAK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84,50 (Baik)	86 (Baik)
73.12	KECAMATAN NGLUWAR	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89,50 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
73.13	KECAMATAN PAKIS	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	90 (Sangat Baik)	95 (Sangat Baik)
73.14	KECAMATAN SALAM	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85 (Baik)	87 (Baik)
73.15	KECAMATAN SALAMAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89 (Sangat Baik)	89 (Sangat Baik)
73.16	KECAMATAN SAWANGAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84,50 (Baik)	86 (Baik)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
73.17	KECAMATAN SECANG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	89,75 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
73.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	84,50 (Baik)	86 (Baik)
73.19	KECAMATAN TEGALREJO	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang	-	87 (Baik)	90 (Sangat Baik)
73.20	KECAMATAN TEMPURAN	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	87 (Baik)	88,30 (Baik)
73.21	KECAMATAN WINDUSARI	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	(Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	-	85,75 (Baik)	86 (Baik)
74.1	KECAMATAN BANDONGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	83,33	95,23
74.2	KECAMATAN BOROBUDUR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	90	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
74.3	KECAMATAN CANDIMULYO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	96,49	100
74.4	KECAMATAN DUKUN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.5	KECAMATAN GRABAG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.6	KECAMATAN KAJORAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
74.7	KECAMATAN KALIANGKRIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	94,60	95,30
74.8	KECAMATAN MERTOYUDAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.9	KECAMATAN MUNGKID	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	90	100
74.10	KECAMATAN MUNTILAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	91	94

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
74.11	KECAMATAN NGABLAK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	95
74.12	KECAMATAN NGLUWAR	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	95	100
74.13	KECAMATAN PAKIS	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	90	100
74.14	KECAMATAN SALAM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	91,66	94,44

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
74.15	KECAMATAN SALAMAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	100	100
74.16	KECAMATAN SAWANGAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	94	100
74.17	KECAMATAN SECANG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	91,66	100
74.18	KECAMATAN SRUMBUNG	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	87,33	95,66

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
74.19	KECAMATAN TEGALREJO	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	93	95
74.20	KECAMATAN TEMPURAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	92,50	100
74.21	KECAMATAN WINDUSARI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	(Persentase desa yang tertib administrasi + Persentase kegiatan yang dikoordinasikan + Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan)/3	persen	90	100

7.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU PD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Magelang Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	angka (0-100)	70,64	Setda
2	Angka Kemiskinan	persen	11,27-10,52	Setda
3	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,40	Setda
4	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,93	Dinsos PPKB PPPA
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	Dinsos PPKB PPPA
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya	Dinsos PPKB PPPA
7	Angka Harapan Hidup	tahun	73,97	Dinkes
8	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,00	Disdikbud
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,60	Disdikbud
10	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,79	Disdikbud
11	Indeks ketahanan pangan	angka (1-100)	81,30	Distan dan Pangan
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,4-4,4	Setda
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,93-3,87	Disperinaker
14	PDRB Per Kapita	juta rupiah	27,78	Setda
15	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.587,62	Setda
16	Inflasi	persen	2,0-4,0	Setda
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	5.547,99	Disdagkop UKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
18	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	8.124,10	Distan dan Pangan; Dispeterikan
19	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	8.631	Disperinnaker
20	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.737,10	Disparpora
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
PENDIDIKAN				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	angka (1-100)	88,64	Disdikbud
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	angka (1-100)	80,97	Disdikbud
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	angka (1-100)	89,06	Disdikbud
4	Angka Kelulusan	angka (1-100)	99,96	Disdikbud
KESEHATAN				
5	Persentase Kualitas pelayanan kesehatan	persen	35	Dinkes
6	Angka kesakitan	persen	40,55	Dinkes
7	Jumlah Kematian Ibu	jumlah kasus	6	Dinkes
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka per 1000 KH	5,68	Dinkes
9	Angka Kematian Balita (AKABa)	Angka per 1000 KH	6,66	Dinkes
10	Angka Kematian Neonatal (AKN)	angka	3,96	Dinkes
11	Kualitas puskesmas dan rumah sakit	persen	70	RSU Muntilan
12	Predikat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	RSU Muntilan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
13	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	persen	63,30	DPUPR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
14	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	94,78	DPRKP
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
15	Cakupan penegakan hukum	persen	86,87	Satpol PP dan PK
16	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	persen	100	BPBD
17	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	persen	98,50	Kesbangpol
	SOSIAL			
18	Cakupan penanganan PMKS	persen	48,63	Dinsos PPKB PPPA
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
	TENAGA KERJA			
19	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	persen	74,34	Disperinnaker
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
20	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	persen	22,59	Dinsos PPKB PPPA
21	Rasio kekerasan	persen	0,02	Dinsos PPKB PPPA
	PANGAN			
22	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	persen	84,90	Distan dan Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
	LINGKUNGAN HIDUP			
23	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	persen	6,98	DLH
24	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	persen	45	DLH
25	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	persen	40,25	DLH
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
26	Rasio Perekaman KTP – elektronik, Keluarga yang Ber KK dan Penerbitan KIA	angka	89,65	Disdukcapil
27	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, Pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	angka	81,67	Disdukcapil
28	Rasio Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data	angka	87,5	Disdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
29	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	persen	90,46	Dispermades
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
30	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	0,93	Dinsos PPKB PPPA
31	Persentase keluarga Pra Sejahtera	persen	19,07	Dinsos PPKB PPPA
	PERHUBUNGAN			
32	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	persen	59,35	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
33	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	persen	100	Diskominfo
34	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	persen	86,81	Diskominfo
	KOPERASI DAN UKM			
35	Persentase koperasi aktif	persen	80,40	Disdagkop UKM
36	Peningkatan Omzet usaha Mikro	persen	5	Disdagkop UKM
	PENANAMAN MODAL			
37	Nilai investasi PMA	milyar rupiah	69.451	DPMPPTSP
38	Nilai investasi PMDN	triliun rupiah	2.792	DPMPPTSP
39	Survey kepuasan pelayanan perijinan	angka (1-100)	88	DPMPPTSP
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
40	Cakupan prestasi generasi muda	persen	43,89	Disparpora
	STATISTIK			
41	Cakupan layanan informasi bagi Desa dan PD	persen	100	Diskominfo
	PERSANDIAN			
42	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	persen	61,70	Diskominfo
	KEBUDAYAAN			
43	Cakupan pengelolaan kebudayaan	persen	33,69	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN			
44	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	persen	0,0188	Dispuspa
	KEARSIPAN			
45	Persentase pengolah arsip yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku	persen	69,23	Dispuspa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN			
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
46	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	ton	16.831,65	Dispeterikan
47	Produksi Telur	ton	17.653,10	Dispeterikan
48	Produksi susu	liter	849.646	Dispeterikan
49	Produksi perikanan budidaya (benih ikan)	Ekor (x1000)	1.788.662	Dispeterikan
50	Produksi ikan konsumsi	ton	19.224,60	Dispeterikan
51	Produksi ikan hias	ekor	2.457.200	Dispeterikan
	PARIWISATA			
52	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	5	Disparpora
53	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	3,70	Disparpora
	PERTANIAN			
54	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	%	0,73	Distan dan Pangan
55	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	%	3,40	Distan dan Pangan
	PERDAGANGAN			
56	Persentase pertumbuhan ekspor nonmigas	persen	1	Didagkop UKM
	PERINDUSTRIAN			
57	Indeks industri yang terbina	persen	1,1	Disperinnaker
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
	PERENCANAAN			
58	Persentase ketercapaian, keterukuran kinerja, dan konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	persen	84,71	Bappeda dan Litbangda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
	KEUANGAN			
59	Persentase kenaikan PAD	persen	7	BPPKAD
60	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	persen	100	BPPKAD
61	Persentase kejelasan status aset daerah	persen	100	BPPKAD
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
62	Indek profesionalitas ASN	Angka (1-100)	53	BKPPD
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
63	Persentase implementasi rencana kelitbang	persen	100	Bappeda dan Litbangda
	PENGAWASAN			
64	Level kapabilitas APIP	Level	3	Inspektorat
65	Nilai maturitas SPIP	Level (0-5)	3	Inspektorat
	FUNGSI LAINNYA			
66	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persen	100	Setda
67	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	84,25 (Baik)	Setda
68	Cakupan fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	persen	100	Setwan
69	Capaian perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan	persen	90	Setda
	C. ASPEK DAYA SAING			
70	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	71,91	Setda
71	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (0-100)	71,34	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Perangkat Daerah Koordinator
1	2	3	4	5
	(IKAx0,376)+(IKUx0,405)+(IKLx0,219)			
72	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	68,96	Setda
73	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	84,99	Satpol PP dan PK; Kesbangpol; BPBD
74	Nilai AKIP	-	61,04 (Baik)	Setda
75	Indeks tingkat kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (1-5)	3,0-3,20	Diskominfo
76	Opini BPK	-	WTP	BPPKAD
77	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,5 (Baik)	Setda
78	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,60	BKPPD
79	Pertumbuhan Investasi	persen	10	DPMPTSP
80	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	75,56	DPUPR
81	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,70	Dispermades

7.4 Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan

Pada Tabel 7.5 di bawah ini memuat seluruh indikator program prioritas dan targetnya pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PD Kabupaten Magelang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nama program, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
	Program Pengelolaan Pendidikan				
		Persentase SD dan SMP yang melaksanakan Pendidikan karakter	%	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	%	52,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase PNF Terakreditasi (PKBM)	%	77,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka melanjutkan SD/ MI dan SMP/ mts	Indeks	86,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				
		Persentase Guru Bersertifikat	Indeks	93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN				
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
		Cakupan perawatan gizi buruk	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit penyakit tidak menular	%	100	Dinas Kesehatan
		Cakupan mutu pelayanan FKTP	%	50	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonosis	%	80	Dinas Kesehatan
		Persentase balita stunting	%	37,6	Dinas Kesehatan
		Cakupan mutu pelayanan laboratorium	%	100	RSUD Muntilan
		Cakupan sumber daya manusia kesehatan	%	86	RSUD Muntilan
		Cakupan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan	%	64	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kesehatan ibu, anak, lansia, gizi	%	66	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	40	Dinas Kesehatan
		Cakupan alkes, perbekes, obat dan pembinaan SDK sesuai standar	%	90	Dinas Kesehatan
		Cakupan surveilans dan imunisasi	%	80	Dinas Kesehatan
		Cakupan mutu pelayanan FKTL	%	50	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kesehatan lingkungan, kesjaor	%	82	Dinas Kesehatan
		Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	40	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
		Cakupan layanan sumber daya air	%	76,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
		Cakupan layanan air minum **	%	91,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				
		Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
		Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik **	%	89,76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				
		Cakupan layanan drainase lingkungan	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Permukiman				
		Cakupan layanan infrastruktur permukiman	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung				
		Cakupan penataan bangunan gedung	%	99,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				
		Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	%	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan penyelenggaraan jalan	%	82,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
		Cakupan layanan pengembangan jasa konstruksi	%	89,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
		Cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang	%	66,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	Program Pengembangan Perumahan				
		Persentase layanan pengembangan perumahan	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman				
		Persentase layanan pengembangan Kawasan permukiman berkualitas	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
		Persentase layanan pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	%	52,71	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)				
		Persentase layanan peningkatan PSU Perumahan	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
		Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Penanggulangan Bencana				
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran				
		Prosentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	65	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
6	SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Sosial				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)	%	10,1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Rehabilitasi Sosial				
		Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,04	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	87,18	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Penanganan Bencana				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana	%	6,47	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten***	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
		Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	%	90	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja				
		Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	%	80,6	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial				
		Cakupan pembinaan hubungan industrial	%	82,74	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
		Persentase Lembaga yang melaksanakan PUG	%	4,76	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya*	Indeks	14,46	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan				
		Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
		Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Perlindungan Khusus Anak				
		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3	PANGAN				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
		Penguatan Cadangan Pangan	%	65	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan energi per kapita	Kalori	2000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan protein per kapita	Gram	53	Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	91	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan				
		Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	%	17	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Pengawasan Kerawanan Pangan				
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan
4	PERTANAHAN				
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan layanan kinerja pertanahan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian, Perencanaan Dan Pelaporan Lingkungan Hidup Daerah	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
		Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	33,71	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)				
		Persentase RTH Publik Yang Terkelola	%	25,75	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
		Proporsi Limbah B3 Yang Dikelola Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri)*	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)				
		Cakupan Fasilitasi Dan Pengawasan Dokumen Lingkungan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH				
		Cakupan Konservasi Jogo Tuk	%	11,39	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup	%	23,85	
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
		Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SPM	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan				
		Persentase Pengelolaan Sampah	%	47,99	Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL				
	Program Pendaftaran Penduduk				
		Persentase Penerbitan KK	Indeks	98,45	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan KIA	%	71,5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman KTP	%	99	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil				
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	%	70	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	95	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
		Persentase Pemanfatan Data	%	95	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan masyarakat desa				
	Program Penataan Desa				
		Persentase Peningkatan Status Desa	%	15,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
		Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	51,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	%	51,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Program Pengendalian Penduduk				
		Usia Kawin Pertama (UKP)	Tahun	21,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
		Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR)	%	70,30	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
		Persentase Perangkat Daerah Dan Lembaga Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	16,66	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
		Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Dan Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)*	%	13,51	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga	%	58,5	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak
9	PERHUBUNGAN				
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas	%	90,68	Dinas Perhubungan
		Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	%	65,00	Dinas Perhubungan
		Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan	%	50,00	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik				
		Cakupan Diseminasi Dan Distribusi Informasi Melalui Media Publik	%	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika				
		Persentase PD Dan Desa/Kelurahan Terfasilitasi Jaringan Internet Dan Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah Yang Optimal Dan Stabil	%	74	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Aplikasi PD Dan Desa Yang Terasilitasi	%	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
		Persentase Koperasi Yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi				
		Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaannya	%	10	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
		Persentase Usaha Simpan Pinjam Yang Dinilai	%	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				
		Persentase Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi				
		Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Koperasi Dan Lembaga Lain	%	15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	%	5	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM				
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	5	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
12	PENANAMAN MODAL				
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal				
		Jumlah Kepeminatan/Pendaftar Penanaman Modal	NIB	2300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal				
		Persentase Pelayanan Perizinan	%	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
		Persentase Pengendalian Investasi	%	5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pengolahan Data	%	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
		Cakupan Pembinaan Pemuda	%	44,44	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	44,25	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
		Cakupan Pembinaan Kepramukaan	%	25,76	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
14	STATISTIK				
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	%	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15	PERSANDIAN				
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
		Persentase PD Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	33	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	KEBUDAYAAN				
	Program Pengembangan Kebudayaan				
		Persentase Karya Budaya Yang Terlayani	%	4,430	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional				
		Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	%	84,14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				
		Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	%	12,64	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN				
	Program Pembinaan Perpustakaan				
		Angka Kepuasan Pemustaka	Skala a-d	80,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan Yang Mengikuti Bimtek Sosialisai Dan Workshop	0	68,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Kabupaten	0	0,0205	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN				
	Program Pengelolaan Arsip				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Prosentase Pengelolaan Arsip	%	39,16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip				
		Persentase Arsip Yang Diselamatkan	%	33,33	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase Arsip Yang Dimusnahkan	%	33,33	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Program Perizinan Penggunaan Arsip				
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan	%	NA	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	NA	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar	%	NA	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan pengembangan budidaya perikanan	%	5	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
		Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	%	9,6	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				
		Angka konsumsi ikan	Kg/perkapita/pertahun	20,10	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	%	5	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	PARIWISATA				
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
		Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata Dan Industri Pariwisata Dalam Kondisi Baik	%	40,13	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata				
		Cakupan Promosi/ Pemasaran Pariwisata	%	52,64	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata	%	24,56	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				
		Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif	%	50	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PERTANIAN				
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				
		Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	%	2,55	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Cakupan Penerapan Teknologi Peternakan	%	0	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	0	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	%	0	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	%	50	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
		Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	1,75	Dinas Pertanian dan Pangan
		Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	%	70	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Cakupan Peningkatan Prasarana Peternakan	%	0	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
		Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hewan	%	100	Dinas Peternakan Dan Perikanan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	9,25	Dinas Pertanian dan Pangan
	Program Perizinan Usaha Pertanian				
		Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
		Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	3	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Program Penyuluhan Pertanian				
		Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	%	40,01	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	3	Dinas Pertanian Dan Pangan
4	PERDAGANGAN				
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				
		Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	%	86	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Koefisien Variasi Harga	%	30	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Ekspor				
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Non Migas	%	3	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				
		Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri				
		Cakupan Promosi Dan Pemasaran	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	PERINDUSTRIAN				
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				
		Persentase Industri Terbina	%	1,1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
		Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	%	67,01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	TRANSMIGRASI				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
		Cakupan pembinaan transmigrasi	%	80	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
D	URUSAN UNSUR PENDUKUNG				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	84	Sekretariat Daerah
		Prosentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	%	100	Bagian Pemerintahan
		Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Permasalahan Hukum Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	%	100	Bagian Hukum
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian dan Pembangunan				
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dijalankan	%	100	Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	%	100	Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	%	100	Bagian Administrasi Pembangunan
		Tingkat Kematangan UKPBJ	(3/9) level (progress)	Level 3	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
		Tingkat Kematangan UKPBJ	%	81,5	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
2	SEKRETARIAT DPRD				
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	%	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	75	Sekretariat DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	%	75	Sekretariat DPRD
		Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	%	75	Sekretariat DPRD

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	%	83,33	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan fasilitas Raperda	%	100	Sekretariat DPRD
		Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	Sekretariat DPRD
E	URUSAN UNSUR PENUNJANG				
1	PERENCANAAN				
	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
		Cakupan Ketersediaan Data Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	Bappeda dan Litbangda
		Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD	%	100	Bappeda dan Litbangda
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	%	79,25	Bappeda dan Litbangda
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	69,89	Bappeda dan Litbangda
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	53,85	Bappeda dan Litbangda
2	KEUANGAN				

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Persentase Serapan APBD	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Penerimaan Pendapatan Di RKUD	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Penerapan SAP Berbasis Akrual Yang Baik Dan Benar	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Tahapan Penganggaran Yang Dilakukan Tepat Waktu	%	100	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		Persentase PD Tertib Administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
		Persentase Kenaikan Retribusi	%	4,89	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase Penyelesaian Penagihan Atas Ketetapan Pajak Daerah	%	100	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Kenaikan Pajak	%	10,70	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	KEPEGAWAIAN				
	Program Kepegawaian Daerah				
		Prosentase Keterisian Jabatan	%	83	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN	%	14,17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Prosentase Evaluasi Kinerja ASN	%	95	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Prosentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian	%	84	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah				
		Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
F	UNSUR PENGAWAS				
1	INSPEKTORAT				
	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	%	100	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi				
		Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi	%	100	Inspektorat

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	UNSUR KEWILAYAHAN				
1	KECAMATAN				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Salaman
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	90	Kecamatan Borobudur
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Ngluwar
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	90	Kecamatan Salam
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Srumbung
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Dukun
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Sawangan
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Muntilan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	92	Kecamatan Mungkid
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	95	Kecamatan Tempuran
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Kajoran
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Bandongan
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Candimulyo
		Persentase pelayanan Publik sesuai SOP dan SP.	%	100	Kecamatan Pakis
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Ngablak
		Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	%	87,19	Kecamatan Grabag

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Secang
		Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	%	NA	Kelurahan Secang
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	%	100	Kecamatan Windusari
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Salaman
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	85	Kecamatan Borobudur
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	85	Kecamatan Ngluwar
		Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	75	Kecamatan Salam
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	75	Kecamatan Srumbung
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	84	Kecamatan Dukun
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	82	Kecamatan Sawangan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Desa/Kel Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Muntilan
		Persentase Desa/Kel Yang Tertib Administrasi	%	100	Kelurahan Muntilan
		Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	92	Kecamatan Mungkid
		Prosentase Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi	%	100	Kelurahan Mendut
		Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kelurahan Sawitan
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	83	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	82,5	Kelurahan Sumberrejo
		Presentase Desa Tertib Administrasi	%	85	Kecamatan Tempuran
		Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Kajoran
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	84	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	50	Kecamatan Bandongan
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	89.47	Kecamatan Candimulyo
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Pakis

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	85	Kecamatan Ngablak
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Grabag
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Tegalrejo
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	75	Kecamatan Secang
		Persentase Desa/ Kelurahan Yang Tertib Administrasi	%	100	Kelurahan Secang
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	100	Kecamatan Windusari
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Salaman
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	90	Kecamatan Borobudur
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Ngluwar
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Salam
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	87	Kecamatan Srumbung
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Dukun

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Sawangan
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Muntilan
		Persentase Kegiatan Yang Di Koordinasikan	%	92	Kecamatan Mungkid
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Mertoyudan
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kelurahan Sumberrejo
		Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Tempuran
		Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Kajoran
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Kaliangkrik
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Bandongan
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Candimulyo
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Pakis
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Ngablak
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Grabag
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Tegalrejo

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	100	Kecamatan Secang
		Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	%	Na	Kelurahan Secang
		Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	%	90	Kecamatan Windusari
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				
		Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif Dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan	%	98,5	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
		Persentase Peningkatan Pembinaan Partai Politik Dan Koordinasi Lembaga Pemerintah	%	100	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
		Persentase Peningkatan Ormas Yang Aktif	%	98,5	Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
		Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Memahami Ketahanan Bangsa	%	98,5	Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
		Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Di Masyarakat	%	90	Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB VIII PENUTUP

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini sangat diperlukan. Sehingga upaya untuk melaksanakan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)” semakin terukur dalam pencapaiannya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

